mfp
MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KPHP MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

KPHP MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

KPHP MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

Diterbitkan Oleh:
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Direktorat Jenderal PHPL,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Terbit 17 Januari 2018
ISBN: 978-602-51285-1-6

Penyusun:
Ir. Drasospolino, M.Sc
Ir. Khairi Wenda, M.Si
Ir. Maidiward, M.Sc
Dr. Soni Trison, S.Hut, M.Si
Siti Maemunah
Multistakeholder Forestry Programme 3

Desain dan Tata Letak:
Multistakeholder Forestry Programme 3

Sumber foto:
KPHP dan MFP3

Hak cipta dilindungi undang-undang,
dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit.

DAFTAR ISI

DAFTAR PENYUSUN ii

DAFTAR ISI iv

SAMBUTAN vii

KATA PENGANTAR ix

BAB SATU **KPH. BABAK BARU PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA** 13

BAB DUA **78 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)** 27

1. KPHP UNIT XXIX MANDAILING NATAL (KPH PANYABUNGAN), SUMATERA UTARA 29
2. KPHP UNIT XI PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT 33
3. KPHP UNIT XVIII KAMPAR KIRI, RIAU 37
4. KPHP UNIT XXII TASIK BESAR SERKAP,RIAU 41
5. KPHP UNIT IX MINAS TAHURA, RIAU 45
6. KPHP UNIT XXIV TEBING TINGGI, RIAU 49
7. KPHP UNIT VII LIMAU SAROLANGUN, JAMBI 53
8. KPHP UNIT I KERINCI, JAMBI 57
9. KPHP UNIT II JEBU BEMBANG ANTAN KEP. BANGKA BELITUNG 61
10. KPHP UNIT V SUNGAI SEMBULAN, KEP. BANGKA BELITUNG 65
11. KPHP UNIT I RAMBAT MENDUYUNG, KEP. BANGKA BELITUNG 69
12. KPHP UNIT IV SIGAMBIR KOTAWARINGIN, KEP. BANGKA BELITUNG 73
13. KPHP UNIT III BUBUS PANCA, KEP. BANGKA BELITUNG 77
14. KPHP UNIT IV MERANTI, SUMATERA SELATAN 81
15. KPHP UNIT V RAWAS, SUMATERA SELATAN 85
16. KPHP UNIT VII DAN VIII BENAKAT BUKIT COGONG, SUMATERA SELATAN 89
17. KPHP UNIT VI LAKITAN, SUMATERA SELATAN 93
18. KPHP UNIT II LALAN MANGSANG MENDIS, SUMATERA SELATAN 97
19. KPHP UNIT XIV SUBAN JERIJI, SUMATERA SELATAN 101
20. KPH UNIT III BUKIT PUNGGUR, LAMPUNG 105

21. KPHP UNIT XIV GEDONG WANI, LAMPUNG 109
22. KPHP UNIT IV MUARA DUA, LAMPUNG 113
23. KPHP UNIT VI REGISTER 47 WAY TERUSAN, LAMPUNG 117
24. KPHP YOGYAKARTA, YOGYAKARTA 119
25. KPHP UNIT IX BATULANTEH, NTB 123
26. KPHP UNIT V SEJORONG, NTB 127
27. KPHP KPHP UNIT XXIII MARIA DONGGOMASSA, NTB 131
28. KPHP UNIT XVIII TAMBORA UTARA, NTB 135
29. KPHP UNIT XX MADAPANGGA ROMPU, NTB 139
30. KPHP UNIT XVI ROTE NDAO, NTT 143
31. KPHP UNIT I MANGGARAI BARAT, NTT 145
32. KPHPL UNIT XIX KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT 149
33. KPHP UNIT X SUNGAI MERAKAI, KALIMANTAN BARAT 153
34. KPHP UNIT XXI SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH 157
35. KPHP UNIT XVI GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH 161
36. KPHP UNIT XXII DAN XXVI KOTAWARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH 165
37. KPHP UNIT XXIII LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH 169
38. KPHP UNIT II MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH 173
39. KPHP UNIT I BANJAR, KALIMANTAN SELATAN 177
40. KPHP UNIT V TABALONG, KALIMANTAN SELATAN 181
41. KPHP UNIT VI TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN 185
42. KPHP UNIT VII TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN 189
43. KPHP UNIT XXXII BONGAN, KALIMANTAN TIMUR 193
44. KPHP UNIT XXXIV KENDILO, KALIMANTAN TIMUR 197
45. KPHP UNIT XII BERAU BARAT, KALIMANTAN TIMUR 201
46. KPHP UNIT XXVII SANTAN, KALIMANTAN TIMUR 205
47. KPHP UNIT XXXIII TELAKAI, KALIMANTAN TIMUR 209
48. KPHP UNIT XXVI SUB DAS BELAYAN, KALIMANTAN TIMUR 213
49. KPHP UNIT IV POIGAR, SULAWESI UTARA 217
50. KPHP UNIT V BOALEMO, GORONTALO 221
51. KPHP UNIT VI GORONTALO, GORONTALO 225
52. KPHP UNIT IV GORONTALO UTARA, GORONTALO 229
53. KPHP UNIT VII BONE BOLANGO, GORONTALO 223
54. KPHP UNIT XVII SIVIA PATUJU, SULAWESI TENGAH 237
55. KPHP UNIT XI SINTUWU MAROSO, SULAWESI TENGAH 241
56. KPHP UNIT IV DAMPELAS TINOMBO, SULAWESI TENGAH 245
57. KPHP UNIT V, VI, DAN IX DOLANGO TANGGUNUNG, SULAWESI TENGAH 249

58. KPHP UNIT I POGOGUL, SULAWESI TENGAH 253
59. KPHP UNIT XX BALANTAK, SULAWESI TENGAH 257
60. KPHP UNIT XIX TOILI BATU RUBE, SULAWESI TENGAH 261
61. KPHP UNIT VII MAMASA BARAT, SULAWESI BARAT 265
62. KPHP UNIT V BUDONG-BUDONG, SULAWESI BARAT 269
63. KPHP UNIT VI KARAMA, SULAWESI BARAT 273
64. KPHP UNIT IV KAROSSA, SULAWESI BARAT 277
65. KPHP UNIT X KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN 281
66. KPHP UNIT XII LADONGI, SULAWESI TENGGARA 285
67. KPHP UNIT XXIV GULARAYA, SULAWESI TENGGARA 289
68. KPHP UNIT XI MEKONGGA SELATAN, SULAWESI TENGGARA 293
69. KPHP UNIT XIX BINA MAHAWANA SEJUK, SULAWESI TENGGARA 297
70. KPHP UNIT II WAE APU, MALUKU 301
71. KPHP UNIT III WAE TINA, MALUKU 307
72. KPHP UNIT X GUNUNG SINOPA, MALUKU UTARA 311
73. KPHP UNIT XIII BACAN, MALUKU UTARA 315
74. KPHP UNIT XII GANE, MALUKU UTARA 319
75. KPHP UNIT IX OBA, MALUKU UTARA 323
76. KPHP UNIT V SORONG SELATAN, PAPUA BARAT 327
77. KPHP UNIT XVII WAROPEN, PAPUA 331
78. KPHP UNIT XLIII NDUGA, PAPUA 335

BAB TIGA **KOMODITAS** 339

BAB EMPAT **KELEMBAGAAN USAHA MASYARAKAT DI KPHP** 459

BAB LIMA **MEMASTIKAN KPHP YANG LESTARI, PRODUKTIF & ADIL** 489

DAFTAR PUSTAKA 512

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebut pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) menjadi prioritas nasional bidang kehutanan. Dalam rentang waktu tersebut, Pemerintah merencanakan membentuk KPH pada semua fungsi hutan baik di Hutan Produksi (HP), Lindung (HL), dan Konservasi (HK). Hingga 2019 direncanakan sudah terbagun 347 unit KPHP, 182 unit KPHL, 50 unit Taman Nasional, dan 100 unit KPHK bukan Taman Nasional.

Operasionalisasi KPHP sebagai sebuah unit kerja di tingkat tapak merupakan bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan.

Model kelembagaan KPHP merupakan terobosan tata kelola hutan di Indonesia yang berlandaskan tiga prinsip yaitu kelola ekonomi, kelola sosial, dan kelola ekologi.

Melalui KPHP maka konfigurasi bisnis baru pengelolaan sumber daya hutan yang saat ini sedang diwujudkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu teralokasikan sumber daya hutan untuk masyarakat, meningkatnya porsi sumber daya hutan yang dapat diakses oleh masyarakat, serta dapat terfasilitasinya penyelesaian konflik di wilayah kerja KPHP guna efektifitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya hutan dapat terlaksana.

Namun demikian terdapat permasalahan berupa keterbatasan data dan informasi KPHP yang dapat mengakibatkan rekomendasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka tata kelola hutan bagi kesejahteraan masyarakat tidak didasarkan pada analisa menyeluruh.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penerbitan buku "KPHP Membangun Kewirausahaan Kehutanan Berbasis Masyarakat" ini menjadi sangat penting dalam proses pengumpulan data potensi KPHP, baik yang terkait dengan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, maupun jasa lingkungan. Pendokumentasian dan inventarisasi potensi hutan yang tertuang dalam buku ini merupakan data awal yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.

Jakarta, Desember 2017

IB Putera Parthama, PhD

KATA PENGANTAR

DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) merupakan unit pengelola hutan di tingkat tapak yang berperan penting dalam pengelolaan hutan produksi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera hutan lestari maka pelibatan masyarakat yang berada di dalam atau sekitar wilayah KPHP yang melakukan usaha kehutanan secara mandiri dan tersebar baik letak, luas maupun keragaman pola usahanya menjadi sangat penting.

Guna memberikan nilai tambah hutan bagi masyarakat dan meningkatkan usaha masyarakat lokal menjadi usaha produktif, maka KPHP dapat mengoptimalkan praktik-praktik kehutanan masyarakat yang sudah ada dan berkembang di masyarakat melalui strategi kemitraan dalam bentuk dukungan kewirausahaan bagi masyarakat.

Dalam buku *"KPHP Membangun Kewirausahaan Kehutanan Berbasis Masyarakat"*, diuraikan secara jelas profil 78 unit KPHP, potensi dan produksi hasil hutan, kelembagaan usaha masyarakat di KPHP, serta contoh-contoh pengalaman KPHP dalam membangun kemitraan kehutanan dan mendukung kewirausahaan masyarakat. Data dan informasi yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat mempromosikan produk KPHP berbasis usaha rakyat yang berasal dari wilayah KPHP yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perwujudan KPHP mandiri.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, tak lupa kami sampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya.

Tentu saja buku ini masih banyak kekurangannya dan mohon kritik membangun dan saran dari para pembaca. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat.

Selamat membaca.

Jakarta, 30 Desember 2017

Ir. Drasospolino, M.Sc

Bentang Alam pesisir
Dolago Tanggunung
Sumber foto: MFP3

Foto Udara Bentang Alam KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

BAB SATU
KPH, BABAK BARU PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA

Kita secara internasional perspektif kepentingan dunia kita sudah posisikan hutan sebagai penopang kehidupan yang sangat penting. Jadi memang bukan hanya teori tapi fakta di lapangan kalau kita tanam pohon yang baik itu mata airnya jadi.

(Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, 2016)

Pengelolaan hutan Indonesia menuju pengelolaan hutan yang lestari telah melewati sejarah panjang, melintasi berbagai rejim kebijakan sejak kemerdekaaan Indonesia 72 tahun lalu. Naik turun situasi pengelolaan Kehutanan ini ditandai tidak hanya oleh keluarnya berbagai kebijakan kehutanan, tapi juga penanda penanda kejadian yang penting dicatat, seperti keluarnya konsesi-konsesi kehutanan, angka deforestasi sepanjang 1997-1998, mencapai angka di atas 3 juta ha setahun[1] , diikuti dengan gerakan okupasi dan kegiatan tidak prosedural/ ilegal dalam kawasan hutan yang belum sempat menemukan basis legal dan pengakuan yang kuat[2] , hingga bencana kebakaran hutan luar biasa dengan skala antar Negara.

Kawasan Hutan Muko-Muko
Sumber Foto: MFP3

[1] Hariadi Kartodiharjo, dkk. 2011. KPH : Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Debut Wahana Sinergi. Jakarta.
[2] Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan - kurang dari 12% atau seluas 14.238.516 Ha hingga 2007

Banyak refleksi telah dilakukan terhadap arah pengelolaan hutan Indonesia. Salah satu benang merah yang terus muncul adalah penyediaan prakondisi pengelolaan hutan lestari, yaitu kebutuhan menyediakan batas kawasan hutan - yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap - yang diakui, baik oleh masyarakat maupun peraturan- perundangan, diatur melalui pengukuhan kawasan hutan. Hal ini muncul pada UU Kehutanan No 5 Tahun 1967. Secara eksplisit mandat pengukuhan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat unit pengelolaan (KPH) juga disebutkan pada UU penggantinya - UU Nomor 41 Tahun 1999. Semuanya bermuara kepada kebutuhan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak, dengan demikian, menjadi penyebab utama kegagalan melaksanakan pengelolaan hutan dan terputusnya informasi antara apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan keputusan-keputusan yang dibuat, baik di tingkat pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah.

Di sinilah pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi kunci pengelolaan hutan Indonesia yang lestari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019[3] menyebut pembangunan KPH menjadi prioritas nasional bidang kehutanan. Dalam rentang waktu tersebut, Pemerintah merencanakan membentuk KPH pada semua fungsi hutan baik di hutan Produksi (HP), Lindung (HL), dan Konservasi (HK). Hingga 2019 direncanakan sudah terbangun 347 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), 182 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), 50 unit Taman Nasional, dan 100 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) bukan Taman Nasional[4] .

Model kelembagaan KPH merupakan terobosan tata kelola hutan di Indonesia yang berlandaskan tiga prinsip yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. Keseriusan mengusung tiga prinsip tersebut diikuti keluarnya

Pengemasan Madu Trigona, Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

[3] Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015
[4] Renstra KLHK; 2015

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MenLHK/ Setjen /Set.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kelola Utama (IKU). IKU merupakan jumlah kumulatif KPH yang yang memproduksi barang dan jasa lestari berbasis desa. Pemerintah mentargetkan ada 347 unit KPH pada 2019.

Jika ketiga prinsip tata kelola hutan – ekonomi, sosial dan ekologi menjadi arahan, niscaya melahirkan KPH yang mandiri, yang mendayagunakan potensi dan kondisi spesifik wilayahnya untuk mencapai suatu sistem pengelolaan hutan yang mandiri, baik dalam bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Oleh karenanya KPH tak bisa bekerja sendiri, KPH membutuhkan rakyat. KPH harus menggandeng rakyat sekitar kawasan hutan yang kebanyakan melakukan usaha kehutanan secara perorangan, tersebar berdasarkan letak, luas lahan dan keragaman pola usaha taninya. Mereka yang sudah berorganisasi umumnya tergabung dalam kelompok tani hutan rakyat yang masih sangat sederhana. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat, mulai proses penanaman, pemeliharaan, penebangan hingga pemasaran ditentukan oleh kebijakan masing-masing keluarga.

Pemanenan Kulit Manis / Kayu Manis KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

Pencucian Batang Rotan, KPH Dolago Tanggunung
Sumber Foto: MFP3

Biji Kopi Sangrai, KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

KEMITRAAN & PENGUATAN KELEMBAGAAN

Khusus pada hutan produksi, untuk menjamin kelestarian hasil hutan rakyat diperlukan penguatan kelembagaan usaha rakyat dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sehingga terbentuk adanya aturan internal yang mengatur sistem pengelolaan hasil hutan terutama hasil hutan bukan kayu. Penguatan kelembagaan usaha rakyat ini dilakukan dengan kolaborasi antara lembaga formal dan non formal melalui tahapan : Identifikasi kelembagaan, aturan dan kesepakatan, pengembangan rencana aksi (*action plan*) dan monitoring evaluasi yang partisipatif. Strategi pengembangan kelembagaan hutan rakyat didasarkan atas identifikasi kekuatan dan kelemahan kedua lembaga.

Oleh karenanya faktor penentu keberhasilan pengelolaan hutan produksi adalah peran dan keterkaitan antara pelaku pengelola hutan dengan masyarakat sekitar. Pelaku yang dimaksud adalah pengelola

Air Terjun Pancaro Rayo
KPHP Kerinci
Sumber Foto:MFP3

KPHP, pengusaha, petani hutan rakyat, kelompok tani, mitra antara (*middlemen*), industri, dan pemerintah setempat. Pelaku tersebut yang juga dikenal sebagai tiga pilar penggerak pembangunan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: masyarakat (*civil society*), pengusaha (*private sector*), dan pemerintah (*state*). Ketiga pilar tersebut juga sudah membentuk jejaring kerja, tetapi dalam skala terbatas dan belum terikat dalam kesepakatan tertulis. Sebagai contoh antara lain bantuan bibit tanaman dari pengusaha kepada kelompok tani, pembelian kayu masyarakat oleh pengusaha, penyuluhan dan pelatihan dari instansi terkait. Bentuk kerjasama dan partisipasi antar pelaku pada posisi yang setara dengan peran masing-masing pihak inilah yang disebut kemitraan.

Dalam implementasinya, pengaturan kelembagaan kemitraan pengelolaan hutan khususnya dalam kewirausahaan kehutanan masyarakat akan mudah dilakukan jika ada kesamaan kepentingan di antara stakeholders dan adanya kejelasan identitas serta besaran (ukuran) kelompok masing-masing *stakeholders*. Semakin besar dan semakin terdiferensiasi kelompok stakeholder yang ada di dalam pengelolaan hutan, maka semakin sulit pengaturan sosialnya.

Model kelembagaan pengelolaan hutan paling baik di KPHP harus sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat dan juga kapabilitas negara yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan negara dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Oleh karena itu, dalam memberikan rekomendasi kelembagaan kemitraan yang optimal maka terlebih dahulu perlu diketahui kondisi sosial – terkait dengan kekuatan modal sosial, kapabilitas pemda - yang terkait dengan kemampuan, kemauan, dan aksesibilitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Identifikasi terhadap modal sosial perlu secara jelas dan rinci dilakukan.

Modal sosial yang dimaksudkan disini adalah kepercayaan dan norma sosial

masyarakat yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan, khususnya agar tercapainya pembangunan berkelanjutan. Pada konsep awal pembangunan berkelanjutan, faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan baru terbatas pada sumberdaya alam, sumberdaya fisik atau buatan, dan sumberdaya manusia. Lalu disadari bahwa ketiga kapital tersebut baru menjelaskan secara parsial, perlu modal sosial dari keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan kelembagaan diarahkan pada bagaimana individu berinteraksi dengan individu lainnya dalam kegiatan pengelolaan hutan terutama pengembangan Hasil Hutan Bukan kayu. Ini penting untuk memastikan kegiatan pengelolaan hutan khususnya dalam kewirausahaan kehutanan masyarakat dapat diterima berbagai stakeholders dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing.

Pemanenan Tanaman
Kayuputih, KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

Pemanenan buah
Kopi, KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

Distribusi Batang Rotan, KPH
Dolago Tanggunung
Sumber Foto: MFP3

Pemanenan Kulit Manis /
Kayu Manis KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

Dalam pengaturan kelembagaan kewirausahaan kehutanan masyarakat ada 3 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: koherensi kepentingan dan aktivitas di antara *stakeholders*, kekuatan lembaga lokal, dan manfaat untuk masyarakat lokal di dalam kegiatan pengelolaan hutan di KPHP.

Dalam pengembangan kemitraan hutan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, keberadaan kelembagaan lokal perlu dikaji sebagai hal yang sangat membantu berfungsinya kegiatan pengelolaan hutan di KPHP melalui perlindungan terhadap hak, penguatan norma-norma yang berlaku, mengatasi konflik, dan distribusi manfaat. Kelembagan lokal akan efektif sebagai pengelola jika manfaat dan biaya memiliki berbagai ciri sebagai berikut: (a) manfaat timbul dengan cepat, (b) manfaat dapat dinikmati secara lokal, (c) manfaat dapat dilihat secara nyata, dan (d) manfaat dapat diperoleh oleh orang yang sama yang menanggung biaya. Pengaruh kelembagaan sangat tergantung pada kekuatan yang dimilikinya atas berbagai aktor yang terlibat dalam pembangunan hutan. Pengaruh kelembagan lokal ini sering sulit menjangkau ranah yang lebih luas, sehingga perlu penguatan oleh lembaga eksternal yang memiliki kekuatan pengaruh yang memadai. Oleh karenanya kemitraan yang dibangun pihak pengelola KPHP dengan masyarakat harus memenuhi unsur untuk penguasaan teritorial, peningkatan pengetahuan dan informasi serta fungsi kehumasan dengan pihak lain.
Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat mestinya tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat atas inisiatif mereka. Langkah-langkah penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha rakya meliputi : identifikasi kelembagaan potensial, penumbuhan motivasi, penumbuhan kelembagaan, pengembangan kelembagaan (fasilitasi kapasitas Pengurus, fasilitas mekanisme manajemen dan kelembagaan, fasilitasi pengembangan aktivitas dan usaha, serta pengembangan kemitraan).

Upaya pengembangan kelembagaan ekonomi yang berlandaskan azas kekeluargaan melalui beberapa langkah. Awalnya, dengan mendorong dan membimbing masyarakat agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Bimbingan dan bantuan kemudahan diberikan oleh

instansi pembina atau pihak lain yang mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian.

Berikutnya, menumbuhkan gabungan kelompok masyarakat, didorong dan dibimbing agar mau dan mampu bekerjasama antar kelompok dalam bentuk gabungan kelompok/ asosiasi yang mampu memberi manfaat secara lebih besar bagi para anggotanya, seperti : menghimpun peningkatan modal usaha, memperbesar skala usaha, meningkatkan posisi tawar menawar dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha. Langkah ketiga yaitu menumbuhkan lembaga ekonomi formal yang dapat dilakukan melalui berbagai latihan dalam bentuk kursus atau magang yang dirancang secara khusus seperti kursus pengembangan motivasi berprestasi, kursus manajemen partisipatif, pelatihan/ kursus kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha dan atau simpan pinjam kelompok, dan lain-lain.

Proses kelembagaan dan penguatan kelembagaan usaha rakyat di KPHP memiliki peran yang penting dalam pengelolaan hutan. Dengan kata lain pengaturan kelembagaan melalui kerjasama antara rakyat dengan KPHP dalam praktik-praktik kehutanan masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme kelompok dan musyawarah untuk membangun kesepahaman rakyat dan kelompok serta KPHP akan terwujud suatu kesepakatan dalam pengaturan hasil menuju kepada kelestarian hutan dan masyarakat sejahtera.

Ke depan, KPHP harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan dengan mengoptimalkan sumberdaya hutan yang ada khususnya praktik-praktik kehutanan masyarakat yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan prioritas program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Perhutanan Sosial.

Buku KPHP Membangun Kewirausahaan Kehutanan Berbasis Masyarakat ini diharapkan memberikan gambaran kepada publik tentang seberapa jauh terobosan yang sudah kita lakukan lewat pembangunan dan pengembangan KPH. Buku yang dibagi dalam lima bagian ini memaparkan hal-hal berikut :

Bab Pertama memaparkan mengapa KPH menjadi jawaban penting pengelolaan hutan Indonesia, kebijakan apa saja yang digunakan sebagai dasar implementasi KPH, serta bagaimana prinsip dan metode dalam pembangunan dan pengembangan KPH di lapang

Bab Kedua berisikan data dan informasi tentang profil 78 KPHP yang sudah disahkan dan sedang proses persetujuan. Profil menggambarkan kondisi wilayah, letak geografis, aksesibilitas wilayah, desa sekitar kawasan hutan, serta kependudukan.

Bab Ketiga akan menampilkan potensi dan produksi hasil hutan yang ada di semua KPHP mulai dari kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Selain identifikasi sumberdaya hutan, buku ini juga mengupas tentang sebaran hasil hutan bukan kayu per komoditas yang ada di setiap KPHP. Data komoditas yang dijelaskan

Proses Pemintalan Benang Sutera, KPH Bualemo
Sumber Foto: MFP3

meliputi 33 hasil hutan bukan kayu berupa sebaran KPHP, volume potensi/ produksi dan harga jual. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam hal promosi dan pemasaran produk KPHP dalam menjual produknya ke para pengusaha.

Bab keempat memaparkan tentang Kemitraan dengan Masyarakat, termasuk contoh-contoh praktek terbaik dalam pembangunan dan pengembangan KPHP. Dalam mewujudkan KPHP yang mandiri dan mendorong pengembangan kewirausahaan di praktik-praktik kehutanan masyarakat perlu dikembangkan kelembagaan usaha rakyat dengan KPHP.

Bab terakhir memaparkan pembelajaran-pembelajaran penting yang dipetik dari proses pembangunan dan pengembangan KPHP serta rekomendasi penting untuk mewujudkan KPH yang mandiri ke depan.

Penyusunan buku ini melalui proses yang cukup panjang, diawali dengan proses optimalisasi data yang ada di KLHK, sebagian melakukan verifikasi di lapangan, komunikasi lewat telpon dan diakhiri dengan validasi data dengan pejabat KPH yang sedang bertugas ke Jakarta. Data yang ada dalam buku ini sangat dinamis, namun yang menjadi catatan adalah kesungguhan pembelajaran dari semua pihak dalam mewujudkan buku ini agar bermanfaat bagi pengembangan KPHP dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Sebagai contoh nama KPHP yang dicantumkan dalam buku ini merupakan hasil data terbaru yang merupakan penyesuaian atas pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sehingga penamaan lembaga di daerah tersebut sangat dinamis, apalagi hal ini tergantung dari kesiapan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan kelembagaan KPHP di wilayahnya. ✣

Lebah Madu Trigona Sp,
KPH Batulanteh
Sumbe Foto: MFP3

BAB DUA
78 UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Kawasan Hutan KPH Mandailing Natal
Sumber foto: KPHP Mandailing Natal

1. KPHP UNIT XXIX MANDAILING NATAL (KPH PANYABUNGAN), SUMATERA UTARA

a. Gambaran Wilayah

Sekitar 24 persen[5] wilayah kabupaten Mandailing natal merupakan wilayah KPHP Unit XXIX Mandailing Natal[6]. Wilayah KPHP Unit XXIX Mandailing Natal tersebar di 6 kecamatan yakni Muara Batang Gadis, Natal, Lingga Bayu, Batang Natal, Ranto Baek, dan Batahan. Luasan itu meliputi kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 13.681 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 14.704 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 131.780 ha.

KPHP Unit XXIX Mandailing Natal bisa dijangkau dari 2 pintu masuk yaitu Medan dan Padang, baik melalui jalan udara maupun darat, atau kombinasi keduanya berikut :

a. Dari Medan Propinsi Sumatera Utara menuju Kota Panyabungan dengan jarak sekitar 500 km dapat ditempuh sekitar 11 jam dengan kendaraan darat, dan 3-4 jam dengan pesawat udara melalui Bandara Udara Aek Godang/Pinang Sori dan dilanjutkan dengan kendaraan darat.
b. Dari Padang Propinsi Sumatera Barat menuju Kota Panyabungan dengan jarak sekitar 400 km ditempuh sekitar 8 jam
c. Selanjutnya dari Kota Panyabungan menuju lokasi terdekat yang berada di Desa Sopotinjak dengan jarak tempuh sekitar 30 km selama sekitar 1,5 jam. Kondisi jalan cukup sempit, beraspal sebagian besar sudah rusak.

[5] Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 332/ Menhut-II/ 2010
[6] Nama KPHP Mandailing Natal berubah menjadi KPH Wilayah IX Panyambungan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Th. 2016 pada 8 Desember 2016.

d. Selain di daerah Sopotinjak, aksesibilatas ke wilayah KPHP Unit XXIX Mandailing Natal pada umumnya jalan tanah dan hanya dapat dijangkau dengan kendaraan *double gardan* (4x4) *wheel drive*.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

Di sekitar wilayah KPHP Unit XXIX Mandailing Natal juga terdapat desa-desa yaitu Desa Muaro Bangko, Desa Banjar Maga, Desa Manuncang dan Desa Sudutan. Penduduk sekitar desa inilah yang selama ini mendapat manfaat dan terus produktif secara ekonomi memanfaatkan sumber daya hutan. Potensi sumberdaya hutan di Unit KPHP XXIX Mandailing Natal yaitu potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu dan potensi jasa lingkungan.

1. Hasil Hutan Kayu

KPHP Unit XXIX Mandailing Natal memiliki potensi tegakan dan volume kayu pada lokasi kegiatan inventarisasi hutan seluas lebih kurang 92.960,65 ha yaitu sebesar 11.970.542 m3 dengan jumlah batang sebanyak 12.408.387 buah. Semantara potensi tegakan pohon dengan rata-rata volume tegakan sebesar 128,77 m3/ha dengan rata-rata jumlah batang 133,48 batang/ha. Jenis hasil hutan kayu yang mendominasi adlah Medang (*Litsia firma HK.F*), Kelat (*Xylopia altissima Boerl*), Lesi-lesi (*Tarretia*), Meranti (*Shorea sp.*), Resak (*Fatica Songa V.Si*), dan Laban (*Vitex pubescens Valil*), Kapur, Kruing, Bania, Merbau, Rengas dan hasil hutan kayu lainnya berdasarkan hasil inventarisasi selanjutnya yang potensial dikembangkan.

HHBK Aren
Sumber foto:
KPHP Mandailing Natal

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Sekitar 1978 keluarga terlibat mengelola hasil hutan non kayu tiap tahunnya di wilayah KPHP Unit XXIX Mandailing Natal yang meliputi 50 kilogram kayu gaharu, 364 ton aren, 27 ton Nilam, 1000 ton getah karet. Tak hanya itu, kawasan hutan yang dikelola KPHP juga memproduksi 30 ribu batang rotan, 500 kilogram madu hutan, 6000 batang bambu per tahun. KPHP Unit XXIX Mandailing Natal harus segera melakukan inventarisasi untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan 3 komoditas terakhir.

3. Jasa lingkungan

Wilayah unit pengelolaan KPHP Uni XXIX Mandailing Natal kaya dengan bentang alam yang menarik, khususnya bentang sungai dan gua-gua batun yang menyediakan jasa lingkungan bagi warga sekitar. Gua-gua batu berada di Desa Bandar Melayu. Air terjun di Desa Aek Holbung, serta tebing yang terjal berada di Desa Nangali.

Sungai Batang Natal sejak lama dimanfaatkan sumber-sumber mata airnya, aliran sungai untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), potensi aliran air sungai untuk arung jeram, lokasi potensial *camping ground*, potensial track lintas alam, pemandangan alam dan hawa sejuk dari panatapan Dolok Martimbus. Tak lupa pula desa-desa budaya yang cukup khas seperti Desa Sopotinjak. ✣

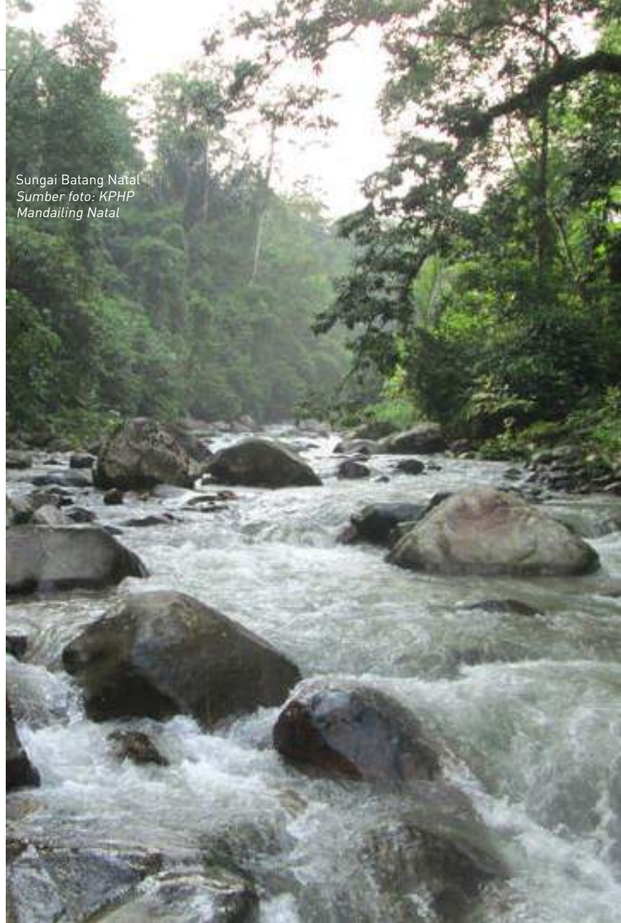

Sungai Batang Natal
Sumber foto: KPHP
Mandailing Natal

2. KPHP UNIT XI PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT

a. Gambaran Wilayah

Kawasan KPHP Unit XI Pesisir Selatan[96] luasnya 59.928 ha[97] meliputi 9 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sebagian besar wilayah KPH merupakan Hutan Produksi Terbatas seluas 46,274 ha, kemudian Hutan Lindung seluas 9,091 ha dan Hutan Produksi seluas 4,563 Ha. Penduduk pada 9 kecamatan ini jumlah populasinya 228.460 jiwa yang sebagian besar mata pencahariannya bertani, berladang, beternak, berdagang, berkebun, usaha perikanan, dan pegawai negeri sipil. Khususnya, masyarakat yang berada di dalam kawasan KPH Pesisir Selatan. mata pencahariannya berupa bertani, berkebun, beternak, berdagang, PNS dan perikanan.

Akses menuju wilayah KPHP Unit XI Pesisir Selatan melawti utama Sumatera Barat. Pada wilayah bagian Barat, akses dilakukan melalui jalan darat, yaitu jalan nasional dan jalan kabupaten/kota. Tengah kawasan hutan wilayah kelola ini dilintasi Jalan nasional Painan-Bengkulu yang ramai dan memudahkan KPHP mengelola hutan. Cara kedua, wilayah kelola bagian Barat juga dapat diakses dengan mudah melalui angkutan laut,. Tapi bisa dilakukan juga melalui laut mengunakan perahu ukuran kecil. Jalur laut tersebut dapat pula menjadi jalur alternatif dalam pengelolaan KPHP Unit XI Pesisir Selatan di wilayah bagian Barat.

[96] Sementara itu, berdasarkan hasil telaah BPHP Wilayah III Pekanbaru dengan luas 59.928,94 ha (selisih 0,94 ha) dengan rincian Hutan Produksi Terbatas 46.274,19 ha (77,22%), HL seluas 8.663,46 ha (14,46%), dan Hutan Produksi seluas 4.563,14 ha (7,61%), dan HPK 428,15 ha (0,71%) sementara data yang kami gunakan adalah dari telaah BPHP Wilayah III Pekanbaru.

[97] Wilayah kelola KPHP Unit XI Pesisir Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 696/Menhut-II/2013. Kawasan ini berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah Timur, Samudra Hindia di sebelah Barat, Provinsi Bengkulu di sebelah Selatan, dan Kabupaten Solok di sebelah Utara.

Sementara wilayah kelola bagian utara mudah diakses karena berdekatan dengan jalan nasional. Jalan Painan-Bengkulu adalah jalan utama untuk mengakses wilayah KPHP Unit XI Pesisir Selatan. Dari jalur Painan-Bengkulu tersedia pula jalan kabupaten dan jalan kampung yang langsung masuk ke dalam kawasan hutan demikian pula wilayah kelola bagian timur bagian selatan terdapat dua arah jalan utama, yakni Tapan-Sungai Penuh dan Painan-Bengkulu. Jalan utama ini terhubung dengan jalan kampung menuju ke titik terdekat ke dalam hutan wilayah kelola KPHP Unit XI Pesisir Selatan.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dilakukan dengan penanaman oleh pihak ketiga bebentuk kemitraan pada areal KPHP Unit XI Pesisir Selatan yang lahannya kritis dan rusak dengan menanam kayu seperti kelompok meranti (resak, meranti kuning, meranti merah, katuko, pulai, jelutung dan jenis lainnya) dan kelompok campuran (kempas, bayur, tarok, medang, sapek, rambutan rimbo, cubadak aia dan sejenis lainnya).

Berdasar hasil dari identifikasi HHK KPHP Unit XI Pesisir Selatan tahun 2015 dan analisis data spasial,potensi volume kayu pada empat Plot (Pasir Laweh Kecamatan Lengayang, Kampung Pelangai Kaciak Mudiak Kecamatan Ranah Pesisir, Bukit Malakok Kecamatan Ampek Balai Tapan dan Bukit Timbulun Kecamatan Air Pura) tersebut adalah 116,42 m3/ha. Di wilayah KPHP Pesisir Selatan jenis hasil hutan kayu didominasi oleh Rambutan Rimbo, Tarok, Resak dan Medang. Sedangkan pada blok HHK-HT pada wilayah seluas sekitar 12.073,60 ha, jika di kalkulasikan dengan hasil Identifikasi Potensi Kayu sebesar 116,42 m3/ha maka diperkirakan potensi hasil hutan kayu di wilayah adalah 1.405.608,5 m3.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit IX Minas Tahura tiap tahunnya menghasilkan 5.000 rotan, 350 kilogram nilam, dan 2000 ton karet. Pengelolan karet dan nilam saja telah melibatkan sekitar 25 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP cukup besar. Hasil dari identifikasi potensi jasa lingkungan pada 2015 terdapat beberapa tempat yang bisa dijadikan Jasa Lingkungan yaitu : Nagari Pelangai Gadang dan Nagari Sungai Liku Kecamatan Ranah Pesisir, Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai dan Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Air Pura. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro serta air minum kemasan dan wisata air sangat diperlukan. ✣

Bentang Alam
Kampar Kiri
Sumber foto:
KPHP Kampar Kiri

3. KPHP UNIT XVIII KAMPAR KIRI, RIAU

a. Gambaran Wilayah

Luasan KPHP Unit XVIII Kampar kiri mencapai 12,36 persen luas Kabupaten Kampar Kiri provinsi Riau atau mencapai 143.783 Ha[7], meliputi Hutan Lindung sekitar 24.028 ha dan Hutan Produksi Terbatas 119.755 Ha. Wilayah KPH yang ditetapkann melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 640/Menhut-II/2011 ini tersebar dalam pada 8 kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Salo, Kuok, Bangkinang, Kampar, Gunung Sahilan, Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Jumlah desa dalam kawasan KPH ini sebanyak 55[8] yang memiliki jumlah kepala keluarga 14.563..

Aksesibilitas menuju kawasan KPH Kampar kiri tergolong mudah dijangkau. Selain jalan darat - melalui jalur jalan nasional Provinsi Riau-Sumatra Barat dan Riau-Jambi. KPH Bisa ditempuh melalui jalur air lewat Sungai Kampar menggunakan perahu.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

KPH Unit XVIII Kampar kiri memiliki potensi volume kayu rata-rata per hektar sebesar 80,36 m3/ha. Jika dikalikan dengan luasan tutupan lahan hutan kering primer dan hutan kering sekunder 82.076,97 ha maka dugaan potensi hasil kayu total KPH ini sebesar 6.595.705 m3.

[7] Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 640/Menhut-II/2011

[8] Nama-nama Desa di sekitar KPH Kampar Kiri diantaranya Desa Balung, Siabu, Bangkinang, Ridan Permai, Gunung Sahilan, Kebun Durian, Subarak, Suka Makmur, Gunung Sahari, Makmur Sejahtera, Sahilan Darussalam, Gunung Mulya, Sungai Lipai, Sei Paku, Sungai Liti, Tanjung Harapan, Tanjung Mas, Sei Raja, Sei Rambai,Sungai Harapan, IV Koto Setingkai, Sei Serik, Muara Selayak, Ranah Singkuang, Penyasawan, Pulau Sarak, Rumbio, Padang Mutung, Koto Tibun, Bukit Melintang, Lereng, Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Bertalut, Alur Kuning, Pangkalan Kapas, Pangkalan Serai, Kota Lama, Ludai, Tanjung Karang, Batu Sasak, Kebun Tinggi, Danau Sontul, Deras Tanjak, Terusan, Subayang Jaya, Sungai Santi, Tanjung Permai, Dua Sepakat, Lubuk Bigaum Bukit Betung, dan Muara Barito.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Saat ini sekitar 430 keluarga berhasil dilibatkan oleh KPHP Unit XVIII Kampar Kiri mengelola hasil hutan non kayu tiap tahunnya. Produk hasil hutan non kayu itu meliputi 24 ton getah damar, 120 ribu batang rotan, 4800 batang bambu, 288 ton madu hutan dan 480 ton getah karet.

3. Jasa Lingkungan
Jenis jasa lingkungan yang penting dikembangkan adalah wisata alam Air Terjun Pangkalan Kapas yang memiliki tinggi 80 m dan Sungai Lubuk Larangan yang merupakan lubuk larangan. ✣

Air Terjun Pangkalan Kapas
Sumber foto: KPHP Kampar Kiri

Patroli Pencegahan dan Kebakaran Awal Karhutla
Sumber foto: KPHP Kampar Kiri

Pemeriksaan tanaman batas
Sumber foto: KPHP Tasik Besar Serkap

4. KPHP UNIT XXII TASIK BESAR SERKAP,RIAU

a. Gambaran Wilayah

KPHP unit XXII Tasik Besar Serkap yang luasnya sekitar 45 persen wilayah Kab. Kampar atau sekitar 513.276 ha. KPH yang sudah ditetapkan sejak 31 tahun[9] lalu ini terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar Provinsi Riau. Wilayah KPH ini tersebar pada 8 kecamatan yaitu XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kampar Kiri, Siak, Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Kawasan KPHP terbagi kedalam 3 fungsi kawasan yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2.660 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) 491.768 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 18.848 ha.

Kawasan KPHP unit XXII Tasik Besar Serkap baru bisa diakses menggunakan transportasi air, perahu - belum ada jalur darat untuk mencapainya. melalui transportasi air saat ini masih tergolong sulit diakses oleh kendaraan darat. Jalur transportasi umum di sana menggunakan transportasi air, memakai perahu. Ada sekitar 17.022 jiwa yang tinggal di 10 desa yang berada di kawasan KPHP unit XXII Tasik Besar, yaitu Desa Penyengat, Rawa Mekar Jaya, Sungai Rawa, Teluk Lanus, Teluk Meranti, Teluk Dalam, Pelalawan, Lalang Kabung, Sungai Limau dan Desa Dayun. Jumlah penduduk yang berada di 10 desa tersebut sejumlah 17.002 jiwa.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap memiliki potensi hasil hutan kayu yang terbagi kedalam dua potensi lokasi yaitu pada wilayah pemegang izin dan wilayah tertentu. Potensi hasil hutan kayu pada wilayah pemegang izin berdasarkan

[9] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986

hasil inventarisasi memiliki riap MAI antara 30,7-30,9m3/ha/Tahun, sedangkan pada wilayah tertentu memiliki volume rata-rata sebesar 163,91 m3/ha .

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Sekitar 145 keluarga terlibat dalam pengembangan produk unggulan KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap. Saat ini KPHP unit XXII Tasik Besar menghasilkan pertahunnya 2800 ton sagu, 48 ton kepiting soka dan 3.780 kilogram madu hutan. Sayangnya KPHP belum mendata berapa masyarakat yang terlibat dalam menghasilkan produk unggulan berupa 7200 ton nanas dan 2880 kilogram getah karet pertahunnya.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan yang ada di KPH unit XXII Tasik Besar Serkap ini diantaranya jasa wisata alam yaitu wisata Bono (olahraga *surfing*), Danau Pulau Besar/ Danau Bawah, Tasik Belat, Tasik Metas, Tasik Mungkal dan Tasik Serkap. ✣

Lokasi Persemaian KPH
Sumber foto: KPHP Tasik Besar Serkap

Pelatihan Lebah Madu KPH
Sumber foto: KPHP Tasik besar Serkap

Kawasan Hutan KPHP Minas Tahura
Sumber foto: KPHP Minas Tahura

5. KPHP UNIT IX MINAS TAHURA, RIAU

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit IX Minas Tahura[95] Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak.Desa yang berada di kawasan KPHP Unit IX Minas Tahura sebanyak 21 desa. Jumlah penduduk dari 21 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan KPHP Unit IX Minas Tahura berjumlah sekitar 131.710 orang.

KPHP Unit IX Minas Tahura memiliki luas 109.361 ha yang meliputi Hutan Produksi Terbatas seluas 11.490 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 90.796 ha, Hutan Produksi yang dapat di Konversi 903 ha dan TAHURA Sultan Syarif Hasyim seluas 6.172 ha.

Jalan menuju kawasan KPHP Unit IX Model Minas Tahura tergolong tidak sulit, karena bias dilewati oleh transportasi darat dan dekat dengan jalan – jalan besar. Jalur transportasi yang sering dimanfaatkan adalah transportasi darat berupa mobil dan trail.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Penutupan vegetasi pada areal KPHP Unit IX Minas Tahura didominasi oleh vegetasi hutan alam dan vegetasi hutan tanaman (*AcasiaSp*, *EucallyptusSp*).

[95] Berdasarkan 1. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit I Manggarai Barat Menjadi KPH Wilayah kabupaten manggarai Barat (unit I).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit IX Minas Tahura tiap tahunnya menghasilkan 60 kilogram lada.

3. Jasa Lingkungan
Adapun jasa lingkungannya yaitu sebagai daerah tangkapan air, wisata Danau Tahura Sultan Syarif Hasyim, wisata alam, wisata outbond, Mountain Bikes, Wisata ATV (mengendarai motor roda empat), lintas alam/tracking, bumi perkemahan, areal bermain anak-anak, pengembangan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, pemanfaatan sarang burung walet, pemanfaatan jasa air, pemanfaatan jasa biofarmaka. ✣

Potensi HHBK, Lada
Sumber foto: KPHP Minas Tahura

HHBK Madu
Sumber foto: KPHP Minas Tahura

Potensi HHBK Kopi Tebing Tinggi
Sumber foto: KPH Tebing Tinggi

6. KPHP UNIT XXIV TEBING TINGGI, RIAU

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi[106] seluas 69.747 ha[107] yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) dengan luas 412 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 69.335 ha tersebar di 3 pulau, yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Merbau dan Pulau Padang. Pulau-pulau ini berada pada 5 kecamatan, yaitu : Kecamatan Merbau, Pulau Merbau, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat dan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. fungsi hutan.

Penduduk asli di seilayah KPHP merupakan suku melayu (80%). Selain suku melayu terdapat juga suku pendatang (20%) yaitu: suku china, batak, jawa, bugis, minang dan suku akit. Masyarakat di sekitar KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani di kebun karet.

Aksesibilitas menuju KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi dari luar kepulauan meranti hanya bisa dilewati melalui transportasi laut/selat dengan menggunakan kapal bermotor.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di wilayah KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi merupakan jenis vegetasi hutan hujan tropis basah yang didominasi Diperocarpaceae. Jenis tanaman hutan yang banyak ditemukan adalah Suntai (*Palaquium burckii*), Bintangur (*Calopyllum pulcherrimum*),

[106] Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Th. 2016 Tgl 4 Nov 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov Riau ada perubahan kelembagaan dari KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi menjadi bagian dari kelembagaan KPHP baru yaitu KPH Tebing Tinggi (unit XXIII, XXIV dan XXV).

[107] Penetapan wilayah KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.343/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni 2011.

Produksi Furniture dari Kayu Nibung
Sumber foto: KPH Tebing Tinggi

Produk Kopi Bubuk KPH
Sumber foto: KPH Tebing Tinggi

Perendaman Batang Sagu.
Sumber foto: KPH Tebing Tinggi

Meranti Rawa (*Shorea sp.*), Geronggang (*Cratoxylum arborescens*), Kempas (*Koompassia malaccensis*), Kelat (*Syzygium sp.*), Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan Punak (*Tetramerista glabra*). Selain itu ditemui juga tanaman jenis Sagu (*Metroxylon sp.*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi, tiap tahunnya menghasilkan 9 ton sagu dan 5 ton kopi. ✣

Penjemuran biji kepayang
Sumber foto: KPHP Limau

7. KPHP UNIT VII LIMAU SAROLANGUN, JAMBI

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit VII Limau Sarolangun[10] merupakan KPHP yang berkedudukan di Kabupaten Sorolangun-Provinsi Jambi. Kawasan KPHP ini luasnya mencapai 121.102 ha[11], dengan fungsi Hutan Lindung seluas 54,793 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 22.502 ha dan Hutan Produksi seluasn 43.807 ha yang tersebar pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pelalawan, Limun, Cermin Nan Gedang dan Batang Asai. Sedikitnya terdapat 52 desa yang berada di sekitar kawasan KPHP Unit VII Limau dengan jumlah penduduk sekitar 70.375 jiwa.

Kawasan KPHP ini dapat diakses lewat jalur darat dari ibukota Kabupaten Sorolangun. Jika melalui Kecamatan Pelalawan dan Limun waktu tempuhnya sekitar 20 menit, sedangkan jika melalui Kecamatan Batang Asai dan Hulu Limun membutuhkan waktu 5 jam. Akses menuju desa-desa sekitar kawasan umunya sudah meiliki jalan aspal dan beberapa masih jalan tanah.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

KPHP Unit VII Limau memiliki potensi hasil hutan kayu sebesar yaitu 29.834,309 m^3.

[10] Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 37 Tahun 2016 Tanggal Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi No. 3/KEP/DISHUT-1.1/2017 Tanggal 4 Januari 2017 Tentang Penugasan Sementara Kepala UPTD KPH dalam Wilayah Provinsi Jambi, bahwa KPHP Unit VII Limau berubah menjadi KPHP Unit VII Limau Sarolangun.
[11] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 714/Menhut-II/2011.

Pemilihan buah kepayang yang sudah masak
Sumber foto: KPHP Limau

Pencucian daging biji kepayang
Sumber foto: KPHP Limau

Pemasaran produk KPHP di toko-toko Sarolangun
Sumber foto: KPHP Limau

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
KPHP Unit VII Limau memiliki produk unggulan pertahunnya masing-masing 104,81 ton Rotan, 500 kilogram jernang, 13 ton madu hutan, dan 4 ton minyak kepayang. Penting bagi KPHP untuk melakukan inventarisasi berapa jumlah keluarga yang terlibat.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan pada KPHP unit VII Limau ini terdiri dari Goa Bukit Bulan yang terletak di Desa Bukit Bulan, sungai untuk arung jeram, Lubuk Larangan, Air Terjun Seluro di Batang Asai, dan mata air pemandian dewa di Bukit Bulan yang dapat dijadikan sumber mata air untuk usaha air minum. ✣

Air Terjun Pancaro Rayo,
Sumber foto: MFP3

8. KPHP UNIT I KERINCI, JAMBI

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit I Kerinci[87] memiliki luasan 34.250 ha[88] dan di dalamnya termasuk kawasan hutan produksi Kota Sungai Penuh seluas 941 ha sehingga luas KPHP Unit I Kerinci tanpa kawasan hutan Kota Sungai Penuh adalah seluas 33.309 ha. KPHP Unit I Kerinci dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, KPHP Unit I Kerinci terletak di 16 wilayah Kecamatan dan 244 desa dan 2 kelurahan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 230.734 jiwa.

Wilayah KPHP mudah mudah untuk diakses, dari Kota Jambi lebih kurang 9 jam menggunakan transportasi darat dan 45 menit menggunakan pesawat udara. Selain itu juga bisa ditempuh dari Provinsi Sumatra Barat menuju Kota Sungai Penuh. Kawasan KPH Unit I Kerinci tidak berada dalam satu hamparan, sehingga hal ini memudahkan bagi pihak pengelola untuk bisa mengakses areal-areal yang terpencar.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan hasil inventarisasi tim BPKH Wilayah XIII tahun 2014 pada 61 blok pengukuran (satu blok = 1 hektar = 16 petak (1 petak = 20mx20m)) dengan hasil potensi kayu yang ada di KPHP Unit I Kerinci dapat dikatakan cukup tinggi dimana potensi hutan primer mencapai 222,49 m3/ha, dengan taksiran potensi kayu per hektar diperkirakan sekitar 193,50 - 251,48 m3/ha dan potensi pada hutan sekunder sekitar 101,13 m3/ha, dengan taksiran potensi kayu per hektar

[87] BBerdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 37 Tahun 2016 Tanggal Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi No. 3/KEP/DISHUT-1.1/2017 Tanggal 4 Januari 2017 Tentang Penugasan Sementara Kepala UPTD KPH dalam Wilayah Provinsi Jambi terjadi perubahan nama KPHP unit I Kerinci menjadi KPH Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

[88] Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.960/Menhut-II/2013.

Pemanenan Madu Hutan,
Sumber Foto: MFP3

Potensi HHBK Kulit Manis
KPH Kerinci,
Sumber Foto: MFP3

Potensi Kulit Manis
KPH Kerinci,
Sumber Foto: MFP3

diperkirakan sekitar 87,89-114,36 m3/ha. Salah satu jenis pohon yang mulai ditanam oleh masyarakat adalah surian *(Toona sureni).*

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit I Kerinci, potensi/produksi dan masyarakat yang terlibat adalah 2 ton rotan, 3000 batang bambu, 2000 ton kayu manis, 90 ton madu hutan, 3,5 ton kopi. Ada sekitar 790 keluarga yang terlibat dalam pengelololaan hutan non kayu.

3. Jasa Lingkungan
Berdasarkan hasil pengamatan dan inventarisasi tahun 2015 diketahui KPHP Unit I Kerinci memiliki potensi ekowisata dan jasa lingkungan seperti : goa, pemandian air panas, air terjun, panorama, danau, gunung, taman bunga, kebun teh, kebun nanas dan masih banyak lagi, selain ada juga wisata peninggalan sejarah seperti : benteng depati parbo, mesjid keramat, batu bersurat, dan batu selindrik. ✣

Pantai Jerangkat
Sumber Foto:
KPHP Jebu Bembang Antan

9. KPHP UNIT II JEBU BEMBANG ANTAN KEP. BANGKA BELITUNG

a. Gambaran Wilayah
KPHP Unit II Jebu Bembang Antan memiliki kawasan hutan seluas 51.769,13 ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 16.553,01 ha dan hutan produksi seluas 35.216,12 ha yang meliputi empat kecamatan di Kabupaten Bangka Barat yaitu Kecamatan Parittiga, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Simpang Tertitip.

Berdasarkan peta kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor: 798/ Menhut-II/2012, Jumlah penduduk di desa-desa kajian 2014 sebanyak 16.187 jiwa yang terdiri dari 8.293 jiwa laki-laki dan 7.894 jiwa perempuan. Luas wilayah kajian seluas 305,44 km2 dengan kepadatan penduduk sebanyak 44 jiwa/ km2 . Sebagian besar penduduk di desa lokasi inventarisasi bermata pencaharian sebagai petani 39,28%, buruh 29,61%, nelayan sebesar 13,82% dan pedagang atau wiraswasta sebesar 11,52%.

Infrastruktur yang terdapat di KPHP Unit II Jebu Bembang Antan adalah adanya jalan yang mendukung kegatan pengelolaan hutan. Jalan menuju lokasi desa di sekitar KPHP Unit II Bembang Antan sebagian sudah jalan aspal dan sebagian lagi masih berupa jalan tanah, sehingga akses menuju lokasi mudah dilalui dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Akses desa-desa lokasi inventarisasi sosia budaya masyarakat ke kawasan hutan dapat ditempuh melalui jalan aspal dan dilanjutkan melalui jalan tanah/setapak melewati ladang masyarakat serta sungai.

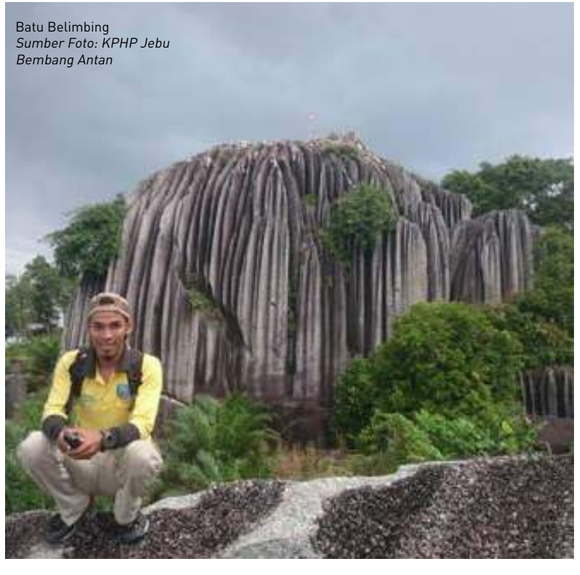

Batu Belimbing
Sumber Foto: KPHP Jebu Bembang Antan

Hutan Pantai Teluk Lingau
Sumber Foto: KPHP Jebu Bembang Antan

Mangrove kapit
Sumber Foto: KPHP Jebu Bembang Antan

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi volume pohon per hektar pada lokasi inventarisasi di wilayah KPHP Unit II Jebu Bembang Antan Kabupaten Bangka Barat memiliki taksiran Volume 85,19-114,97 m3/ha pada hutan lahan kering dan pada hutan mangrove dan rawa memiliki taksiran volume 199,50-251,79m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis hasil hutan bukan kayu yang ada di KPHP Unit II Jebu Bembang Antan tiap tahunnya adalah 4,2 ton madu hutan.

3. Jasa Lingkungan

Adapun jasa lingkungan yang terdapat di KPHP Unit II Jebu Bembang Antan Kabupaten Bangka Barat dibedakan kedalam 2 (dua) macam, yaitu air dan obyek wisata. Terdapat mata air, danau, dan sungai yang airnya berpotensi untuk dikembangkan di wilayah tersebut guna memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan air lainnya. Disamping itu di wilayah KPHP Unit II Jebu Bembang Antan Kabupaten Bangka Barat juga terdapat tempat-tempat yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata, antara lain: Pantai Air Mas, pantai Air Nyatoh, dan Pantai Tungau di Kecamatan Simpang Teritip, Pantai Tanjung Ru, Pantai Blembang, dan Pantai Siangau di Kecamatan Parittiga, Pulau Nenas, Pantai Bembang, Bukit Mempari, dan Bukit Penyabung di kecamatan Jebus, dan Air Panas Dendang di Kecamatan Kelapa. ✣

Produk HHBK
Kerajinan Resam
Sumber foto: KPHP Sungai Sembulan

10. KPHP UNIT V SUNGAI SEMBULAN, KEP. BANGKA BELITUNG

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit V Sungai Sembulan Bangka Tengah[19] terletak pada 12 desa[20] di 2 kecamatan yaitu Sungai Selatan dan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas KPH ini menurut SK Menteri Kehutanan No 329/Menhut-II/2010 mencapai 39.413 ha, yang terbagi dalam fungsi Hutan Lindung (HL) seluas 3.946 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 35.467 ha.

KPHP Unit V Sungai Sembulan dapat dikunjungi melalui jalur darat dan air (sungai). Jalur darat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, sementara untuk jalur sungai dapat menggunakan kapal motor.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan berupa hasil kayu di KPHP Unit V Sungai Sembulan terhitung cukup besar yaitu sebesar 298.343,31 m3. Adapun flora yang tumbuh di KPH Bangka Tengah adalah Mahang (*Pithecellobuin splenders Con*), Rengas (*Gluta renghas*), Tulang Kerak, Medang Sunggau, Bintangor (*Lagerstomia sp*), Terentang (*Campnosperma auriculata Hk.f*), Nyatoh (*Palaquium rostratum Burck*), Seruk (*Schima wallichii Korth*), Medang, Mesirak (*Ilex*), Pelempang itam (*Adinandra dumosa Mig*), Pelempang Putih (*Laplaceae subinte gerremi Mig*), Memparak, Pelawan (*Tristania obovata R.Br*), Meranti, Kayu Besi, dan jenis lainnya.

[19] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT Tanggal 30 Januari 2017 Perihal Pelaksanaan Tugas Kepala KPHP/KPHL, bahwa ada perubahan nama KPHP Unit V Sungai Sembulan menjadi KPH Bangka Tengah.

[20] Terdapat 12 desa disekitar KPHP Unit V Sungai Sembulan yaitu Desa Sungai Selan, Desa Sungai Selan Atas, Desa Tanjung Pura, Desa Sarang Mandi, Desa Romadhon, Desa Keretak (Keretak Atas dan Keretak Bawah), Desa Lampur, Desa Munggu, Desa Kerantai, Desa Puput dan Desa Katis

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit V Sungai Sembulan, potensi/ produksi dan masyarakat yang terlibat tiap tahunnya adalah 6000 kilogram Madu Hutan.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan yang sangat potensial adalah banyaknya jaringan sungai yang dapat digunakan sebagai sarana wisata. Sungai-sungai tersebut diantaranya Sungai Sembulan, Sungai Selan, Sungai Gino, Sungai Buah, Sungai Kambuk, Sungai Belit, Sungai Bindu, Sungai Tampui, Sungai Semabur, Sungai Sepai dan Sungai Belango. ✣

Panen madu Kelut oleh Gubernur Prov. Kep. Babel
Sumber foto: KPH Sungai Sembulan

Produk HHBK, Teh daun Gaharu
Sumber foto: KPH Sungai Sembulan

Penanaman Bibit Mangrove oleh Gubernur
Sumber foto: KPH Sungai Sembulan

11. KPHP UNIT I RAMBAT MENDUYUNG, KEP. BANGKA BELITUNG

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit I Rambat Menduyung[98] meliputi 23 desa dan 2 kelurahan[99] terletak di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Mentok, Kecamatan Simpang Teritip, dan Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan KPHP ini sekitar 54.494 ha[100] yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 12.035 ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 42.458 ha.

Aksesibilitas menuju kawasan KPHP Unit I Rambat Menduyung dapat ditempuh melalui perjalanan darat, sungai, maupun laut. Kondisi akses jalan melalui darat sebagian jalan aspal dan jalan tanah dan dapat dilalui baik kendraan roda 2 maupun roda 4, sementara akses melalui sungai dan laut dapat ditempuh menggunakan kapal motor.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil inventarisasi di wilayah KPHP Unit I Rambat Menduyung, beberapa jenis pohon yang ditemukan antara lain Bakau (*Rhyzopora sp*), Tumo, Keruing (*Dipterocarpus retusus*), Perepat, Mekepar, Gelam, Bintangur (*Callophylum inophylum*), Sapat, Seru, Medang, Meranti (*Shorea sp*), Gergadai, Api-Api (*Avicennia sp*), Memeti, Pelawan (*Tristaniopis merguensis*), Teruntum, Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia*), Mentangur, Nyirih, Buta – Buta, Pulai

[98] Berdasarkan (Pelaksana Tugas Sementara berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT Tanggal 30 Januari 2017 Perihal Pelaksanaan Tugas Kepala KPHP/KPHL ada perubahan nama KPHP Unit I rambat Menduyung menjadi KPH Bangka Barat.

[99] Adapun jumlah desa dan kelurahan yang ada disekitar kawasan sejumlah 23 desa dan 2 kelurahan yaitu Desa Air Putih, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng, Desa Belo Laut, Desa Air Belo, Desa Air Limau, Desa Rambat, Desa Mayang, Desa Pelangas, Desa Simpang Gong, Desa Pangek, Desa Peradong, Desa Air Nyatoh, Desa Simpang Tiga, Desa Air Menduyung, Desa Berang, dan Desa Ibul, Desa Pangkal Beras, Desa Kayu Arang, Desa Dendang, dan Desa Terentang, Desa Penyampak, Desa Simpang Yul, Desa Sinar Surya, dan Desa Tanjung Nyiur.

[100] Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 798/kpts-II/ 2012.

Potensi Umbil Lengkir
Sumber foto: KPH Rambat Menduyung

HHBK Madu Trigona
Sumber foto:
KPH Rambat Menduyung

(*Alstonia scholaris*), Mekepar, dan berbagai jenis lainnya.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit I Rambat Menduyung tiap tahunnya menghasilkan 1000 batang rotan, 1 ton madu hutan, 500 kilogram jamur palawan, 1500 liter madu trigona. Jumlah keterlibatan masyarakat yang tercatat hanyalah sekitar 45 orang yang terlibat pada pengolahan hasil madu hutan dan madu trigona, sementara produk hasil hutan bukan kayu lainnya belum didata.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan dan wisata alam yang terdapat di kawasan KPH Unit I Rambat Menduyung meliputi : hutan adat Pelangas, pantai Tungau, kebun durian, dan hutan Mangrove. ✣

Produk HHBK, Teh dan Kopi Pinang
Sumber foto: KPH Sigambir Kotawaringin

12. KPHP UNIT IV SIGAMBIR KOTAWARINGIN, KEP. BANGKA BELITUNG

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin[112] secara administrasi negara terletak di 6 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bakam, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin menjadi 36.492,46 ha[113] terdiri dari Hutan lindung seluas 5.153,23 ha dan Hutan Produksi seluas 31.339,23 ha.

Inventarisasi sosial budaya telah dilakukan di 6 desa terpilih dari 18 desa dan 2 kelurahan yaitu Desa Labuh Air Pandan, Desa Kotawaringin, Desa Air Anyir, Desa Penagan, Desa Pemali, dan Desa Rukam. Kerapatan penduduk dari enam desa tersebut bervariasi dari 26 jiwa/km2 (Desa Labuh Air Pandan) sampai 119 jiwa/km2 (Desa Air Anyir) atau rata-rata kepadatan penduduknya sebesar 65 jiwa/km2.

Wilayah KPHP unit IV Sigambir Kotawaringin dapat ditempuh melalui dua jalur utama, Pertama, rute Pangkalpinang-Sungailiat dengan waktu tempuh lebih 30 menit perjalanan darat (roda 4). Kedua, rute Muntok-Sungailiat dengan waktu tempuh lebih kurang 1,5 jam perjalanan darat (roda 4).

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil inventarisasi yang dilakukan di Hutan Lindung Sungai Sembulan dan

[112] Berdasarkan (Pelaksana Tugas Sementara berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT Tanggal 30 Januari 2017 Perihal Pelaksanaan Tugas Kepala KPHP/KPHL, ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin menjadi bagian dari KPH Bangka.

[113] Ditetapkan melaui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 962/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Kotawaringin, ditemukan jenis tumbuhan pada hutan mangrove antara lain bakau, tumo, nyirih, menaro, teruntum, buta-buta, perepat, gelam, dan berbagai jenis flora lainnya. Pada tipe hutan rawa, ditemukan antara lain mang, medang, samak, kabel, mensirak, ketiau, banit, tukak, rengas, terentang, meranti merah, gelam dan berbagai jenis tumbuhan lainnya.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXII dan XXVI Kota Waringin Barat tiap tahunnya menghasilkan 900 kilogram aren.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan dan wisata alam untuk dikembangkan oleh KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin antara lain berupa Pantai, Hutan Mangrove, pemandian air panas dan danau bekas galian tambang. ✣

tensi HHBK, Daun Madu Pelawan
Sumber foto: KPH Sigambir Kotawaringin

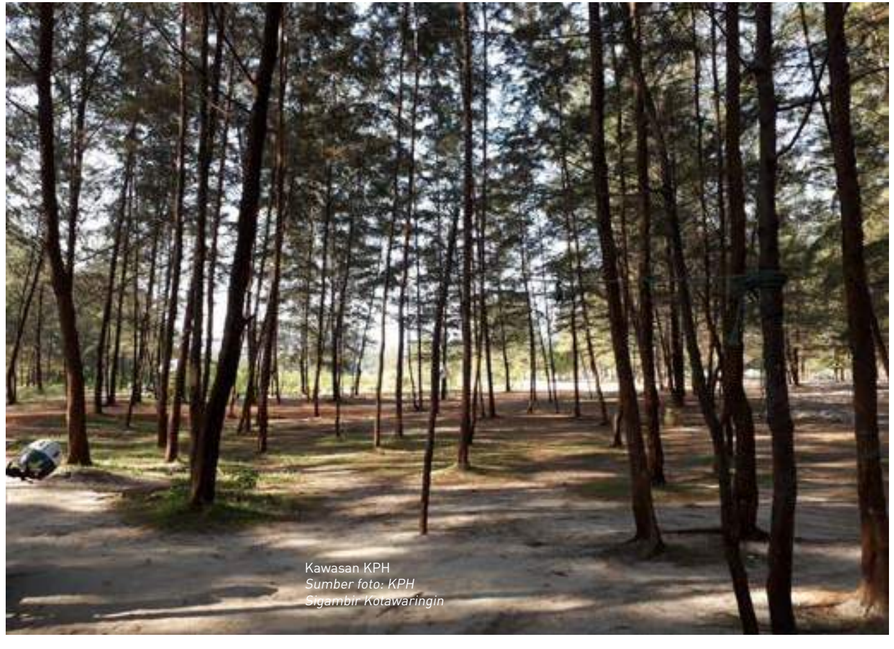

Kawasan KPH
Sumber foto: KPH Sigambir Kotawaringin

Potensi HHBK, Daun Madu Pelawan
Sumber foto: KPH Sigambir Kotawaringin

13. KPHP UNIT III BUBUS PANCA, KEP. BANGKA BELITUNG

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit III Bubus Panca[128] memiliki luas 45.953 ha[129] , terdiri dari kawasan hutan Produksi Tetap (HP) seluas 35.175 ha, dan Hutan Lindung (HL) seluas 10.777 ha. KPHP ini terletak di 2 wilayah Kecamatan, Kecamatan Riau Silip dan Belinyu, Kabupaten Bangka[130] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbit, yang didalamnya telah membagi seluruh kawasan hutan seluas ± 641.801 hektar ke dalam 13 unit KPH yang terdiri dari 2 KPHL seluas 93.632 hektar dan 11 KPHP seluas 548.169 hektar.

Akses jalan ke kawasan KPHP Unit III Bubus Panca sudah sangat baik sehingga mendukung kegiatan pengelolaan hutan. Jalan menuju lokasi desa disekitar KPHP Unit III Bubus Panca hampir seluruhnya jalan aspal sehingga akses menuju lokasi mudah dilalui dengan kendaraan apapun, baik itu kendaraan roda dua ataupun roda empat.

b Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil inventarisasi di wilayah KPHP Unit III Bubus Panca diketahui potensi kayu yang ada di lahan kering memiliki taksiran volume 62,35-63,96 m3/ha sedangkan pada hutan mangrove hanya memiliki taksiran volume sekitar 14,79-21,80 m3/ha.

[128] Berdasarkan Pelaksana Tugas Sementara berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT Tanggal 30 Januari 2017 Perihal Pelaksanaan Tugas Kepala KPHP/KPHL ada perubahan nama dai KPHP Unit III Bubus Panca menjadi bagian KPH Bangka Unit III dan IV.

[129] Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 797/Menhut-II/2009

[130] Berdasarkan

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit III Bubus Panca tiap tahunnya menghasilkan 230 kilogram gaharu, 1020 kilogram madu hutan, 4616,8 ton karet.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan di wilayah KPHP Unit III Bubus Panca Kabupaten Bangka dapat dibedakan kedalam 2 macam, yaitu air dan obyek wisata. Terdapat mata air, danau, dan sungai yang airnya berpotensi untuk dikembangkan di wilayah tersebut guna memenuhi kebutuhaan air minum dan kebutuhan air minum dan kebutuhan harian lainnya. Wilayah KPHP Unit III Bubus Panca Kabupaten Bangka juga terdapat tempat-tempat yang potensial untuk dikebangkan sebagai obyek wisata, anatara lain Wisata Resort Tuing, wisata *outbond*, danau, pantai beserta flora dan faunanya, dan keramat/situs budaya yang terdapat di wilayah tersebut seperti wilayah suku Adat Lom. Beberapa objek wisata terdapat di sekitar areal KPHP Unit III Bubus Panca antara lain di Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu, yaitu: Pantai Romodong, Pantai Tanjung Penyusuk, Pulau Lampu, dan Pulau Karang. ✣

Kawasan Hutan KPH Meranti
Sumber foto: KPH Meranti

14. KPHP UNIT IV MERANTI, SUMATERA SELATAN

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit IV Meranti[15] luasnya mencapai 244.162,33 ha[16] , berkedudukan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah kerja KPHP ini meliputi 118 desa dalam 7 kecamatan[17] . Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah itu mencapai 293.800 jiwa.

Kawasan KPHP Unit IV Meranti terbagi dalam beberapa fungsi, yaitu 16.325,30 ha Hutan Lindung (HL) dengan pemanfaatan pada wilayah tertentu, Hutan Produksi untuk Pemanfaatan IUPHHK-HA (Hutan Alam) seluas, Blok Hutan Produksi untuk Pemanfaatan IUPHHK-HT (Hutan Tanaman) seluas 142.267,52 ha, Blok Produksi untuk pemberdayaan pada wilayah tertentu seluas 19.316,31 ha dan Blok Hutan Produksi untuk Perlindungan seluas 16.099,58 ha.

Kawasan KPHP Unit IV Meranti mudah dijangkau dari berbagai arah. ergolong sangat strategis, karena dapat dicapai dari berbagai arah. Moda transportasi yang dapat digunakan yaitu angkutan darat (jalan) tetapi sebagian kawasan harus dicapai dengan angkutan air (sungai). Berikut jalur menuju lokasi:

Arah Utara: Dari Jambi - wilayah konsesi restorasi ekosistem (PT. REKI) - sekitar 80 km arah barat daya dari Kota Jambi – ke arah Muara Bulian dengan jarak sekitar 50 km – Masuk ke jalan perkebunan kelapa sawit PT. Asiatic Persada sekitar 35 km - sampai di base camp KM. 35 PT Asialog, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dari Jambi.

[15] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 099/KPTS/I/HUT/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penetapan Tugas Koordinator Wilayah Pengelolaan dan Pelayanan Bidang Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adanya perubahan nama dari KPHP Unit IV Meranti menjadi KPH Wilayah I Meranti.

[16] Keterangan Menteri Kehutanan No. 822/Menhut-II/2013

[17] Meliputi Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa dan Tungkal Jaya

Aktifitas Penyadapan Karet
Sumber foto: KPH Meranti

Potensi HHBK, Rotan
Sumber foto: KPH Meranti

Arah Selatan: Dari Palembang melalui Sekayu–Mangun Jaya ditempuh menggunakan kendaraan umum (bis, mobil travel) dengan waktu tempuh 5-6 jam - Dilanjutkan dari Mangun Jaya ke Lubuk Bintialo menggunakan angkutan umum pedesaan atau ojek motor dengan waktu tempuh 1-2 jam. Disamping perjalanan darat, dari Lubuk Bintialo ke Sako Suban dapat pula ditempuh lewat jalur air, melalui Sungai Batanghari Leko– Sungai Kapas menggunakan perahu/ketek dengan waktu tempuh 3-4 jam.

Arah Timur: Desa Lubuk Bintialo dan Sako Suban dapat dicapai dari kota Palembang menuju Simpang Gas (arah ke Bayung Lencir dan arah Jambi) menggunakan kendaraan umum (bis, mobil travel) dengan waktu tempuh 5-6 jam. Selanjutnya dari Simpang Gas ke Lubuk Bintialo melalui jalan berbatu dan tanah (gravel road) sekitar 60 km yang dibangun oleh perusahaan minyak dan gas ConocoPhillips Grissik Ltd. menggunakan angkutan umum pedesaan atau ojek motor dengan waktu tempuh sekitar 3 jam.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi KPHP Unit IV Meranti memiliki potensi volume kayu rata-rata pada blok Hutan Lindung Pemanfaatan 49,02 m3/ha, sedangkan Hutan Pro - Pemberdayaan 3,77 m3/ha dengan potensi luas total 873.084 m3.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

KPHP Unit IV Meranti menghasilkan produk unggulan pertahunnya berupa 112 ton Rotan, 2,5 ton jernang, 30 ton madu hutan, 1050 ton getah karet. Pengelolan produk tersebut berhasil melibatkan sedikitnya 165 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Salah satu jasa lingkungan di KPHP Unit IV Meranti berupa pembangkit listrik mikro hidro, industri air minum kemasan, wisata alam dan perdagangan karbon. ✣

15. KPHP UNIT V RAWAS, SUMATERA SELATAN

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit V[18] Rawas terletak di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Wilayahnya tersebar pada 32 desa di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Rupit, Karang Jaya, Rawasa Ulu, Ulu Rawas dan Nibung. Jumlah penduduknya sekitar 64.024 jiwa. Luasan lahannya menurut SK Menteri Kehutanan No 822/Menhut-II/2013 mencapai 118.514,51 ha yang terbagi terbagi dalam 2 fungsi hutan, yaitu Hutan Produksi memiliki luas 83.643,42 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 35.384,97 ha.

Kawasan KPHP Unit V Rawas dapat ditempuh menggunakan jalur darat. Perjalanan dapat ditempuh dari Kabupaten Musi Rawas Muara Belit, Masuk ke kota Linggau – dlanjutkan melalui Lintas Sumatera ke arah Jambi. Jarak temput terdekat adalah wilayah karang jaya 2 jam perjalanan sedangkan terjauh yaitu Kota Linggau 4 jam perjalanan.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi hasil kayu di KPHP Unit V Rawas didapatkan volume kayu rata-rata sebesar 26,663m3/ha. Terdapat tiga kelompok jenis kayu yang ditanam diantaranya kelas komersil satu, komersil dua, kayu indah satu, kayu indah dua dan lain-lain.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis hasil hutan bukan kayu unggulan KPHP Unit V Rawas adalah 250 kilogram Nilam yang pengelolaannya melibatkan 33 keluarga.

[18] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 099/KPTS/I/HUT/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penetapan Tugas Koordinator Wilayah Pengelolaan dan Pelayanan Bidang Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ada perubahan nama KPHP Wilayah V Rawas menjadi KPH Wilayah XIV Rawas.

Potensi HHBK, Penyadapan Karet
Sumber foto: KPH Rawas

Potensi Kelapa sawit,
Sumber foto: KPH Rawas

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP Unit V Rawas areal hutan produksi tetap yang dapat digunakan sebagai lokasi penelitian, selain itu areal ex-tambang emas memiliki pemandangan yang artistik dan dapat digunakan untuk kegiatan ekowisata dan wisata *outbound* lainnya. ✣

Bentang alam KPH
Sumber foto: MFP3

16. KPHP UNIT VII DAN VIII BENAKAT BUKIT COGONG, SUMATERA SELATAN

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Wilayah XII Benakat[12] merupakan gabungan dari KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong. Wilayahnya lumayan luas, berada di 6 kabupaten/ kota yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat dan Kota Lubuk Linggau - Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah tersebut berada pada 97 desa dari 27 kecamatan. Jumlah penduduk pada desa-desa sekitar KPHP mencapai 73.021 jiwa. Desa-desa tersebut merupakan pemukiman masyarakat asli dan trasnmigran yang mayoritas bermata pencaharian petani dan buruh tani. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 822/ Menhut-II/2013, luasan KPH Benakat mencapai 271.434,00 ha, terbagi dalam 3 fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Lindung 2.099,07 ha, Hutan Produksi Terbatas 4.416,74 ha dan Hutan Produksi 264.918,51 ha.

Jalan menuju Lokasi KPHP unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong dapat dicapai melalui jalan darat dari Ibu Kota Provinsi menuju berbagai ibukota Kabupaten yaitu Muara Beliti, Muara Enim, Lahat, Talang Ubi dan Sekayu, Kota Prabumulih serta Kota Lubuk Linggau. Jarak terdekat dengan bisa dicapai melalui ibukota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Talang Ubi) ditempuh dengan waktu 30 menit,

[7] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 099/KPTS/I/HUT/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penetapan Tugas Koordinator Wilayah Pengelolaan dan Pelayanan Bidang Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, ada perubahan nama menjadi KPHP Wilayah XII Benakat.

sedangkan yang terjauh melewati kota Sekayu menuju Kecamatan Sungai Keruh yang membutuhkan waktu 3 jam.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong memiliki potensi hasil hutan kayu yang tergolong tinggi yaitu 1.350.973 m3 dengan rata rata volume 99,164 m3/ha. Hasil hutan kayu itu berasal dari pemanfaatan hasil hutan Hutan Tanaman Industi Pulp, Hutan Tanaman Industri Jabon, Hutan Tanaman Industri Karet, Hutan Tanaman Rakyat dan wilayah tertentu.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan KPHP pertahunnya meliputi 15 ribu batang, 17,4 ton madu hutan, 7000 ton karet, 75 ton jengkol dan 7 ton gaharu.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan dan wisata alam pada KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong diantaranya pemanfaatan air dan aliran air untuk wisata alam. Hasil analisis ekonomi terhadap jasa lingkungan air menghasilkan pendapatan Rp 359.995.497,- sedangkan dari sektor wisata sebesar Rp 3.323.487.617,-. ✣

[12] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 099/KPTS/I/HUT/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penetapan Tugas Koordinator Wilayah Pengelolaan dan Pelayanan Bidang Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, ada perubahan nama menjadi KPHP Wilayah XII Benakat.

HHBK getah karet
Sumber foto: MFP3

Aktifitas penyadapan Karet
Sumber foto: MFP3

Kawasan hutan KPH
Sumber foto: MFP3

Kawasan KPH Lakitan
Sumber foto: KPH Lakitan

17. KPHP UNIT VI LAKITAN, SUMATERA SELATAN

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit VI Lakitan[13] sesuai SK Menteri Kehutanan No 790/Menhut-II/2009 - luasnya mencapai 76.776 ha. Luasan ini meliputi 41 desa dalam 13 kecamatan[14] dengan jumlah penduduk mencapai 111.556 jiwa. Wilayah KPHP ini terbagi dalam 4 kelompok, yaitu : Hutan Produksi (HP) yaitu HP Lakitan Utara I seluas 33.635 ha tersebar dalam 17 desa, HP Lakitan Utara II seluas 3.850 ha di wilayah 6 desa, HP Lakitan Selatan seluas 22.276 ha pada 15 desa, HP Kungkus seluas 17.013 ha pada 8 desa.

Perjalanan ke kawasan KPHP Unit VI Lakitan dapat ditempuh dengan menggunakan trasnportasi darat - baik jalan aspal maupun jalan tanah dari Ibukota Kabupaten Muara Beliti. Wilayah Kecamatan Jayaloka dapat ditempuh 1 jam perjalanan sedangkan Kecamatan Karang Dapo ditempuh 3 jam perjalanan.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi hasil hutan kayu KPHP unit VI Lakitan didapatkan dalam 10 tahun kedepan KPHP ini akan memiliki produksi kayu mencapai 6,05 juta m3. Produksi kayu ini sekitar 68,8%

[13] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 099/KPTS/I/HUT/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penetapan Tugas Koordinator Wilayah Pengelolaan dan Pelayanan Bidang Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, ada perubahan nama KPHP Lakitan menjadi KPHP Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong. KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong merupakan KPH Hutan Produksi yang menjadi KPH Model di Provinsi Sumatera Selatan.

[14] KPHP Unit VI Lakitan wilayahnya berada di Kecamatan Jayaloka, Tiang Pumpung Kepungut, Suka Karya, Megang Sakti, Tuah Negeri, Sumberharta, Muara Kelingi, Karang Dapo, Karang Jaya, Megang Sakti, Muara Lakitan, Muraha Rupit, STL Ulu Terawas, Karang Dapo, Muara Lakitan dan Rawas Ilir.

berasal dari Hutan Tanaman Indutstri adapun Hutan Tanaman Rakyat yang berkontribusi dana hingga 31,4%.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit VI Lakitan per tahunnya menghasilkan 10 ribu batang gaharu, 450 batang bambu, 1000 kilogram madu hutan, 200 ton getah karet dan 36 ribu ton jelutung.

3. Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan KPHP Unit VI Lakitan bisa dilakukan melalui skema restorasi ekosistem (RE), proyek REDD, proyek PAN/RAP Karbon, atau pemanfaatan untuk tujuan tertentu (PWT) yang dikelola langsung oleh KPHP Unit VI Lakitan. ✣

Produk HHBK, Kopi Selangit
Sumber foto: KPH Lakitan

18. KPHP UNIT II LALAN MANGSANG MENDIS, SUMATERA SELATAN

a. Gambaran Wilayah

KPHP unit II Lalan Mangsang Mendis terletak di Kecamatan Banyuasin II Kabupatan Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dengan luas kawasan 60.999,33 ha[143]. Penduduk sekitar wilayah KPHP ini tersebar pada 9 desa dengan total penduduk 17.252 jiwa dan kepadatan penduduk 795,171 jiwa/km2. Mata pencaharian penduduk sekitar yang paling dominan adalah petani dan berkebun.

Perjalanan menuju wilayah KPHP Unit II Lalan Mangsang Mendis memiliki aksesibilitas sedang dan dapat ditempuh melalui jalur darat dan sungai. Perjalanan darat diawali dari ibukota Provinsi Jambi – Desa Petaling (120 km, 3 jam), setelah itu menuju ke Dusun Pancuran (50km, 1 jam). Sarana jalan darat sudah cukup memadai dengan adanya jalan aspal dan jalan tanah. Perjalanan melalui sungai dimulai dari jalan Tanjung Api-api – Jembatan simpang PU – kecamatan Tanjung Lago – Desa Karang Agung Ilir –Sungai Sembilang dengan menggunakan alat transportasi *Speedboat.*

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan kayu di KPHP unit II Lalan Mangsang Mendis yaitu terdiri dari dua tipe hutan yaitu hutan basah/rawa dan hutan mangrove. Jenis-jenis pohonnya antara lain meranti, merawan, merbau, Ketapang, Kenanga, Kempas, Arang-arang, mangrove sekunder masih terdapat kayu komersil

[143] Berdasarkan SK 866/Menhut-II/2014.

kelas satu seperti Jangkang Penyirih dan Tumuk.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit II Lalan Mangsang Mendis tiap tahunnya adalah 500 kilogram rotan, 600 kilogram jelutung, 42 ribu buah nanas dan 300 ribu – 350 ribu liter nipah. Sekitar 200 keluarga terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan yang dimanfaatkan di wilayah KPHP unit II Lalan Mangsang Mendis yaitu untuk pemanfaatan sumberdaya air, penelitian dan pengembangan, penangkaran satwa dan jasa karbon.✣

Potensi HHBK, Daun Nilam
Sumber foto: KPH Lalan MAngsang Mendis

Potensi HHBK
Lebah Madu
Sumber foto: KPH Suban Jeriji

19. KPHP UNIT XIV SUBAN JERIJI, SUMATERA SELATAN

a. Gambaran Wailayah

Wilayah KPHP Unit XIV Suban Jeriji[142] tersebar ke dalam 5 kabupaten dan 16 kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayahya meliputi seluas 203.316 ha yang terdiri dari 5 resort antara lain : (1) Resort Niru Lubuk Batang, (2) Resort Bukit Asam, (3) Resort Suban Jeriji Barat, (4) Resort Suban Jeriji Timur, (5) Resort Martapura Aer Laye (khusus resort ini dikelola secara kolaboratif bersama TNI).

Penduduk sekitar wilayah KPHP Unit XIV Suban Jeriji tersebar ke dalam 5 kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim (7 kecamatan), Kabupaten Ogan Komering Ulu (2 kecamatan), Kabupaten OKU Timur (4 kecamatan), Kabupaten Prabumulih (2 Kecamatan) dan Kabupaten Lahat (1 kecamatan). Kecamatan Muara Enim, OKU dan Lahat merupakan kecamatan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kegiatan masyarakat dalam kawasan KPHP Unit XIV Suban Jeriji.

Aksesibilitas menuju KPHP Unit XIV Suban Jeriji berupa jalan aspal dan jalan poros milik perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar. Untuk menuju wilayah KPHP dapat ditempuh melalui jalur darat dari berbagai ibu kota Kabupaten/Kota. Jarak terdekat dengan ibu kota kabupaten adalah Muara Enim menuju Kecamatan Muara Enim dapat ditempuh selama 3 jam sedangkan jarak terjauh yaitu dari Kota Muara Enim menuju Kecamatan Peninjauan yaitu selama 5 jam.

[142] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 099/KPTS/I/HUT/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penetapan Tugas Koordinator Wilayah Pengelolaan dan Pelayanan Bidang Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit XIV Suban Jeriji menjadi KPH VIII Semendo.

Potensi HHBK, Gaharu
Sumber foto: KPH Suban Jeriji

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Kawasan KPHP Unit XIV Suban Jeriji sebagian besar merupakan Hutan Tanaman Industri areal konsensi IUPHHK-HT, sebagian besar telah terkonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Berdasarkan kondisi ini, potensi kawasan KPHP Unit XIV Suban Jeriji untuk menghasilkan potensi sumberdaya kayu dan non kayu sangat rendah. Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam juga tidak ditemui pada kawasan KPHP Unit XIV Suban Jeriji karena sebagian besar kawasan ini berupa lahan kering dan rawa.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XIV Suban Jeriji, tiap tahunnya adalah 75 ribu batang bambu, 90 ton madu hutan, 1,24 ton gaharu, 632 ribu ton karet. Pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini melibatkan sekitar 49.657 keluarga, sekitar 98% nya terlibat dalam pengelolaan produksi karet. ✣

Potensi Jasling Air terjun Putri Malu
Sumber foto: KPH Bukit Punggur

20. KPH UNIT III BUKIT PUNGGUR, LAMPUNG

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPH Unit III Bukit Punggur [21] terletak pada 6 kecamatan di Provinsi Lampung diantaranya Kecamatan Banjit, Kasui, Rebang Tangkasm Negeri Agung, Blambangan Umpu dan Way Tuba. Kawasan itu dihuni sekitar 201.598 jiwa. Luas kawasan KPHP Unit III Bukit Punggur berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 439/Menhut-II/2012 luasnya mencapai 41.126 ha yang terdiri dari Hutan Lindung 19.131 ha dan Hutan Produksi seluas 21.995 ha.

KPHP Unit III Bukit Punggur dapat ditempuh melalui jalur darat dari kota Bandar Lampung sejauh 210 km dengan waktu tempuh 5 jam. Jalur yang ditempuh adalah Bandar Lampung ke Bandar Jaya ke Kota Bumi ke Blambangan Umpu ke kantor KPHP Unit III Bukit Punggur. Moda tranportasi yang dapat digunakan diantaranya bus umum, mobil dan angkutan lokal.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan hasil inventarisasi pada 2013 diketahui bahwa terdapat 51 jenis pohon kayu yang terbagi kedalam tiga kelas komersiil. Kelas satu yaitu kayu medang dan cempaka dengan potensi volume 8,1 m3/ha, Kelas komersil dua terdiri dari kayu meranti, menggris dan mentru dengan potensi volume 7,93 m3/ha, sedangkan kayu kelas komersil tiga adalah kayu pasang dan lainnya yang memilliki potensi volume 5,76 m3/ha.

[21] Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun. 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung Tanggal 1 Februari 2017 ada perubahan nama KPHP Unit III Bukit Punggur menjadi KPH Unit III Bukit Punggur.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Tiap tahunnya KPHP Unit III Bukit Punggur memproduksi produk unggulan sebesar 33.800 ton Karet dan 10 ribu ton kopi.

3. Jasa Lingkungan
Potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata alam diantaranya jasa lingkungan Air Terjun Putri Malu dan Arung Jeram Way Besai, selain itu terdapat pula Sumber Air Panas Plamasin dan Arung Jeram Way Giham. ✣

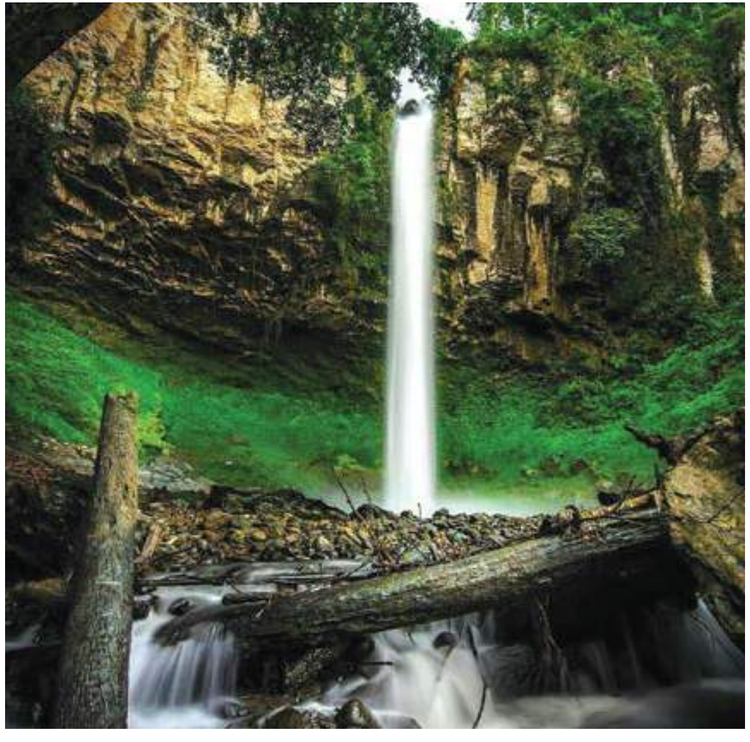

Potensi Jasling Air terjun Putri Malu
Sumber foto: KPH Bukit Punggur

21. KPHP UNIT XIV GEDONG WANI, LAMPUNG

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XVI Gedong Wani merupakan KPHP yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari 11 kecamatan dan 39 desa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 68/Menhut-II/2011 kawasan KPHP Unit XVI Gedong Wani yang memiliki luas 30.243 ha dan terbagi dalam empat register Kawasan Hutan Produksi (KHP) diantaranya KHP Way Ketibung I, Way Ketibung II, Gedong Wani dan Way Kibang. Saat ini jumlah desa yang berada dalam areal wilayah KPHP Unit XVI Gedong Wani berjumlah 39 desa dengan jumlah dusun sebanyak 179 dusun.

KPHP unit XVI Gedong Wani dapat diakses dari Kota Bandar Lampung dengan kondisi baik dan lancar menggunakan jasa angkutan darat roda dua atau empat. Akses yang baik di kawasan karena didukung dengan fasilitas sekitar desa yang lengkap, mulai dari kantor kepolisian sampai puskesmas.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di kawasan KPHP Unit IV Muara Dua meliputi *Hevea brasiliensis* dan *Acacia mangium* dengan total kawasan tanam sekitar 29.086 Ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan Kehutanan di KPHP Unit XVI Gedong Wani tiap tahunnya menghasilkan 39.400 ton karet, 1.578 ton buah kelapa sawit dan 66.500 batang

Ibu Menteri LHK sedang memanen jagung hasil kemitraan kehutanan
Sumber foto: KPH Gedong Wani

Potensi HHBK Budidaya Lebah Madu
Sumber foto: KPH Gedong Wani

bambu. Ketiga komoditas ini melibatkan 1185 keluarga dalam mengelola hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan yang muncul di KPHP Unit XVI Gedong Wani diantaranya hamparan batu-batu besar (*big rock*) yang dapat dikelola sebagai lokasi wisata yang menarik. ✣

Tegakan Kayu Putih di Kawasan Hutan Produksi Register 46 Way Hanakau seluas 3.8 Hektar
Sumber foto: KPH Muara Dua

22. KPHP UNIT IV MUARA DUA, LAMPUNG

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit IV Muara Dua[22] terletak pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan luas kawasan mencapai 49.134 ha[23] . Kawasan KPHP Unit IV Muara Dua terbagi menjadi 4 Resort Pengelolaan Hutan (RPH) diantaranya RPH 1 seluas 10.272 ha, RPH 2 seluas 10.055 ha, RPH 3 seluas 21.171 ha dan RPH 4 seluas 11.470,92 ha.

Wilayah KPHP Unit IV Muara Dua terdiri dari 7 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 211.631 jiwa. Sebagian besar penduduk sekitar KPHP Unit IV Muara Dua memiliki mata pencaharian bertani atau berkebun dan lainnya sebagai pedagang, peternak, pemerintahan ataupun jasa.

KPHP Unit IV Muara Dua dapat dijangkau dari Kota Bandar Lampung menggunakan kendaraan roda empat sekitar 180 km atau dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Perjalanan dimulai dari Kota Bandar Lampung – Bandar Jaya – Kota Bumi – Negara Ratu – Kawasan. Kondisi jalan tergolong baik melalui jalan provinsi.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di kawasan KPHP Unit IV Muara Dua meliputi *Hevea brasiliensis*

[22] Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung Tanggal 1 Februari 2017, ada perubahan nama KPH dari KPHP Unit IV Muara Dua menjadi KPH Unit IV Muara Dua.

[23] Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 236/Menhut-II/2012.

dan *Acacia mangium* dengan total kawasan tanam sekitar 29.086 Ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Hasil hutan bukan kayu yang KPHP Unit IV Muara Dua tiap tahunnya adalah : 24 liter Madu Hutan, 7.528 ton getah karet dan 26 liter minyak kayu putih. Pengelola KPH berhasil melibatkan 713 keluarga mengelola produk unggulan tersebut.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan untuk kegiatan wisata alam di KPHP Unit IV Muara Dua berupa rawa-rawa seluas 6000 ha yang saat ini belum dioptimalkan sebagai lokasi wisata. ✣

Potensi Tanaman Karet
Sumber foto: KPH Muara Dua

Kawasan KPH Way Terusan
Sumber foto: KPH Way Terusan

23. KPHP UNIT VI REGISTER 47 WAY TERUSAN, LAMPUNG

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan[24] terletak di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Luas kawasan KPH mencapai 12.500 ha[25] , yang terbagi kedalam Blok Pemberdayaan seluas 9.000 ha dan Blok Perlindungan seluas 3.500 ha. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan kawasan KPH Unit VI Way Terusan sebagai ladang mata pencahariannya. Setidaknya terdapat 4015 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun pada kawasan KPH.

Aksesibilitas menuju kawasan KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan dapat ditempuh melalui jalan areal perkebunan tebu PT Gunung Madu dengan kondisi jalan yang sudah diperkeras dan diperlebar. Selain itu bisa juga menggunakan trasnportasi air melalui sungai Way Seputih.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Belum dikaji

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan yang merupakan produk unggulan KPH per tahunnya adalah 2400 ton getah karet. Belum diketahui berapa jumlah keluarga yang terlibat.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan yang ada berupa penyimpanan penyerapan karbon dan wisata air sungai. ✣

[24] Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Th. 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung Tanggal 1 Februari 2017, ada perubahan nama KPH dari KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan menjadi KPH Unit VI Way Terusan.

[25] Surat Keterangan Menteri Kehutanan No 3039/Menhut-II/2014.

Potensi Jasa Lingkungan
Arum Jeram
Sumber Foto:
KPH Yogyakarta

24. KPHP YOGYAKARTA, YOGYAKARTA

a. Gambaran Wilayah

KPHP Yogyakarta[26] terletak pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luasannya mencapai 15.724,50 ha yang terbagi kedalam dua fungsi kawasan yaitu Hutan Produksi seluas 13.411,70 ha dan Hutan Lindung seluas 2.312,80 ha. Jumlah penduduk yang berada di sekitar kawasan BKPH Yogyakarta meliputi 47 desa di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 276.026 jiwa

Kawasan hutan KPHP Yogyakarta mudah dijangkau dengan menggunakan jalur darat :

1. Pada kawasan hutan negara di Kabupaten Gunungkidul dari Yogyakarta berjarak sekitar 25 km untuk wilayah Bagian Daerah Hutan (BDH) Playen, sekitar 35 km untuk BDH Paliyan, sekitar 30 km untuk BDH Panggang dan sekitar 50 km untuk BDH Karangmojo.
2. Pada kawasan hutan negara di Kabupaten Bantul, dari Yogyakarta untuk mencapai wilayah hutan negara di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan sekitar 20 km dan 30 km untuk RPH Dlingo.
3. Pada Kabupaten Kulon Progo, dari Yogyakarta untuk mencapai wilayah RPH Sermo sekitar 40 km, dan RPH Kokap sekitar 45 km

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu yang saat ini tersedia diantaranya jati, mahoni, akasia, gmelina, gliricecidea, sonokeling dan bambu.

[26] Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 96 Th. 2015 ada perubahan nama dari KPHP Yogyakarta menjadi BKPH Yogyakarta.

Produk HHBK, Minyak Kayu Putih
Sumber foto: KPH Yogyakarta

Aktifitas KPH dalam pengelolaan Lahan
Sumber foto: KPH Yogyakarta

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Tiap tahunnya KPHP Yogyakarta menghasilkan produk unggulan dari hasil hutan bukan kayu, yaitu 31.247 liter minyak kayu putih.

3. Jasa Lingkungan
Jasa lingkungan yang sangat potensial dikembangkan sebagai media wisata alam pada KPHP Yogyakarta diantaranya Wisata Kalibiru, Goa Rancang Air, Air Terjun Sri Gethuk, Goa Pindul, Goa Semanau, Mata Air Bengkung, Waduk Sermo, Goa RPH Gerbang, Kolam Ikan RPH Pucanganon, Goa Ngingrong, Goa Luweng dan Goa Bagus. ✣

Potensi HHBK,
Sumbawa Black
Sumber foto: MFP3

25. KPHP UNIT IX BATULANTEH, NTB

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XII Batulanteh[27] luasnya mencapai 32.776 ha[28] , terletak pada 8 Kecamatan meliputi Kecamatan Batulanteh, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, Labuhan Badas, Rhee, Unter Iwes dan Lape Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasannya terbagi kedalam tiga fungsi kawasan hutan, yaitu fungsi Hutan Lindung seluas 14.303 ha, Hutan Produksi seluas 14.842 ha dan Hutan Produksi Terbatas 3.631 ha. Terdapat 40 desa dalam kawasan KPHP . Jumlah penduduk yang ada di BKPH Puncak Ngengas Batulanteh berjumlah 64.135 jiwa, dengan penduduk terpadat di Kecamatan Moyo Hulu dan terendah di Kecamatan Batulanteh.

KPHP Unit XII Batulanteh dapat ditempuh menggunakan jalur darat. Kondisi jalan sebagian berupa jalan aspal, namun kebanyakan akses menuju desa-desa sudah rusak dan memerlukan kendaraan *double gardan* (Hardtop) untuk mengakses desa-desa tersebut.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu kawasan pada hutan produksi adalah jenis kayu Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swetenia macropila*), Gamelina (*Gemelina arboria*), Berora (*Kleinbovia hospital*), Beru (*Garuga floribundadence*), Dadap (*Erythrina ssp*), Kesambi (*Scleicera olesa*), Ketimis (*Protium javanicum Burma*), Kukin (*Schoutenia obstacle Kurtz*)

[27] Berdasarkan (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB dan (2) Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 522/386/PH-Dislhk/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penunjukan Sementara Kepala KPHP ada perubahan nama dari KPHP Unit IX Batulateh menjadi BKPH Puncak Ngengas Batulanteh (BKPH Pucak Ngengas Batulanteh (KPHL Unit VIII Puncak Ngengas dan KPHP Unit IX Batulanteh).

[28] Sesuai SK Menteri Kehutanan No. 342/Menhut-II/2011.

memiliki potensi sebesar 48.000 m3/ tahun. Sedangkan potensi kayu pada hutan lindung terdiri dari jenis-jenis kayu Bungur (*Lagerstromia speciosa*), Kelapan/Jabon (*Arthocephalus cadamba*), Rapat Bewe (*Drypetes longifolia*), Binong (*Tetramales Sp*), Rajumas (*Duabanga moluccana*), dan Suren (*Toona sureni*), Prek Mayung (*Tengkawang*). Bulu Bawi (*Palaquium micropyum*), Kayu Batu (*Alstonia spectabillis*), Kemiri (*Aleurites moluccana*), Kesi (*Canarium oleosum*), Bengkal (*Neuclea orientalis*), Binong (*Tetrameles nudiflora*), Buapuin (*Dyosxylum claulostachyum*), Bulu Ayam (*Palaquium micropyum*), Dangar (*Gossampinus malabarica*) dan Doat (*Eugenia luminii*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Jenis hasil hutan bukan kayu unggulan yang dihasilkan KPHP Unit XII Batulanteh tiap tahunnya adalah 200 ton rotan, 500 ton Kemiri, 340,2 liter Madu Trigona, 533.6 Ton Kopi, 20 ribu liter madu hutan, 350 liter kayu putih, 0,67 ton Sereh wangi, 25 liter biji Keruing atau Tengkawang. Sayangnya belum ada inventarisasi berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan produk unggulan hasil hutan bukan katyu tersebut.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan KPHP Unit XII Batulanteh diantaranya pemasok sumber air bagi PDAM wilayah Kabupaten Sumbawa, potensi wisata alam Air Terjun dan Kolam Pemandian Samongkat, desa wisata madu di Desa Batudulang, wisata tracking, *camping ground*, dan jalur *offroad* motor sangat potensial untuk dikembangkan. ✣

Potensi
HHBK Kemiri
Sumber foto: MFP3

Pengolahan Minyak
Kayu Putih.
Sumber foto: MFP3

Komoditas Kopi,
Masyarakat Desa Batudulang
Sumber foto: MFP3

Landscape Kawasan
KPH Sejorong
Sumber foto: KPH Sejorong

26. KPHP UNIT V SEJORONG, NTB

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit V Sejorong[29] termasuk wilayah Kecamatan Maluk dan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luasnya mencapai 40.988 ha[30] yang terbagi kedalam kawasan Hutan Lindung seluas 15.762 ha, Hutan Produksi seluas 5.274 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 19.952 ha.

Jumlah desa yang termasuk kedalam wilayah KPHP Unit V Sejorong terdiri dari 13 desa[31] dengan jumlah penduduk sekitar 20.664 jiwa, dengan jumlah laki-laki 10.690 jiwa dan perempuan 9.974 jiwa.

Aksesibilitas di Kabupaten Sumbawa Besar relatif telah dapat menjangkau seluruh wilayah KPHP Unit V Sejorong, namun kondisi jalan masih sebagian besar berupa tanah dan kerikil tanpa pengerasan. Akses ke dalam wilayah KPKH cukup beragam, ada beberapa titik wilayah harus ditempuh melalui jalan setapak hingga jalan yang diperkeras.

[29] Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB dan 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 522/386/PH-Dislhk/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penunjukan Sementara Kepala KPHP ada perubahan nama dari KPHP Unit V Sejorong menjadi BKPH Sejorong Mataiyang Brangrea (KPHP Unit V Sejorong , KPHL Unit VI Matayang dan KPHL Unit Brang Rea).

[30] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 963/Menhut-II/2013.

[31] Desa-desa tersebut adalah Desa Sekongkang, Sekongkang Atas, Tongo, Ai Kangkung, Tatar, Talongan Baru, Pers Kemuning, UPT Tango II SP 2, Maluk, Benete, Bukit Damai, Mantun dan Pasir Putih.

Budidaya Lebah Trigona
Sumber foto: KPH Sejorong

Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu pada KPHP Unit V Sejorong berasal dari kawasan hutan produksi dengan hasil produksi kayu pada 2012 mencapai 35.211,55 m^3 .

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis unggulan yang dihasilkan KPHP Unit V Sejorong tiap tahunnya (2012) adalah 100 ton rotan, 12 ton kemiri, 120 liter madu hutan, 56 ton porang, 4000 batang bambu, 150 kilogram aren, dan 30 ton liana. Pengelolaan hasil hutan bukan kayu tersebut telah melibatkan 128 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan untuk kegiatan wisata alam pada KPHP Unit V Sejorong ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan yaitu wisata alam pantai dan laut. ✣

Jasa Lingkungan Sangiang
Sumber foto: KPH Maria Donggomassa

27. KPHP UNIT XXIII MARIA DONGGOMASSA, NTB

a. Gambaran Wilayah

Luas keseluruhan wilayah kerja KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa[73] adalah 27.632 ha[74] terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 8.515 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 14.563 ha dan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 4.554 ha yang tersebar pada 5 (lima) Kelompok Hutan (KH), yaitu : 1) KH Maria (RTK 25), 2) KH Tololai (RTK 24), 3) KH Tolowata (RTK 23), 4) KH Nanganae Kapenta (RTK 68) dan 5) KH Puau Sangiang (RTK 86). Wilayah kelola KPHP Maria secara geografis terletak meliputi 2 (dua) Kabupaten, yaitu; kabupaten Bima yang terdiri dari 4 Kecamatan (Ambalawi, Wera, Wawo, Sape) dan Kota Bima yang terdiri dari 3 Kecamatan (Asakota, Rasnane Timur dan Mpunda).
KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa dikelilingi sekitar 25 desa yang tergabung dalam 7 kecamatan. Jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggal di sekitar hutan KPHP sebesar 197.818 orang atau 168 orang/km2.

Wilayah KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa merupakan kawasan hutan yang terpencar kedalam 5 kelompok hutan, yaitu: 1) KH Maria (RTK. 25), 2) KH Tololai (RTK. 24), 3) KH Tolowata (RTK. 23), 4) KH Nanganae kapenta (RTK. 68), dan 5) KH Pulau Sangiang (RTK. 86) dapat dikategorikan sebagai kawasan yang memiliki aksesibilitas tinggi karena sudah tersedia sarana dan prasarana transportasi darat dan laut berupa jalur laut, jalan aspal, dan jalan sirtu serta sudah tersedia

[73] Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016 tgl 27 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB, Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 522/386/PH-Dishk/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penunjukan Sementara Kepala KPHP ada perubahan nama dari KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa menjadi menjadi BKPH Maria Donggomassa.

[74] Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 752/Menhut-II/2012.

angkutan umum. Semua dapat ditempuh dan laut. Kondisi jalan akses menuju pinggir batas kawasan hutan sebagian besar berupa jalan sirtu dan jalan tanah serta sebagian kecil berupa jalan aspal yang dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4.

a. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi rata-rata keseluruhan jenis pohon pada hutan produksi di KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa memiliki volume rata-rata 32,00 m3 /ha dengan jumlah pohon 78 batang. Diseluruh hutan produksi dan hutan produksi terbatas, potensi HHK berada dalam kelas rendah dan sedang kecuali sebagian kecil di kelompok hutan maria yang memiliki potensi tinggi seluas 2.643,7 ha. Hal tersebut menunjukan bahwa hutan produksi sudah dalam kondisi yang sangat tidak baik.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa, tiap tahunnya menghasilkan 976 kilogram kemiri dan 15 hingga 50 ton madu hutan.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan yang ada di kawasan KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa yaitu pemandangan alamnya yang bagus dan indah sehingga memiliki potensi sebagai tempat wisata alam dan lintas alam seperti bukit-bukit yang terbuka memiliki keindahan panaroma alam, puncak gunung api, teluk dan wisata budaya. ✣

Jasa Lingkungan Pulau Ular
Sumber foto: KPH Maria Donggomassa

Potensi Jasa Lingkungan
Air terjun Bidadari
Sumber foto: KPH Tambora Utara

28. KPHP UNIT XVIII TAMBORA UTARA, NTB

a. Gambaran Wilayah

Luas Kawasan Hutan Tambora yang keseluruhan wilayahnya masuk dalam wilayah kerja KPHP Unit XVIII Tambora Utara[77] seluas 62.602,01 ha[78] . Kawasan hutan ini terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 9.916,90 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 20.467,76 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 32.217,35 ha yang semuanya terletak pada Kelompok Hutan (KH) Tambora. Wilayah kelola KPHP Unit XVIII Tambora Utara seluas 31.812,30 ha berada di Kabupaten Bima dan 30.789,71 ha di Kabupaten Dompu, yang tersebar pada 6 kecamatan dan 25 desa[79] . memiliki batas-batas geografis sebagai berikut : Kawasan KPHP Unit XVIII Tambora Utara bisa dijangkau dengan kendaraaan roda empat dan infrastruktur jalannya telah terhubung antara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi rata-rata keseluruhan jenis hasil hutan kayu pada KPHP Unit XVIII Tambora Utara bagian utara, berdasarkan hasil inventarisasi KPHP pada 2014 kurang dari 54,66 m3/ha dengan jumlah pohon 68 batang. Jenis-Jenis pohn yang mendominasi antara lain Maladi (*Laportea peltata Gaud.*), Kayu Putih (*Eucalyptus sp.*), Wuampu'u

[77] Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016 tgl 27 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB, Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 522/386/PH-Dislhk/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penunjukan Sementara Kepala KPHP ada perubahan nama dari KPHP Unit XVIII Tambora Utara menjadi BKPH Tambora.

[78] Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 2842/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Tambora.

[79] Batas geografi kawasan ini sebelah utara dan barat berbatasan dengan: Laut Flores, sebelah Selatan dengan Teluk Saleh , sebelah timur dengan kawasan Cagar Alam Tambora.

(*Dysoxylum caulostachyum*), Rame (nama lokal), Dantadolo (*Terminalia sp.*), Ni'u (nama lokal) dan penik (nama lokal).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XVIII Tambora Utara tiap tahunnya menghasilkan75 ribu ton rotan, 50 ton kemiri, dan 3 ton madu hutan. Kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini telah melibatkan sekitar 800 keluarga.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan dikawasan KPHP Unit XVIII Tambora Utara dimulai dari hamparan berbagai bukit, termasuk puncak Tambora sampai dengan beberapa aliran dan beberapa titik air terjun, merupakan sebuah potensi wisata alam yang dapat dikembangkan secara profesional, termasuk pula jalur pendakian menuju kawasan cagar alam dan puncak Tambora. Selai itu, BKPH Tambora juga memiliki potensi pengembangan jasa lingkungan melalui penyediaan air dan cadangan karbon yang cukup besar terutama pada blok hutan lindung inti. ✣

Potensi Madu Hutan (Pohon Owo)
Sumber foto: KPH Tambora Utara

Kawasan KPH
Sumber foto:
KPH Madapangga Rompu

29. KPHP UNIT XX MADAPANGGA ROMPU, NTB

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XX Madapangga Rompu[92] terletak di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas KPHP mencapai mencapai 46.687,02 ha[93] , yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 19.277,18 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 15.060,36 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 12.349,48 ha yang semuanya terletak pada Kelompok Hutan (KH) ToffoRompu (RTK. 65). Kecamatan yang melingkari kawasan ini, meliputi; Kecamatan Madapangga, Kecamatan Bolo, Kecamatan Monta, Kecamatan Parado, dan Kecamatan Woha. Berdasarkan hasil identifikasi, wilayah kelola KPHP Tipo Pajo Madapangga Rompu Kabupaten Bima berbatasan dengan 29 29 desa. PenyebarJumlah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk 166.149 jiwa

KPHP bisa dijangkau menggunakan akses darat atau jalan. Semua desa terhubung oleh jalan dengan transportasi kendaraan roda dua dan empat. Melalui pendekatan pembangunan fisik yang telah dilaksanakan sejak lama, infrastruktur jalan di Kabupaten Bima telah terhubung di hampir seluruh wilayah. Wilayah kelima kecamatan juga sudah terhubung dengan ibukota kabupaten dengan kondisi jalan beraspal.

[92] Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016 tgl 27 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB, Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 522/386/PH-Dislhk/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penunjukan Sementara Kepala KPHP ada perubahan kelembagaan nama KPHP dari KPHP Unit XX Madapangga Rompu menjadi BKPH Tifo pajo Madapangga Rompu Waworada (Unit XX).

[93] Berdasarkan SK Nomor 337/Menhut-VII/2009 Tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah disesuaikan pada Peta Tata Batas adalah

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu rata-rata keseluruhan jenis vegetasi pada KPHP Unit XX Mandapangga Rompu Kabupaten Bima berdasarkan hasil enumerasi BPKH Tahun 2015 adalah kurang dari 57, 32 m3 /ha dengan jumlah pohon 106 batang. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat pada wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima (BPKH, 2015), antara lain jenis-jenis seperti kemiri (*Aleurites moluccana*), asam (*Tamarindus indica*), lada (*Piper albi*), rotan (*Daemonorops sp.*), dan ketak (*Lygodium sp.*).

2 Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XX Mandapangga Rompun tiap tahunnya

Potensi HHBK Rotan
Sumber foto:
KPH Madapangga Rompu

menghasilkan 8611 ton kemiri, 2500 liter madu hutan, kemiri, 3000 batang bambu, 1883 ton rotan per tahun. Banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolan hasil hutan bukan kayu ini. Sekitar 3120 keluarga terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

KPHP Unit XX Madapangga Rompu memiliki potensi pengembangan jasa lingkungan melalui penyediaan air, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa bendungan yang ada di sekitar kawasan KPHP Madapangga Rompu yang mana sumber air berasal dari dalam kawasan. Selain itu, cadangan karbon yang cukup besar terutama pada blok HL Inti memiliki potensi yang besar untuk masuk dalam skema pengelolaan KPH. ✣

Potensi Jasling Wisata
Danau Laut Mati
Sumber foto:
KPH Rote Ndao

30. KPHP UNIT XVI ROTE NDAO, NTT

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XVI Rote Ndao[101] terletak menyebar pada 8 kecamatan[102] di Kabupaten Rote Ndao dengan luas wilayah 40.595 ha[103] yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 15.978 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 24.617 ha. Masyarakat di sekitar KPHP Unit XVI Rote Ndao bermata pencahariannya sebagian besar adalah bertani.

Akses ke kawasan KPHP Unit XVI Rote Ndao bisa dilakukan dari ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten (Ba'a) yang berjarak 33 km dilewati melalui jalur darat, menggunakan kendaraan umum roda empat maupun kendaraan roda dua. Selain itu jalan yang menghubungkan antara Ba'a dengan Olafuliha'a bisa dilewati oleh kendaraan roda empat pengangkut barang.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan kayu di KPHP Unit XVI Rote Ndao terdiri dari 3 kelompok pohon yakni kelompok Rimba Campuran, kelompok Mahoni dan kelompok Jati.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XVI Rote Ndao tiap tahunnya menghasilkan 96.768 liter aren/lontar, 67 liter kayu putih, 420 liter madu hutan. Pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini telah melibatkan 2.325 keluarga. ✣

[101] Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ,Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit XVI Rote Ndao menjadi KPH Wilayah kabupaten Rote Ndao (unit XVI).

[102] Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat.

[103] Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK. 333/Menhut-II/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang penetapan wilayah KPHP Unit XVI Rote Ndao memiliki.

31. KPHP UNIT I MANGGARAI BARAT, NTT

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit I Manggarai Barat[94] terdiri dari kawasan Hutan Lindung (HL) sekitar 27.113 ha, Hutan Produksi (HP) luas sekitar 18.163 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) luas sekitar 14.571 ha.

Wilayah KPHP Unit I Manggarai Barat memili batas kawasan: Sebelah utara Desa Nggilat - Kecamatan Macang Pacar, sebelah selatan Desa Nanga Bere - Kecamatan Lembor Selatan, sebelah barat Desa Golo Mori - Kecamatan Komodo dan sebelah timur Desa Tentang Kecamatan Ndoso. Sebagian besar wilayah KPHP Unit I Manggarai Barat didominasi oleh aksesibilitas yang rendah. Kelas aksesibilitas ditentukan berdasarkan kedekatan dengan jalan atau pemukiman, dimana, semakin dekat dengan jalan atau perumahan maka tingkat aksesibilitasnya tinggi.

a. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH Wilayah IV Kupang menunjukkan bahwa potensi rata-rata kayu di KPHP Unit I Manggarai Barat adalah sebesar 92 m3/ha. Jenis – jenis yang dominan adalah Rukus, Ruteng, Beringin, Sema, Mukuta'a, Mukute'e, Namut, Pante, Lokom, Dingar. Selain itu ada pula jati, mahoni, gmelina, sengon lokal dan jabon.

[94] Berdasarkan 1. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit I Manggarai Barat Menjadi KPH Wilayah kabupaten manggarai Barat (unit I).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit I Manggarai Barat tiap tahunnya menghasilkan hasil hutan bukan kayu tiap tahunnya mencapai 2,1 ton pinang dan 100 hinga 4100 ton kemiri.

3. Jasa Lingkungan
Jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan antara lain adalah sebagai penyerap karbon, penyedia oksigen dan sebagai daerah tangkapan air. ✣

32. KPHP UNIT XVIII DAN KPHPL UNIT XIX KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu[32] termasuk kedalam 55 desa di 5 Kecamatan[33] di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduk total di kelima kecamatan tersebut sebanyak 42.495 jiwa. Luasnya KPHP ini mencapai 458.025 ha[34] yang terdiri dari hutan lindung seluas 224.522 ha, hutan produksi 83.241 ha dan hutan produksi terbatas seluas 150.262 ha.

Untuk mencapai KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu dapat ditempuh melalui Ibukota Kabupaten Kapus Hulu ke arah Ibukota Kecamatan dan menuju ke unit-unit KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu menuju desa dengan menggunakan transportasi air dan sebagian transportasi darat.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi hasil hutan kayu pada kawasan KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu hasil inventarisasi pada 2013 bervariasi mulai dari 117,30 m3/ha sampai 225,20 m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu tiap tahunnya adalah 1.122.280 bambu, 108 ton madu hutan, 2.985,8 ton karet. Jumlah masyarakat yang telah terlibat dalam

[32] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 135 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KPHP Wilayah Kapuas Hulu Selatan Provinsi Kalimantan Barat , Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 136 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KPHP Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalimantan Barat , Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 137 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KPHP Wilayah Kapuas Hulu Utara Provinsi Kalimantan Barat bahwa KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu terbagi kedalam 3 KPH yaitu KPH Kapuas Hulu Selatan, KPH Kapuas Hulu Timur dan KPH Kapuas Hulu Utara

[33] Lima kecamatan dalam wilayah KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu yaitu Kecamatan Badau, Batang Lumpur, Embaloh Hulu, Embaloh Hilir dan Putussibau Utara.

[34] Sesuai Surat Keterangan Menteri Kehutanan No. 380/Menhut-II/2011.

mengelola hasil hutan bukan kayu ini hanya untuk komoditas karet saja berjumlah 4079 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu adalah menjadi koridor satwa Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Hal ini tentunya akan bisa dijadikan sebagai bahan dasar pengembangan ekowisata di kawasan KPHP Unit XVIII dan KPHPL Unit XIX Kapuas Hulu. ✣

33. KPHP UNIT X SUNGAI MERAKAI, KALIMANTAN BARAT

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit X Sungai Merakai memiliki luas 268.912 ha , yang terbagi dalam fungsi kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi. Wilayah KPHPP ini meliputi 5 wilayah Kecamatan dan 37 Desa. Masyarakat sekitar KPHP unit X Sungai Merakai sebagian besar merupakan kelompok masyarakat adat. Jumlah penduduk di wilayah KPHP Unit X Sungai Merakai jumlahnya 34.933 jiwa sekitar 50,87 persennya adalah laki-laki, sisanya adalah perempuan. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor kehutanan, kebun dan usaha dagang, ladang berpindah untuk padi dan tanaman semusim lainnya dengan sistem tebas bakar merupakan cara umum dilakukan. Perlandangan berpindah dilakukan di hutan temasuk dalam areal KPHP Unit X Sungai Merakai.

KPHP Unit X Sungai Merakai bisa dijangkau dari Pontianak ke Kabupaten Sintang, menggunakan roda empat, ataupun pesawat terbang dengan dua maskapai penerbangan dari Pontianak ke Sintang dengan jarak tempuh ± 40 menit, sedangkan untuk kendaraan roda empat ditempuh dengan waktu ± 9 jam, dari Kabupaten Sintang menuju kecamatan Ketungau Tengah dapat menggunakan jalur sungai dengan waktu tempuh ± 4 jam dan jalur darat dengan waktu tempuh 5 jam.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu kelompok jenis lain memiliki volume 61,69 m3/ha, Kelompok Kayu rimba Campuran (Komersial Dua) memiliki volume 19,86 m3/ha, Kelompok Kayu Indah Dua dengan volume 7,71 m3/ha, dan terakhir yang paling sedikit adalah Kelompok Kayu Dilindungi dengan volume 3,48 m3/ha. Secara umum dalam kawasan KPHP Unit X Sungai Merakai terdapat kekayaan hutan non kayu.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi dan produksi hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit X Sungai Merakai, tiap tahunnya menghasilkan 300 ton gaharu, 100 kilogram madu, dan 300 ton tengkawanng. Sekitar 805 keluarga masyarakat sekitar KPHP yang dilibatkan dalam pengelolan hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan di wilayah KPHP unit X Sungai Merakai yaitu Sumber air bersih bagi masyarakat dan beberapa air terjun. Selain itu, Kabupaten Sintang memiliki potensi obyek wisata alam berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan sejarah/keunikan yang belum terpublikasikan secara optimal. Keseluruhan potensi obyek wisata alam mini merupakan sumberdaya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. ✣

Potensi Jasling Air terjun Suling Tambun
Sumber foto: KPH Seruyan

34. KPHP UNIT XXI SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XXI Seruyan terletak di Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah KPHP Unit XXI Seruyan memiliki luas wilayah KPHP lebih kurang 373.909 ha[80] . Dari luasan wilayah KPHP Unit XXI Seruyan tersebut terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 38.970 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 6.112 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 328.827 ha.

Aksesibilitas menuju wilayah KPHP Unit XXI Seruyan bisa ditempuh dari ibukota Kabupaten Seruyan ke Kantor KPHP Unit XXI Seruyan di Tumbang Manjul dengan jalur darat (Roda 2 maupun roda 4) maupun jalur sungai (Speedboat, Klotok) dengan jarak sekitar 410 km dan lama waktu tempuh sekitar 12 jam, selanjutnya menuju Kecamatan Suling Tambun dapat ditempuh dengan jalur darat (Roda 2 maupun roda 4) maupun jalur sungai (klotok) dengan jarak sekitar 35,19 km.

Adapun jumlah kecamatan yang ada disekitar kawasan sejumlah 2 kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. Berdasarkan hasil Sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Seruyan pada tahun 2014, Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Seruyan Hulu terdapat 20 desa dengan jumlah penduduk sebesar 11.550 jiwa

[80] Telah ditetapkan pembentukannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK. 716/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Potensi HHBK Rotan
Sumber foto:
KPH Seruyan

dengan kepadatan penduduk 3,54 jiwa/km2. Sedangkan pada Wilayah Kecamatan Suling Tambun terdapat 9 desa dengan jumlah penduduk sebesar 3.273 jiwa dengan kepadatan penduduk 2,21 jiwa/km2.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan kayu di KPHP Unit XXI Seruyan yaitu potensi kayu, dilihat dari luas dan sebarannya, dimana kerapatan masih relatif tinggi dan di dominasi sebaran kelas 50 up (rimba campuran) pada hutan lindung dan sebaran kelas 20 – 29 (rimba campuran) pada hutan produksi. Sebaran potensi kayu yang ditemukan adalah bangkirai, kapur, keruim, kulim, melapi, meranti kuning, meranti merah, meranti putih, merawa, nyatoh dan resak. Kayu indah/ kayu yang dilindungi : cempaka, sindur, ulin, jelutung, mageris dan tengkawang.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXI Seruyan Utara tiap tahunnya menghasilkan 400 liter madu hutan dan 150 ton tengkawang. Sayangnya belum terdata berapa jumlah keluarga yang terlibat dalam pengelolaan produk ini.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan hutan (*forest environmental services*) seperti sebagai lokasi *Demontration Activity Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (DA-REDD) karena memiliki potensi hutan yang baik dan debit air yang relatif stabil. Selain itu, kawasan KPHP Unit XXI Seruyan juga memiliki potensi sebagai pengatur tata air hulu untuk menjaga kestabilan hidrologi. Selanjutnya potensi sumber daya sungai, air terjun dan jeram yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata air dan hutan yang masih lebat dan memiliki pemandangan yang indah dapat dijadikan kawasan ekowisata dan wisata alam. ✣

Kerajinanan anyaman rotan
Sumber foto: KPH Gunung Mas

35. KPHP UNIT XVI GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XVI Gunung Mas[83] meliputi 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi : Kecamatan Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa, yang luasnya mencapai 294.735 ha[84] , yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 57.337 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas187.291 ha, dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 50.107 ha. Jumlah penduduk yang berada di sekitar wilayah KPHP ini mencapai 22.923 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 296 jiwa/ km2.

Jaringan jalan di wilayah kelola KPHP Unit XVI Gunung Mas masih terbatas, jaringan jalan yang sudah dibangun adalah jalan angkutan kayu bulat (log) milik pemegang IUPHHK-HA. Kondisi fisik jalan sebagian besar jalan tanah yang hanya ditaburi kerikil atau batu split. Dengan kondisi jalan darat yang belum berkembang dengan baik, maka masyarakat masih menggunakan alat transportasi mengunakan transportasi sungai yaitu perahu dan perahu motor (klotok).

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil survei Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Unit XVI Gunung Mas Tahun 2015, lebih dominasi oleh pohon berdiameter 30–49 cm, sebanyak 52 jenis pohon yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yakni kelompok meranti, kelompok rimba campuran, dan kelompok kayu indah.

[83] Berdasrkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017 Tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Nama KPHP ini KPHP XVI Gunung Mas. Setelah pemberlakukan UU tentang pemerintahan daerah namanya berubah menjadi KPHP Kahayan Hulu (unit XV dan XVI).

[84] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.965/Menhut-II/2013.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XVI Gunung Mas tiap tahunnya menghasilkan 50 kilogram damar, 10 kilogram sarang semut, 20 liter madu hutan, 100 kilogram jahe merah. Sekitar 45 keluarga terlibat dalam pengelolaaan hasil hutan bukan kayu ini.

3. Jasa Lingkungan
Wilayah kelola KPHP Unit XVI Gunung Mas ini terdapat areal kawasan hutan yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, misalnya pengembangan penangkaran burung kuau raja/ merak kerdil (Haruei), lebah madu, getah jernang, sarang burung walet, sarang semut dan tanaman obat-obatan, serta juga pengembangan wisata budaya seperti masyarakat adat. Selain itu juga dapat dikembangkan potensi wisata alam lainnya seperti air terjun dan arung jeram. ✣

Budidaya Jahe Merah
Sumber foto:
KPH Gunung Mas

Potensi Hasil hutan Kayu
Sumber foto:
KPH Gunung Mas

Wisata Pemandian Air
Sumber foto:
KPH Kotawaringin Barat

36. PKPHP UNIT XXII DAN XXVI KOTAWARINGIN BARAT, KALIMANTAN TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah kelola KPHP Unit XXII dan XXVI Kotawaringin Barat[89] tersebar di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Utara, Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kumai. Luas adalah 316.135 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 9.672 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 49.303 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 257.160 ha.

Akses menuju Wilayah KPHP Unit XXII dan XXVI Kotawaringin Barat dapat dituju dengan menggunakan jalur darat dan udara dari Palangkaraya untuk sampai ke ibukota kabupaten (Pangkalan Bun). Dari Pangkalan Bun ke lokasi Wilayah Kelola KPHP Unit XXII dan XXVI Kotawaringin Barat, dapat menggunakan jalur darat (selama 3 – 4 jam) dan jalur air (selama 3,5 – 4 jam).

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di wilayah KPHP Unit XXII dan XXVI Kotawaringin Barat relatif rendah, hal ini karena banyaknya perambahan di areal tersebut, yang mana di sekitar hutan tersebut banyak area yang berubah fungsi menjadi perkebunan, semak belukar, pertambangan, dan lahan terbuka. Tegakan di wilayah KPHP Unit XXII dan XXVI Kotawaringin Barat di dominasi oleh pohon yang berdiamater dibawah 40 cm sementara untuk pohon yang berdiameter diatas 40 cm relatif lebih sedikit.

[89] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017 Tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ada perubahan nama dari KPHP Unit XXII dan XXVI Kota Waringin Barat menjadi KPHP Kota waringin Barat.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXII dan XXVI Kota Waringin Barat tiap tahunnya menghasilkan 900 kilogram aren.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan pada KPHP Unit XXII dan XXVI Kotawaringin Barat, yang terdiri dari jasa aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan lingkungan, penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan wisata alam. ✣

Pohon Induk Pakit
Sumber foto:
KPH Kotawaringin Barat

Potensi Jasling Rusa Sambar
Sumber foto:
KPH Lamandau

37. KPHP UNIT XXIII LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah kelola KPHP Unit XXIII Lamandau[90] meliputi 7 kecamatan dari 8 Kecamatan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. KPHP ini memiliki luas 226.289 ha[91] . Berdasarkan fungsi kawasan hutannya KPHP Unit XXIII Lamandau memiliki luasan Hutan Produksi Terbatas seluas180.951 ha, Hutan Lindung seluas 25.432 ha, dan Hutan Produksi seluas 19.906 ha.

Desa-desa di ssekitar di sekitar kawasan KPHP pada umumnya berada di luar kawasan, dari 27 desa hanya 2 desa yang berada di dalam kawasan KPHP yaitu Desa Bintang Mengalih Dan Desa Petarikan. Mata pencaharian penduduk yang ada di wilayah KPHP pada umumnya adalah petani ladang berpindah atau sebagai karyawan perusahaan sawit. Potensi jasa lingkungan terbesar diperkirakan berasal dari kegiatan ekowisata yang memadukannya dengan Budaya Dayak khas Kabupaten Lamandau dan juga beberapa wisata.

Kantor KPHP Unit XXIII Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Waktu tempuh dari Palangkaraya, Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ke wilayah KPHP Unit XXIII Lamandau selama 12 jam dengan jarak tempuh sekitar 480 Km menggunakan kendaraan bermotor (jalur darat).

[90] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017 Tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan.

[91] Unit XXIII Lamandau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.717/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember.

Jasling Riam Tapin Bini
Sumber foto:
KPH Lamandau

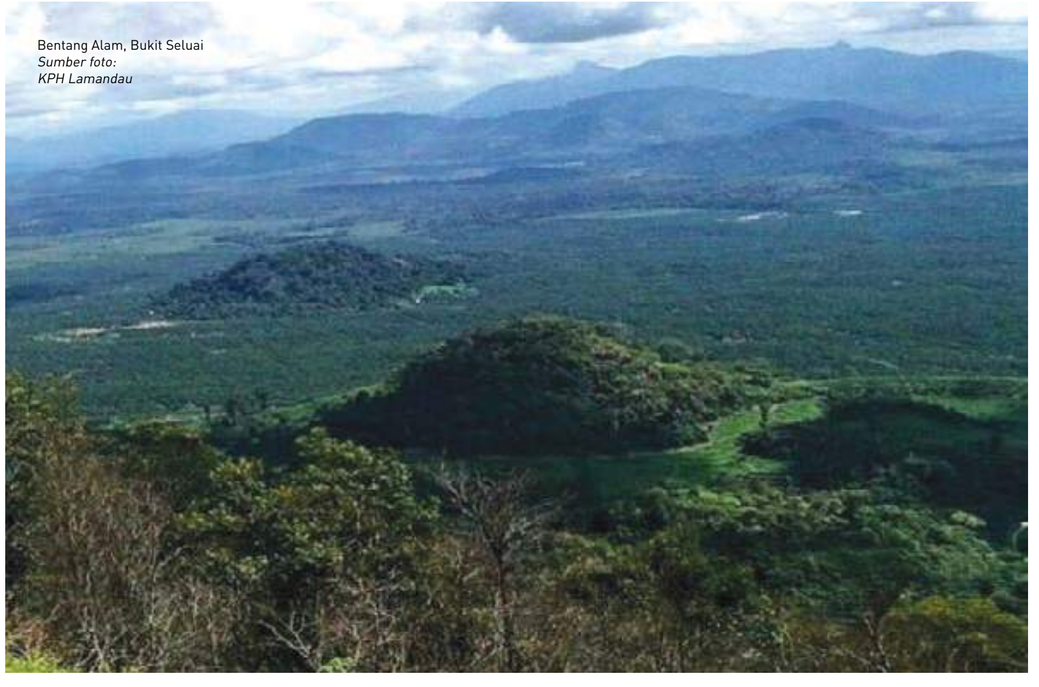

Bentang Alam, Bukit Seluai
Sumber foto:
KPH Lamandau

a. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Sukamara-Lamandau Tahun 2015 menunjukkan, pada 24 sampel plot, menemukan bahwa potensi kayu yang dimiliki oleh KPHP Unit XXIII Lamandau berupa jenis-jenis tegakan/pohon yang memiliki diameter ≥20 cm umumnya didominasi oleh jenis Meranti (*Shorea sp*), Keruing (*Dipterocarpus*), Jambu-jambuan (*Eugenia sp*), Ubar (*Eugenia sp*), resak (*Vatica subcerdata Ball*), Medang (*Alseodaphne sp*), Lempung (*Shorea sp*) dan Banitan (*Polyalthia sp*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXIII Lamandau, KPHP Unit XXIV, dan JPHP XXV tiap tahunnya menghasilkan 300 kilogram damar, 600 ton rotan, 100 liter madu hutan, 235 batang bambu, 60 ton jahe merah, 100 ton jengkol dan 1 ton pasak bumi. Sekitar 690 keluarga terlibat dalam pengelolan asil hutan bulan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan terbesar diperkirakan berasal dari kegiatan ekowisata yang memadukannya dengan Budaya Dayak khas Kabupaten Lamandau dan juga beberapa wisata. ✣

Potensi Air Terjun Kohang Poran
Sumber foto: KPH Murung Raya

38. KPHP UNIT II MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit II Murung Raya[108] meliputi 29 desa dan 10 wilayah kecamatan di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah kelola KPHP ini adalah 908.255 ha[109] , yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 103.578 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 598.948 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 205.729 ha.

Wilayah KPHP Unit II Murung Raya dapat dicapai dengan 2 sarana transportasi yaitu melalui transportasi darat (jalan) atau transportasi sungai (perahu motor). Jalan darat terdiri atas dua jenis jalan yaitu: jalan negara dan jalan bekas HPH atau tambang. Jalan negara yang juga sebagian besar berasal dari jalan bekas HPH yang sudah beraspal atau cor beton dapat dipergunakan untuk mencapai wilayah barat dari KPHP, sedangkan jalan bekas HPH (jalan tanah dan setapak) digunakan untuk mencapai wilayah tengah dan timur KPHP. Bila melewati jalur sungai maka harus melewati DAS Barito yang memiliki 10 Sub DAS yaitu Sungai Malu, Sungai Murung, Sungai Landaun, Sungai Laung, Sungai Maruwei, Sungai Bumban, Sungai Tuhup, Sungai Tapanuh, Sungai Burak dan Sungai Joloi. Berdasarkan parameter tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar areal KPHP sulit dijangkau baik dengan menggunakan jalan sungai maupun darat.

[108] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017 Tanggal 7 April 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit II Murung Raya menjadi KPHP Murung raya (Unit I dan II).

[109] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK.964/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di wilayah kelola KPHP Unit II Murung Raya hasil survei Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Unit II Murung Raya Tahun 2015, teridentifikasi jenis pohon/vegetasi sebanyak 72 jenis yang terdiri dari Kelompok Meranti 15 jenis, Kelompok Rimba Campuran 53 jenis dan Kelompok Kayu Indah 4 jenis.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit II Murung Raya, tiap tahunnya menghasilkan 900 ton karet.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan yang saat ini dikembangkan yaitu peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap listrik dari sumber energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan penyediaan air bersih. Sedangkan potensi jasa lingkungan yang belum dioptimalkan adalah cadangan karbon hutan tersimpan yang melimpah untuk perdagangan karbon (*carbon trade*), panorama bukit/pegunungan, riam-riam sungai untuk wisata arung jeram dan air terjun alami sebagai potensi ekowisata (*ecotourism*). ✣

Kegiatan Pemadaman Kebakaran
Sumber foto: KPH Murung Raya

Panen Umbi Tanaman Porang
Sumber foto: KPH Banjar

39. KPHP UNIT I BANJAR, KALIMANTAN SELATAN

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit I Banjar[35] terletak di Kabupaten Banjar Bagian Hulu, meliputi 38 desa di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Peramasan Bawah, Sei Pinang, Pengaron, Sambung Makmur dan Telaga Bauntung. Jumlah penduduk di desa-desa ini mencapai 24.949 jiwa.Luas kawasannya mencapai 138.586,40 ha[36] yang terbagi dalam beberapa fungsi kawasan diantaranya Hutan Lindung seluas 40.719,4 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 25.354 ha dan Hutan Produksi Tetap seluas 72.513 ha.

Jalan akses menuju kawasan KPHP Unit I Banjar dapat diakses melalui beberapa pilihan jalur pada Kabupaten Banjar, diantaranya:

1) Dari bagian Barat mulai dari jalan trans Kalimantan (Jl Jend A. Yani km 68) dapat ditempuh melewati jalan Simpang Empat, Desa Sungaijati, Desa Sukarame, Desa Maniapun dengan jarak sekitar 110 km dari Banjarmasin;
2) Melalui Sungkai, Desa Batubatian (Jl Jend A Yani km 76) – Dusun Madurejo –Baliangin – Panyiuran – Sungai Pinang dengan sekitar 120 km dari Banjarmasin;
3) Melalui Binuang (Jl Jend A Yani km 84,5) – Desa A Yanipura – Kembang Kuning – Hatungun –Tarungin – Asam Randah – Rampah dengan jarak sekitar 104 km dari Banjarmasin;

[35] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ada perubahan nama dari KPHP Unit I Banjar menjadi KPH Kayu tangi (KPHP Unit I Banjar).

[36] Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah KPH Unit I Banjar.

4) Melalui kota Rantau (Jl Jend A Yani km 113)- Desa Bungur - Desa Kelumpang - Desa Pantaimalang, Desa Linuh – Rantau bujur dengan jarak sekitar 135 km dari Banjarmasin.
5) Di bagian Utara dapat di akses melalui kota Kandangan (Jl Jend A Yani km 135) –Lumpangi – Batung-Paramasan bawah (Bancing) masuk kawasan hutan sekitar 170 km;
6) Selanjutnya dari arah Timur kawasan dapat diakses melalui Kota Batulicin – Paramasan Bawah dengan jarak sekitar 130 km.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

KPHP Unit I Banjar memiliki potensi hasil hutan kayu hasil identifikasi pada dua kelompok hutan yaitu kelompok hutan Sungai Pinang memiliki potensi kayu 142,375 m3/ha, sedangkan kelompok hutan Peramasan sebesar 41,270 m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit I Banjar tiap tahunnya mencapai 81.600 ton rotan, 6 ton kemiri, 104 ton kayu manis, 60 kilogram madu kelulut, 780 kilogram madu hutan, 1560 ton kunyit dan kencur, 5- 10 ton jahe merah. Pengelolaan hutan bukan kayu untuk produk unggulan kemiri, kayu manis, kunyit, kencur dan jahe merah telah melibatkan sekitar 170 keluarga. Pengelolan Madu kelulut dan madu hutan bahkan melibatkan warga satu desa, yaitu desa Alimukin.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan di KPHP Unit I Banjar diantaranya pemanfaatan sumber dan aliran air oleh masyarakat yang potensial dikembangkan, potensi jasa wisata alam dengan tersedianya air terjun dan jalur pendakian yang sangat potensial untuk dikembangkan. ✣

Potensi HHBK Kayu Manis
Sumber foto: KPH Banjar

Potensi Jasling Air Terjun Mandin Paninjauan
Sumber foto: KPH Banjar

Produk Komoditas HHBK unggulan KPH
Sumber foto: KPH Banjar

Gelar Adat dayak deah
Sumber foto: KPH Tabalong

40. KPHP UNIT V TABALONG, KALIMANTAN SELATAN

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit V Tabalong[104] tersebaar pada 28 desa dan 6 kecamatan di kabupaten Tabalong, yang luasnya mencapai 117.357 ha[105] dan terbagi menjadi Hutan Lindung (HL) seluas 48.776 ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 23.822 ha dan Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 44.759 ha. Jumlah desa di sekitar Adapun jumlah desa di sekitar wilayah kelola KPHP ini berjumlah 28 desa, dengan julah penduduk mencapai 239.590 jiwa, yang terdiri dari 121.660 jiwa penduduk laki-laki dan 117.930 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tabalong adalah Suku Banjar dan Dayak (Deah dan Lawangan) yang berprofesi sebagai petani lahan kering maupun petani lahan basah serta berkebun.

Aksesibilitas untuk mencapai kawasan KPHP unit V Model Tabalong dapat menggunakan sarana perhubungan darat dan air. Sebagian wilayah terdapat akses jalan seperti jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa maupun koridor-koridor perusahaan. Aksesibilitas yang sulit adalah pada kawasan hutan bagian utara yang berbatasan dengan Profinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

[104] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit V tabalong menjadi KPH Tabalong (unit V dan Unit X).

[105] Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.999/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang penetapan Wilayah KPHP Tabalong.

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di wilayah KPHP Unit V Tabalong, berdasarkan inventarisasi oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru pada strata hutan lahan kering sekunder yang dilakukan pada 12 titik sampel (plot) yang terletak di kecamatan Jaro. Jenis tegakan/pohon yang ditemui dalam plot tersebut terdiri dari jenis meranti, mahang, biwan, kayu lua, wayan, kemiri, babaris, balik angin, alaban dan bangkirai.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit V Tabalong tiap tahunnya menghasilkan 60 – 1.200 kilogram kopi Pasak Bumi dan 60-120 ton kemiri. Pengelolan hasil hutan bukan kayu telah melibatkan 80 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan pada KPHP unit V Model Tabalong antara lain, melalui kegiatan usaha diantaranya, pemanfaatan aliran air; pemanfaatan air; wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau dan / atau penyimpan karbon. ✣

Produk HHBK Kopi Pasak Bumi
Sumber foto: KPH Tabalong

Bibit Kayu Manis
Sumber foto: KPH Tanah bumbu

41. KPHP UNIT VI TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN

a. Gambaran Wilayah

KWilayah KPHP Unit VI Tanah Bumbu[116] meliputi 7 Kecamatan[117] di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Luasnya mencapai 253,726 ha[118] yang terbagi dalam fungsi-fusngsi hutan yaitu Hutan Lindung (HL) seluas 83,161ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 25,046 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 145,519 ha. Wilayah KPHP ini Tanah Bumbu terdiri dari 33 desa dengan jumlah penduduk mencapai 81.321 jiwa. Kabupaten Tanah Bumbu dengan ibukotanya Batulicin, terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak dari Kota Batulicin dari Ibukota Provinsi sejauh 262 km, yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama lebih dari 5 jam. Moda trasnportasi umum berupa Bis maupun mobil carter yang mudah diperoleh di Terminal Induk Pal 6 Banjarmasin. Moda lainnya berupa pesawat udara terjadwal satu kali penerbangan (*Wings Air*) setiap hari ke Banjarmasin dan Makassar. Kota Batulicin juga memiliki pelabuhan laut yang dapat melayani kapal penumpang dan kapal barang yang berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil survey yang dilakukan Tim BPKH V Banjarbaru menbununjukan potensi kayu di kawasan KPHP Unit VI Tanah Bumbu rata-rata 87,813 m3/ha. Adapun jenis yang di temui pada hutan alam didominasi oleh jenis dipterocarpaceae seperti Meranti (*Shorea spp*), Keruing (*Dipterocarpus sp*), pulai

[116] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ada perubahan nama KPH dari KPHP Unit VI Tanah Bumbu menjadi KPH Kusan Unit VI.

[117] Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Mentewe, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Simpang Empat.

[118] Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.624/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Desember 2015.

(*Alstonia spp*), Kapur (*Driobalanops sp*), Nyato h (*Palaquium spp*), Bangkirai (*Shorea laevis*), Balau (*Shorea eliptica*), Biwan (*Endertia spectabilis*), Merijang (*Sindora spp*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan banyak jenis kayu hutan alam lainnya. Sedangkan pada hutan tanaman hanya jenis akasia (*Accacia mangium*) sedikit ditemui Mahoni (*Switenia sp.*) dan Jati (*Tectona grandis*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XVI Rote Ndao tiap tahunnya menghasilkan 12 ribu kilogram kayu manis, 6000 kilogram kemiri dan 13.599 madu keulut. Ada sekitar 170 keluarga yang terlibat dalam pengelolaan hasil hutan buka kayu.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan yang umum berupa sumber-sumber air tanah sebagai bagian dari penyedia air bersih bagi masyarakat atau perusahaan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu saat ini berencana membangun bendungan pembangkit tenaga listrik dan pengairan (irigasi) di Sungai Kusan. Adapun wisata alam yang belum dikelola dengan maksimal seperti, air terjun, gua alam dan objek wisata alam lainnya. ✣

HHBK Kemiri
Sumber foto: KPH Tanah bumbu

Air Terjun Mandin Damar
Sumber foto: KPH Tanah bumbu

HHBK Kayu Manis
Sumber foto: KPH Tanah bumbu

Panen padi di KTH HKM Ingin Maju
Sumber foto: KPH Tanah Laut

42. KPHP UNIT VII TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit VII Tanah Laut[37] memiliki luasan 92.641 ha dan berada di 7 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yaitu Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, dan Kecamatan Tambang Ulang. Berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehutanan Nomor: SK.440/ Menhut-II/2012, luas KPHP Unit VII Tanah Laut meliputi Hutan Lindung (HL) dengan luas 15.862 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 71.490 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 5.289 ha.

Beberapa desa yang berada di kawasan KPHP Unit VII Tanah Laut antara lain, Desa Tanjung, Desa Sabuhur, Desa Asam-Asam, Desa Kintap, Desa Ambungan, dan Desa Sungai Bakar. Total penduduk yang tinggal di kawasan KPHP Unit VII Tanah Laut sebesar 293.333 jiwa.

Wilayah KPHP Unit VII Tanah Laut bisa diakses melalui adalah sebagai berikut,

a. Akses darat menuju KPHP Unit VII Tanah Laut menggunakan angkutan umum atau mobil atau kendaraan darat lainnya. Akses jalur darat dari Banjarmasin menuju Kabupaten Tanah Laut berkisar 1 jam 36 menit.
b. Terdapat bandara dan pelabuhan di Banjarmasin, sehingga akses menuju Kabupaten Tanah laut cukup mudah melalui jalur manapun.

[37] Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ada perubahan nama dari KPHP Unit VII Tanah Laut menjadi KPHP Unit VII Tanah Laut (KPHP Unit VII Tanah Laut).

Pelatihan Budidaya Jamur
Sumber foto: KPH Tanah Laut

Jasling Air Terjun Bajuin
Sumber foto: KPH Tanah Laut

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Kegiatan inventarisasi KPHP Unit VII Tanah Laut pada 3 plot di Kecamatan Bajuin, 3 plot di Kecamatan Batu Ampar, dan 3 plot di Kecamatan Kinta, didapatkan massa tegakan untuk semua jenis pohon pada seluruh sampel adalah 633,971 m3, dengan nilai volume rata-rata sebesar 70,441 m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit VII Tanah Laut per tahunnya adalah 1500 liter madu budidaya dan 150 kilogram jamur tiram. Keduanya melibatkan sekitar 170 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan dan wisata pada kawasan KPHP Unit VII Tanah Laut adalah sebagai sumber air bersih, wisata alam Gunung Keramaian, Goa Macan/ Liang Babau, Air Terjun Bajuin, dan Air Terjun Balangdaras. ✣

Aktifitas KPH Bongan
Sumber foto:
KPH Bongan

43. KPHP UNIT XXXII BONGAN, KALIMANTAN TIMUR

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XXXII Bongan[81] terletak dalam 3 wilayah Kabupaten, yaitu: Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Luasan KPHP ini mencapai 35.238,99 ha[82] , yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 31.952,24 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 135.229,65 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 165.948,20 ha, Hutan Produksi dapat Dikonversi seluas 2.108,90 ha.

Kegiatan utama perekonomian masyarakat di sekitar KPHP sebagian besar masih tergantung pada hutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada baik kayu maupun non kayu. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ladang, kebun sawit, pedagang, PNS, dan lain-lain. Perekonomian masyarakat khususnya yang posisi desa atau kampungnya jauh dari Kecamatan masih sangat memprihatinkan, sehingga masih perlu diperhatikan dan diberikan bantuan untuk meningkatkan perekonomiannyaAksesibilitas pada wilayah KPHP Unit XXXII Bongan yaitu melalui jalan darat. Semua desa/ kota dan unit pengelola dapat diakses dengan jalan darat. Adapun jenis jalan yang bisa di lewati yakni : jalan negara yang posisinya tidak jauh dari wilayah KPHP, jalan provinsi, jalan perusahaan IUPHHK, dan jalan kabupaten.

[81] Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 Tanggal 22 Nov 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ada perubahan nama KPHP Unit XXXII Bongan menjadi KPH Bongan
[82] Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Aktifitas KPH Bongan
Sumber foto:
KPH Bongan

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi hutan oleh Tim BPKH Wilayah IV Samarinda bersama UPTD KPHP Unit XXXII Bongan pada masing-masing plot Yaitu : Pada plot BG-1, BG-2, dan BG-3 didominasi kelompok Rimba Campuran dengan total jumlah masing-masing 68 batang, 41 batang, dan 70 batang adapun jenis yang mendominasi adalah jenis Jambu-jambu (*Syzygium spp*), selanjutnya plot BG-4 didominasi oleh kelompok Rimba Campuran dengan total jumlah 53 batang, adapun jenis yang mendominasi adalah jenis Banitan (*Polyalthia glauca*), dan yang terakhir plot BG-5 dan BG-6 didominasi oleh kelompok Meranti dengan jumlah total masing-masing 57 batang dan 65 Batang, adapun jenis yang mendominasi adalah jenis Meranti (*Shorea spp*).

2. Hasil Hutan Bukan kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXXII Bongan tiap tahunnya menghasilkan 10 ton rotan, 5 ton bambu dan 15.500 liter madu hutan. Sekitar 175 keluarga terlibat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Wilayah KPHP Unit XXXII Bongan belum terdapat potensi jasa lingkungan dan wisata alam baik yang didalam maupun disekitar wilayah kerjanya. ✣

Panorama alam suweto
Sumber foto:
KPH Kendilo

44. KPHP UNIT XXXIV KENDILO, KALIMANTAN TIMUR

a. Gambaran Wilayah
Wilayah KPHP Unit XXXIV Kendilo[85] meliputi 4 wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser[86] , meliputi Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang, Muara Samu dan Batu Engau. Luas KPHP Kendilo sebesar 137.495 ha. Berdasarkan fungsinya, wilayah KPHP Kendilo sebagai Hutan Lindung (HL) seluas 41.558 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 34.049 Ha, dan Hutan Produksi (HP) 61.888 ha.

Menjangkau wilayah KPHP Unit XXXIV Kendilo bisa menggunakan jalan darat engan sarana angkutan umum, adapun trayek dari angkutan umum tersebut yaitu jalur Tanah Grogot-Batu Licin (Kalimantan Selatan), Kuaro-Banjarmasin dan Tanah Grogot-Penajam. Untuk melayani trayek tersebut tersedia 3 unit terminal yaitu terminal kota Tanah Grogot, terminal Tepian Batang dan terminal Kuaro.

a. Potensi Sumberdaya Hutan
1. Hasil Hutan Kayu
Sebagian besar dari wilayah kelola KPHP Unit XXXIV Kendilo terdiri dari zona yang belum terdapat ijin pemanfaatan kawasan dan hasil hutan, yaitu pada kawasan HL dan HPT. Dengan demikian data dan informasi tentang potensi kayu merupakan masukan atau kebutuhan pokok-penting dalam pengelolaan sumber daya hutan di zona tersebut.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP KPHP Unit XXXIV Kendilo tiap tahunnya menghasilkan 2000 batang rotan dan 5 ton madu hutan.

[85] Berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,
[86] Jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 102.936 jiwa pada tahun 1990 dan bertambah menjadi 230.316 jiwa pada tahun 2010.

3. Jasa Lingkungan

Wisata alam di Kabupaten Paser saat ini boleh dikatakan masih terfokus pada wisata budaya seperti goa, museum, makam raja, sementara jasa lingkungan dan wisata alam dengan lansekap hutan yang menyimpan potensi besar masih belum banyak yang bisa digarap. ✣

Jasling Camping Ground Suweto
Sumber foto: KPH Kendilo

Potensi Anyaman Kerajinan Rotan
Sumber foto: KPH Kendilo

Bentang alam & aktifitas
KPHP Berau Barat
Sumber foto:
KPHP Berau Barat

45. KPHP UNIT XII BERAU BARAT, KALIMANTAN TIMUR

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XII Berau Barat[38] berada pada 28 desa[39] di 4 kecamatan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kelay, Segah, Sambaliung, dan Teluk Bayur. Luasan KPHP ini mencapai 768.021 ha[40] dengan rincian luas terbagi menjadi Hutan Lindung (HL) 251.375,51 ha, Hutan Produksi (HP) 103.139,49 ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 431.506 ha. Jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan KPHP populasinya mencapai 62.364 jiwa.

Kawasan KPHP Unit XII Berau Barat bisa ditempuh melalui :

a. Akses darat menuju KPHP Unit XII Berau Barat dapat menggunakan angkutan umum. Terdapat beberapa terminal di Kabupaten Berau yang melayani transportasi darat antar kota dan antar provinsi.
b. Terdapat Bandara Kalimarau yang melayani penerbangan dari berbagai daerah di Kalimantan. Jarak bandara dengan KPHP Unit XII Berau Barat apabila ditempuh dengan jalur darat menggunakan kendaraan pribadi hanya sekitar 18 menit.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Tutupan wilayah KPHP Unit XII Berau Barat sekitar 97%nya merupakan

[38] Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 Tanggal 22 Nov 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ada perubahan nama dari KPHP Unit XII Berau Barat menjadi KPHP Unit XII Berau Barat (KPH Berau Utara, KPH Berau Tengah, KPH Berau Pantai).

[39] Beberapa desa yang berada di kawasan KPHP Unit XII Berau Barat adalah Desa Long Beliu, Desa Muara Lesan, Desa Lesan Dayak, Desa Sidobangen, Desa Merapun, Desa Long Duhung, Desa Long Keluh, Desa Long Lacim, Desa Long Pelai, Desa Long Sului, Desa Merasa, Desa Siduung Baru, Desa Pandan Sari, Desan Harapan Jaya, Desa Tepian Buah, Desa Punan Malinau, Desa Long Ayan, Desa Punan Mahakam, Desa Long Laai, Desa Punan Segah, Desa Long Ayap, Desa Tumbit Dayak, Desa Ling Lanuk, Desa Nyapah Indah, Desa Tumbit Melayu, Desa Labanan Jaya, Desa Labanan Makarti, dan Desa Bukit Makmur.

[40] berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011.

Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, dan Hutan Rawa Sekunder. Sedangkan sisanya berupa semak belukar, pemukiman, perkebunan, pertanian, dan tanah terbuka. Potensi hasil hutan kayu berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) didapatkan rataan volume pohon berkisar 86,49 hingga 178 m3/ha untuk diameter 10 cm up dan 28,25 hingga 87,66 m3/ha untuk diameter 50 cm up. Sedangkan berdasarkan sampel Inventarisasi *Ground Truthing* diperoleh volume pohon yang komersial (selain pohon yang dilindungi) adalah rataan 95,5 m3/ha untuk diamater 50 cm up.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XII Berau Barat per tahunnya menghasilkan 160 liter madu hutan, 300 kotak teh manggar. Pengelolaan keduanya melibatkan 170 keluarga.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan dan wisata KPHP Unit XII Berau Barat berupa PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Long Keluh, wisata gua-gua burung walet, pegunungan karst, dan wisata budaya daerah setempat. ✣

Produk HHBK Berau
Sumber foto: KPH Berau Barat

Patroli Pengaman Hutan
Sumber foto: KPH Berau Barat

Industri Rumahan Gula Aren
Sumber foto: KPH Santan

46. KPHP UNIT XXVII SANTAN, KALIMANTAN TIMUR

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XXVII Santan[110] terletak dalam 3 wilayah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Luas wilayah KPHP ini mencapai 267.068 ha[111] . Jumlah desa yang berada di wilayah kelola KPHP Unit XXVII Santan mencapai 28 desa, sedangkan pemukiman masyarakat yang berada langsung dalam Wilayah KPHP ada 3 desa/ kelurahan yaitu: Santan Ulu, Danau Redan dan Suka Damai

KPHP Unit XXVII Santan bisa diakses melalui jalan darat. Sarana transportasi umum antara lain yaitu dari Samarinda ke Sebulu dan Samarinda ke Bontang. Jaringan jalan di KPHP Unit XXVII Santan diantaranya terdapat jalan negara, jalan perusahaan HTI, jalan tambang dan jalan kabupaten. Jalan negara penghubung antara Samarinda-Bontang-Sangatta kondisinya beraspal dan secara umum baik. Sementara jalan kabupaten ada yang beraspal, jalan cor semen dan jalan tanah. Jalan Kabupaten yang menghubungkan Samarinda - Sebulu - Muara Kaman sudah beraspal, namun kondisinya kurang baik karena sebagian besar aspalnya berlubang.

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Wilayah kelola KPHP Unit XXVII Santan merupakan areal berhutan yang terdiri dari 47,9% hutan tanaman dan 9,47% hutan sekunder dan sedikit hutan rawa, yang didominasi oleh ekosistem hutan lembab tropis (*tropical rain*

[110] Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 Tanggal 22 Nov 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit XXVII Santan menjadi KPH Santan Unit XXVII.

[111] SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan peta perkembangan tata batas oleh BPKH wilayah IV Samarinda, yaitu seluas

Goa Batu Gelap
Sumber foto:
KPH Santan

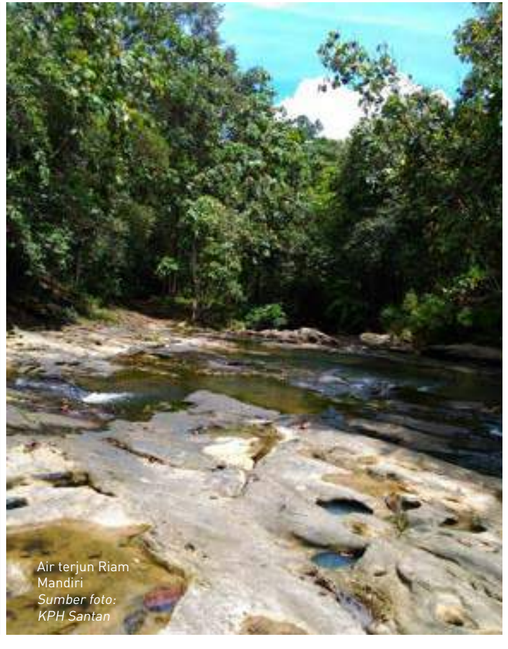

Air terjun Riam Mandiri
Sumber foto:
KPH Santan

Inventarisasi Hutan
Sumber foto:
KPH Santan

forest ecosystem). Komposisi vegetasi penyusun tegakan hutan dalam ekosistem lembab tropis didominasi oleh famili *Dipterocarpaceae*.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXVII Santan, tiap tahunnya menghasilkan 3.000 aren /gula merah, 3.000 kilogram per tahun dan masyarakat yang terlibat sejumlah 9 keluarga.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan di Wilayah kelola KPHP Santan adalah wisata. Apalagi posisinya dekat dengan dua kota besar yaitu Samarinda dan Bontang serta dilalui oleh jalan nasional, apabila disinergikan dengan potensi jasa lingkungan yang lain dapat dikembangkan menjadi ekowisata, termasuk : wisata alam (*eco-tourism*), wisata pendidikan dan penelitian (keilmu-pengetahuan) dan lain sebagainya. ✣

Bentang Alam Bukit Sembanai
Sumber foto: KPH Telakai

47. KPHP UNIT XXXIII TELAKAI, KALIMANTAN TIMUR

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XXXIII Telakai[119] meliputi 5 Kecamatan – yaitu Kecamatan Muara Komam, Long Ikis, Batu Sopang, Long Kali dan Kuaro, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Luas Wilayah KPHP ini 275.761 ha[120] . Kemudian berkurang menjadi 249.694,69 ha[121] . Kawasan tersebut terbagi dalam fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 69.984,98 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 102.010 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 69.985,06 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 7.703,28 ha.

KPHP Unit XXXIII Telakai terdiri dari dua lokasi yang terpisah. Secara fisik di lapangan batas wilayah kelola KPHP Unit XXXIII Telakai sebagian besar merupakan batas alam berupa sungai dan batas buatan tetap berupa patok. Secara administrasi, wilayah KPHP Unit XXXIII Telakai berada pada suatu Kabupaten yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 33 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut berdasarkan jumlah penduduk terbanyak secara berurutan antara lain, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Longikis, Kecamatan Longkali, dan Kecamatan Muara Komam. Jumlah penduduk totalnya sendiri berdasarkan BPS Kabupaten Paser, Kecamatan dalam Angka Tahun 2016, yaitu sebesar 133.884 jiwa.

[119] Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 Tanggal 22 Nov 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ada perubahan nama KPHP Unit XXXIII Telakai menjadi bagian dari KPH Kendilo

[120] Berdasarkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.674/Menhut-II/2011

[121] berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, peta perkembangan tata batas oleh BPKH wilayah IV Samarinda dan perkembangan tata batas oleh Biro Perbatasan provinsi Kalimantan Timur

HHBK Jamur Tiram
Sumber foto:
KPH Telakai

Wilayah KPHP Unit XXXIII Telakai bisa dijangkau melalui jalan darat. Semua desa/kota dan unit pengelola dapat diakses dengan jalan darat. Sarana transportasi umum yang reguler sudah ada, yaitu dari Kuaro ke Batu Sopang dan Muara Komam. Untuk transportasi lain antar desa, kendaraan *charter* baik mobil maupun motor bisa digunakan dengan harga bervariasi sesuai dengan jarak tempuhnya. Selain menggunakan *charter*, masyarakat biasa ikut dengan menumpang kendaraan-kendaraan pemegang IUPHHK-HT/HA, sebagai bagian dari kegiatan pembinaan masyarakat.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Sekitar 92,42% wilayah KPHP Unit XXXIII Telakai merupakan areal berhutan yang terdiri dari 3,50 hutan primer, 1,72% hutan tanaman dan 87,27% hutan sekunder. Ini menggambarkan potensi kayu hutan alam yang ada di wilayah KPHP Unit XXXIII Telakai masih tinggi. Pada strata Belukar didapatkan Kelompok Pohon kelas diameter 20–29 cm mendominasi strata tegakan, adapun jenis yang mendominasi adalah jenis Mahang (*Macaranga sp*). Pada strata Hutan Sekunder didapatkan bahwa Kelompok Pohon kelas diameter 20–29 cm mendominasi strata tegakan, adapun jenis yang mendominasi adalah jenis Mahang (*Macaranga sp*). Potensi rata-rata pada hutan lahan kering primer (Hp) dengan diameter 40 cm up sebesar 143 m3/ha dengan jumlah batang 45 batang/ha. Potensi rata-rata pada hutan lahan kering sekunder (Hs) dengan diameter 40 cm up sebesar 81 m3/ha dengan jumlah batang 34 batang/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit I Rambat Menduyung tiap tahunnya menghasilkan 31.200 batang rotan, 3,6 ton jamur tiram, 3.500 madu hutan.

3. Jasa Lingkungan

Hutan dalam wilayah kelola KPHP Unit XXXIII Telakai juga merupakan potensi dalam jasa lingkungan keilmu-pengetahuan. Wilayah KPHP Unit XXXIII Telakai posisinya dekat dengan jalan nasional yang menghubungkan Samarinda-Balikpapan dan Banjarmasin apabila disinergikan dengan potensi jasa lingkungan yang lain dapat dikembangkan wisata alam (*eco-tourism*), wisata pendidikan dan penelitian (keilmu-pengetahuan), dan lainnya. Keberadaan Hutan Lindung (HL) Gunung Lumut dan HL Gunung Ketam juga menyimpan potensi jasa lingkungan berupa konservasi terhadap tanah dan air (KTNA). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Di sekitar wilayah KPHP Unit XXXIII Telakai, terdapat beberapa potensi jasa lingkungan yang berupa potensi wisata yaitu di Kecamatan Muara Komam, Long Ikis dan Batu Sopang. Terdapat goa dan air terjun yang sudah dikenal antara lain goa tengkorak, gua loyang, gua mangkulangit. Potensi wisata tersebut belum dikelola dan dipromosikan. ✣

Potensi Madu Hutan
Sumber foto:
KPH Telakai

Kawasan Rawa Gambut
Sumber foto:
KPH Das Belayan

48. KPHP UNIT XXVI SUB DAS BELAYAN, KALIMANTAN TIMUR

a. Gambaran Wilayah

Luas wilayah KPHP Unit XXVI Sub Das Belayan[131] adalah 1.033.151 ha[132] terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini belum mengalami tekanan yang tinggi dari penduduk di sekitarnya. Mungkin karena lebih 63% penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Sebagian besar desa-desa di sekitar KPHP masih memberlakukan budaya adat sesuai dengan kelompok etnis masing-masing dalam memanfaatkan sumberdaya hutan.

Wilayah KPHP Unit XXVI Sub Das Belayan bisa dijangkau melalui jalan darat dan sungai. Tidak semua kampung dan unit pengelola dapat diakses dengan jalan darat akan tetapi harus dibantu dengan transportasi sungai khususnya seperti desa-desa yang ada di Kecamatan Tabang. Belum ada sarana transportasi umum yang regular baik lewat darat maupun lewat sungai ke lokasi desa dan unit pengelola yang ada di di wilayah KPH Samarinda Sub DAS Belayan, akan tetapi kendaraan charter baik mobil ataupun perahu milik masyarakat setiap saat tersedia.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Volume pohon hasil inventarisasi dari UPHHK-HA berkisar antara 86,49-178 m3/ha (Diameter 10 cm up), sedangkan untuk 50 cm up berkisar antara 28,25-87,66 m3/ha. Rataan jumlah volume kelompok Meranti adalah 73 m3/ha, hasil tersebut menggambarkan bahwa

[131] Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 Tanggal 22 Nov 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ada perubahan kelembagaan KPHP dari KPHP Unit XXVI Sub Das Belayan menjadi bagian dari KPH Sub Das Belayan (Unit XXIX dan XXVI).
[132] Semula luas KPHP 1.033.138 ha Kemudian disesuaikan Dengan Kepmen Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Keatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHPL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur Luas KPHP Sub DAS Belayan.

wilayah KPH Unit XXVI Sub DAS Belayan masih potensial untuk dikelola melalui pemanfaatan hasil hutan kayu.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi dan produksi hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit X Sungai Merakai tiap tahunnya menghasilkan 10 ton rotan, 100 liter madu hutan, 200 kilogram sarang walet dan 48 ton aren. Tidak ada data pasti berapa keluarga yang dilibatkan, tapi ada sekitar 20 desa yang terlibat dalam pengelolan hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan
Keberadaan kekayaan keragaman hayai spesies anggrek alam merupakan potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan ke depan. Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk wilayah kelola KPHP Unit XXVI Sub DAS Belayan terkenal dengan potensi ekowisata danau besar seperti Danau Semayang dan Danau Mellintang. Habitat mamalia Lumba-lumba air tawar (Pesut Mahakam) yang spesifik dan hanya ada di perairan Mahakam. Keberadaan danau ini yang merupakan sempadan air KPHP Unit XXVI Sub DAS Belayan cukup potensial apabila disinergikan dengan potensi jasa lingkungan yang lain dapat dikembangkan menjadi wisata anggrek wisata alam (*ecotourism*), wisata pendidikan dan penelitian dan lain sebagainya. ✣

Jasling Tanaman Anggrek
Sumber foto:
KPH Das Belayan

HHBK Madu Hutan
Sumber foto:
KPH Das Belayan

Bentang Alam Poigar
Sumber foto: MFP3

49. KPHP UNIT IV POIGAR, SULAWESI UTARA

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit IV Poigar berada pada 35 desa di 11 Kecamatan dan memiliki luas areal 41.597 ha menjadi bagian wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas kawasan hutan 25.014 ha (60,13 %) dan Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas kawasan hutan 16.583 ha (39,87 %).

Wilayah KPHP ini terbagi dalam fungsi kawasan Hutan Produksi/ Hutan Produksi Terbatas (HP/HPT) seluas 36.332 ha (87,34 %), dan kawasan Hutan Lindung (HL) termasuk hutan bakau di sebagian pesisir pantai seluas 5.265 ha (12,66 %). Luasan tersebut berbeda dengan hasil tata hutan KPHP Unit IV Poigar karena tata hutan menggunakan tata batas kawasan hutan terbaru.

Aksesibilitas Kawasan KPHP Unit IV Poigar berbentuk segitiga yang dibatasi dan dilalui oleh jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan arteri negara Trans Sulawesi: Manado –Amurang – Inobonto terdapat di sepanjang pantai Utara dari kawasan dan berarah Timur laut-Barat daya. Jalan arteri ini bercabang di Inobonto yang menuju ke Kota mobagu dan Gorontalo. Ruas jalan arteri Provinsi Kota mobagu – Inobonto ini berada di sebelah selatan kawasan dan berarah Barat laut-Tenggara. Kedua jalan tersebut relatif datar dibandingkan dengan jalur jalan yang terdapat di sebelah Timur kawasan, yakni jalur jalan Kota mobagu –Modoinding – Amurang yang berarah Utara - Selatan. Ketiga jalur jalan utama tersebut memberikan akses pertumbuhan terhadap kota kabupaten dan kota-kota kecamatan disekitarnya, serta menumbuhkan kesempatan pengelolaan terhadap sumber daya alam sekitarnya. Pada

Potensi HHBK Cengkeh
Sumber foto: MFP3

tiap jalur jalan tadi terdapat jalan-jalan sekunder dan tersier yang masuk ke dalam kawasan hutan Poigar.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi tegakan hutan di KPHP Unit IV Poigar sebesar 174,648 m3/ha dengan jumlah pohon sebanyak 117,83 batang/ha. Potensi permudaan tingkat tiang memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan tingkat semai dan pancang. Jenis kayu dominan yang ditemukan adalah Jabon (*Anthocepallus micropillus Miq*), Aras (*Ficus variegate*), Kenanga (*Cananga odorata Hook.f.et.Th*), dan Nantu (*Palaquium obtusifolium*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil hutan bukan kayu unggulan KPHP Unit IV Poigar per tahunnya meliputi : 48.480 Aren, 480 ton Kemiri, 3.312 arang tempurung, 1440 liter *Virgin Coconut Oil*. Pengelolaan hutan untuk produk unggulan ini telah melibatkan 175 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan kawasan hutan KPHP Unit IV Poigar adalah air terjun dan sumber mata air di kawasan HL.Gn. Lolombulan, HPT Gn. Bumbungan dan HP Inobonto-Poigar yang dimanfaatkan masyarakat Desa Paku Ure 3, Desa Aergale, dan Desa Tandoy sebagai sumber air minum masyarakat. ✣

50. KPHP UNIT V BOALEMO, GORONTALO

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit V Boalemo[43] Boalemo terletak di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo memiliki seluas 96.926 ha[44] yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 29.383 ha, Hutan Produksi Terbatas sekitar 55.140 ha dan Hutan Produksi seluas 12.403 ha. Wilayah KPHP ini tersebar pada 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Mananggu.

Desa terluas di wilayah KPHP Unit V Boalemo adalah Desa Bendungan (244,24 km2), sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Tangkobu (5,72 km2). Desa dengan penduduk tertinggi adalah Desa Piloliyanga (3.383 jiwa), sedangkan desa dengan penduduk terendah adalah Desa Dulangeya (576 Jiwa). Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Tangkobu (307 jiwa/km2), sedangkan desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah Desa Bendungan (8 jiwa/ km2).

Lokasi KPHP Unit V Boalemo bisa dicapai melalui dua cara. Pertama, di sebelah barat dan sebelah selatan Kabupaten Boalemo. Wilayah KPHP Unit V Boalemo yang terletak disebelah barat dan selatan dapat dicapai dari arah Timur, melalui akses jalan Ibukota Propinsi Gorontalo dan dapat pula dicapai dari arah Barat melalui akses Kabupaten Pohuwato. Kedua, Perjalanan dari arah sebelah selatan dapat ditempuh ± 3,5 jam dari arah Kota Gorontalo. Jalur darat antar wilayah

[43] Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo ada perubahan nama dari KPHP Unit V Boalemo menjadi KPHP Unit V Boalemo.

[44] KPHP Unit V Boalemo disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 402/Menhut-II/2011, tanggal 11 Juli 2011.

kecamatan di Kabupaten Boalemo dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat), dan hubungan ke desa-desa dapat ditempuh dengan roda 4 (empat), roda 2 (dua), sedangkan untuk yang akses daratnya sulit dijangkau dapat menggunakan perahu sampan (motor laut).

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi KPHP Unit V Boalemo oleh tim Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo (2011) menunjukkan potensi kayu yang berdiameter > 50 cm untuk semua kelompok jenis kayu, mencapai 168,20 m3/ha atau sebanyak 8,50 batang/ha. Potensi kayu komersial di blok pemanfaatan kayu hutan alam yang dapat ditebang mencapai 42,05 m3/ha. Dari jumlah total potensi tegakan yang ada pada hutan alam, maka tegakan rata-rata kayu komersil untuk diameter < 50 cm mencapai 15,20 m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit V Boalemo per tahunnya adalah 7.308.586 kilogram damar, 33.000 ton rotan, 200 kilogram jenang, 7.300 liter aren, 2400 kilogram kain sutra. KPHP berhasil melibatkan 265 keluarga dalam pengelolaan hasil hutan non kayu.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan di wilayah KPHP Unit V Boalemo adalah simpanan air dalam jangka waktu yang lama, sehingga sebagian besar sungai dan mata air di kawasan KPH mengalir sepanjang tahun dengan kualitas air yang baik. Sumber air ini bisa digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta dan Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. PLTMH menghasilkan listrik dengan menggunakan sumber tenaga air.

Selain itu ada air terjun di Hutan Lindung Ayuhulalo yang dapat menyediakan jasa lingkungan air bersih yang dapat dikelola bersama dengan perusahaan air minum PDAM dalam melayani kebutuhan air bersih di Kabupaten Boalemo. Bentang alam air terjun Hutan Lindung Ayuhulalo juga mempunyai panorama yang sangat indah dan berpotensi dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, seperti tracking dalam hutan alam menikmati keindahan panorama, tracking terapi kaki, terapi ikan di kolam, demplot tanaman obat-obatan, demplot tanaman jernang dan masohi, *camping ground*, *out bond*, *flying fox*, jembatan antar tajuk, dan lainnya. ✣

Komoditas Ulat Sutera
Sumber foto: MFP3

Dirjen PHPL melihat proses pengolah gula aren
Sumber foto: KPH Gorontalo

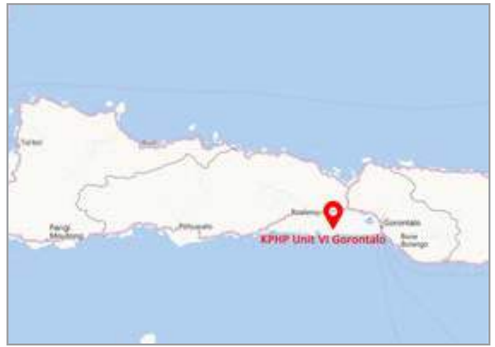

51. KPHP UNIT VI GORONTALO, GORONTALO

a. Gambaran Wilayah

Sekitar 72,4 persen dari 98.976,71 Ha[45] . kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo[46] telah ditetapkan sebagai wilayah KPH Wilayah VI Kabupaten Gorontalo , luasnya sekitar 71.682 ha. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut mencapai 368.053 jiwa pada 2013, telah menempatkan Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang terbesar di Provinsi Gorontalo. Penduduk yang tinggal disekitar kawasan hutan umumnya petani atau buruh tani yang memanfaatkan lahan disekitar maupun di dalam kawasan hutan.

Akses menuju Kawasasn KPHP Unit VI Gorontalo dapat ditempuh dari arah Timur melalui Ibukota Provinsi Gorontalo yaitu dari arah Kabupaten Gorontalo Utara dan dari arah Kabupaten Boalemo. Waktu tempuh sekitar 2-3 jam untuk bisa mengakses lokasi terjauh KPHP Unit VI Gorontalo[47] dari arah ibukota Provinsi. Lokasi terjauh berada di Kecamatan Asparaga, sedangkan lokasi terdekatnya membutuhkan waktu sekitar 0,5 - 1 jam. Lokasi terdekat berada di Desa Polohungo dan Malahu (Kecamatan Limboto).

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

KPHP Unit VI Gorontalo mempunyai potensi kayu yang cukup besar, meskipun luasan kawasan hutan primer hanya 5115,387 ha atau hanya 7,2% dari total luas kawasan KPHP Unit VI Gorontalo. Potensi kayu paling besar yang berada di kawasan KPHP Unit VI Gorontalo terdapat di wilayah

[45] Penetapan kawasan hutan ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No 325/Menhut-II/2010. Luas fungsi kawasan hutan berdasarkan fungsinya di Kabupaten Gorontalo terbagi 5, yaitu Hutan Konservasi seluas 24.838,98 ha, Hutan Lindung seluas 13.126 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 40.775 ha, Hutan Produksi seluas 17.781,00 ha, dan Hutan Produksi Konversi seluas 2.455,73 ha.

[46] Berdasarkan SK Menteri Nomor 976/Menhut-II/2013 tentang Penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi wilayah VI yang berada di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

[47] Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo ada perubahan nama dari KPHP Unit VI Gorontalo menjadi KPHP Unit VI Gorontalo.

Kecamatan Asparaga terutama di Desa Bontula, Desa Pangu dan Desa Bihe. Sedangkan potensi kayu paling sedikit terdapat di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai dan Kecamatan Biluhu.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
hasil hutan bukan kayu yang ada di KPHP Unit VI Gorontalo tiap tahunnya menghasilkan 290 ton pinus dan 33,9 ton aren.

3. Jasa Lingkungan
KPHP Unit VI Gorontalo memiliki potensi jasa lingkungan berupa air dan wisata alam. Pemanfaatan jasa lingkungan air beberapa diantaranya telah dimanfaatkan masyarakat. Saat ini baru ada 1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) yang memanfaatkan jasa lingkungan air yang terdapat di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga. PLTMH tersebut memiliki potensi sebagai salah satu sumber pemasukan bagi KPHP Unit VI Gorontalo.

Potensi lain yang dimiliki oleh KPHP Unit VI Gorontalo adalah beragamnya bentang lahan khususnya perbukitan yang sangat cocok dikembangkan sebagai salah satu obyek wisata alam. Saat ini sedang dibangun 2 obyek wisata alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo yaitu arboretum di Desa Dulamayo Selatan dan Arboretum di Desa Bihe Kecamatan Asparaga. Pembangunan arboretum ini ditujukan untuk pelestarian sumber mata air, tetapi tidak menutup kemungkinan sarana dan prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata pendidikan. ✣

Kunjungan DIrjen PHPL ke KPH
Sumber foto: KPH Gorontalo

Proses Pembuatan
Gula Aren
Sumber foto:
KPH Gorontalo Utara

52. KPHP UNIT IV GORONTALO UTARA, GORONTALO

a. Gambaran Wilayah
Berdasarkan RT/ RW dengan luas KPHP Unit IV Gorontalo Utara[48] luasnya 89.762,41 ha[49]., dengan pembagian fungsi Hutan Lindung seluas 7.952,14 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 15.555,71 ha dan Hutan Produksi seluas 65.255,56 ha. Sebelah Utara KPHP Unit IV Gorontalo Utara berbatasan dengan wilayah Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pohuwato, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara.
Akses menuju KPHP Unit IV Gorontalo Utara dari ibukota Provinsi Gorontalo dibutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam. Sedangkan dari arah Manado (Sulawesi Utara) dibutuhkan waktu antara 7-8 jam untuk mencapai lokasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara.

b. Potensi Sumberdaya Hutan
1. Hasil Hutan Kayu
Potensi kayu komersial kelas 1 yang berdiameter > 60 cm di KPHP Unit IV Gorontalo Utara bisa mencapai 20,68 m3/ha dan ini belum termasuk potensi kayu komersil kelas 2 dan rimba campuran. Adapun jenis yang mendominasi yakni dari family *Dipterocarpaceae* terutama anggota genus *Shorea*,*Dipterocarpus*, *Hopea*, *Vatica*, *Dryobalonops*, dan *Cotylelobium*.

[48] Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016 Tanggal 23 Des 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup da Kehutanan Provinsi Gorontalo berubah dari KPHP Unit IV Gorontalo Utara menjadi KPHP Unit IV Gorontalo Utara.

[49] Berdasarkan SK Menhut No 766/Menhut-II/2012, luas KPHP Unit IV Gorontalo Utara.

Produk HHBK Gula Semut yang sudah dikemas
Sumber foto: KPH Gorontalo Utara

Pengolahan Gula Semut dengan mesin
Sumber foto: KPH Gorontalo Utara

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah , potensi/produksi dan masyarakat yang terlibat adalah : 12 ton Pinus, 240 ton rotan, 720 liter minyak nilam , 12,6 ton aren. KPHP telah berhasil melibatkan 130 keluarga dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini.

3. Jasa Lingkungan

Berdasarkan hasil inventarisasi produk jasa lingkungan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara yang berpotensi PLTMH yaitu : Air Terjun Zuryati, Air Terjunkasia, Air Terjun Bubode dan Sumber Air Buata. Selain itu terdapat juga objek wisata alam berupa Pulau Saronde, Air Terjun Didinga, Pulau Lampu, Pantai Minanga Atinggola, Pulau Huha Dan Wilayah Pesisir. ✣

Air terjun Taluda Gorontalo
Sumber foto:
KPH Bone Bolango

53. KPHP UNIT VII BONE BOLANGO, GORONTALO

a.Gambaran Wilayah

Wilayah kelola KPHP Unit VII Bone Bolango[114] diapit oleh 4 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Bone Bolango memiliki kawasan hutan seluas 140.493,19 ha[115] dengan pembagian fungsi hutannya sebagai berikut : Hutan Konservasi seluas 104.904,72 ha, Hutan Lindung seluas 15.924,71 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 18.827,32 ha, Hutan Produksi seluas 836,45 ha. Adapun jumlah desa yang berada di sekitar wilayah kelola KPHP Unit VII Bone Bolango berjumlah 152 desa, dengan jumlah penduduk mencapai 166.235 jiwa (2013).

KPHP Unit VII Bone Bolango bisa diakses dari bagian utara maupun selatan menggunakan transportasi darat. Waktu tempuh dari Ibukota Provinsi Gorontalo menuju wilayah KPHP ini sekitar 3 jam. Wilayah KPH yang terjauh berada di Kecamatan Bone Pantai sedangkan yang terdekat berada di Kecamatan Suwawa Timur. Untuk wilayah KPHP Unit VII Bone Bolango yang terletak disebelah selatan dapat di tempuh 2 – 3 jam dari ibukota Kabupaten Bone Bolango.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil inventarisasi potensi kayu rata-rata bisa mencapai 59,98 meter kubik untuk jenis kayu diameter diatas >50 cm. adapun potensi kayu terbesar adalah

[114] Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016 Tgl 23 Des 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup da Kehutanan Provinsi Gorontalo, ada perubahan nama KPHP dari KPHP Unit VII Bone Bolango menjadi KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Gorontalo Kota (Unit VII).

[115] Telah ditunjuk berdasarkan SK menteri Kehutanan No 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010.

Air terjun Taluda Gorontalo
Sumber foto:
KPH Bone Bolango

jenis rimba campuran yang berada pada tutupan hutan sekunder di hutan produksi terbatas, dimana potensinya mencapai 72.34 m3/ha untuk diameter diatas 60 cm, sedangkan untuk kayu komersial satu mencapai 18.32 m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit VII Bone Bolango tiap tahunnya menghasilkan 25,2 ton aren, 1563 batang rotan, 20 ton getah pinus. Sekitar 234 keluarga terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini.

3. Jasa Lingkungan

Potensi pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan air. Saat ini baru terdapat 1 PLTMH yang memanfaatkan jasa lingkungan air yang terdapat di Taludaa. Selain itu pemanfaatan kawasan untuk wisata juga dapat diterapkan pada rumah persembunyian Nani Wartabone dalam melawan imperialisme. Nani Wartabone merupakan seorang pahlawan nasional. Selanjutnya KPHP Unit VII Bone Bolango mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai kawasan wisata alam dalam bentuk ekowisata, salah satunya pemandangan hutan tropis dan wilayah Kecamatan Bulango Ulu dan Suwawa Timur serta pemandangan teluk tomini yang dapat disaksikan dari puncak hutan tropis di Kecamatan Bone dan Kecamatan Bone Pantai. ✣

Potensi Jasling
Danau Ligis
Sumber foto:
KPH Sivia Patuju

54. KPHP UNIT XVII SIVIA PATUJU, SULAWESI TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XVII Sivia Patuju[60] terletak di Kabupaten Tojo Una-Una tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Ampana Kota, Ampana Tete dan Ulubongka. Luasannya sekitar 109.492 ha[61] . Luasan tersebut terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 39.922 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 58.927 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 10.643 ha.

Dari perhitungan jumlah penduduk di Kecamatan sekitar wilayah KPHP hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 239.035 jiwa atau sebanyak 58.014 KK, *sex* rasio 102, rata-rata penduduk per RT sebanyak 4 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 106 jiwa/km2. Aksesbilitas menuju wilayah KPHP ini cukup mudah dijangkau hingga pada batas-batas luar kawasan hutan, namun aksesibilitas dari batas-batas luar menuju lokasi di dalam kawasan hutan KPH akan sedikit mengalami kesulitan karena jaringan jalan pernah ada seperti jalan-jalan eks HPH telah rusak. Akses jalur darat dapat dilalui dari arah utara yaitu melalui ibu kota Kabupaten Tojo Una Una (Ampana).

a. Dari arah utara dapat ditempuh melalui Desa Batunga, Sabo, Balingara, Bulan jaya dan Wanasari Dataran Bulan, Kecamatan Ampana Tete menggunakan kendaraan mobil dan motor.
b. Dari arah Timur dapat ditempuh melalui kecamatan Ulubongka dengan menggunakan kendaraan mobil, motor dan perahu.

[60] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016 Tanggal 17 Nov 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas ada perubahan dari KPHP Unit XVII Sivia Patuju menjadi KPH Sivia Patuju (KPHP Unit XVI, KPHP Unit XVII).

[61] Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 635/Menhut-II/2013, KPHP Unit XVII Sivia Patuj

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu yang bernilai komersil di KPHP Unit XVII Sivia Patuju yaitu potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu dan potensi jasa lingkungan. Hasil hutan kayu yang bernilai komersial di wilayah KPH ini antara lain: Palapi (*Heritiera sp*), Nyatoh (*Palaqium sp*), Nantu (*Endiandra sp.*), Kume (*Palaquium quercifolium (de Vriese) Burck.*), Dara-dara (*Eugenia sp*), Bintangur (*Calophyllum spp.*), Meranti (*Shorea spp*), Kaumama putih (*Anthocephalus spp.*), Cempaka (*Elmerillia sp*), Meranti (*Shorea sp*), dan Jabon (*Antocephalus macrophylla*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

JProduk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit XVII Sivia Patuju tiap tahunnya menghasilkan 3458 ton getak damar, 180 batang rotan, 1800 liter madu hutan dan 2400 kilogram kemiri. KPH berhasil melibatkan sekitar 150 keluarga untuk pengelolaan hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam yang mengandalkan potensi aliran air sungai dan danau. Kecamatan Ulubongka memiliki sungai yang membentang panjang dan dapat di kembangkan untuk olah raga arus deras atau arung jeram pada wilayah hulu dan anak sungai. Di wilayah tersebut sungai-sungai utama dimanfaatkan untuk irigasi persawahan dan air bersih (PDAM). ✣

Budidaya Nilam
Sumber foto:
KPH Sivia Patuju

Pemanenan Madu
Hutan Sivia Patuju
Sumber foto:
KPH Sivia Patuju

Pegunungan desa Panjoka
Sumber foto:
KPH Sintuwu Maroso

55. KPHP UNIT XI SINTUWU MAROSO, SULAWESI TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XI Sintuwu Maroso[62] terletak pada 13 kecamatan[63] di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas 131.848,63 ha. Luasan ini terdiri atas; Hutan Lindung (HL) seluas 46.158,80 ha dan Hutan Produksi (HPT dan HP) seluas 85.689,83 ha[64]., KPHP Sintuwu Maroso.

Jumlah penduduk di sekitar KPHP Unit XI Sintuwu Maroso hingga akhir 2010 berjumlah 142.775 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 74.366 jiwa dan perempuan 68.409 jiwa, sex rasio 110, rata-rata penduduk per RT sebanyak 4 jiwa.

KPH Sintuwu Maroso mudah dijangkau hingga pada batas-batas luar kawasan hutan, menggunakan jalan bekas HPH PT. Gulat di Kecamatan Poso Pesisir Utara tepatnya di Desa Kilo (Dusun Gayatri dan Mouro) dan Kawende, serta di kawasan hutan produksi Desa Dewua Kecamatan Lore Selatan

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan yang ada di KPHP Unit XI Sintuwu Maroso yaitu potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu dan potensi jasa lingkungan. Hasil hutan kayu yang bernilai komersial di wilayah KPHP ini antara lain: Palapi (*Heritiera sp*), Nyatoh (*Palaqium sp*), Cempaka (*Michelia camphaka*), Agatis (*Agathis sp*), Meranti (*Shorea sp*), Bintangur (*Calophylum soulatri*), Matoa (*Pometia pinnata*), Dao (*Dracontamelon dao*), dan Binuang (*Octomeles sumatrana*).

[62] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas ada perubahan dari KPHP Unit XI Sintuwu Maroso menjadi KPH Sintuwu Maroso (KPHL Unit X, KPHP Unit XI, KPHP Unit XII).

[63] Lokasi KPHP Unit XI Sintuwu Maroso terletak pada 13 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota Selatan, Lage, Pamona Utara, Pamona Pasulemba, Pamona Barat, Lore Selatan, Lore Peore, Lore Tengah, Lore Timur dan Lore Utara.

[64] Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Menteri Kehutanan Nomor SK.79/Menhut-II/2010.

Nibong (kecubung)
Sumber foto:
KPH Sintuwu Maroso

Penyadapat getah pinus
Sumber foto:
KPH Sintuwu Maroso

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit XI Sintuwu Maroso tiap tahunnya adalah 5000 to damar, 3.037 ton pinus, 10 ribu ton rotan, dan 5000 ton madu hutan. Ada sekitar 550 keluarga yang terlibat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu ini.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan yaitu pemanfaatan kawasan hutan produksi di wilayah DAS Mayakeli DAS Poso (kawasan ini merupakan sumber air objek wisata alam Wera Saluopa), dan kawasan hutan lindung untuk perlindungan sumber-sumber air bagi kawasan bawahannya. Pemanfaatan jasa lingkungan lainnya yang terdapat di kawasan tersebut adalah pengelolaan sumber-sumber air untuk irgiasi sawah dan objek wisata air terjun di wilayah DAS Wera Saluopa (DAS Poso), pengelolaan sumber air bersih di kawasan HL Gunung Kele Desa Sintuwulemba, pengelolaan sumber-sumber air di wilayah hulu DAS Puna. ✣

Pengolahan Minyak Nilam
Sumber foto: MFP3

56. KPHP UNIT IV DAMPELAS TINOMBO, SULAWESI TENGAH

a.Gambaran Wilayah

KPHP Unit IV Dampelas[50] memiliki luasan 112.664 ha. berada dalam 6 enam kecamatan dan 2 Kabupaten, yakni Kecamatan Balaesang, Damsol, Sojol dan Sojol Utara di Kabupaten Donggala dan Kecamatan Tinombo/Sidoan, Tinombo Selatan di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah KPHP ini memiliki fungsi Hutan Lindung (HL) seluas 21.240 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 10.271 ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 80.983 ha. Jumlah penduduk di sekitar KPHP Unit IV Dampelas Tinombo hingga akhir 2009 sebanyak 158.605 jiwa atau 36.165 keluarga (BPS, 2010)[51] .

Wilayah KPHP ini cukup mudah diakses melalui jalan aspal dan jalan sirtu, namun aksesibilitas dari batas-batas luar menuju lokasi di dalam kawasan hutan KPH akan mengalami kesulitan, karena jaringan jalan yang pernah ada di wilayah eks . Jalan HPH pada umumnya telah rusak dan tidak layak dilalui kendaraan bermotor.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di wilayah KPHP Unit IV Dampelas Tinombo yang bernilai komersial tinggi di pasar Internasional maupun domestik, adalah kayu hitam/ Ebony (*Diospyros celebica Bakh.*),

[50] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016 Tanggal 17 Nov 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas ada perubahan dari KPHP Unit IV Dampelas Tinombo menjadi KPHP Unit IV Dampelas Tinombo.

[51] BPS Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala tahun 2010.

Potensi HHBK Pembuatan Gula semut
Sumber foto: MFP3

Maraula (*Diospyros macrophylla*), Agatis/Damar (*Agathis spp.*), Meranti (*Shorea spp.*), Palapi (*Herriteria sp.*), Nyatoh (*Palaqium spp.*), Rau (*Dracontamelon mangiferum*), Bintangur (*Calophyllum soulatri*), Matoa (*Pometia pinnata*), Rau (*Dracontamelon mangiferum*), Binuang (*Octomeles sumatrana*) dan jenis lainnya.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk hasil hutan bukan kayu unggulan KPHP Unit IV Dampelas Tinombo tiap tahunnya adalah 360 ton rotan, 6 ton aren, 2.160 kilogram minyak nilam , 90 ton karet.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan di KPHP ini adalah pengelolaan sumber-sumber air di wilayah DAS Tada, DAS Taipa, DAS Babatona, DAS Sikea, DAS Malawa dan DAS Rumu. Wilayah DAS tersebut merupakan sumber-sumber air utama bagi irigasi pertanian di Desa Tada, Desa Siney, Desa Khatulistiwa di Kecamatan Tinombo Selatan. Sedangkan DAS Taipa dan DAS Babatona. Selanjutnya untuk pengembangan wisata alam berada di wilayah hutan lindung danau Dampelas yang berdampingan langsung dengan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Danau Talaga. ✣

Potensi Rotan
Sumber foto: MFP3

Potensi HHBK Kopi
Sumber foto: MFP3

57. KPHP UNIT V, VI, DAN IX DOLANGO TANGGUNUNG, SULAWESI TENGAH

a.Gambaran Wilayah

Wilayah kelola KPH Dolago Tanggunung[52] berada dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.755/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Unit V, KPHP Unit VI, dan KPHP Unit IX Dolango Tanggunung dengan luas areal 144.349 ha, yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) dengan luas 67.794 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 57.548 ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 19.008 ha. Jumlah penduduk di sekitar KPHP hingga akhir tahun 2009 tercatat sebanyak 239.035 jiwa dan sebanyak 58.014 keluarga (BPS Kabupaten/Kota, 2010-2012).

Aksesibilitas wilayah yang cukup memadai berupa jalan aspal dan jalan sirtu. Dengan demikian keterjangkauan wilayah KPHP ini cukup mudah dijangkau hingga pada batas-batas luar kawasan hutan.

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu di wilayah KPHP Unit V, KPHP Unit VI, dan KPHP Unit IX Dolango Tanggunung yang bernilai komersial tinggi di pasar Internasional maupun

[52] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016 Tanggal 17 November 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas ada perubahan dari KPHP Unit VI dan IX Dolago Tanggunung menjadi KPHP Unit V, KPHP Unit VI, dan KPHP Unit IX Dolango Tanggunung.

domestik, adalah Kayu Meranti (*Shorea spp.*), Palapi (*Herriteria sp.*), Nyatoh (*Palaqiumspp.*), Rau (*Dracontamelon mangiferum*), Bintangur (*Calophyllum soulatri*), Eboni (*Diospyros celebica*), Maraula (*Diospyros macrophylla*), Agatis/Damar (*Agathis spp.*), Matoa (*Pometia pinnata*), Dao (*Dracontamelon dao*), Binuang (*Octomeles sumatrana*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk hasil hutan bukan kayu unggulan KPHP Unit V, KPHP Unit VI, dan KPHP Unit IX Dolango Tanggunung adalah 16.503,83 ton rotan, 180 ribu liter aren dan 16,2 ton nilam. Upaya ini melibatkan 175 keluarga untuk mengelola hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Potesnis jasa lingkungan di kawasan ini adalah pengelolaan aliran atau sumber air dalam rangka pengaturan tata air dalam rangka pengendalian banjir di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau. Adapun wisata alam yang sedang dikembangkan adalah wisata alam hutan lindung (wana wisata agrohutani) di kawasan kebun kopi Kecamatan Tana Ntovea Kabupaten Donggala. ✣

HHBK Madu Hutan dan beeswax
Sumber foto: MFP3

58. KPHP UNIT I POGOGUL, SULAWESI TENGAH

a.Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit I Pogogul[53] meliputi 11 Kecamatan[54] di Kabupaten Buol, kawasannya tersebar di 11 Kecamatan dengan luas total 187.544,27 ha[55] . Luasan tersebut terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 42,310.38 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 49,789.32 ha, d Hutan Produksi (HP) seluas 95,444.57 ha. Jumlah penduduk di Kabupaten Boul pada 13 wilayah kecamatan sebanyak 115.121 jiwa dan sebanyak 26.896 KK. Penduduk laki-laki sebanyak 58.348 jiwa dan perempuan 56.773 jiwa, sex rasio 103, rata-rata penduduk per RT sebanyak 4 jiwa.

Aksesbilitas menuju wilayah KPHP Unit I Pogogul belum cukup memadai sehingga transportasi antar desa dalam wilayah kecamatan maupun dari dan menuju desa di kecamatan lainnya masih sulit.

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan yang ada di KPH Unit I Pogogul yaitu potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu dan potensi jasa lingkungan. Wilayah KPHP Unit I Pogogul terdapat hutan pegunungan/hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah yang kaya akan jenis-jenis vegetasi berkayu dan vegetasi tak berkayu baik komersial dan non-komersial. Potensi kayu yang memiliki nilai komersial antara lain; Palapi (*Heritiera sp*), Nyatoh (*Palaqium sp*),

[53] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016 Tanggal 17 November 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas ada perubahan dari KPHP Unit I Pogogul menjadi KPH Pogogul (KPHP Unit I).

[54] Kecamatan Lakea, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Karamat, Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Momunu, Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, dan Kecamatan Tiloan.

[55] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013.

Cempaka (*Elmerillia sp*), Agatis (*Agathis sp*), Meranti (*Shorea sp*), dan Jabon (*Antocephalus macrophylla*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit I Pogogul tiap tahunnya menghasilkan 12 ton damar, 60 ton rotan, 3600 batang bambu, 13 ton aren dan 1200 kilogram madu hutan. KPHP telah berhasil melibatkan 245 keluarga dalam pengelolaan hutan yang menghasilkan produk unggulan ini.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan yaitu berupa wisata alam pada kawasan hutan produksi di wilayah Kecamatan Lipunoto tepat di Desa Kumaligon yaitu berupa sumber-sumber mata air dari celah bebatuan kapur. Selain itu terdapat wisata alam pegunungan Tabong-Kokobuka dan gua di wilayah hulu sungai Tabong. ✣

Bentang Alam KPH Balantak
Sumber foto: KPH Balantak

59. KPHP UNIT XX BALANTAK, SULAWESI TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XX Balantak[56] berada dalam wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, luasnya mencapai 109.779 ha[57] , yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 31.524 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 54.299 ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 23.956 ha. Jumlah penduduk Kabupaten Banggai berjumlah 323.626 jiwa yang tersebar dalam 18 kecamatan dengan rasio jenis kelamin 104.49 dan kepadatan penduduk 34 jiwa/km2.

Aksesbilitas menuju wilayah KPHP Unit XX Balantak dapat melalui jalan provinsi dan jalan kabupaten yang tedapat sepanjang pantai. Sekitar KPH Balantak terdapat beberapa pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Bunta dan Pelabuhan Pagimana. Selain itu terdapat bandar udara yang bernama Syukuran Aminudin Amir.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan yang ada di KPHP Unit XX Balantak yaitu potensi kayu, potensi hasil dan hutan bukan kayu. Potensi hasil hutan kayu yang bernilai komersial di pasar internasional maupun domestik antara lain; khususnya dari jenis kayu adalah Kayu Meranti (*Shorea spp.*), Palapi (*Herriteria sp.*), Nyatoh (*Palaqium spp.*), Rau (*Dracontamelon mangiferum*), Bintangur (*Calophyllum soulatri*), Agatis/Damar (*Agathis spp.*), Matoa (*Pometia pinnata*), Dao (*Dracontamelon dao*), Mangga hutan (*Mangifera foetida*), Binuang (*Octomeles sumatrana*).

[56] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016 Tanggal 17 November 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas ada perubahan dari KPHP Unit XX Balantak menjadi KPH Balantak (KPHP Unit XVIII, KPHP Unit XX).

[57] Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis hasil hutan bukan kayu yang ada di Produk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit XX Balantak tiap tahunnya adalah : 360 ton damar, 71,1 hingga 125,1 ton rotan, 120 hingga 600 ton bambu, 1.500 – 2.500 biji aren, 600 hingga 1.200 kilogram pinang, 30 hingga 50 ton kemiri, 600 hingga 1200 liter madu hutan, dan 3 hingga 4 ton getah pinus. KPHP berhasil melibatkan 1070 keluarga dalam mengelola hasil hutan bukan kayu tersebut. ✣

jun Salodik
r foto: KPH Balantak

Potensi Air Terjun
Desa Lijo
Sumber foto:
KPH Batu Rube

60. KPHP UNIT XIX TOILI BATU RUBE, SULAWESI TENGAH

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XIX Toili Batu Rube[58] memiliki luasan 276.676 ha[59] yang terletak di Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una Una dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Sebaran penduduk yang ada di sekitar kawasan tersebar di 3 kabupaten dengan total 180 desa dan jumlah penduduk 219.208 jiwa Secara fungsi kawasan ini terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 126.447 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 94.800 dan Hutan Produksi (HP) seluas 55.389 ha.

Terdapat 2 cara untuk mencapai wilayah KPHP ini yaitu melalui jalur darat dan jalur laut. Lokasi desa terjauh dalam wilayah KPHP adalah Desa Tirongan Atas Kecamatan Bungku Utara, apabila ditempuh dari Kota Luwuk memerlukan waktu 9 jam. Wilayah KPHP dapat juga ditempuh melalui jalur laut dari ibu kota Kabupaten Morowali Utara (Kolonodale) dengan waktu tempuh 8 jam menggunakan kapal ferry menuju Ibu Kota Kecamatan Bungku Utara (Baturube). Dari arah Utara yaitu ibu kota Kabupaten Tojo Una Una (Ampana) dapat ditempuh melalui jalur darat menuju Desa Bulan Jaya, Wanasari, dan Dataran Bulan, Kecamatan Ampana Tete.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi hasil hutan kayu yaitu kelompok kayu perdagangan yaitu Damar (*Agathis celebica*), Meranti (*Shorea spp.*), Meranti merah (S*horea lepidota Bl.*),

[58] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016 Tanggal 17 Nov 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas ada perubahan dari KPHP Unit XIX Toili Batu Rube menjadi KPH Toili Batu Rube (KPHP Unit XIX).

[59] Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 967/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013

Komoditi HHBK Gula Aren
Sumber foto: KPH Batu Rube

Palapi (*Heritiera littoralis Dryand.*) Jenis kelompok kayu riba campuran Bayur (*Pterospermum spp.*), Bintangur (*Calophyllum spp.*), Binuang (*Octomeles sumatrana Miq*), Jambu-jambu (*Eugenia spp.*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
JProduk unggulan hasil hutan bukan kayu KPHP Unit XIX Toili Batu Rube tiap tahunnya adalah 600 ton damar dan 207.360 kilogram aren. Sekitar 260 keluarga sekitar terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan
JPotensi jasa lingkungan yang terdapat di wilayah KPHP Unit XIX Toili Batu Rube yaitu berupa wisata air terjun di Desa Lemo, jasa lingkungan air dan pemanfaatan karbon. Potensi air terjun di Desa Lijo memiliki debit yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTA. ✣

Area Persemaiaan
budidaya Nilam
Sumber foto: KPH Mamasa Barat

61. KPHP UNIT VII MAMASA BARAT, SULAWESI BARAT

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit VII Mamasa Barat terletak di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah KPHP Unit VII Mamasa Barat berdasarkan SK. 341/Menhut-II/2011 seluas 53.555 ha dengan rincian hutan lindung seluas 17.352 ha dan hutan produksi terbatas seluas 36.203 ha, namun berdasarkan hasil pengukuran di lapangan luas KPHP Unit VII Mamasa Barat sebesar 73.718,87 ha.

Penduduk yang bermukim di sekitar dan di luar kawasan hutan tersebar di tujuh kecamatan yaitu kecamatan Tabulahan, Buntu Malangka, Aralle, Mambi, Bambang, Mehalaan dan Rantebulahan Timur. Jumlah penduduk pada ketujuh kecamatan berjumlah 58.864 jiwa.

Aksesibilitas menuju kawasan KPH dapat menggunakan moda transportasi darat. Akses jalan dapat melalui jalan Kabupaten Mamasa sepanjang 2005,05 km dengan dominasi kondisi jalan sedang sepanjang 879.54 km (49.80 %) dan rusak berat sepanjang 374,10 km atau (21.18%) dari total panjang jalan kabupaten.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu yang teridentifikasi yaitu 25 jenis pohon. Jenis pohon yang mendominasi di antaranya: Baloli, Latto, Uru, Kata, Barani, Lemarra, Buluang, Tikkala, Poppong, Mampa, Nato, dan Assa.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit VII Mamasa Barat, tiap tahunnya menghasilkan 4.000 ton pinus, 200 ton rotan, 90 ribu batang bambu, 6 ton minyak nilam, 1400 ton kopi. Produk unggulan hasil hutan bukan kayu ini dikelola dengan melibatkan sekitar 2950 keluarga.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan yang terdapat di KPHP Unit VII Mamasa Barat yaitu wisata alam berupa air terjun Sambabo, pemandian air panas dan wisata arum jeram. ✣

Kantor KPH
Mamasa Barat
Sumber foto:
KPH Mamasa Barat

Inventarisasi potensi HHBKSumber foto:
KPH Mamasa Barat

Bentang Alam KPH
Budong-budong
Sumber foto:
KPH Budong-budong

62. KPHP UNIT V BUDONG-BUDONG, SULAWESI BARAT

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit V Budong-Budong[65] terletak di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, yang berada pada tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Tommo, Kalumpang, Budong-Budong, Pangale, Topoyo, Karossa dan Kecamatan Tobadak. Luas KPHP Unit V Budong-Budong seluas 127.834,79 ha, yang terdiri atas HPT seluas 85.906,23 ha, HP seluas 36.502,81 ha dan HL seluas 5.425,75 ha.

Gambaran sumber daya manusia di sekitar KPHP ini berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju pada 2013, jumlah penduduk yang berada di tujuh kecamatan dalam wilayah KPHP Unit V Budong-Budong pada tahun 2012 sebanyak 144.128 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 24 jiwa/km2

Aksesibilitas menuju kawasan dapat melalui jalur darat menggunakan angkutan umum berupa roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat melayani mobilitas antar ibukota kecamatan dan antar desa, sedangkan angkutan roda dua melayani mobilitas dalam satu desa.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan di KPHP Unit V Budong-Budong yaitu potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu dan potensi jasa lingkungan. Potensi kayu yang teridentifikasi sebanyak 10

[65] Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Gub. Sulbar No. 821.23/05/2017 tgl. 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ada perubahan nama KPHP Unit V Budong-budong menjadi KPH Budong-budong.

jenis pohon. Jenis pohon tersebut di antaranya Palado, Palapi, Uru, Simponi, Nyatoh, Meranti, Kanduruan, Lebani, Tippulu dan Sama-Sama.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit V Budong-Budong, tiap tahunnya menghasilkan 12-24 ton aren. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan di KPH ini, termasuk perlu dilakukan pendataan berapa masyarakat yang terlibat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan berupa wisata alam seperti pemandangan alam, air terjun dan sungai. ✣

kau

ong

Potensi Jasling wisata bakau
Sumber foto: KPH Karama

63. KPHP UNIT VI KARAMA, SULAWESI BARAT

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit VI Karama berlokasi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penetapan wilayah KPHP Unit VI Karama didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 799/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, yang terdiri dari hutan lindung (HL) seluas 52.844,44 ha, hutan produksi (HP) seluas 15.054,13 ha dan hutan produksi terbatas seluas 90.401,64 ha. Tapi luasan tersebut berkurang sejak 2015 , KPHP Unit VI Karama luasnya menjadi sekitar 156.917,47 ha, yang terdiri atas hutan produksi (HP) seluas 36.367,65 ha atau sekitar 23,18%, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 64.755,10 ha atau sekitar 41,27%, dan hutan lindung (HL) seluas 55.794,72 ha atau sekitar 35,56%.

Wilayah KPHP Unit VI Karama berada pada sebelas kecamatan, yaitu Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, Kalukku, Papalang, Sampaga, Tommo, Bonehau, Kalumpang dan Pangale (penyesuaian dengan SK.636/Menlhk-Setjen/2015). Jumlah total penduduk dari sepuluh kecamatan yang berbatasan langsung dengan KPHP Unit VI Karama pada 2013 adalah 252.295 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 128.704 jiwa dan perempuan sebanyak 123.591 jiwa. Laju pertambahan penduduk di sekitar lokasi KPHP Unit VI Karama sebesar 2,375% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada 2012. Jumlah penduduk di sekitar lokasi KPHP Unit VI Karama masih tergolong jarang, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 104 jiwa/km2, tersebar tidak merata pada setiap Kecamatan. Jumlah penduduk sebagian besar terkonsentrasi di bagian barat. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah

Area Pembibitan KPH
Sumber foto: KPH Karama

Mamuju (299 jiwa/km2) dan yang terendah adalah Kecamatan Kalumpang (7 jiwa/km2).

Kawasan KPHP Unit VI Karama dapat ditempuh dengan sarana transportasi darat di wilayah KPHP Unit VI Karama yang terdiri atas mobil angkutan penumpang dan mobil angkutan barang yang berfungsi melayani mobilitas penduduk di dalam kabupaten. Angkutan umum terdiri atas bus, kendaraan roda empat dan roda dua. Bus melayani angkutan umum antar provinsi. Kendaraan roda empat melayani mobilitas antar ibukota kecamatan dan antar desa, sedangkan angkutan roda dua melayani mobilitas dalam satu desa/dusun. Panjang jalan di Kabupaten Mamuju sekitar 1.191,78 km, didominasi oleh jalan kabupaten sepanjang 797,9 km atau sekitar 66,95%. Sisanya, jalan negara sepanjang 240,35 km atau sekitar 20,17% dan jalan provinsi, sepanjang 153,53 km atau sekitar 12,88%. Berdasarkan tipe permukaan jalan, sebagian besar jalan di Kabupaten Mamuju (75,73%) sudah merupakan jalan aspal. Sisanya masih merupakan jalan tanah, kerikil dan lainnya.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu pada wilayah kelola KPHP Unit VI Karama dari tahun 2012-2015 berjumlah 26.777,40 m3 .

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit VI Karama tiap tahunnya menghasilkan 976 kilogram kemiri, 15 hingga 50 ton dan 15-50 ton madu hutan.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang terdapat dalam wilayah kelola KPHP Unit VI Karama diantaranya pemanfaatan sumber air baku bagi PDAM Tirta manakarra pda sungai Mamuju dan sungai Taparia sebagai sumber energy bagi PLTMH yang potensial pada beberapa air tejun yang tersebar hampir disemua kecamatan, dan obyek wisata alam pada sungai Mamuju. ✣

Potensi HHBK Aren
Sumber foto:
KPH Karossa

64. KPHP UNIT IV KAROSSA, SULAWESI BARAT

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit IV Karossa[137] mengalami perubahan luasan karena perubahan status fungsi hutannya. Pada 2014 sebagian besar kawasan hutan lindung di dalam wilayah KPHL Karossa berubah menjadi kawasan hutan konservasi seluas 45.232 ha. Perubahan fungsi tersebut menyebabkan luas wilayah KPHL Karossa[138] berubah menjadi seluas 65.757 ha, terdiri atas hutan lindung seluas 15.979 ha (24,3%) dan hutan produksi seluas 49.778 ha (75,%). Akibatnya hutan produksi mendominasi luasan KPHP ini, oleh karenanya status KPHL Karossa berubah menjadi KPHP Unit IV Karossa[139].

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan KPHP Karossa diketahui penduduk didominasi laki-laki dengan jumlah 10.871 jiwa (51,21%). Desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terkecil adalah Desa Lembah Hopo sebesar 10 jiwa/km2., sedangkan tingkat kepadatan penduduk desa terbesar adalah Desa Lara sebesar 113 jiwa/km2. Sebanyak 71 persen penduduk sekitar hutan adalah pendatang. Laju migrasi masuk penduduk tersebut cenderung meningkat seiring perkembangan pembangunan infrastruktur fisik termasuk pembukaan jalan di Kabupaten Mamuju Tengah.

[137] Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Keputusan Gub. Sulbar No. 821.23/05/2017 tgl. 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ada perubahan nama KPH dari KPHP Unit IV karossa menjadi KPH Karossa (Unit IV).

[138] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.

[139] Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.799/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, telah ditetapkan 13 wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas total wilyah KPH 1.099.827 ha, terdiri atas KPHP sebanyak 3 Unit dengan luas total 379.153 ha, dan KPHL sebanyak 10 Unit dengan luas total 720.674 ha.

Sebagian kawasan KPHP Unit IV Karossa dikelola oleh swasta melalui perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sejak 1975 oleh PT. Sulwood, PT. Rante Mario, dan PT. Zedsko Permai. Perusahaan tersebut telah membangun jalan sarad untuk mengangkut kayu dari tempat penebangan ke TPn dan membangun jalan utama untuk mengangkut kayu dari TPn ke logpond di pinggir pantai. Pembangunan jalan tersebut membuka akses bagi masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan. Jalan-jalan provinsi, jalan Negara, jalan kabupaten, dan jalan desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah pada umumnya adalah bekas jalan sarana dan jalan utama yang dibangun perusahaan HPH dan telah dikembangkan oleh Pemerintah. Akses untuk masuk ke dalam kawasan hutan, masyarakat meggunakan jalan tanah dan jalan pengerasan. Jarak permukiman dengan hutan pada umumya antara 1 – 5 km, dan jarak terjauh adalah 20 km.

Getah Damar
Sumber foto: KPH Karossa

Air Nira
Sumber foto: KPH Karossa

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Volume individu pohon di KPHP Unit IV Karossa relatif kecil menunjukkan tegakan hutan pada areal KPHP Unit IV Karossa adalah tegakan bekas tebangan yang pada saat ini sementara bertumbuh untuk mencapai diameter minimal untuk bisa ditebang sesuai aturan TPTI yakni sebesar 50 cm. Potensi kayu yang relatif besar dijumpa pada tegakan hutan tanaman yakni rata-rata sebesar 2,16 m3/pohon.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi dan produksi hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit IV Karossa tiap tahunnya menghasilkan 13,1 ton damar, 16.449, 1 ton rotan, 30 ton aren dan 36 ton kopi. Pengelololaam hasil hutan bukan kayu ini telah melibatkan 90 keluarga, belum termasuk yang mengelola damar dan rotan.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan yang dapat dikelola oleh KPHP Unit IV Karossa sebagai unit usaha KPH diantaranya terdiri potensi potensi wisata alam air terjun, pembangunan agrowisata, potensi pemanfaatan air domestik, potensi pemanfaatan aliran air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, serta potensi perdagangan karbon (*carbon trade*). ✣

Aktifitas KPH
Sumber foto:
KPH Kep. Selayar

65. KPHP UNIT X KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN

a. Gambaran Kawasan

Wilayah KPHP Unit X Kepulauan Selayar terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan seluas 20.901 ha[72] . Kawasan KPHP Unit X Kepulauan Selayar terbagi 3 resort meliputi : Resort Bontosikuyu, Resort Jampea, dan Resort Pulau Kalao. Luas wilayahnya Resort KPHP Unit X Kepulauan Selayar berdaasarkan fungsi kawasan hutan memiliki luas total 9811,86 ha untuk Hutan Lindung (HL), untuk Hutan produksi (HP) memiliki luas total 4029,94 ha, dan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas total 7059,55 ha.

Sekitar 15 desa yang berbatasan langsung dengan wilayah KPHP Unit X Kepulauan Selayar merupaka desa yang berbatasan langsung dengan pantai, yang diklasifikasikan menjadi desa Swasembada dan Swakarya. Populasi penduduknya sekitar 6.896 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata 51 jiwa/ km2, jumlah rumah tangga 4.593 KK, dan rata-rata anggota keluarga 3 orang per keluarga.

Ibukota Kepulauan Selayar yaitu Kota Benteng dapat ditempuh dari darat, laut maupun udara dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Jalur darat dapat ditempuh menggunakan bus dan mobil serta roda dua hingga ke pelabuhan Bira di Kabupaten Bukumba - waktu tempuhnya sekitar 6-7 jam. Perjalanan selanjutnya menggunakan kapal ferry menuju Pelabuhan Pammatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, waktu tempuhnya sekitar 2 jam. Jalur darat

[72] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.616/Menlhk-setjen/2015 tanggal 14 desember 2015.

Potensi HHBK Kemiri
Sumber foto:
KPH Kep. Selayar

dapat ditempuh dengan pesawat dari kota Makassar dengan tujuan Selayar membutuhkan waktu 45 menit dengan jadual penerbangan terbatas, hanya di hari selasa, kamis, dan sabtu.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu yang terdapat di KPHP Unit X Kepulauan Selayar berjumlah 117 jenis dengan rata-rata jumlah pohon sebanyak 75 pohon/ha. Potensi kayu di kawasan hutan KPHP Unit X Kepulauan Selayar didominasi oleh jenis kelumpang (*Sterculia spp.*), Angsana (*Pterocarpus indicus*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), bitti (*Vitex cofassus*),Jati (*Tectona grandis*), Bilalang, Bayam/Merbau (*Intsia spp.*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Bambu (*Bambusa vulgaris*), dan Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit X Kepulauan Selayar, tiap tahunnya menghasilkan 2.517,37 ton kemiri, 40,2 ton cengkeh, 4,3 ton pala, 15,67 ton aren, dan 19,5 ton kenari. Sekitar 1678 keluarga terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan di kawasan KPHP Unit X Kepulauan Selayar didominasi deretan perbukitan, dengan hamparan landscape kawasan yang bervariasi, yang dihiasi panaroma air terjun dan ngarai, selain itu juga disebagian pinggir kawasan terdapat panaroma pantai yang dapat dikembangkan menjadi wisata bahari. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah yang kaya akan potensi pariwisata dengan jenis yang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan di daerah ini yang memiliki daya tarik dengan pemandangan alam, air terjun, pantai, dan sungai.✣

Persemaian bibit oleh petugas
Sumber foto: KPH Ladongi

66. KPHP UNIT XII LADONGI, SULAWESI TENGGARA

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XII Ladongi terletak di wilayah Kabupaten Kolaka Timur[70] yang terdiri atas 8 Kecamatan dan 35 Desa, dengan luas 43.157,08 ha[71] . Kawasan KPHP Unit XII Ladongi terbagi kedalam beberapa bagian yaitu Hutan Lindung dengan luas 9.641,36 ha, Hutan Produksi 6.370,48 ha, dan Hutan Produksi Terbatas seluas 27.145,24 ha.

Aksesibilitas menuju kawasan KPHP Unit XII Ladongi wilayah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ditempuh melalui :

a. Transportasi jalan angkutan darat AKAP jalan Trans Sulawesi melalui terminal Rate-Rate
b. Transportasi laut melalui Kapal Ferry sebanyak 4 kapal/hari dan kapal superjet ke Kabupaten Kolaka
c. Transportasi udara melalui Bandara Sangia Nibandera dengan jadwal penerbangan 2 flight/hari all destination dilanjutkan dengan perjalanan darat melewati Kecamatan Pomala, Baula, Wunduluako dan Kolaka di Kabupaten Kolaka
d. Dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) ke Ibukota Kabupaten Kolaka Timur (Tirawuta) dapat dtempuh melalui jalan darat dengan jarak tempuh kurang lebih 1130 km dalam waktu sekitar 3-4 jam.

[70] KPHP Unit XII Ladongi berada di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan ibu kota Kabupaten terletak di KecamatanTirawuta, terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan dan 96 (Sembilan puluh enam) desa/kelurahan.

[71] Dimana wilayah Aere merupakan wilayah terluas sebesar 16.039,25 ha atau 37,16% dari luas wilayah Kabupaten Kolaka Timur, sedangkan wilayah Kecamatan Mowewe merupakan wilayah terkecil seluas 77,28 ha atau 0,18%. Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Timur pada 2014 berjumlah 132.423 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 68.733 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 63.690 jiwa. Kecamatan-kecamatan yang diperoleh datanya adalah Kecamatan Ladongi, Lambandia, Tirawuta, Mowewe, Uluwoi, Loea, Tinondo, Poli-Polia Lalolae, sedangkan Kecamatan yang belum memiliki data lengkap diantaranya Kecamatan Aere (Pemekaran dari Kecamatan Lambadia), Kecamatan Dangia dan Uesi. Jumlah penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Lambadia dengan jumlah penduduk sebesar 29.142 jiwa, sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Lalolae sebesar 3.701 jiwa. Jika ditinjau dari ke padatan penduduk maka kecamatan Ladongi merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yang sebesar 127,99 jiwa/ km2 , sedangkan kepadatan terendah terdapat di kecamatan Uluiwoi yaitu sebesar 3,52 jiwa/km2.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan hasil analisis data rekapitulasi kegiatan inventarisasi hutan biogeofisik kawasan KPHP Unit XII Ladongi memiliki potensi volume kayu rata-rata seperti kayu indah sebesar 0,09 m3/ha, kayu indah dua 84.71 m3/ha, rimba campuran lainnya 2.88m3/ha, Meranti/ kelompok komersil satu 3,45 m3/ha, rimba campuran/kelompok komersil dua 7,80 m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XII Ladongi tiap tahunnya menghasilkan 180 ton pinus, 240 ton rotan, 1.404.000 kilogram aren, 10 ton madu hutan. Sekitar 570 keluarga sudah dilibatkan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu ini.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan hutan merupakan potensi SDH yang perlu digali dan dimanfaatkan untuk kedepannya. Peran kondisi hutan di wilayah KPHP Unit XII Ladongi dalam jasa lingkungan yaitu sebagai menyediakan jasa air melalui kemampuannya sebagai regulator air, ini bermula dari fungsi hutan sebagai penyerap hujan. Selain itu memungkinkan air hujan tidak langsung jatuh ketanah sehingga dapat mencegah erosi permukaan. Terdapat beberapa sungai besar yang mengalir melalui areal KPHP Unit XII Ladongi yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengairan atau irigasi dan juga sebagai sumber air bersih, dengan demikian maka fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan dapat tergambarkan. ✣

Bentang alam
Sumber foto: KPH Ladongi

Proses pemanenan madu
Sumber foto:
KPH Gularaya

67. KPHP UNIT XXIV GULARAYA, SULAWESI TENGGARA

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XXIV Gularaya merupakan KPH lintas administratif yang melintasi 2 wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Total luasnya 115.363,01 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 43.688,38 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 65.920,85 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 3.643,72 ha dan Dampak Penting Cakupan Luas Strategis seluas 2.110,06 ha.

Potensi sumber daya manusia yang bisa dilibatkan untuk pengelolaan hutan lestari ke depan sangatlah besar. Jumlah penduduk di kabupaten Konawe Selatan tersebar dalam 24 kecamatan dengan jumlah penduduk 269.853 jiwa sedangkan jumlah penduduk di Kota kendari sebanyak 295.737 jiwa yang tersebar ke dalam 10 kecamatan.

Aksesibilitas menuju wilayah KPHP Unit XXIV Gularaya tergolong mudah untuk diakses dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak ibukota Provinsi dan Kabupaten Konawe Selatan sejauh 75 km dari Kota Kendari dengan akses jalan provinsi. Wilayah terjauh KPHP Unit XXIV Gularaya pada bagian selatan berjarak 55 km dari ibukota provinsi, sebelah barat sejauh 85 km dan sebelah timur sejauh 80 km. Terdapat 5 jalur utama yang berada dalam wilayah maupun sangat dekat dengan wilayah KPHP Unit XXIV Gularaya yaitu:
(1) Jalur Kendari – Moramo, (2) Jalur Kendari – Lainea – Kolono, (3) Kendari – Punggaluku – Andolo, (4) Kendari – Torobulu – Tinanggea dan (5) Kendari – Boro-Boro – Motaha.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi hasil hutan kayu di wilayah KPHP ini terdiri dari kayu rimba dan kayu jati. Potensi kayu semua jenis dalam wilayah KPHP Unit XXIV Gularaya pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah sebanyak 2.948.786,3 m3 dengan asumsi potensi rata rata per hektar 31,02 m3. Untuk jenis kayu perdagangan sebanyak 2.094.189,6 m3dengan asumsi potensi kayu rata-rata per hektar 22,03 m3 . Data potensi jati memiliki kerapatan tegakan 565 batang/ha atau total 4.570.777 batang dan rata rata volume 10,65m3/ha.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XXIV Gularaya, tiap tahunnya menghasilkan 600 ton rotan, 6.000 batang bambu, 12 ton sagu dan 600 liter madu hutan. Sayangnya belum ada data berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu ini.

3. Jasa Lingkungan

Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di wilayah KPHP Gularaya yang dapat dikembangkan seperti ekowisata air terjun Moramo dan ekowisata permandian air panas Kaendi.✣

Tanaman kopi sawah
Sumber foto:
KPH Gularaya

Tegakan Sagu
Sumber foto:
KPH Gularaya

Sagu tanpa pati
Sumber foto:
KPH Gularaya

68. KPHP UNIT XI MEKONGGA SELATAN, SULAWESI TENGGARA

a. Gambaran Wilayah
Wilayah KPHP Unit XI Mekongga masuk dalam Kabupaten Kolaka dan tersebar pada 7 kecamatan dengan luas total 50.680,28 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 11.772,07 ha, Hutan Produksi seluas 17.538,86 ha dan hutan Produksi Terbatas seluas 21.369,35 ha.di antara lain: Kecamatan Polinggona, Tanggetada, Watubangga, Pomalaa, Wundulako, Baulu dan Kolaka. Kawasan KPHP Unit XI Mekongga Selatan.

Penduduk dalam wilayah kelola KPHP Unit XI Mekongga Selatan tersebar dalam 7 kecamatan dan 27 desa. Jumlah total penduduk dalam wilayah kelola KPHP ini sejumlah 27.394 jiwa, perbandingan

b. Potensi Sumberdaya Hutan
1. Hasil Hutan Kayu
Wilayah KPHP Unit XI Mekongga Selatan didominasi oleh ekosistem hutan dengan penutupan hutan lahan kering sekunder, dengan komposisi penyusun vegetasi sangat bervariasi. Jenis pohon yang mendominasi yaitu jenis Pololi (*Lithocarpus cf. pseudomolucca*), Bintangur (*Calophyllum inophyllum*), Kondole (*Baccaurea costulata*), Dao (*Dracontomelon mangiferum B.L*) dan jenis lainnya.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XI Mekongga Selatan, tiap tahunnya menghasilkan 5 ton rotan, 1 hingga 3 ton nilam dan 50 -100 kilogram cengkeh. Sayangnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu belum didata.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan yang dirasakan manfaatnya yaitu jasa lingkungan air dan wisata alam. Jasa lingkungan air dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penyedia air bersih dan irigasi pertanian. Potensi wisata alam yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu terdapat di Desa Sopura, Oko-Oko dapat dimanfaatkan sebagai wisata *camping ground* dan *tracking*, Desa Lamedai dengan cagar alamnya sebagai wisata pendidikan. ✣

Potensi Jasling
Pulau Labengki
Sumber foto: KPH Mahawana Sejuk

69. KPHP UNIT XIX BINA MAHAWANA SEJUK, SULAWESI TENGGARA

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk berada di Kabupaten Konawe Utara provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan daerah pemekaran dari kabupaten konawe pada tahun 2007. Luas Wilayah KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk berdasarkan Hasil analisis GIS Sebesar 113.562,88 ha yang tersebar secara administrasi di 7 kecamatan dan 35 Desa. Kawasan KPHP ini menurut fungsinya terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 22.522,50 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 65.981,56 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 25.058.81 ha.

Wilayah KPHP Sejuk berhimpitan langsung dengan masyarakat yang berada di Kabupaten Konawe Utara, yang berpenduduk sekitar 37.527 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 14 jiwa/km2 yang tingkat kepadatan tertinggi terdapat dikecamatan Lasolo sebanyak 42 jiwa/km2 dan yang terendah terdapat di kecamatan Wiwirano dan Oheo sebanyak 5 jiwa/km2. Mata pencaharian masyarakat sekitar KPHP umumnya petani, perkebunan, perikanan, pengrajin/ industri kecil dan jasa angkutan. Adapun sebagian besar masyarakatnya berasal dari suku Tolaki, dan beberapa suku pendatang suku Bugis, Jawa dan Bali yang kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani.

Aksesibilitas menuju KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk sangat beragam disebabkan oleh wilayah KPHP terletak pada jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Akses dari KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk menuju Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara - Kendari dapat ditempuh melalui transportasi darat, selama 4 jam.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Kawasan KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan kayu dan non kayu pada areal hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas(HPT), sedangkan pada kawasan hutan lindung (HL) dimanfaatkan untuk jasa lingkungan dan ekowisata alam. Potensi kayu Berdasarkan hasil pengolahan terhadap hasil pengambilan data lapangan sebanyak 18 sampel plot, terdapat 64 jenis kayu yang terdapat di kawasan KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk baik endemik sulawesi utara maupun bukan masih banyak tersebar dan belum menjadi kategori flora terancam punah, dan juga terdapat kayu komersil yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga memungkinkan upaya pengembangan tanaman kehutanan yang mampu mendatangkan investor.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk tiap tahunnya menghasilkan 5 ton damar , 80 ton rotan dan 132 ton lada. Sekitar 286 kekuarga terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan yang dapat dikembang-kan pada KPHP ini berdasarkan hasil Inventarisasi biogeofisik kawasan dan sosial budaya adalah permandian di Desa sambandete, kawasan ini menjadikan kawasan wisata masyarakat sekitar, selanjutnya wisata alam yang dapat dikembangkan di wilayah KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk adalah wisata buatan, yaitu pembuatan arena lintasan offroad pada kawasan jalan sawit, selain itu adanya lokasi penangkaran Buaya Muara yang aman dan tidak menjadi daerah transportasi air. ✣

Getah Damar
Sumber foto: KPH Mahawana Sejuk

Pengamanan Kayu hasil pengamanan Hutan
Sumber foto: KPH Mahawana Sejuk

Potensi HHBK Lada
Sumber foto: KPH Mahawana Sejuk

Bentang Alam
Sumber foto:
KPH Wae Apu

70. KPHP UNIT II WAE APU, MALUKU

a. Gambaran Wilayah

Wilayah kelola KPHP Unit II Wae Apu[122] terletak di Pulau Buru[123] di Kabupaten Buru[124]. KPHP ini meliputi 62 desa dan 75 dusun pada 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Namlea (7 desa, 9 dusun), Kecamatan Air Buaya (10 des, 9 dusun), Kecamatan Waeapo (7 desa, 8 dusun), Kecamatan Waplau (10 desa, 3 dusun), Kecamatan Lolong Guba (10 desa, 24 dusun), Kecamatan Fena Leisela (13 desa, 22 dusun), dan Kecamatan Lilialy (5 desa). KPHP Unit II Wae Apu memiliki areal seluas 232.432 ha[125] , yang terdiri atas Hutan Lindung seluas 73.478 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 96.032 ha, dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 62.921 ha.

Pada 2013, jumlah penduduk Kabupaten Buru sebanyak 120.181 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 61.608 jiwa, dan perempuan 58.573 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 7.595,58 km2, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Buru sebesar 15,82 jiwa/km2.Penyebaran penduduk di Kabupaten Buru kurang merata. Hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk yang berbeda secara signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Daerah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Waeapoyaitu 113,71 jiwa/km2dan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Fena Leisela yaitu 3,96 jiwa/km2.

[122] Berdasarkan Surat Perintah Gubernur Maluku No. 421.2-131 Tahun 2017 Tanggal 17 Mei 2017 tentang Pelaksana Tugas UPTD KPH Kabupaten /Kota Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ada perubahan naam KPHP unit II Wae Apu menjadi KPH Buru.

[123] KPHP Unit II Wae Apu berbatasan dengan : sebelah utara dengan Laut Seram; selatanberbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan danLaut Banda; di timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Kayeli dan Kecamatan Batabual (Selat Manipa); di barat berbatasan dengan Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan.

[124] Kabupaten Buru memiliki luas wilayah 7.594,98 km² yang terdiri atas wilayah daratan seluas 5.577,48 km² dan wilayah lautan/perairan seluas 1.972,50 km², dengan panjang garis pantai 232,18 km².

[125] Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 770/Menhut-II/2012. Namun, berdasarkan hasil perhitungan sebaran spasial, luasnya 251.891,70 ha yang meliputi Kawasan Hutan Lindung seluas 84.629,68 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 99.669,37 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 67.592,65 ha (sekitar 45% dari luas daratan Kabupaten Buru).

Akses menuju wilayah kelola KPHP Unit II Wae Apu ditempuh melalui jalur barat, utara dan selatan dari ibukota Kabupaten Buru di Namlea. Wae Apu terletak di Pulau Buru yang memiliki garis pantai yang panjang dan topografi wilayah bergunung.Hal tersebut menjadikan wilayah dataran hanya dijumpai di pesisir pantai. Transportasi darat belum memadai. Sebagian besar perjalanan k ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, sedangkan desa/ kampung yang berada di pegunungan ditempuh dengan berjalan kaki. Sarana perhubungan dari Kota Ambon ke ibukota Kabupaten Buru (Namlea) sendiriditempuh dengan menggunakan sarana transportasi laut berupa kapal motor, baik swasta maupun Lambelu (PT PELNI).

b.Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Kelompok hutan Pulau Buru bagian barat berdasarkan tipe iklimnya maka wilayah bagian utara termasuk dalam tipe hutan musim (*monsoon forest/ tropical moist deciduous forest*), sedangkan bagian selatan termasuk tipe hutan hujan tropika bawah (*lowland evergreen tropical rain forest*). Secara umum, penyebaran potensi pada kedua kelompok hutan tersebut didominasi oleh jenis meranti (*Shorea sp*) dari famili *Dipterocarpaceae* dengan potensi tegakan 64,82 m3/ha (89,2%), yang meliputi meranti merah terapung (*Shorea selanica*) dan meranti merah tenggelam (*Shorea platicarpa Mei*). Jenis-jenis lain yang banyak terdapat diantaranya kayu putih (*Melaleuca leucadendron*)dengan potensi 2,53 m3/ ha (2,3%), Uhun (*Eucaliptosis papuana CT*) 2,46 m3/ha (4,00%).

Hasil inventarisasi pada 3 plot sampling ditemukan ada 19 jenis pohon, dengan jumlah 360 pohon dan volume sebesar 1.387,34 m3.Tegakan pada plot pengukuran didominasi oleh jenis uhun (*Eucalyptopsis papuana*) dengan jumlah

Potensi HHBK Lebah Madu
Sumber foto: KPH Wae Apu

pohon sebanyak 180 pohon dan volume 842,25 m3, meranti (*Shorea selanica Bl.*) dengan jumlah pohon sebanyak 65 pohon dan volume 366,9 m3, serta jenis halaur (*Palaqium sp*) dengan jumlah pohon sebanyak 38 pohondan volume 96,95 m3.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit II Wae Apu tiap tahunnya menghasilkan 600 ton sagu, 5 – 6 ton gaharu, 7 – 8 ton damar , 7500 batang bambu, 4200 liter madu dan 300 ton kayu putih. Sekitar 5810 keluarga ikut terlibat mengelola hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan

Selain itu, jasa lingkungan cukup berpotensi di daerah tersebut. Potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di wilayah KPHP Unit II Wae Apu yang dapat dikembangkan seperti Danau Rana yang direncanakan sebagai pusat pembangunan Objek wisata oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru. Selain itu terdapat dua buah gunung dengan ketinggian yang rendah serta non aktif. Gunung tertinggi adalah Gunung Rana (Kecamatan Air Buaya) dengan ketinggian mencapai 2.000 meter, Gunung Batabual (Kecamatan Batabual) dengan ketinggian mencapai 1.731 meter.

Bentang alam spesifik yang terdapat di lokasi Inventarisasi Wilayah KPHP Model Unit II Wae Apu dengan deretan bukit dan gunung yang membujur di sebelah timur sampai ke barat dan dari utara sampai selatan, antara lain Kaku (Gunung) Kepala Madan, Kaku Date, Kaku Mortinafina, Kaku Djaga dan lainnya, serta terdapat sungai-sungai kecil dan besar, seperti Wae Apu, Wae Nibe, Wae Pude, Wae Mangit, Wae Ili dan Wae Langa dengan kondisi berbatu dan berpasir. Dari kondisi tersebut membentuk aliran sungai dari riam sampai air terjun dengan fenomena alam yang khas sebagai pemisah/penyangga yang membedakan struktur, tipe vegetasi hutan dan jenis ekosistem.Sementara untuk potensi jasa lingkungan lainnya,yaitu penyedia sumberdaya air, penyedia jasa wisata alam dan sebagai penyerap karbon. ✣

71. KPHP UNIT III WAE TINA, MALUKU

a. Gambaran Wilayah

BKPHP Unit III Wae Tina terletak di Pulau Buru dan Pulau Ambalau, wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Luas wilayah pengelolaan KPHP seluas 205.134,93 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 51.436,56 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 66.792,13 ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas 86.906,24 ha.

Penduduk sekitar wilayah KPHP Unit III Wae Tina tersebar ke dalam empat kecamatan (kec. Leksula, Namrole, Waesama, Ambalau) dengan jumlah total penduduk 46.951 jiwa. Mata pencaharian sebagain besar penduduk sekitar KPHP yaitu petani, pengumpul hasil hutan dan nelayan.

Aksesibilitas menuju kawasan KPHP Unit III Wae Tina dapat melalui jalur darat dan laut. Perjalanan melalui jalur darat dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat melewati jalan aspal dan jalan tanah sedangkan jalur laut dapat menggunakan *longboat*. Jalan menuju pinggiran lokasi kawasan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Jenis hasil hutan kayu yang ditemukan di wilayah KPHP Unit III Wae Tina yaitu jenis Meranti dan jenis rimba campuran seperti meranti, kayu sapin, kayu merah, laku dan kamlanga.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi atau produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit III Wae Tina, tiap tahunnya adalah 144 ton damar dan 980 kilogram kayu putih, dengan melibatkan sekitar 155 keluarga.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan berpotensi besar untuk dikembangkan di wilayah KPHP yaitu Dana Rana di Kabupaten Buru. Selain itu terdapat sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk wisata arum jeram. ✣

Pembuatan Briket Arangu
Sumber foto: KPH Gunung Sinopa

72. KPHP UNIT X GUNUNG SINOPA, MALUKU UTARA

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP unit X Gunung Sinopa[86] berada dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, yang mencakup dua kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan. Luas wilayah KPHP unit X Gunung Sinopa adalah 41.823,24 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 19.453,04 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 15.317,43 ha, dan Hutan Produksi dengan luas 7.052,77 ha.

Penduduk sekitar kawasan KPHP unit X Gunung Sinopa tersebar dalam 4 kecamatan yaitu kec. Weda, Weda selatan, Oba, dan Oba selatan. Jumlah penduduk dalam 4 kecamatan tersebut sebanyak 27.585 jiwa dengan kepadatan penduduk 18 jiwa/km2.

Kawasan KPHP unit X Gunung Sinopa dapat didatangi melalui jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan rute : (1) Jalan kolektor provinsi Sofifi – Payahe terdapat di sepanjang pantai Barat dari kawasan. (2) Jalan kolektor provinsi Payahe (Kota Tidore Kepulauan) – Weda (Kabupaten Halmahera Tengah) ini berada di tengah-tengah kawasan dan berarah ke Timur.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu yang teridentifikasi sebanyak 104 jenis pohon. Jenis pohon yang paling dominan adalah Bintangur (*Callophyllum inophyllum L.*), Kayu Besi (*Intsia bijuga O. Kt.Ze.*), Kayu Hitam (*Diospyros rumpii Bakh*), Hiru (*Vatica*

[86] Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016 Tgl 28 Des 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara ada perubahan kelembagaan KPHP Unit X Gunung Sinopa digabung dengan KPHP Unit IX Oba menjadi KPH Tidore Kepulauan.

papuana), dan Mologotu (*Diospyros ebenum Koen*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit X Gunung Sinopa, tiap tahunnya menghasilkan 60 kilogram gaharu, 2.160 ton damar, 12 ton rotan dan 3,2 liter madu hutan. Sekitar 51 keluarga terlibat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan yaitu Wisata alam Air terjun Sigela, Telaga Yonli (Danau Kenanga) yang potensial dikembangkan sebagai sumber air bersih dan sumber air minum. ✣

Pembuatan Briket Arang
Sumber foto: KPH Gunung Sinopa

73. KPHP UNIT XIII BACAN, MALUKU UTARA

a. Gambaran Wilayah
Wilayah KPHP unit XIII Bacan[67] berada pada 14 wilayah kecamatan di Provinsi Maluku Utara dengan luasan 140.808 ha, terdiri dari Hutan Lindung seluas 62.840 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 70.186 ha dan Hutan Produksi seluas 7.782 ha.

KPHP unit XIII Bacan berada di Halmahera Selatan yang merupakan kabupaten yang berbasis kepulauan. Bacan bisa ditempuh dari Ternate setelah menggunakan pesawat atau kapal laut. Waktu tempuh dengan menggunakan pesawat selama 20 menit, sedangkan lama perjalanan laut dari Ternate ke Babang sekitar 8 jam. Perjalanan Babang ke Labuhan dapat menggunakan kendaraan umum roda empat selama selama 30 menit.

b. Potensi Sumberdaya Hutan
1. Hasil Hutan Kayu
Potensi sumberdaya hutan kayu yang ada di KPHP unit XIII Bacan yaitu teridentifikasi yaitu jenis meranti (69,7 m3/ha), kenari (108 pohon) dan nyatoh (98 pohon).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XIII Bacan tiap tahunnya menghasilkan: 180 – 360 ton Damar, namun belum didata berapa masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu tersebut.

[67] Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016 Tgl 28 Des 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara ada perubahan nama dari KPHP Unit XIII Bacan menjadi KPH Halmahera Selatan.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan yang potensial untuk dikembangkan yaitu wisata alam seperti Pantai Kupal dan Pantai Nusa Ra di Kecamatan Bacan, b) Pantai Tawa di Kecamatan Bacan Timur, c) Kepulauan Gura Ici di Kecamatan Kayoa, dan d) beberapa air terjun, misalnya air terjun Inggoi dan Bibinoi. Selain itu juga terdapat wisata sejarah berupa Keraton, Mesjid Sultan dan Mahkota Sultan peninggalan Kesultanan Bacan serta benteng pertahanan peninggalan bangsa Portugis dan Belanda. ✣

Proses Pemanenan Getah damar
Sumber foto: KPH Gane

74. KPHP UNIT XII GANE, MALUKU UTARA

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XII Gane[135] berada di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan provonsi Maluku Utara. KPHP ini ditetapkan Menteri Kehutanan pada 2010 dengan luas 175.671 ha[136] . Luas tersebut menyusut menjadi 171.662 ha karena perubahan tata batas, sampai dengan juni 2016 luasan perubahan fungsinya adalah kawasan HL seluas 56.115,89 ha, Fungsi kawasan HPT seluas 41.208,26 ha, dan fungsi kawasan HP seluas 74.337,85 ha.

Kawasan KPHP ini berhimpit dengan desa-desa dalam Kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (10.448 jiwa), dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 463,50 jiwa/Km2. Jumlah penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kayoa Utara (2.864 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 39.22 jiwa/km2.

Akses menuju kawasan KPHP Unit XII Gane bisa dilakukan lewat jalan darat. Kondisi jalan yang ada pada setiap kecamatan yang menjadi wilayah KPHP Unit XII Gane sebagian besar sudah beraspal, kerikil, tanah. Letak sarana jalan tersebut berada di dalam maupun di luar atau pinggiran areal kerja KPHP sehingga memudahkan menjangkau kawasan KPHP menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

[135] Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016 Tgl 28 Des 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan.
[136] Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010. Secara geografis KPHP Unit XII Gane memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : a) sebelah Utara berbatasan dengan KPHP Model Gn. Sinopa. b) sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram, c) sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, d) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

KPHP Unit XII Gane merupakan wilayah KPH di wilayah Provinsi Maluku Utara yang memiliki keragaman hayati yang cukup tinggi. Khususnya dari jenis kayu yakni kayu mologotu (*Diospyros ebenum Koen*), binuang (*Octomeles sumatrana*), marfala (*Lagerstromia ovaliafolia T.et. B*), bedenga (*Neonauclea spp.*), bamboo (*Bambusa spp.*), aren (*Arenga pinnata Merr.*) dan jenis-jenis palma lainnya.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi dan produksi hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit XII Gane tiap tahunnya menghasilkan 360 ton damar, namun belum ada data tentang jumlah masyarakat yang terlibat.

3. Jasa Lingkungan

Kawasan KPHP Unit XII Gane memiliki potensi jasa lingkungan dan wisata seperti air terjun di Desa Tokaka Kecamatan Gane Barat Utara. Air terjun ini memiliki potensi digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pada beberapa titik aliran sungai pada DAS terbesar yakni DAS Ake Lamo Halsel dan Das Kuala Fida dapat dikembangkan pembangkit listrik skala kecil, industri air bersih untuk kebutuhan air minum masyarakat, suplai air untuk kebutuhan pertanian lahan basah (sawah dan tambak ikan), serta untuk wisata petualangan alam (arung jeram). ✣

Potensi Jasa
Lingkungan Pulau Widi
Sumber foto:
KPH Gane

Aktifitas Pelatihan
Madu Trigona
Sumber foto:
KPH Oba

75. KPHP UNIT IX OBA, MALUKU UTARA

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XI Oba[140] terletak di tiga kecamatan yakni Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah dan Oba Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Luas wilayahnya sekitar 19.211,916 ha[141] dengan rincian Hutan Lindung seluas 18.572,984 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 19.211,916 ha.

Jumlah penduduk di tiga kecamatan dalam wilayah KPHP sejumlah 32.950 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamantan Oba Utara sebanyak 14.031 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 37,32 jiwa/km^2. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kota Tidore Kepulauan yaitu sebagai petani dan nelayan.

Mencapai Wilayah KPHP Unit IX Oba dapat menggunakan jalur darat dan jalur air. Jalur darat melalui trans Sofifi-Weda memiliki sarana jalan yang baik. Kecamantan Oba Tengah dan Kecamatan Oba letaknya dekat Ibuktoa Provinsi Maluku Utara (Sofifi) sehingga memiliki aksesibilitas yang baik seperti jalan aspal dan sirtu. Selain itu menuju kawasan KPHP dapatn menggunakan jalur sungai besar seperti Sungai Oba, Sungai Tobatu, Sungai Toburo, Sungai Lamo, Sungai Roral dan Sungai Bai. Untuk menunju wilayah KPHP Unit IX Oba dari ibu Kota Tidore Kepulauan dapat menggunakan speedboat dengan waktu tempuh selama lebih kurang 30 menit.

[140] Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016 Tgl 28 Des 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara ada perubahan nama dari KPHP Unit IX Oba menjadi KPH Tidore Kepulauan.

[141] Berdasarkan SK. 302/Menhut-II/2013.

Jasling Air terjun Sigela
Sumber foto: KPH Oba

Potensi HHBK Madu Trigona
Sumber foto: KPH Oba

a. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi sumberdaya hutan kayu yang ada di KPHP Unit XI Oba yaitu kayu yang memiliki nilai komersial tinggi di pasaran antara lain : jenis Hiru (*Vatica papuana Dyer*), Marsawa (*Anisoptera costata Korth*), dan Kayu Besi (*Intsia biyuga*).

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Potensi dan produksi hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit IX Oba tiap tahunnya dihasilkan 12 ton rotan, 2400 batang bambu, 2400 buah aren, dan 120 ton damar. Kegiatan ini telah melibatkan sekitar 40 keluarga.

3. Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan yang menjadi daya tarik di kawasan KPHP yaitu wisata alam berupa Air Terjun (Petak 176) di desa Sigela Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan. Air terjun tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik (mikro-hidro), sumber air minum, perikanan darat, dan irigasi pertanian. ✣

Proses Pemanenan Sagu
Sumber foto: MFP3

76. KPHP UNIT V SORONG SELATAN, PAPUA BARAT

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit V Sorong Selatan terletak pada lima distrik, yaitu Distrik Moswaren, Wayer, Teminabuan, Kais, Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Berdasarkan SK.771/Menhut-II/2012, KPHP Sorong Selatan seluas 283.260 ha, terdiri dari kawasan Hutan Lindung 121.361 ha, Hutan Produksi Terbatas 88.710 ha dan Hutan Produksi tetap 73.189 ha.

Aksesibilitas menuju Kawasan KPHP Unit V Sorong Selatan terbilang mudah karena sudah terdapat infrastruktur jalan darat. Menuju kawasan KPHP, dapat diakses melalui Ibukota Kabupaten Sorong Selatan dengan waktu tempuh 2 hingga 3 jam menggunakan jalur darat. Penduduk Kabupaten Sorong Selatan tersebar di 13 kecamatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 sebanyak 60.619 jiwa dengan kepadatan penduduk 1 jiwa/km2.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi hasil hutan kayu masih sangat tinggi di areal KPHP ini. Jenis kayu komersial di KPHP Unit V Sorong Selatan yaitu jenis kelompok Meranti.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit V Sorong Selatan, tiap tahunnya menghasilkan 30 ton sagu dan 3.227,04 kilogram damar. Ada sekitar 75 keluarga yang terlibat mengelola sagu, sedangkan masyarakat yang terlibat mengelola Damar belum didata.

3. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan yang dimanfaatkan di KPHP Unit V Sorong Selatan adalah jasa lingkungan air. Danau tersebut dimanfaatkan sebagai resapan air sekaligus areal perlindungan sumber air serta memiliki potensi air yang dapat dibuat komoditi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. ✣

Sagu siap Jual
Sumber foto: MFP3

77. KPHP UNIT XVII WAROPEN, PAPUA

a. Gambaran Wilayah

Wilayah KPHP Unit XVII Waropen[68] termasuk dalam wilayah Kabupaten Waropen Provinsi Papua dan berada dalam Distrik Inggerus dan Wapoga. Luas wilayah KPHP ini berdasarkan mencapai 185.957,46 ha[69] yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 83.632,71 ha, Hutan Produksi seluas 97.419,69 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 4.905,06 ha.

Penduduk sekitar wilayah KPHP Unit XVII Waropen tersebar dalam enam kampung yaitu kampung Somiangga, Awaso, Demisa, Firo, Awera, dan Pirare. Jumlah penduduk dari 6 kampung tersebut sebanyak 592 jiwa dengan kepadatan penduduk 68,6 jiwa/km2. Tipologi masyarakat sekitar hutan di KPHP ini terbagi menjadi 2 kelompok yaitu petani dan pemburu.

Aksesibilitas menuju kawasan KPHP terbilang agak sulit karen hanya dapat melalui jalur perairan yaitu melewati sungai Wapoga. Jalur sungai ini juga hanya dapat dilalui oleh kapal/perahu kecil seperti jolor, dan perahu long boat bermesin motor tempel. Transportasi menuju KPHP juga tergantung pada cuaca. Waktu tempuh dari ibukota Kabupaten Waropen menuju KPHP sekitar 3-4 jam menggunakan *long boat*. Rata-rata waktu jarak tempuh antar kampung di sekitar wilayah KPHPsekitar 1-3 jam.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Potensi kayu minimum yang dapat diproduksi berdasarkan perhitungan yaitu 2.622m3/tahun dan maksimum 3.799 m3/tahun. Jenis-jenis pohon dominan yang ditemui di wilayah KPHP

[68] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 821.1/877 Tanggal 8 Maret 2017 Tentang Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Papua ada perubahan nama lembaga dari KPHP Unit XVII Waropen menjadi KPHP Waropen.

[69] Sesuai SK 782/Menhut-II/2012.

Kawasan Kelola KPH
Sumber foto:
KPH Waropen

Waropen antara lain ketapang, merbau, matoa, pulai, nyatoh, mersawa, bipa, resak, dan jenis-jenis lainnya.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu
Terdapat 180 Jenis hasil hutan bukan kayu yang ada di KPHP Unit XVII Waropen Produk unggulan hasil hutan bukan kayu tiap tahunnya menghasilkan 75 ton sagu, 50 ton gaharu dan 100 ton pinang.

3. Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan yang dikembangkan di KPHP Unit XVII Waropen yaitu pariwisata alam. ✣

Petugas KPH untuk Menanggulangi Kebakaran hutan
Sumber foto: KPH Nduga

78. KPHP UNIT XLIII NDUGA, PAPUA

a. Gambaran Wilayah

KPHP Unit XLIII Nduga berada di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Kabupaten Nduga[126] yang beribukota di Kenyam, memiliki luas 12.941 Km2 atau 4,08% dari luas Provinsi Papua. Wilayah KPHP Unit XLIII Nduga[127]memiliki dua fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Luas Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 175,226 ha, sedangkan luas Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 82,846 ha.

Aksesibilitas kawasan KPHP Unit XLIII Nduga, relatif agak sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa sungai dan anak sungai yang tidak biasa dijadikan jalur transportasi. Hanya perahu long boat bermesin motor tempel. Selain itu lancarnya jalur tranportasi kewilayah KPHP sangat tergantung pada cuaca laut.

b. Potensi Sumberdaya Hutan

1. Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, tentang Kawasan hutan dan Konservasi Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Papua, KPHP Unit XLIII Nduga terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Hasil inventarisasi potensi kayu komerisal dan kayu indah adalah meranti, rimba campuran, dan kayu indah.

[126] Sebelah Barat kabupaten Nduga berbatasan dengan Jila. Sebelah Timur berbatasan dengan Pelebaga dan Wamena. Sebelah Utara berbatasan dengan Kuyawage, Balingga, Pirime dan Makki. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawaerma, Asmat.

[127] Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 821.1/877 Tanggal 8 Maret 2017 Tentang Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Papua ada perubahan nama dari KPHP Unit XLIII Nduga menjadi KPHP Nduga.

HHBK Buah Merah
Sumber foto:
KPH Nduga

Pemanfaatan jasling
untuk air kemasan
Sumber foto:
KPH Nduga

Petugas KPH untuk
Menanggulangi
Kebakaran hutan
Sumber foto:
KPH Nduga

Potensi atau Produk unggulan hasil hutan bukan kayu di KPHP Unit II Wae Apu tiap tahunnya menghasilkan 600 kilogram gaharu, 400 kilogram damar, 300 kilogram rotan, 50 ribu batang bambu, 650 kilogram sarang semut. ✣

BAB TIGA
KOMODITAS

www.inspirasipertanian.com

GAHARU

Sebanyak 10 KPHP memiliki potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) gaharu dengan 9 KPHP yang telah melakukan produksi gaharu, dengan jumlah produksi sebesar 375,18 ton/ tahun dengan melibatkan 602 keluarga.

Gaharu bernilai ekonomi tinggi selain karena harum, produk turunannya memiliki manfaat tinggi. Gaharu merupakan bahan produk kosmetik, yaitu parfum, sabun, lotion, pembersih wajah, dan krim gaharu. Gaharu dapat diolah menjadi obat-obatan. Khasiat gaharu sebagai obat-obatan untuk penyakit hepatitis, sakit perut, alergi, liver, malaria, rhematik, TBC, dan tonikum (Firmansyah 2015). Produk turunan lain seperti aroma terapi, kopi gaharu, dan gelang gaharu juga merupakan produk yang cukup laris di pasaran. Harga kopi gaharu mencapai Rp 250 ribu/15 sachet. Krim gaharu untuk asam urat dan keseleo dibanderol Rp 250 ribu/20 gram. Di lapang harga gaharu berkisar antara 1 juta -25 juta perkilogramnya tergantung kualitas gaharu.

Gaharu merupakan kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Terdapat delapan genus pohon penghasil gaharu di Indonesia yaitu Aquilaria malaccensis, Gyrinops spp, Aetoxylon spp, Gonystylus spp, Enkleia spp, Wiekstroemia spp, Dalbergia sp, dan Excoccaria sp (Sumarna 2012). Gaharu dapat dibudidayakan atau tumbuh secara liar. Tanaman yang menghasilkan resin harum dan berharga mahal tersebut dapat tumbuh atau dibudidayakan di hutan maupun lahan perkebunan. Lahan yang cocok untuk budidaya gaharu sebagian besar adalah lahan-lahan marginal dengan kesuburan rendah, iklim panas, dan curah hujan kurang dari 1000 mm/tahun. Karena kondisi lahan tersebut merupakan daerah yang cepat menghasilkan gaharu (Sumarna 2012).

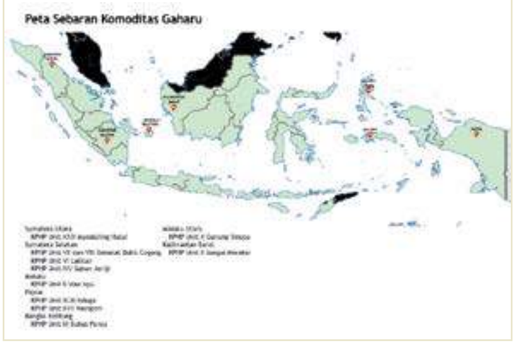

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI GAHARU

No	Nama KPHP	Potensi (Kg)	Produksi (Kg/Th)	Masyarakat Yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	50	50	30
2	KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong	7.000	7000	-
3	KPHP Unit X Gunung Sinopa	60	60	-
4	KPHP Unit XVII Waropen		50.000	
5	KPHP Unit II wae Apu		6.000	100
6	KPHP Unit XLIII Nduga	600		
7	KPHP Unit III Bubus Panca		230	
8	KPHP KPHP Unit X Sungai Merakai		300.000	400
9	KPHP Suban Jeriji		124.000	72
10	KPHP Unit VI Lakitan		10.000	
	Jumlah (Ton)	**7,66**	**375,18**	**602**

www.gaharusuperkalbar.com

gaharu-www.agrotani.com

www.salamoru.com

GETAH DAMAR

Terdapat 16 KPHP yang memiliki potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berbentuk getah damar. Empat KPHP baru memiliki data potensi sedangkan 12 KPHP lainnya sudah memiliki produksi sebesar 1.789,936 ton/tahun. Harga yang dipatok untuk komoditas ini berkisar antara Rp. 2.500 – 40.000/Kg.

Damar (Agathis dammara) merupakan pohon anggota tumbuhan gymnospermae. Pohon yang dapat tumbuh hingga 65 m ini memiliki tipe batang silindris dengan diamater dapat melebihi 1,5 m. Pohon damar tumbuh secara alami di hutan hujan dataran rendah hingga ketinggian 1200 mdpl. Secara umum, getah damat mudah larut dalam minyak atsiri, mudah merekat, dan kayunya rapuh (Mulyono dan Apriyantono 2004).

Damar dibudidayakan untuk diambil getah atau hars nya. Getah damar dapat diolah menjadi Kopal, yaitu bahan dasar cairan pelapis kertas supaya tinta tidak menyebar. Pohon penghasil kopal bernilai ekonomis tinggi tersebut termasuk ke dalam komoditas ekspor Indonesia. Selain digunakan untuk membuat pernis, getah damar dapat dimanfaatkan sebagai bahan perekat, sumber bahan bakar, dan sumber pengobatan (Andhika et al 2016). Getah damar juga dapat diolah menjadi bahan industri, seperti campuran produk plastik, tekstil, cat, bahan plester, dan korek api. Getah damar mengandung senyawa aktif amentoflavon yang dapat mengobati HIV. Selain itu, getah damar juga dapat diolah menjadi obat untuk gangguan memori. Terdapat juga aromatik dan pewarna batik berbahan getah damar. Pada zaman dahulu, getah damar juga diolah untuk menjadi bahan bakar lampu petromak.

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI GETAH DAMAR

No	Nama KPHP	Potensi (Kg)	Produksi (Kg/Th)	Masyarakat Yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	10.000		
2	KPH Wil. V Boalemo		708.586	15
3	KPHP Unit 1 Pogogul		12.000	3
4	KPHP Unit XX Balantak		360.000	123
5	KPHP Unit XVII Sivia Patuju (Tojo Una Una)		348.000	15
6	KPHP Unit XI Sintuwu Maroso (Rano Patanu)	5.000.000		100
7	KPHP Unit X Gunung Sinopa		180.000	15
8	KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk		5.000	50
9	KPHP Unit XXIII Lamandau, KPHP Unit XXIV, dan JPHP XXV		300	25
10	KPHP Unit II Wae Apu		8.000	150
11	KPHP Unit XLIII Nduga			
12	KPHP Unit IV Karossa	13.100		
13	KPHP Unit IX Oba	120.000		
14	KPHP Unit III Wae Tina		144.000	75
15	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri		24.000	10
16	KPHP Unit XVI Gunung Mas		50	10
	Jumlah (Ton)	**5.143,1**	**1.789, 936**	**618**

manfaat.co.id

www.adventurose.com

ROTAN

Indonesia memiliki potensi hasil hutan bukan kayu rotan sangat tinggi. Dibuktikan dengan sebaran komoditas rotan tersebar pada 75 KPHP. Terdapat 28 KPHP yang telah melakukan inventarisasi dan produksi komoditas rotan (Tabel 1). KPHP yang telah melakukan produksi komoditas rotan sebanyak 28 KPHP dengan jumlah produksi mencapai 239.423 batang/tahun dan 149.538,91 ton/tahun. Harga rotan sangat bervariasi tergantung jenis, kualitas dan ukuran untuk rotan batangan harga berkisar antara Rp. 1.000-30.000/batang, sedangkan rotan yang dijual kiloan memiliki kisaran harga Rp. 650-30.000/kg.

Rotan adalah HHBK dengan batang beruas panjang, tidak berongga, dan terdapat duri. Duri tersebut sebagai alat pertahanan diri rotan, membantu memanjat pohon, dan pengganti sulur. Rotan menghasilkan air apabila ditebas batangnya. Rotan memiliki nilai ekonomi tinggi karena rotan memiliki sifat cepat tumbuh, relatif mudah dipanen, dan diangkut. Rotan termasuk salah satu tumbuhan hutan yang sangat penting karena dapat menghasilkan devisa negara, merupakan sumber mata pencaharian penduduk.

Rotan terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan cara pertumbuhannya. Rotan yang tumbuh secara berumpun dan tumbuh secara tunggal. Rotan yang tumbuh berumpun biasanya ukurannya lebih kecil, seperti rotan sega, rotan ahas, dan rotan jermasin. Rotan yang tumbuh secara tunggal hanya menghasilkan satu batang selama hidupnya, seperti rotan tunggal dan rotan besar (Januminro 2000). Pemanfaatan rotan sebagian besar diolar menjadi kerajinan tangan seperti keranjang pikul, keranjang gendong, dan anyaman untuk perabot rumah tangga (Situmorang et al. 2012). Sifatnya yang elastis, awet, dan kuat, menjadikan rotan banyak diolah menjadi barang tersebut.

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI ROTAN

No	Nama KPHP	Potensi		Produksi		Masyarakat Yang Terlibat (KK)
		Volume (Btg)	Volume (Kg)	Volume (Btg/Th)	Volume (Kg/Th)	
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal			30.000		
2	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri			120.000		
3	KPHP Unit VII Limau				104.810	
4	KPHP Unit IV Meranti		112.000			50
5	KPHP Unit IX Batulanteh		200.000		200.000	35
6	KPHP Unit V Sejorong				10.0000	20
7	KPHP Unit I Banjar			81.600		
8	KPHP Unit V Boalemo				33.000.000	25
9	KPHP Unit IV Dampelas Tinombo				360.000	
10	KPHP Unit I Pogogul	-			60.000	140
11	KPHP Unit XX Balantak				125.100	175
12	KPHP Unit XI Sintuwu Maroso				10.000.000	120
13	KPHP Unit XXIV Gularaya				600.000	
14	KPHP Unit VII Mamasa Barat				200000	100
15	KPHP Unit X Gunung Sinopa				12.000	10
16	KPHP Unit XII Ladongi				240.000	30 Orng
17	KPHP Unit VI Karama			-	27.000.000	360
18	KPHP Unit XVII Tambora Utara				75.000000	300
19	KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk				80.000	300
20	KPHP Unit XXXII Bongan				10.000	100

LANJUTAN TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI ROTAN

No	Nama KPHP	Potensi		Produksi		Masyarakat Yang Terlibat (KK)
		Volume (Btg)	Volume (Kg)	Volume (Btg/Th)	Volume (Kg/Th)	
21	KPHP Unit I Kerinci				2.000	
22	KPHP Sukamara - Lamandau (Unit XXV, Unit XXIII dan Unit XXIV)				600.000	100
23	KPHP Unit XX Madapangga Rompu				1.833.000	
24	KPHP Unit XI Pesisir Selatan			5.000		
25	KPHP UnitVII Bone bolango			1.563		
26	KPHP Unit XXXIII Telakai			31.200		
27	KPHP Unit IX Oba	-			12.000	10
28	KPHP Unit XVII Sivia Patuju			60		20
	Jumlah (Batang dan Ton)	**30.000**	**312**	**239.423**	**149.538,91**	**1.860**

AREN

Sejumlah 36 KPHP memiliki komoditas Aren di lokasinya, dari 36 KPHP terdapat 20 KPHP telah melakukan produksi yang mencapai 2.458,914 ton/tahun. (Lihat Tabel). Harga air nira, dan produklainnya memiliki kisaran harga Rp7.500-50.000/kg.

Pohon aren atau enau (*Arenga pinnata Merr.*) merupakan palma serba guna. Pohon Aren menguntungkan dalam segi lingkungan dan segi ekonomi. Pohon yang mampu menghasilkan sumber mata air karena sifat akarnya yang menarik air tanah tersebut dapat tumbuh mencapai 20 m dengan diameter batang dapat mencapai 65 cm (Ramadani et al 2008). Pohon aren merupakan pohon kebal

hama, sehingga tidak memperlukan pestisida. Aren dapat tumbuh di antara pepohonan maupun semak-semak. Pohon aren tidak terlalu membutuhkan perawatan khusus. Bahkan di beberapa tempat, aren dibiarkan tumbuh secara liar.

Hampir semua bagian pohon aren bermanfaat dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bagian fisik (akar, batang, daun, ijuk dll) maupun hasil produksinya (nira, pati atau tepung dan buah) (Lempang 2012). Nira dapat diolah menjadi beberapa produk diantaranya gula aren (cair/cetak) dan bioetanol. Selain produk makanan, batang dan serat selubung pohon aren juga dapat menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Batang pohon aren dapat dimanfaatkan menjadi kayu aren. Kerajinan kayu aren seperti teko, sumpit, dan kursi. Serat selubung aren dimanfaatkan sebagai sapu ijuk. Harga sapu ijuk di pasaran mencapai Rp 10.000 per buah.

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI AREN

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/Th)	Masyarakat Yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	364.000	240
2	KPHP Unit V Sejorong	150	25
3	KPHP Unit I Banjar	12.000	
4	KPHP Unit IV Poigar	48.480	50 org
5	KPHP Unit V Boalemo	7.300	125
6	KPHP Unit VI Gorontalo	33.900	
7	KPHP Unit IV Gorontalo Utara	12.600	65
8	KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	6.000	
9	KPHP Unit VI dan IX Dolago Tanggunung	180.000	75
10	KPHP Unit I Pogogul	13.000	30
11	KPHP Unit XX Balantak	2.500	225
12	KPHP Unit XIX Toili Baturube	207.360	60
13	KPHP Unit XII Ladongi	1.404.000	500 orang
14	KPHP Unit X Kepulauan Selayar	15.670	15
15	KPHP Unit XVI Rote Ndao	19.354	1.525
16	KPHP Unit XXVII Santan	3.000	9
17	KPHP Unit XXVI Sub Das Belayan	48.000	
18	KPHP Unit VII Bone Bolango	25.200	204
19	KPHP Unit IV Karossa	30.000	35
20	KPHP Unit IX Oba	2.400	
	Jumlah (Ton)	**2.458,914**	**550 orang** **2.633 KK**

MADU HUTAN

Total KPHP di Indonesia yang memiliki potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu hutan sebanyak 36 KPHP dan memproduksi madu hutan mencapai 5.787,806 ton/tahun.

Madu hutan merupakan salah satu jenis madu yang dihasilan dari jenis lebah hutan yang didapatkan pemburu madu di hutan liar ataupun budi daya lebah di sekitar kawasan hutan oleh masyarakat. Madu hutan merupakan madu alami yang tidak mendapat pengaruh pupuk, pestisida. Madu hutan mengandung protein, vitamin A, B1, B2, B6, C, D, dan E, serta mineral seperti Ca, Mg, Mn, K, Zn, Fe, Se, Na, Cr, dan Cu (Sari RK et al 2013). Jenis gula dalam madu hutan antara lain, fruktosa, glukosa, sukrosa, dan maltosa. Madu hutan juga mengandung beberapa vitamin yang dibutuhkan tubuh. Perbedaan mencolok madu hutan dibandingkan madu ternak adalah warna madu hutan lebih merah gelap dan lebih encer, sedangkan madu ternak memiliki warna lebih cerah.

Madu hutan memiliki berbagai khasiat menjaga kesehatan, misalnya untuk mengobati penyakit mata, mengobati luka gores, menguatkan janin yang lemah di dalam rahim, membantu meningkatkan perkembangan otak bayi, mengobati radang tenggorokan, infeksi bakteri, dan lainnya. Madu hutan juga memiliki manfaat untuk perawatan kulit, seperti membantu mengencangkan wajah, menghilangkan jerawat dan flek hitam, melembabkan bibir kering, mengangkat kulit mati, dan conditioner rambut.

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI MADU

No	Nama KPHP	Potensi (Kg)	Produksi (Kg/Th)	Masyarakat Yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	500		
2	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri		288.000	20
3	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap		3.780	20
4	KPHP Unit VII Limau		13.000	
5	KPHP Unit VII Dan VIII Benakat Bukit Cogong		17.400	
6	KPHP Unit Vi Lakitan		1.000	
7	KPHP Unit IV Meranti		30.000	
8	KPHP Unit V Sungai Sembulan		6.000	
9	KPHP Unit IX Batulanteh	35.000	20.000	400
10	KPHP Unit V Sejorong		120	9
11	KPHP Unit XVIII Dan KPHL Unit XIX Kapuas Hulu		108.000	
12	KPHP Unit I Banjar	840	Ds. Alimukim	
13	KPHP Unit I Pogogul		1.200	25
14	KPHP Unit XX Balantak		1.200	22
15	KPHP Unit XVII Sivia Patuju (Tojo Una Una)		1.800	95
16	KPHP Unit XI Sintuwu Maroso (Rano Patanu)		5.000.000	150
17	KPHP UniT XXIV Gularaya		600	
18	KPHP Unit X Gunung Sinopa		3	14
19	KPHP Unit XII Ladongi		10.000	
20	KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa		50.000	
21	KPHP Unit VI Karama		500	20

LANJUTAN TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI MADU

No	Nama KPHP	Potensi (Kg)	Produksi (Kg/Th)	Masyarakat Yang Terlibat (KK)
22	KPHP Unit XVIII Tambora Utara		3.000	350
23	KPHP Unit XXXII Bongan		15.500	25
24	KPHP Unit XXXIV Kendilo		5.000	
25	KPHP Unit I Kerinci	90.000	30	
26	KPHP Unit XXIII Lamandau, Kphp Unit Xxiv, Dan KPHP XXV		100	20
27	KPHP Unit XX Madapangga Rompu		2.500	
28	KPHP Unit XVI Rote Ndao		420	45
29	KPHP Unit VI Tanah Bumbu (Kusan)		13.599	
30	KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin		300	20
31	KPHP Unit XXXIII Telakai		3.500	30
32	KPHP Unit II Wae Apu		4.200	
33	KPHP Unit III Bubus Panca		1.020	
34	KPHP Unit II Jebu Bembang Antan		4.200	
35	KPHP Unit X Sungai Merakai		100	
36	KPHP Unit XIV Suban Jeriji		90.000	220
	Jumlah (Ton)	**35,5**	**5.787,806**	**1.311**

www.sultranews.com

NILAM

Sejumlah 8 KPHP telah melakukan inventarisasi potensi dan telah melakukan produksi minyak nilam. Total produksi mereka mencapai 592,68 ton/ tahun (Tabel 1). Daun nilam kering yang telah diolah, akan menghasilkan minyak nilam yang memiliki harga mencapai Rp 325.000 hingga RP 800.000 per kilogram.

Nilam merupakan suatu semak tropis penghasil sejenis minyak astiri yang disebut minyak nilam. Minyak tersebut disuling dari daun, sehingga disebut juga minyak patchouli. Tumbuhan nilam berupa semak yang mampu mencapai ketinggian 1 meter. Nilam cocok tumbuh pada bulan kering (curah hujan < 60 mm/ bulan), suhu optimal 27 derajat celcius, dengan pH tanah 6-7, dan dapat ditanam di lahan pekarangan (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2013). Nilam mudah layu apabila terkena sinar matahari langsung atau karena kekurangan air. Bunganya yang menyebarkan bau wangi yang kuat, sehingga sering digunakan sebagai bahan dupa dan parfum.

Minyak nilam merupakan minyak dengan nilai ekonomi tertinggi dibandingkan turunan minyak atsiri lainnya. Minyak nilam berwarna kuning keemasan dengan aroma yang khas (Adharini 2009). Baunya yang kuat menyebabkan minyak nilam sering diolah menjadi parfum. Beberapa parfum terkenal menggunakan minyak nilam sebagai bahan baku. Karena minyak nilam dianggap memiliki wangi yang mewah oleh orang eropa. Selain itu, aroma minyak nilam juga dianggap menenangkan. Di Indonesia, setidaknya terdapat 13 KPHP penghasil minyak nilam.

kolakapos.fajar.co.id

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI NILAM

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/Th)	Masyarakat Yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	27.000	208
2	KPH Wilayah XIV Rawas	250	30
3	KPHP Unit IV Gorontalo Utara	720	20
4	KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	2.160	
5	KPHP Unit VI dan IX Dolago Tanggunung	16.200	50
6	KPHP Unit VII Mamasa Barat	6.000	150
7	KPHP Unit XI Mekongga Selatan	3.000	
8	KPHP Unit XI Pesisir Selatan	350	1 KTH
9	KPHP UNIT VI Karama	540.000	20
	Jumlah (Ton)	**595,68**	**608.428 KK + 1 KTH**

beritadaerah.co.id

www.teropongbisnis.com

KARET

Indonesia setidaknya memiliki 29 KPHP yang memiliki potensi produksi getah karet. Sekitar 10 KPHP telah memproduksi getah karet dengan produksi mencapai 63.906,8 ton/tahun (Tabel 1).

Harga karet sangat berfluktuasi berkisar Rp 5.500-10.000,- tiap kilogranmnya. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung dalam lateks beberapa jenis tumbuhan. Karet alam didapat melalui getah pohon karet yang telah didiamkan untuk membeku. Pohon karet tumbuh dengan curah hujan ideal berkisar 2000-3000 mm/tahun (Siahaan dan Siregar 1984) di hutan tropis basah. Pohon karet dapat tumbuh dengan tanaman sela. Sehingga komoditas karet dapat menghasilkan produk lain sebagai tanaman sela dan meningkatkan potensi keuntungan ekonomi, seperti tanaman pangan, pisang, nanas, cabai, jagung, serta semangka (Boerhendhy dan Agustina 2013) . Selain karet alam, prospek bisnis karet lainnya adalah penyediaan bahan tanam karet karena pasarnya masih sangat terbuka dengan potensi keuntungan yang cukup besar.

Produk turunan karet alam antar lain mampu menjadi bahan ban, pelapis kabel, alat rumah tangga, karet gelang, dan beberapa produk lainnya. Dalam industri otomotif, karet berguna sebagai ban untuk roda kendaraan. Industri lain yang memanfaatkan karet alam sebagai bahan untuk produknya adalah industri sarung tangan, alas kaki, dan perabotan rumah tangga.

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI KARET

No	Nama KPHP	Potensi (Kg)	Produksi (Kg/Th)	Masyarakat Yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal		1.000.000	208 kk
2	KPH Unit XVIII Kampar Kiri		480.000	300
3	KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong		7.000.000	
4	KPHP Unit VI Lakitan		200.000	
5	KPHP Unit IV Meranti		1.050.000	100
6	KPHP Unit XVI Gedong Wani		39.400.000	975
7	KPH Unit IV Muara Dua		7.528.000	700
8	KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	90.000		
9	KPHP Unit XI Pesisir Selatan		2.000.000	1 kth
10	KPHP Unit III Bubus Panca		4.616.080	
11	KPHP Unit XIV Suban Jeriji		632.000	48.615
12	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	2.880		
	Jumlah (Ton)	**92,88**	**63.906,8**	**50.918 kk +1 kth**

www.khasiat.co.id

BAMBU

Sebaran komoditas bambu berada di 42 KPHP di Indonesia. Setidaknya terdapat 12 KPHP yang telah melakukan produksi dengan volume produksi mencapai 263.035 batang tiap tahun dan 5000 kg/ tahun.

Harga bambu tergantung jenis dan ukurannya. Harga jual bambu per batangan berkisar antara Rp 5.000 – Rp 25.000. Sedangkan harga jual bambu perkilo dijual dengan harga berkisar Rp 7.500 - Rp 15.000. Hampir seluruh bagian Bambu memiliki nilai ekonomis. Tunas bambu dapat digunakan sebagai sayur atau isi lumpia (jajanan khas semarang). Tunas bambu dapat digunakan juga sebagai acar. Batang bambu memiliki opsi ekonomi lebih banyak, antara lain arang bamboo, *pulp*, kerajinan tangan, supit, perkakas rumah tangga, komponen bangunan dan rumah, serta rebung dan bahan alat music tradisional Indonesia (Batubara 2002).

beritadaerah.co.id

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Di beberapa tempat, bambu disebut juga buluh, aur, dan eru. Bambu merupakan tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Dalam sehari, bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm bahkan lebih, tergantung kondisi tanah dan iklim. Bamboo termasuk tanaman bersifat kosmopolit, yaitu dapat hidup di daerah panas dan dingin, rawa-rawa, tebing hutan, gunung-gunung, dataran tinggi atau rendah, serta mudah tumbuh kembali setelah mengalami kerusakan atau kebakaran di lingkungan sekitarnya (Sukawi 2010).

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI ROTAN

No	Nama KPHP	Potensi		Produksi		Masyarakat yang Terlibat (KK)
		Volume (Btg)	Volume (Kg)	Volume (Btg/Th)	Volume (Kg/Th)	
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	6.000				
2	KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong	15.000				
3	KPHP Unit XIV Gedong Wani			66.500		2
4	KPHP Unit V Sejorong			4.0000		15
5	KPHP Unit I Pogogul			3.600		20
6	KPHP Unit XX Balantak		120.600			50
7	KPHP Unit XXIV Gularaya			6.000		
8	KPHP Unit XXXII Bongan				5.000	50
9	KPHP Unit XLIII Nduga	50.000				
10	KPHP Unit IX Oba			2.400		15
11	KPHP Unit XIV Suban Jeriji			75.000		750
12	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri			4.800		50
13	KPHP Unit VI Lakitan	450				
14	KPHP Mamasa Barat			90.000		1.000
15	KPHP Unit I Kerinci			3.000		70
16	KPHP Unit XXIII Lamandau, KPHP Unit XXIV, dan KPHP XXV			235		100
17	KPHP Unit XX Madapangga Rompu	3.000				
18	KPHP Unit II Wae Apu			7.500		30
	Jumlah	**74.450**	**120.600**	**263.035**	**5.000**	**2.152**

www.rumahmesin.com.

www.teropongaceh.com

GETAH PINUS

Sekitar 6 KPHP yang memproduksi getah pinus dengan melibatkan sekitar 1.300 keluarga. produksi mencapai 7.253 ton/tahun, (Tabel 1). Harga getah pinus berkisar antara Rp 3500 hingga Rp 9.000 per kilogramnya.

Resin atau getah yang dikeluarkan pohon, terutama pohon pinus atau jenis pohon runjung. Resin biasanya dalam bentuk beku, keras, dan transparan. Resin juga biasa digunakan untuk menyebut zat sintesis yang memiliki sifat mekanik yang sama – yaitu cairan kental yang mengeras menjadi padatan transparan. Meskipun beberapa ilmuwan menganggap resin pinus merupakan produk limbah, tetapi resin sebenarnya

memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pinus termasuk pohon yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanah meskipun hanya dapat tumbuh baik di ketinggian 400-2000 m dpl (Sallata 2013).

Getah resin diperoleh dari sadapan pohon pinus (*oleoresin*), dapat diolah untuk terpentin dan gondorukem (Sallata 201). Terpentin dapat diolah menjadi beberapa produk turunan dengan nilai ekonomi tinggi. beberapa produknya antara lain pelarut cat, pencampur minyak kayu putih, bahan campuran vernis untuk mengkilapkan kayu, dan bahan baku kimia lainnya. Terpentin juga dapat diolah menjadi terpineol, broneol, menthol, dan lainnya. Gondorukem merupakan resin alami yang didapat dari hasil distilasi getah pinus. Bentuknya yang transparan, padatan rapuh, dengan bau sedikit harum. Gondorukem digunakan sebagai campuran bahan pembuat batik, sabun, cat,parfum, insektisida, obat-obatan, karet, dan plastic (Soenardi 1983).

www.antarafoto.com

www.antarajatim.com

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI GETAH PINUS

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit VII Mamasa Barat	4.000.000	900
2	KPHP Unit IV Gorontalo Utara	12.000	30
3	KPHP Unit XX Balantak	4.000	150
	KPHP Unit XI Sintuwu Maroso (Rano Patanu)	3.037.000	180
4	KPHP Unit XII Ladongi	180.000	40
5	KPHP Unit VII Bone Bolango	20.000	
	Jumlah (Ton)	**7.253**	**1.300 kk**

www.tokoperhutani.com

www.hiveminer.com

JELUTUNG

Hanya 1 KPHP yang memiliki produksi komoditas jelutung sebesar 0,6 ton/ tahun. Ini akan menjadi peluang untuk pengembangan lanjutan sehingga produksi jelutung boda diperbanyak dan perluas. Namun begitu terdapat 6 KPHP yang menanam Jelutung, yaitu :

Jelutung merupakan jenis pohon asli rawa (*indigenuos tree species*) dan merupakan spesies pohon komersial bernilai tinggi yang menghasilkan getah (*latex*) dan kayu. Jelutung mempunyai daya adaptasi yang baik dan teruji pada lahan gambut, pertumbuhannya relatif cepat dan dapat dibudidayakan dengan manipulasi lahan yang minimal, serta mempunyai hasil ganda (getah dan kayu) (Bastoni & Lukman, 2004). Jelutung terdiri dari 2 jenis, yaitu jelutung darat

www.baltyra.com

(*Dyera costulata*) dan jelutung rawa (*Dyera lowii* atau *Dyera polyphylla*). Kedua jenis jelutung tersebut dapat dibedakan secara mudah dari bentuk daunnya. Jelutung darat memiliki daun lebih lebar, daun lebih tipis dan ujung daun meruncing. Sedangkan daun jelutung rawa lebih kecil, daun lebih tebal dan ujung daun melekuk ke dalam (Bastoni 2014). Jelutung dapat diambil kayu dan getahnya. Getah jelutung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Jelutung tumbuh baik di daerah hutan hujan tropis, tanah berpasir, tanah liat, dan tanah rawa dengan ketinggian 20 hingga 80 mdpl.

Getah jelutung dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Salah satunya adalah permen karet. Berbagai macam jenis permen karet menggunakan bahan dasar getah jelutung. Selain itu, getah jelutung juga diolah menjadi perekat atau lem. Nilai ekonomi getah jelutung cukup tinggi, selain karena potensi pendapatan, biaya perawata jelutung tidak terlalu tinggi dan bahkan dapat menggunakan tanah rawa gambut kosong yang tidak terpakai. Getah jelutung mentah dibanderol Rp 4000 hingga Rp 7000 per kilogram dengan total volume produksi mencapai 4 hingga 24 kg/pohon tiap tahunnya.

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI JELUTUNG

No	Nama KPHP	Potensi (Kg)	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit II Lalan Sembilang		600	50
2	KPHP Unit VI Lakitan	36.000		
	Jumlah (Ton)	**36**	**0,6**	**50**

www.wetlands.org

www.picssr.com

JERNANG

Jernang diketahui terdapat di tiga negara di dunia yaitu Indonesia, Malaysia dan India, tetapi yang terbesar berada di Indonesia, khususnya di daerah Jambi, Aceh dan Kalimantan. Saat ini diketahui terdapat 8 KPHP di Indonesia yang memiliki potensi jenang, tetapi baru 3 KPHP yang telah melakukan produksi mencapai 3,2 ton/tahun (Tabel 1) . Harga jernang ini berkisar antara Rp 350 ribu – 6 juta per kilogram.

Getah jenang memiliki nilai jual yang tinggi. Jika pemanfaatan rotan pada umumnya adalah dari batangnya, maka pemanfaatan pada jernang adalah dari getah yang terdapat pada buahnya (Yetty *et al*. 2013). Jernang adalah sejenis resin yang dihasilkan dari spesies rotan tertentu. Resin tersebut berwarna merah, oleh karenanya, dalam bahasa asing biasa disebut Dragon's Blood. Jernang diperoleh dari lilin yang melindungi buah-buah muda. Bentuknya berupa resin beku, padat, merah, dan larut dalam alkohol. Jernang merupakan tumbuhan merambat, sehingga memerlukan pohon pelindung.

www.khasiat.co.id

Secara tradisional pemanfaatan getah jenang digunakan sebagai bahan ramuan obat diare dan gangguan pencernaan lainnya. Di Eropa, getah ini digunakan sebagai bahan baku obatobatan seperti obat sakit disentri dan diare. Di Malaysia, getah jernang digunakan sebagai bahan pengobatan gangguan pencernaan. Sedangkan di Indonesia, jernang digunakan sebagai bahan ramuan obat penyakit kencing darah, sariawan dan sakit perut (Purwanto et al. 2005)

Jernang termasuk komoditas ekspor dengan nilai cukup tinggi. Kebutuhan ekspor jernang mencapai 400 ton per tahun. Sehingga banyak permintaan jernang yang harus dipenuhi terpenuhi. Jernang dapat diolah menjadi beberapa produk. Terdapat produk dengan harga yang cukup fantastis, yaitu Dragon's Blood, yang dapat diolah menjadi beberapa produk olahan seperti pewarna, pelapis vernis, cat untuk lapisan barang seni, dan untuk pelapis alat musik seperti biola. Dragon's Blood merupakan getah jernang berwarna merah darah dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain dragon's blood, jernang diolah menjadi dupa dan kemenyan, serta pewarna alami.

www.steemkr.com

beritadaerah.co.id

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI JERNANG

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit VII Limau Sarolangun	500	
2	KPHP Unit IV Meranti	2.500	15
3	KPHP Unit V Boalemo	200	
	Jumlah (Ton)	**3,2**	**15**

beritadaerah.co.id

KAYU PUTIH

Indonesia setidaknya memiliki 6 KPHP yang memiliki komoditas kayu putih, tetapi baru 5 KPHP yang telah melakukan produksi sebesar 11.506.294 liter tiap tahunnya. Kayu putih termasuk komoditas yang cukup menjanjikan di pasaran dan memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Harga minyak kayu putih ini berkisar antara Rp 170 ribu – 230 ribu,- per liter

Kayu putih atau Melaleuca cajuputi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku utama minyak kayu putih (Karitkawati 2014). Tanaman yang cocok ditanam di musim kemarau ini,

meskipun terjadi kebakaran, pohonnya dapat kembali bertunas, sehingga tidak diperlukan program tanam ulang. Tanaman kayu putih mudah menguap, sehingga apabila pada hari dengan cuaca cukup panas, aroma kayu putih dapat tercium dari jarak yang cukup jauh. Kayu putih juga dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 400 mdpl, di daerah pantai sekitar hutan bakau, atau di tanah berawa.

Bagian kayu putih yang sering dimanfaatkan adalah daunnya. Daun kayu putih tersebut memiliki berbagai macam khasiat. Yaitu untuk mengobati insomnia, flu, demam, radang kulit, rematik, hingga luka bernanah. Daun kayu putih dapat diolah menjadi beberapa produk. Produk olahan daun kayu putih yang paling banyak dipasaran adalah minyak kayu putih dan minyak telon. Berbagai macam merek minyak kayu putih dengan berbagai macam ukuran dan variasi harga menghiasi pasar domestik dan internasional. Selain produk minyak kayu putih, inovasi produk turunan kayu putih lainnya adalah permen kayu putih.

TABEL 1. PRODUKSI DAN POTENSI MINYAK KAYU PUTIH

No	Nama KPHP	Produksi (Lt/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPH Unit IV Muara Dua		
2	KPHP Unit IX Batulanteh	1.174.000	55
3	KPHP Unit XVI Rote Ndao	67	51
4	KPHP Unit II Wae Apu	300.000	
5	KPHP Unit III Wae Tina	980	80
6	KPHP Yogyakarta	31.247	
	Jumlah (Ton)	**11.506,294**	**131**

KEMIRI

Komoditas kemiri terbesar berada pada 13 KPHP yang memiliki potensi dan produksi sejumlah 16.055,446 ton/tahun komoditas kemiri. Komoditas kemiri di 13 KPHP dengan kisaran harga Rp. 3.000,00 hingga Rp. 40.000,00 perkilogram. Produksi dari masing-masing KPHP tersaji dalam Tabel 1.

Kemiri (*Aleurites moluccana*) merupakan salah satu pohon serbaguna yang telah dibudidayakan secara luas di dunia. Spesies ini merupaan jenis asli Indo-Malaysia termasuk Indonesia (Krisnawati et.al 2011). Pohon kemiri banyak dijumpai di daerah tropis dengan ketinggian sampai 1200-2000 mdpl, di Indonesia kemiri dapat dijumpai pada ketinggian 0-800mdpl (DHTI 1990). Menurut DBTT (2008) Penyebaran kemiri di Indonesia hampir meliputi seluruh wilayah kepulauan dengan luas total luas kebun budi daya mencapai 205.532 ha.

Menurut Heyne (1987) hampir semua bagian dari pohon kemiri seperti buah, daun, kulit, kayu, akar, getah dan bunga yang dapat digunakan untuk obat-obat tradisional, penerangan, bahan bangunan, bahan pewarna, bahan makanan, dekorasi dan kegunaan lainnya. Produk kemiri ini banyak digunakan sebagai bahan bumbu masakan selain itu minyak yang diekstrak dari biji kemiri mengandung zat yang iritan dan dapat berfungsi sebagai pencahar, perawatan rambut, dan sisa olahan biji kemiri digunakan untuk pupuk (Elevitch & Manner 2006)

TABEL 1. PRODUKSI KEMIRI

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit IX Batulanteh	1.700	110 orang
2	KPHP Unit V Sejorong	12.000	12 KK
3	KPHP Unit I Banjar	104.000	20 orang
4	KPHP Unit IV Poigar	480.000	75 orang
5	KPHP Unit XX Balantak	50.000	300 KK
6	KPHP Unit XVII Sivia Patuju (Tojo Una-Unu)	2.400	20 KK
7	KPHP Unit X Kepulauan Selayar	2.517.370	1.400 KK
8	KPHP Unit XVIII Tambora Utara	50.000	150 KK
9	KPHP Unit XX Madapangga Rompu	8.611.000	1.860 KK
10	KPHP Unit I Manggarai Barat	4.100.000	
11	KPHP Unit V Tabalong	120.000	50 KK
12	KPHP Unit VI Tanah Bumbu	6.000	40 KK
13	KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa	976	-
	Jumlah (Ton)	**16.055,446**	**95 ORANG, 3.832 KK**

SARANG SEMUT

Indonesia setidaknya memiliki 10 KPHP yang memiliki potensi produksi sarang semut, dengan 2 KPHP yang telah melakukan produksi sarang semut dengan jumlah produksi sebesar 0,66 ton/tahun (Tabel 1). Harga sarang semut cukup tinggi di pasaran. Sarang semut dibanderol Rp 50.000 hingga Rp 120.000 per kilogram. Beberapa produsen sarang semut mengolah sarang semut dalam bentuk kapsul ataupun diekstrak.

Sarang semut (*Myrmecodia pendans*) merupakan tanaman yang berasal dari Papua yang termasuk tanaman dengan

www.swamedium.com

www.tabloidjubi.com

manfaat mengobati berbagai penyakit. Tanaman epifit tersebut tumbuh pada dahan atau batang tumbuhan sebagai tempat hidupnya. Sarang semut meskipun menumpang pada tanaman lain, tidak termasuk tanaman yang merugikan. Tanaman dengan berbagai manfaat tersebut dapat hidup tanpa mengganggu kebutuhan air dan hara tanah tanaman yang ditumpanginya. Akar umbi sarang semut terjuntai pada cabang tanaman dan bergantung pada proses simbiosis untuk kebutuhan nutrisinya. Manfaat tanaman sarang semut antara lain, mengobati pengobatan kanker, tumor, TBC, diabetes, hipertensi, lever, asam urat, wasir, nyeri sendi, gangguan ginjal dan jantung (Antoni 2015).

www.aktual.com

www.artemisinine.net

TABEL 1. PRODUKSI SARANG SEMUT

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XVI Gunung Mas	10	5
2	KPHP Unit XLIII Nduga	650	-
	Jumlah (Ton)	**0,66**	**5**

PINANG

Indonesia setidaknya memiliki 4 KPHP yang memiliki potensi hasil hutan bukan kayu berupa pinang. Terdapat 4 KPHP yang telah melakukan proses produksi Pinang sejumlah 103.78 ton/tahun. Harga pinang yang belum dikupas dan telah dikupas berkisar antara Rp3.000-50.000,- Per Kilogram. Produksi Pinang KPHP tersaji dalam Tabel 1.

Pinang (*Arenga catechu*) merupakan tanaman liar dari suku Palmae, biasanya tumbuh di tepi sungai dan pekarangan, sampai ketinggian 1400mdpl. Pinang tersebar luas di India, Malaysia, Tiawan, Indonesia dan negara Asia lainnya (Jaiswal *et al.* 2011). Sumatera dan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah penghasil pinang, pada tahun 2011 pulau Sumatera dapat memproduksi biji pinang sebanyak 59.108 ton, sedangkan NTT sebanyak 7.273 Ton (Litbang Pertanian 2012).

Potensi ini seharusnya dijadikan peluang usaha di bidang kehutanan untuk memperkuat basis ekonomi Indonesia. Menurut BPS (2012) produksi pinang megalami peningkatan dalam kurun waktu 2008-2011 sebesar 2.783,76 ton menjadi 3.238,72 ton.

Biji pinang mengandung lemak, alkaloid dan tanin. Secara tradisional biji pinang dapat digunakan untuk obat pendarahan antara lain untuk menghentikan cucur darah, haid banyak mengeluarkan darah dan sebagai obat luka (Mardisiswojo S dan Radjakmangunsudarso H 1975). Selain itu manfaat biji pinang dapat digunakan sebagai anti kanker dan pewarna alami (Meiyanto *et al.* 2008)

www.khasiat.co.id

commons.wikimedia.org

TABEL 1. PRODUKSI PINANG

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XX Balantak	1.200	25
2	KPHP Unit XVII Waropen	100.000	
3	KPHP Unit I Manggarai Barat	2.100	
4	KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin	480	15
	Jumlah (Ton)	**103,78**	**40**

commons.wikimedia.org

www.cintaihidup.com

SAGU

Indonesia setidaknya terdapat 6 KPHP yang memiliki potensi komoditas sagu, dan telah melakukan produksi sejumlah 3.501 ton/tahun Harga sagu mencapai Rp 2.000-20.000.Produksi sagu di beberapa KPHP tersaji dalam Tabel 1.

Sagu (*Metroxylon*) merupakan salah satu jenis tumbuhan palma wilayah tropika basah. Tumbuhan sagu memiliki daya adaptasi yang tinggi pada lahan marjinal yang tidak memungkinkan pertumbuhan optimal bagi tanaman pangan maupun tanaman perkebunan (Suryana 2007). Sagu merupakan tanaman yang memiliki peran sosial ekonomi dan budaya yang cukup penting terutama bagi masyarakat

pusat-pkkp.bkp.pertanian.go.id

www.phytoimages.siu.edu

Indonesia bagian timur karena menjadi bahan makanan pokok terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir (Kanro *et.al.* 2003).

Olahan dari batang sagu yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah tepung sagu. Setelah pengolahan menjadi tepung sagu, selanjutnya diolah menjadi produk turunan tepung sagu. Misalnya soun, bihun, mie sagu, dan papeda. Sagu termasuk dalam kategori *zero waste industry*, karena hampir semua bagian dari sagu dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis.

sp.beritasatu.com

TABEL 1. PRODUKSI SAGU

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	2.800.000	45
2	KPHP Unit XXIV Gularaya	12.000	
3	KPHP Unit XVII Waropen	50.000	
4	KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi	9.000	
5	KPHP Unit II Wae Apu	600.000	30
6	KPHP Unit XLIII		
7	KPHP Unit V Sorong Selatan	30.000	75
	Jumlah (Ton)	**3.501**	**150**

www.riaulive.com

KAYU MANIS

Indonesia memiliki 3 KPHP (Tabel 1) yang memiliki produksi kayu manis dengan produksi mencapai 2.116 ton/ tahun. Harga dari kayu manis ini berkisar antara Rp.10.000-30.000,-/Kg tergantung kualitas dari kayu manis tersebut. Produksi kayu manis di masing-masing KPH tersaji dalam Tabel 1.

Kayu manis merupakan tumbuhan asli Asia Sekatan, Asia Tenggara dan Daratan China. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komoditas kayu manis ini. Kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) termasuk kedalam famili Lauraceae dapat tumbuh sampai dengan ketinggian 1500mdpl (Haris 1990). Kayu manis sudah lama dikembangkan di Indonesia dan merupakan salah satu komoditi rempah yang menjadi barang dagangan utama sejak zaman kolonial (Denian 1996). Ekspor kayu manis Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2008-2013 sebesar 9% (Ferry 2013).

Kayu manis memiliki beragamnya manfaat terutama untuk kesehatan. Tanaman kayumanis dapat diolah menjadi bermacam-macam produk seperti dalam bentuk bubuk, minyak atsiri atau oleoresin. Kulit kayu manis dalam bentuk asli seperti potongan atau bubuk digunakan untuk bermacam-macam bumbu masakan daging dan ikan, dan sebagai campuran dalam minuman (teh, kopi, dan kakao). Secara imperis kulit kering kayu manis yang direndam dalam air teh dan diminum dapat menurunkan kadar kolesterol tubuh dan mengencerkan darah sehingga baik untuk penderita *stroke* (Ferry 2013).

Kayu manis merupakan komoditas yang masih memiliki minat pasar yang tinggi. Selain sebagai rempah-rempah, kulit kayu manis dapat diolah menjadi beberapa produk turunan bernilai ekonomis tinggi. Minyak atsiri dalam kayu manis sering diolah menjadi obat kumur, pasta gigi, penyegar bau sabun, deterjen, dan parfum. Minyak atsiri kayu manis juga dapat dimanfaatkan sebagai pewangi, peningkat cita rasa *softdrink*, agar-agar, dan kembang gula. Berkembangnya dunia kuliner mengangkat pamor kayu manis sebagai bagian bahan baku pembuatan makanan.

TABEL 1. PRODUKSI KAYU MANIS

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit I Banjar	104.000	15 orang
2	KPHP Unit I Kerinci	2.000.000	300 KK
3	KPHP Unit VI Tanah Bumbu	12.000	80 orang
	Jumlah (Ton)	**2.116**	**95 Orang, 300 KK**

TENGKAWANG

Di Indonesia, terdapat 3 KPHP yang memiliki potensi tengkawang yang telah melakukan produksi Tengkawang sejumlah 450,025 ton/tahun. Produksi tengkawang di KPHP tersedia dalam Tabel 1.

Tengkawang di Indonesia sebagian besar tersebar di wilayah Kalimantan dan sebagian kecil di Sumatera. Distribusi persebaran tengakwang dipengaruhi oleh jenis tanah, kondisi iklim, dan ketinggian tempat (Purwaningsih, 2004). Menurut Martawijaya *et al.* (1981) dalam Istomo dan Hidayati (2010), tengkawang tumbuh dalam hutan hujan tropis dengan tipe curah hujan A dan B. Jenis

www.mongabay.co.id

ini tumbuh pada tanah latosol, podsolik merah kuning dan podsolik kuning pada ketinggian sampai 1.300 meter dari permukaan laut. Bagian lain dari pohon seperti buah/ biji dan kulit juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan maupun kerajinan tangan (Fernandes dan Maharani, 2014)

Buah tengkawang merupakan bahan baku lemak nabati yang berharga lebih tinggi dibanding minyak nabati lain seperti minyak kelapa (Tantra, 1981 dalam Hakim et al., 2010). Keistimewaan minyak tengkawang adalah sifat titik cairnya yang tinggi, yaitu rata-rata 30°C, sehingga cocok untuk pembuatan margarine, coklat, sabun, lipstik, obat-obatan, lilin, dan lain-lain (Sobari, 2001).

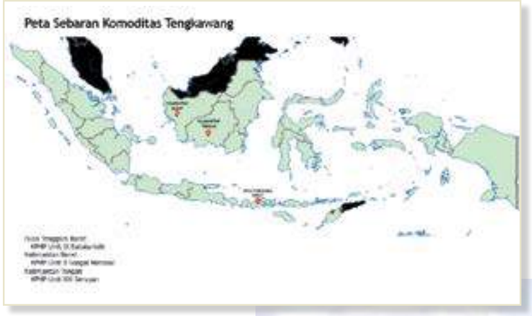

www.antaranews.com

www.bendessen.com.au

indonesiakehati.com

TABEL 1. RODUKSI TENGKAWANG

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit IX Batulanteh	25	
2	KPHP Unit X Sungai Merakai	300.000	400
3	KPHP Unit XXI Seruyan	150.0000	
	Jumlah (Ton)	**450,025**	**400**

PALA

Terdapat 1 KPHP yang telah melakukan produksi pala yaitu KPHP Unit X Kepulauan Selayar dengan produksi mencapai 4,3 Ton /tahun. Harga pala bervariasi berkisar antara Rp 88.000 hingga Rp 145.000 per kilogram.

Produksi Pala tersaji dalam tabel 1.Pala (*Myristica fragrant*) merupakan tanaman rempah asli Maluku (Purseglove *et al*., 1995). Potensi pala sebagai komoditas perkebunan masyarakat telah berkembang sejak zaman kolonial dan memiliki nilai ekonomi tinggi (Rodianawati *et al*. 2015). Indonesia juga menjadi pemasok kebutuhan pala terbesar di dunia dengan pangsa mencapai 60-75 % kebutuhan dunia (Hasibuan *et al*., 2010; Rodianawati *et al*., 2015; Nurdjannah, 2007). Buah pala berbentuk bulat berwarna hijau kekuningan, apabila telah masak, buah pala akan terbelah menjadi dua. Daging buah pala tebal dan berasa asam. Biji pala berwarna coklat dan mengkilat pada bagian luarnya. Biji pala biasanya dimanfaatkan untuk rempah-rempah. Pohon pala dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian hingga 700 m dpl dan curah hujan rata-rata 2656 mm/tahun atau sekitar 167 hari sepanjang tahun.

Pala memiliki manfaat baik buah, minyak dan bunga (Fuli) sebagai komoditas Ekspor berupa produk volatil oil of nutmeg untuk pembuatan minyak wangi, parfum, sabun, bahan pengolah gula dan makanan. Selain itu industri minuman, obat-obatan dan kosmetika menggunakan pala sebagai bahan baku. Obat-obatan yang dihasilkan dari pala ini digunakan untuk obat stimulus sistem jantung, diare, rematik, nyeri otot, sakit gigi, menghilangkan racun dalam hati (Erowid 2001).

www.wikiwand.com

celebesnews.id

www.khasiat.co.id

TABEL 1. PRODUKSI PALA

No	Nama KPHP	POTENSI (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit X Kepulauan Selayar	4.300	20
	Jumlah (Ton)	**4,3**	**20**

KENARI

Potensi HHBK kenari di Indonesia dimiliki 2 KPHP. Kacang kenari yang telah dikemas dan siap konsumsi dapat mencapai Rp 150.000/kg. Produksi Kenari di KPHP tersaji dalam Tabel 1.

Kenari merupakan tanaman asli Indonesia yang banyak tumbuhan di daerah Indonesia bagian Timur, seperti Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara. Terdapat tiga spesies kenari yang paling banyak terdapat di Indonesia antara lain, *Canarium lamili* (Irian Jaya), *Canarium vulgare* (Sangihe Talaud, Sulawesi, Seram, Morotai, Tanimbar, dan Flores), dan *Canarium indium* Sulawesi utara, Ambon, Ternate, pulau Seram, dan Kai) (Leenhouts, 1959, Yen, 1994). Tempat tumbuh tanaman kenari umumnya di hutan primer dengan kondisi tanah bervariasi; berkapur, berpasir, maupun tanah liat. Selain itu, tanaman ini tumbuh baik di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut (Thomson dan Evans, 2004).

commons.wikimedia.org

Kenari adalah tumbuhan dengan potensi ekonomi tinggi yang diambil buahnya untuk dimakan, terutama bagian bijinya. Potensi manfaat biji kenari sangatlah banyak. Biji kenari mengandung antioksidan yaitu tokoferol atau vitamin E (Mailoa M 2015). Bagian dalam cangkang kenari dapat dipakai sebagai pengganti *almond* untuk menghias kue. Minyak bijinya dapat diekstrak dan dapat digunakan sebagai pengganti minyak kelapa. Batang pohon kenari mengeluarkan resin yang diperdagangkan untuk campuran vernis dan pelicin perahu. Kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuat perahu dan dayungnya.

Biji kenari dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Biasanya disebut dengan kacang kenari. Kacang kenari memiliki manfaat tinggi. Yaitu melindungi eskim, melindungi dari serang jantung, mencegah infeksi, menurunkan kolesterol, mencegah ketombe, menunda keriput, dan sebagai pelembap wajah. Kacang kenari tinggi akan serat dan protein, sehingga dapat menjadi pelengkap kebutuhan protein harian.

Buah kenari biasa dimanfaatkan untuk anti inflamasi (asma, reumatik), mencegah stroke, meningkatkan kekebelan tubuh, menurunkn berat badan, mengatasi sembelit, dan baik untuk kehamilan. Kenari diambil bijinya kemudian diolah untuk dikonsumsi. Dalam dunia perdagangan biasa disebut dengan walnut. Sedangkan buah kenari biasanya langsung diolah sebagai makanan atau campuran untuk krim kecantikan.

www.nuga.co

www.berbagifun.com

TABEL 1. PRODUKSI KENARI

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit X Kepulauan Selayar	19500	83
2	KPHP Unit I Manggarai Barat	4.100.000	
	Jumlah (Ton)	**4.119,5**	**83**

www.indonews.co.id

id.wikipedia.org

KOPI

Indonesia merupakan negara penghasil kopi yang penting. Data BPS tahun 2013 menunjukkan luas perkebunan kopi di Indonesia yang dikelola oleh perusahaan besar hanya sekitar 47.000 ha, sedangkan luas perkebunan kopi rakyat mencapai 1,2 juta ha (BPS 2014). Komoditas kopi tersebar pada 6 KPHP di Indonesia yang telah melakukan produksi kopi sjeumlah 11.445,7 ton/tahun.Harga kopi berkisar 18.000- 50.000,-/Kg. Produksi Kopi masing-masing KPHP tersaji dalam Tabel 1.

Data potensi kopi saat ini masih bisa terus dikembangkan termasuk dengan memanfaatkan kawasan hutan produksi sebagai pemasok komoditas kopi di Indonesia. Kopi merupakan salah satu diantara tiga minuman non alkoholik (kopi, teh, cokelat) yang tersebar luas. Kopi merupakan komoditi potensial dengan harga tinggi dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.

Bagian kopi yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah biji kopi. Biji kopi terdiri dari 2 jenis. Yaitu biji kopi arabika dan biji kopi robusta. Biji kopi arabika dapat tumbuh hingga setinggi 3 meter dengan suhu optimal 18-26 derajat celsius di ketinggian 600 hingga 2000 m dpl. Biji kopi robusta yang memiliki kandungan kafein lebih banyak harus tumbuh dengan ketinggian tertentu. Kopi robusta biasa tumbuh dengan ketinggian 800 m dpl.

Produk kopi di pasaran sangat bervariasi. Ada bubuk kopi siap saji yang dibungkus, ada dijual mentah dalam bentuk biji kopi belum diolah, biji kopi siap ditumbuk untuk bubuk, hingga campuran bubuk kopi dengan bahan lain yang siap saji. Tingkat konsumsi kopi yang tinggi, mengakibatkan tingginya permintaan kopi.

TABEL 1. PRODUKSI KOPI

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit III Bukit Punggur	10.000.000	
2	KPHP Unit VII Mamasa Barat	1.400.000	800
3	KPHP Unit I Kerinci	3.500	300
4	KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi	5.000	
5	KPHP Unit IVKarossa	36.000	55
6	KPHP Unit V Tabalong	120.000	50
	Jumlah (Ton)	**11.564,5**	**1.205**

CENGKEH

KPHP yang telah melakukan produksi yaitu KPHP Unit X Kepulauan Selayar dan KPHP Unit XI Mekongga Selatan mencapai 40,3 ton/tahun. Produksi cengkeh di KPHP tersaji dalam Tabel 1.

Tanaman cengkeh (*Syzygium aromaticum* (L) merupakan tanaman rempah yang termasuk dalam komoditas sektor perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting antara lain sebagai penyumbang pendapatan petani dan sebagai sarana untuk pemerataan wilayah pembangunan serta turut serta dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Chaniago (1980), sejak tahun 22 sebelum Masehi, cengkeh

digunakan sebagai rempah – rempah, diantaranya di Tiongkok digunakan dalam upacara keagamaan yaitu dimasukan ke dalam peti mayat. Begitu juga bagi perwira yang ingin menghadap kaisar diharuskan mengunyah cengkeh, sedang di Persia cengkeh digunakan sebagai lambang cinta. Kemudian berkembang lagi dan sejak tahun 1980 cengkeh digunakan sebagai periang yaitu sebagai pencampur tembakau ditambah rempah – rempah (Kemala, 1988). Rokok hasil campuran antara cengkeh dan rempah lainnya disebut rokok kretek, sedang rokok campuran tembakau dan rempah atau saus lainnya tanpa cengkeh disebut rokok sigaret atau lebih populer disebut rokok putih.

Menurut Nurdjannah (2004) produk cengkeh dapat diolah menjadi beberapa komoditas diantaranya minyak cengkeh, oleoresin cengkeh, cengkeh dalam campuran minuman dan makanan, cengkeh dalam industri rokok dan obat-obatan. Cengkeh memiliki khasiat untuk menyehatkan jantung, mencegah pembekuan darah, mencegah stroke, anti bakteri dan jamur, anti inflamasi, meringankan infeksi saluran pernafasan, mengatasi mual, dan meningkatkan sistem pencernaan. Cengkeh diolah sebagai bahan masakan dan dapat digunakan sebagai obat herbal

TABEL 1. PRODUKSI CENGKEH

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit X Kepulauan Selayar	40.200	160
2	KPHP Unit XI Mekongga Selatan	100	-
	Jumlah (Ton)	**40,3**	**160**

www.beritalink.com

MINYAK KEPAYANG

Potensi Minyak kepayang terdapat pada 1 KPH yaitu KPH Unit VII Limau Sarolangun dengan produksi mencapai 4 ton/ tahun. Harga minyak kepayang ini dapat mencapai 50000/kg. Produksi minyak kepayang di KPHP tersaji dalam Tabel 1.

Kepayang atau keluak termasuk pohon yang tumbuh secara liar dan penghasil bahan sebagai bumbu untuk masakan khas nusantara. Pohon kepayang memiliki tinggi pohon mencapai 40 m dengan diameter batang 2,5 m. Pohon yang memiliki biji yang mengandung asam sianida tersebut dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian 1000 m dpl. Karakteristik pohonnya yang mudah dan cepat tumbuh, akarnya kuat, mampu mempertahankan air tanah, berumur panjang, dan memiliki potensi konservasi

www.khasiat.co.id

tanah dan air. Bagian kepayang yang paling sering dimanfaatkan adalah bijinya. Biji kepayang mengandung minyak dan memiliki kandungan asam lemak yang cukup tinggi.

Minyak kepayang sering dimanfaatkan sebagai minyak goreng dan obat tradisional (Misriadi 2016). Belum adanya penelitian khusus terkait minyak kepayang tersebut menjadikan potensi minyak kepayang masih belum termaksimalkan. Potensi minyak kepayang sebagai alternatif bahan baku minyak nabati didapatkan dari hasil ekstrasi minyak kepayang kasar dari biji kepayang (Mahandari *et al* 2011). Minyak kepayang mengandung omega , vitamin A, B, dan C, protein, zat besi, dan betakaroten. Olahan minyak kepayang yang terkenal seperti kosmetik, sabun kecantikan, *body lotion*, minyak rambut, dan pengawet ikan. Biji kepayang juga bermanfaat untuk antiseptik dan pengganti minyak kelapa.

TABEL 1. PRODUKSI MINYAK KEPAYANG

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)
1	KPH Unit VII Limau Sarolangun	4.000
	Jumlah (Ton)	**4**

www.dapurprima.com

www.liburansari.com

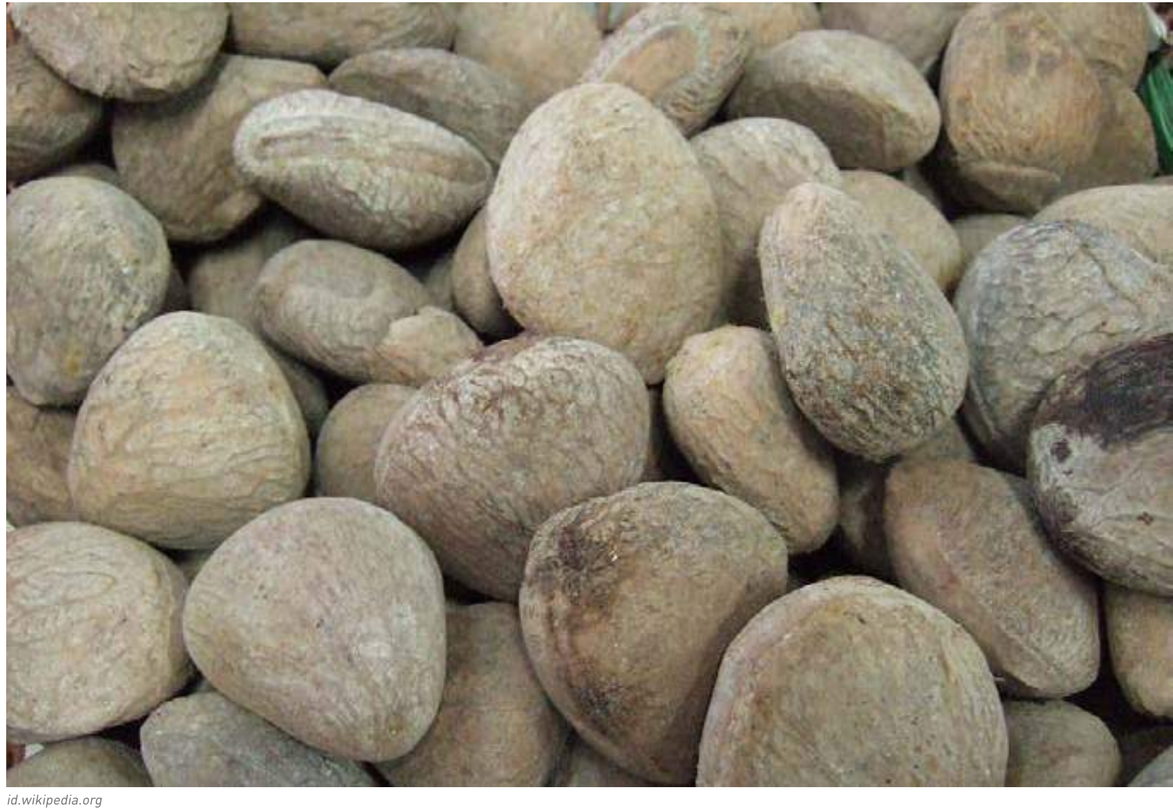

id.wikipedia.org

bisniskeuangan.kompas.com

LADA PUTIH

Terdapat 2 KPHP yang telah melakukan produksi Lada dengan besar produksi mencapai 132,06 ton/tahun. Harga lada dapat mencapai 180.000/kg. Produksi komoditi Lada tersaji dalam Tabel 1.

Lada atau dapat disebut merica/sahang termasuk tanaman yang banyak memiliki kandungan kimia. Termasuk di dalamnya terdapat minyak lada, minyak lemak, hingga pati. Sifat lada yang sedikit pahit dan pedas, membuat lada memiliki julukan Raja Rempah-rempah. Karena lada termasuk salah satu komoditas ekspor dengan nilai tinggi. Produksi lada di Indonesia dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu lada hitam dan lada putih. Lada hitam didapat dari proses pengeringan lada tanpa pengupasan dan lada putih merupakan lada yang dikeringkan setelah melalui proses perendaman dan pengupasan (Elizabeth 2012). Lada putih yang membutuhkan 8 hingga 9 bulan untuk mencapai kondisi masak penuh (Heartwin dan Korikanthimath 2003).

Tanaman yang mengandung capsain ini bermanfaat mengobati kanker, mengurangi arthritis, menurunkan berat badan, mengobati batuk, dan menyembuhkan sakit kepala. Kandungan flavonoid, vitamin C, dan vitamin A lada putih juga dapat menjaga kesehatan jantung, tekanan darah, dan sebagai antioksidan untuk mengurangi beberapa tanda penuaan. Lada putih butiran tahan hingga beberapa tahun. Sedangkan dalam bentuk bubuk, lebih mudah busuk karena mudah lembab.

suksesjayamelati.wordpress.com

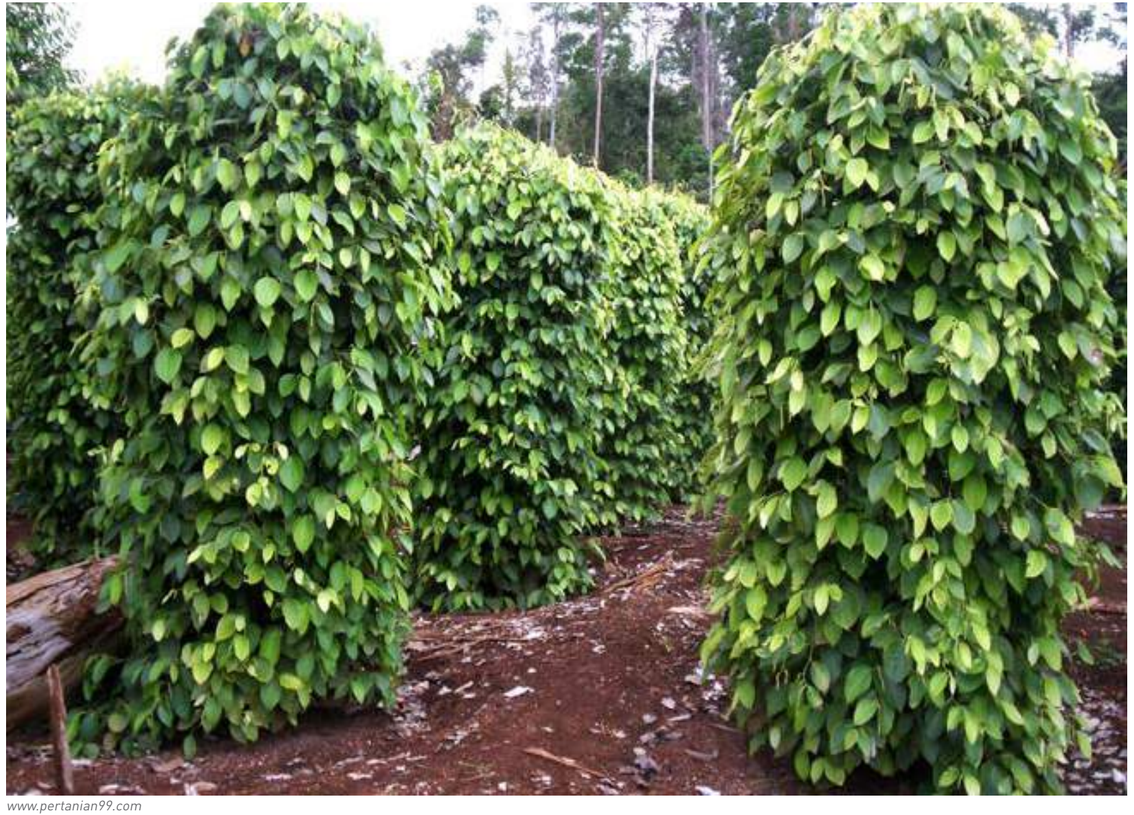

www.pertanian99.com

TABEL 1. PRODUKSI LADA

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk	132.000	134
2	KPHP Unit IX Minas Tahura	60	
	Jumlah (Ton)	**132,06**	**134**

www.jurnalasia.com

breaktime.co.id

JENGKOL

Wilayah-wilayah KPHP yang memiliki potensi jengkol perlu didorong agar melakukan inventarsisasi untuk pengembangan produksi jengkol dalam skala besar. Saat ini hanya 2 KPHP yang memiliki produksi jengkol dalam skala besar (Tabel 1). Namun, potensi HHBK tersebut belum terukur.

Jengkol (*Archidendron pauciflorum (Benth.) I.C. Nielsen*) menjadi daya tarik sebagian orang, meskipun beberapa orang tidak menyukai dikarenakan baunya. Hasil hutan bukan kayu ini sudah sejak lama ditanam di Indonesia, di kebun atau pekarangan untuk dijadikana pelengkap menu makanan. Jengkol tergolong ke dalam suku Fabaceae yang juga berkhasiat sebagai obat. Biji jengkol merupakan bagian tanaman yang paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat. Jengkol mengandung karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin B, fosfor, kalsium dan beberapa senyawa yang mempunyai aktivitas antidiare seperti tanin, flavonoid dan steroid. Senyawa tersebut membantu mengatasi diare dengan efek sebagai astringen yaitu dapat mengerutkan selaput lendir usus sehingga mengurangi pengeluaran cairan diare dan disentri (Rizal *et al.* 2016).

Pohon jengkol sendiri mampu tumbuh hingga mencapai 10-27 meter. Selain itu, pohon jengkol juga memiliki akar yang dalam sehingga mampu menyerap air tanah. Sekitar bulan Mei 2017 Indonesia mengalami kelangkaan jengkol sehingga mencapai harga Rp 90.000/kg. Padahal harga normal Rp 35.000/kg sebelum mengalami kelangkaan. Artinya ada potensi besar pemanfaatan jengkol yang belum menjawab permintaan

news.xlcore.com

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI JENGKOL YANG TELAH DIMANFAATKAN KPHP INDONESIA

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong	75.000 kg/tahun	-
2	KPHP Unit XXIII Lamandau, KPHP Unit XXIV, dan KPHP XXV	100.000 kg/tahun	500
	Jumlah (Ton)	**175**	**100**

negeriagunglamtimkab.com

beritagar.id

negerimas.com

JAHE MERAH

Saat ini potensi jahe merah masih berada di 3 wilayah KPHP dengan total mencapai 70,1 ton/tahun, meskipun keterlibatan masyarakat masih belum maksimal.

Jahe merah tumbuh di ekososistem dataran rendah hingga ekosistem pegunungan dengan ketinggian 0 - 1.500 mdpl. Jahe merah hampir menyerupai batang semu dengan tinggi batang sekitar 30cm- 100 cm. Jahe merah, tidak hanya digunakan untuk membuat bumbu masak tetapi secara empiris digunakan sebagai komponen penyusun ramuan obat. Secara umum digunakan dalam obat dengan khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi radang, batuk, luka, dan alergi akibat gigitan serangga.

Jahe memiliki tiga varietas yaitu jahe gajah, jahe emprit dan jahe merah.

Tentunya kandungan minyak atsiri yang berbeda-beda. Minyak atsiri tertinggi pada varietas jahe merah yaitu mencapai 2.58%-3.09% (Hidayati 2015). Rimpang jahe merah mengandung gingerol yang memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antikarsinogenik, antimutagenik, antitumor. Selain itu, Senyawa metabolit sekunder jahe merah dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia, diantaranya bakteri *Staphylococcus aureus, Escherichia coli* (Handrianto 2016).

Harga jahe merah yang berada di pasaran saat ini berada Rp 25.000/ kg. Harga jahe merah termasuk harga yang tertinggi dengan varietas yang lain seperti jahe gajah dan jahe emprit. Oleh karena itu, potensi nilai ekonomi di pasar masih perlu dikembangkan melalui peningkatan nilai produk pasca panen.

www.agrowindo.com

iwaralaba.com

www.husnaherbal.com

www.ukmriau.com

TABEL 1. POTENSI DAN PRODUKSI JAHE MERAH DI SELURUH KPHP INDONESIA

No	Nama KPHP	Produksi (Kg/th)	Masyarakat yang Terlibat (KK)
1	KPHP Unit XVI Gunung Mas	100	20
2	KPHP Unit XXIII Lamandau, KPHP Unit XXIV, dan KPHP XXV	60.000	50
3	KPHP Unit I Banjar	10.000	30
	Jumlah (Ton)	**70,1**	**100**

porang.co.id

PORANG

Indonesia hanya memiliki satu porang, yakni di bawah izin pemaafaatan KPHP Unit V Sejorong, Sumbawa Barat. Masyarakat wilayah Sejorong membudidayakan porang menghasilkan produksi sejumlah 35 ton per tahun yang melibatkan masyarakat sebanyak 40 KK. Perlu pengembangan porang baik peningkatan intensifikasi maupun ekstensifikasi budidaya porang. Harga porang saat ini mencapai Rp. 4.000,-/kg ketika di panen. Namun, pemanfaatan porang di wilayah masyarakat hutan butuh peningkatan nilai produk pasca panen.

porang.co.id

Porang (*Amorphophallus muelleri Blume*) tergolong famili Araceae yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Porang banyak tumbuh secara liar di hutan-hutan Pulau Jawa. Beberapa petani menjadikan hutan milik perhutani untuk menanam porang. Umbi-umbian ini tidak bisa ditanam di tempat terbuka dan porang membutuhkan sandaran pohon lainnya (Arifin 2001).

Pemanfaatan umbi porang sampai saat ini yaitu diproses menjadi tepung porang. Tepung porang mengandung glukomanan yang tinggi mencapai 81.72%. Saat ini glukomannan dan turunannya telah diteliti dan dapa digunakan pada berbagai industri seperti industri pangan (gelling agent, thickener, film former, sdan emulsifier); industri farmasi (terapi sel, bahan pengisi implan, dan bahan penghantar obat); industri bioteknologi (bahan imobilisasi sel dan enkapsulasi) dan industri kimia (bahan kosmetik, komposit biodegradable). Glukomanan merupakan makanan dengan kandungan serat larut air yang tinggi, rendah kalori dan bersifat hidrokoloidnya yang khas (Dwiyanti 2015).

porang.co.id

PASAK BUMI

Indonesia setidaknya memiliki 2 KPHP yang memiliki potensi produksi Pasak Bumi yaitu KPHP Unit XXIII Lamandau, KPHP Unit XXIV, dan KPHP unit XXV, dan KPHP Unit V Tabalong. KPHP Unit XXIII Lamandau, KPHP Unit XXIV, dan KPHP unit XXV memiliki produksi sejumlah 1 ton per tahun, dan masyarakat yang terlibat sejumlah 15 KK. Sedangkan KPHP Unit VII Tanah Laut memiliki produksi Pasak Bumi sebesar 1,2ton per tahun dan masyarakat yang terlibat sejumlah 30 KK. Menurut data yang diperoleh untuk harga Pasak Bumi sendiri berkisar Rp 20.000 per kg tergantung kualitas Pasak Bumi tersebut.

porang.co.id

Pasak bumi (*Eurycoma longifolia Jack.*) merupakan salah satu tumbuhan banyak ditemukan di hutan Indonesia. Tumbuhan ini lazim digunakan dalam pengobatan tradisional. Akar pasak bumi biasanya digunakan sebagai obat kuat, namun dapat juga digunakan untuk mengatasi disentri, penurun panas, dan antimalaria. Kulit dan batang pasak bumi bermanfaat untuk mengatasi demam, sariawan, cacing perut dan sakit tulang. Daun pasak bumi digunakan untuk mengatasi penyakit gatal. Bunga dan buahnya digunakan untuk mengatasi sakit kepala, sakit perut, dan nyeri tulang. Karena khasiat pasak bumi yang banyak membuat pasak bumi semakin populer, sehingga penggunaan pasak bumi sebagai obat tradisional cenderung meningkat.

www.sehatnesia.com

SARANG WALET

Indonesia setidaknya memiliki 1 KPHP yang memiliki potensi produksi Sarang Walet yaitu KPHP Unit XXVI Sub DAS Belayan. KPHP Unit XXVI Sub DAS Belayan memiliki produksi sejumlah 3,6 ton per tahun, dan masyarakat yang terlibat sejumlah 20 Desa setempat. Menurut data yang diperoleh untuk harga Sarang Walet sendiri berkisar Rp 2 juta – 10 juta per kg tergantung kualitas Sarang Walet tersebut.

Burung Walet memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh burung lain. Ciri yang paling khas yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang yang bernilai jual tinggi. Indonesia menjadi penyedia sarang Burung Walet dunia. Ekspor sarang Burung Walet dilakukan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta Australia dan Amerika Serikat.

Sarang burung walet yang harganya mahal dibuat dari air liur yang dihasilkan oleh jenis burung *Collocalia fuchiphaga* (sarang putih) dan *Collocalia maxima* (sarang hitam). Meskipun habitat alami burung walet adalah gua-gua kapur, Collocalia fuchiphaga telah berhasil ditangkarkan dalam rumah-rumah sejak tahun 1880. Habitat burung walet di dalam gedung yang dapat dikondisikan sesuai kebutuhan seperti temperatur, kelembaban dan intensitas cahaya. Sarang burung walet ini dianggap mempunyai banyak khasiat seperti sebagai anti aging dan meningkatkan sistem imun. Sarang burung walet juga sebagai makanan yang lezat dimana direbus dengan gula batu untuk sebagai sup sarang burung.

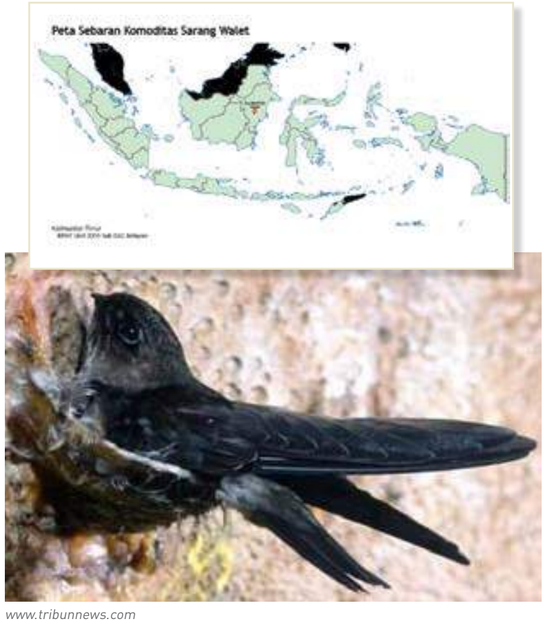

www.tribunnews.com

warungkopi.okezone.com

SEREH WANGI

Indonesia setidaknya memiliki 1 KPHP yang memiliki potensi produksi Sereh Wangi yaitu KPHP Unit IX Batulanteh. KPHP Unit IX Batulanteh memiliki produksi sejumlah 1 ton per tahun. Menurut data yang diperoleh untuk harga Sereh Wangi sendiri berkisar Rp 150.000 – 180.000 per kg tergantung kualitas Sereh Wangi tersebut.

Sereh Wangi (*Cymbopogon citratus*) merupakan famili Gramineae telah banyak dibudidayakan di Indonesia. Sereh wangi merupakan tanaman menahun dengan tinggi antara 50 – 100 cm. Memiliki daun tunggal berjumbai yang dapat mencapai panjang daun hingga 1 m dan lebar antara 1,5 - 2 cm. Batang tidak berkayu dan berwarna putih keunguan. Tanaman ini tumbuh berumpun dan memiliki perakaran serabut.

Sereh termasuk jenis *fast growing* yang dapat mencapai sekitar 1 meter. Pertumbuhan tanaman yang baik dapat dipereoleh pada daerah dengan curah hujan berkisar antara 700 – 3000 mm dengan hari hujan tersebar cukup merata sepanjang tahun. Tanaman sereh dari species Cymbopogon citratus dapat tumbuh dengan optimal hingga ketinggian 1000 meter dpl. Penanaman pada tanah dengan pH antara 5 – 7 dan memiliki drainase yang baik merupakan kondisi yang cukup ideal bagi sereh. Tanaman sereh dapat hidup dalam kondisi ekstrim seperti tanah yang miskin hara, tanah basa, dan hutan yang terdegradasi

Tanaman ini bermanfaat sebagai bahan pada makanan dan minuman di Asia. Selain itu, sereh wangi telah banyak digunakan sebagai minyak pijat. Ditambah lagi, dimanfaatkan untuk dupa atau lilin aromatik. Selain penggunaan tersebut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya manfaat sebagai pestisida.

www.khasiatpokokherba.com

www.khasiat.co.id

JAMUR TIRAM

Indonesia setidaknya memiliki 2 KPHP yang memiliki potensi produksi Jamur Tiram yaitu KPHP Unit XXXIII Telakai, dan KPHP Unit VII Tanah Laut. KPHP Unit XXXIII Telakai memiliki produksi sejumlah 3,6 ton per tahun. Sedangkan KPHP Unit VII Tanah Laut memiliki produksi Jamur Tiram sebesar 150 kg per tahun dan masyarakat yang terlibat sejumlah 20 kk. Menurut data yang diperoleh untuk harga jamur tiram sendiri berkisar Rp 11.000 – 12.000 per kg tergantung kualitas jamur tiram tersebut.

Jamur tiram (*Pleurotus sp.*) merupakan salah satu jamur konsumsi yang bernilai tingi. Jamur tiram terdiri dari beberapa jenis yaitu jamur tiram putih (*P.ostreatus*), jamur tiram merah muda

www.pertanian.tv

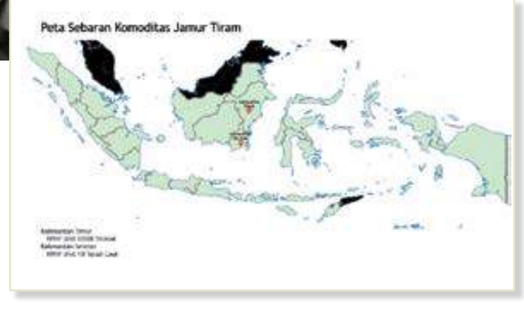

(*P.flabellatus*), jamur tiram abu-abu (*P. sajor caju*), dan jamur tiram abalone (*P.cystidiosus*). jamur ini merupakan tumbuhan saprofit yang hidup di kayu lunak dan memperoleh bahan makanan dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan organik. Nutrisi utama yang dibutuhkan jamur tiram adalah sumber karbon seperti sebuk kayu gergajian dan berbagai limbah organik lain.

Pertumbuhan jamur tiram sangat tergantung pada faktor fisik seperti suhu, kelembaban, cahaya, pH media tanam, dan aerasi, udara jamur tiram dapat menghasilkan tubuh buah secara optimum pada rentang suhu 26-28 °C, kelembaban udara 80-90% dan pH media tanam yang agak masam antara 5-6. Cahaya matahariyang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur sangat sedikit berkisar antara 50-300 lux.

sajiansedap.grid.id

JAMUR PELAWAN

Indonesia setidaknya memiliki 1 KPHP yang memiliki potensi produksi Jamur Pelawan yaitu KPHP Unit I Rambat Menduyung. KPHP tersebut memiliki produksi jamur ope sejumlah 500 kg per tahun. Menurut data yang diperoleh untuk harga Jamur Pelawan sendiri berkisar Rp 1.000.000 – 2.000.000 per kg tergantung kualitas Jamur Pelawan tersebut.

Sistem perakaran pohon pelawan (*Tristaniopsis merguensis*) tumbuh jamur edibel yang dikenal dengan nama jamur pelawan. Jamur pelawan merupakan salah satu spesies dari famili Myrtaceae. Jamur ini tersebar di selatan Myanmar, selatan Thailand, Malaysia, Sumatera, Kepulauan Riau, kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Kalimantan. Jamur pelawan ini ditemukan tumbuh pada sistem perakaran pohon T. merguensis yang berada pada fase pohon, tiang, maupun pancang. Selain sebagai inang utama dari jamur pelawan, nektar bunga pohon pelawan juga merupakan makanan utama bagi lebah penghasil madu pahit. Pohon pelawan dapat tumbuh pada daerah dataran rendah, pegunungan sampai dengan ketinggian 1300 mdpl juga terdapat di sepanjang aliran sungai (Yarli N).

Jamur pelawan tergolong mahal karena tergolong langka yang serimg tumnbuhnya hanaya di daerah Bangka. Harga jual jamur pelawan ini berkisar Rp 400.000,- hingga Rp 800.000,- bahkan pernah mencapai Rp 1.000.000,-/kg berat kering pada bulan Desember 2010 – Januari 2011.

www.belitonggeopark.com

SUTRA

Indonesia setidaknya memiliki 1 KPHP yang memiliki potensi produksi Sutra yaitu KPHP Unit V Boalemo. KPHP Unit XXXIII Telakai memiliki produksi sejumlah 240 kg per tahun dengan melibatkan masyarakat sejumlah 75 KK. Menurut data yang diperoleh untuk harga benang sutera sendiri berkisar Rp 280.000 per kg tergantung kualitas benang sutera tersebut.

Produksi benang sutera alam yang merupakan produksi kepongpong dari ulat sutera yang diberi makan daun murbei (*Morus spp.*). Budidaya murbei memiliki agroklimat yang sesuai, lokasinya strategis. Ulat sutera termasuk endopterigota, yaitu serangga yang

perkembangan sayapnya terjadi didalam badan dan fase pradewasa berbeda dengan fase dewasa, baik dalam bentuk perilaku, makanan, maupun bentuknya. Lama periode hidup, mulai dari saat lahir (telur menetas) sampai masa membuat kokon adalah sekitar 1 bulan. Meskipun hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh iklim dan suhu setempat.

Tingkat produksi kokon hasil pemeliharaan petani masih sangat beragam, yaitu berkisar dari 12 – 43 kg per boks. Produksi kokon sebesar 8.220 kg per tahun. Untuk tingkat perkembangan harga saat ini harga telur ulat sutera Rp 45.000/box. Harga kokon masih berfluktuasi, berkisar Rp. 13.000 – Rp. 25.000/kg. Harga benang sutera saat ini antara Rp 280.000 per kilogram (Armando 2008). ✣

Pemanenan kulit Manis KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

BAB EMPAT
KELEMBAGAAN USAHA MASYARAKAT DI KPHP

Sebagai sebuah terobosan tata kelola hutan di Indonesia, kelembagaan KPH bekerja berdasarkan tiga prinsip yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. Produksi barang dan jasa menunjukkan kemampuan KPH dalam kelola ekonomi, secara lestari akan menunjukkan kemampuan KPH dalam kelola ekologi sementara target berbasis desa menunjukkan kemampuan KPH dalam kelola Sosial.

1. PERAN KPHP DALAM KEWIRAUSAHAAN BERBASIS MASYARAKAT

Pergeseran paradigma pembangunan telah membawa perubahan dalam pembangunan kehutanan dari industrial ke kehutanan masyarakat. Konsep kehutanan masyarakat merujuk pada praktek-praktek pengelolaan hutan atau pohon-pohon, dimana perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bekerjasama dengan anggota masyarakat desa, baik pada lahan komunal atau lahan negara yang dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh rakyat di kawasan KPHP sudah berlangsung sejak lama. Tujuan program kehutanan masyarakat adalah memberikan manfaat kepada anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lahan, konservasi lahan dan kegiatan yang berkaitan dengan hutan lainnya. Dalam implementasinya, kehutanan masyarakat dilaksanakan oleh lembaga sosial pedesaan, koperasi rakyat dan lainnya. Hasil produksi yang diperoleh dari hutan-hutan yang dikelola secara komunal, biasanya didistribusikan manfaatnya kepada anggota masyarakat sesuai dengan keperluan. Hasil dari hutan ini biasanya digunakan untuk keperluan yang bersifat subsisten, walaupun ada yang dapat dijual sebagai tambahan income keluarga.

Dalam rangka pengembangan kehutanan masyarakat penelusuran terhadap sejarah paradigma pengelolaan hutan di indonesia, baik masa lalu, juga sebelum atau selama Orde Baru sangat penting dilakukan. Hal tersebut akan bermanfaat

Komoditas HHBK Kulit manis KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

dalam mengambil pembelajaran dari setiap kasus dan kebijakan. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan komparasi pada pengelolaan hutan secara konvensional dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat. Ciri-ciri paradigma kehutanan yang konvensional ini disampaikan oleh Wiersum (1987) sebagai berikut:

a. Sentralisasi manajemen.
Pemerintah pusat mengatur secara detil aspek administrasi dan teknis suatu kegiatan pengusahaan hutan agar hak negara untuk menguasai (*state-based*) tidak akan terganggu;

b. Kontrol di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Seluruh kegiatan harus didasarkan pada petunjuk pelaksanaan (juklak)

dan petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan, serta harus melalui perijinan dan/atau pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak hanya menyangkut pengusahaan kayu dan non-kayu tetapi juga pemanfatan kawasan hutannya;

c. **Memanfaatkan rencana kerja untuk areal yang luas.** Artinya disediakan *blue print* yang berlaku umum, tanpa memberikan ruang penyesuaian kepada spesifikasi lokal yang jelas-jelas akan sangat berpengaruh pada kelestarian sumberdaya itu sendiri;

d. **Produk tunggal.** Produk yang diutamakan adalah kayu sedang hasil hutan non kayu hanya dianggap sebagai hasil hutan ikutan saja;

e. **Asumsi homogen.** Kondisi hutan dianggap sama. Hal ini terjadi tidak saja karena kurang tersedianya informasi dan/atau ketidak tahuan atas kondisi serta makna keanekaragaman ekosistem hutan, tetapi juga demi mempermudah tugas dan pekerjaan yang diemban para perencana dan pengambil keputusan;

f. **Diarahkan ke target.** Artinya keberhasilan suatu pengelolaan ditinjau dari target-target yang ditetapkan dalam rencana karya (atau realisasi jatah tebangan kayu), sehingga makna proses diabaikan dan berakibat timbulnya kecurangan-kecurangan di tingkat pelaksanaan;

Potensi Jasa LIngkungan KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

g. **Fokus utama terhadap pendapatan.** Cara pandang yang menganggap hutan sebagai sumber keuangan yang perlu semaksimal mungkin diekstraksi hasilnya tanpa pertimbangan ekologi;

h. **Aturan mainnya bersifat hukuman/ sanksi bukan insentif/disinsentif.**

i. **Keputusan dibuat sepihak.** Pengambilan keputusan umumnya dilakukan oleh pihak yang berkuasa - baik aparat terhadap pengusaha hutan dan masyarakat lokal, ataupun pengusaha hutan terhadap masyarakat di sekitarnya dengan berbekal peraturan kebijakan, tanpa menghiraukan prinsip partisipatif yang sangat penting guna menyelaraskan berbagai kepentingan;

Dalam perkembangannya, memasuki dasawarsa terakhir Abad ke-21 telah terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Perubahan ini menyikapi perubahan dinamika masyarakat dan adanya tuntutan global terhadap pelestarian sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Apalagi setelah guliran reformasi tahun 1998, kebebasan ruang untuk melakukan perjuangan terhadap akses masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya semakin terus diperjuangkan. Sehingga perbaikan posisi masyarakat dan kelembagaan lokal terlihat sebagai berikut (Sardjono, 2000):

Pengolahan Minyak Nilam, KPH Dampelas
Sumber Foto: MFP3

a. Adanya kewenangan masyarakat yang berhimpun dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang disebut desa untuk melaksanakan proses dan mekanisme administrasi pemerintahan dan kelembagaan desa.

b. Menyangkut pengelolaan sumberdaya hutan, masyarakat lokal dan adat, khususnya melalui koperasi dan kelembagaan lainnya memiliki kesempatan memperoleh ijin pemanfaatan hutan dalam bentuk ijin Pemungutan Hasil Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Hak, Hutan Adat, dan juga Hutan Desa;

c. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya hutan, disamping pemanfaatan masyarakat juga memiliki hak-hak lainnya, yaitu memperoleh dan memberikan masukan informasi dari atau terhadap rencana pemanfaatan sumberdaya, serta terlibat dalam pengawasan pemanfaatan;

d. Masyarakat juga berhak memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan sumberdaya hutan dan melakukan gugatan perwakilan bilamana dirugikan kehidupannya.

Perkembangan-perkembangan di atas memberikan kejelasan bahwa kehutanan konvensional sesuai dengan karakter yang dimilikinya tidak akan memberikan jaminan keberhasilan. Justru kehutanan masyarakat dalam prakteknya – baik berbasis sistem

Penanaman Bibit Kayu Bawang oleh KPH Muko-Muko
Sumber Foto: MFP3

tradisional ataupun inovasi baru, sepanjang prinsip-prinsip kuncinya terpenuhi akan menjadi tumpuan harapan keberhasilan pembangunan kehutanan di masa depan. Sardjono (1999) menekankan prinsip-prinsip kunci dimaksud yaitu:

a. Masyarakat lokal memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan dan/atau hasil hutan. Dalam hal kewenangan pengelolaan kawasan kehutanan masyarakat tidak menekankan perbedaan status kepemilikan hutan (negara, komunal, perorangan). Sedangkan dalam hasil-hutan meliputi komponen hayati (kayu dan non-kayu), non-hayati (tanah, air), dan jasa hutan;

b. Masyarakat lokal berperan-serta dalam setiap tahap kegiatan pengelolaan hutan. Peran serta dimaksud meliputi wakil seluruh komponen masyarakat lokal ditinjau dari umur (tua dan muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), ataupun asal (asli dan pendatang). Adapun setiap tahap pengelolaan menyangkut keterlibatan aktif dan tanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan/penilaian;

c. Masyarakat lokal memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan pengelolaan hutan. Bila ditinjau dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan maka sangat wajar bila porsi lebih besar manfaat pengelolaan

Potensi HHBK Kemiri
KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

hutan dinikmati masyarakat. Disamping itu juga menggaris-bawahi terdistribusinya secara merata hasil dan keuntungan dimaksud pada seluruh lapisan masyarakat;

d. Masyarakat lokal terbebas dari eksploitasi pasar dan tekanan pihak luar. Sebagai kelompok inferior dengan segala keterbatasannya, masyarakat lokal seringkali atau berpotensi menjadi obyek dari pengelolaan hutan. Oleh karenanya unsur pemberdayaan (*empowerment*) antara lain melalui pendampingan dari kelompok profesional sebelum atau selama pengelolaan hutan merupakan karakter penting kehutanan masyarakat.

Sebagai sebuah terobosan tata kelola hutan di Indonesia, kelembagaan KPH bekerja berdasarkan tiga prinsip yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. Ketiga prinsip tersebut memaksa KPH untuk bekerja secara seimbang dalam mengelola wilayahnya. Keberlanjutan ekologi atau kelestarian harus dapat dicapai dengan tetap memperhatikan kemanfaatan ekonomi untuk mewujudkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat yang berada di sekitar KPH. Target jumlah KPH yang memproduksi barang dan jasa lestari berbasis desa menunjukkan keseriusan dan mandat yang harus dilaksanakan oleh KPH dalam mengelola wilayahnya. Produksi barang dan jasa menunjukkan kemampuan KPH dalam kelola ekonomi, secara lestari akan menunjukkan kemampuan KPH dalam kelola ekologi sementara target berbasis desa menunjukkan kemampuan KPH dalam kelola Sosial.

Mandat dan prinsip kerja KPH bisa diwujudkan jika KPH mendorong upaya-upaya peningkatan usaha-usaha kehutanan masyarakat di wilayah KPH. Peran yang dilakukan KPH adalah dengan : a) melakukan pengorganisasian masyarakat; b)melakukan peningkatan kapasitas masyarakat; c) memberikan kepastian wilayah bagi masyarakat (*Land and Legality*); d) Memberikan bantuan teknis dan usaha; e) Akses pemasaran produk masyarakat; dan Akses permodalan.

Potensi HHBK Kemiri
KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

Upaya mendukung peran KPHP dalam pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat, dia harus memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengembangkan kewirausahaan tersebut. Pengembangan ini dapat dilihat dari faktor organisasi, ketersediaan data serta faktor Pemasaran. Itulah sebabnya data lapang menjadi sangat penting. Dalam mendorong kewirausahaan kehutanan masyarakat, KPHP membagi upayanya dalam tiga kategori kluster, yaitu :

Kluster 1 KPHP

KPHP yang memiliki organisasi sangat kuat, ditandai dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat handal, adanya ketersediaan data Hasil Hutan Bukan Kayu (HBBK) lebih dari 50 persen dari daftar HHBK di Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan sudah memiliki saluran pemasaran produk HHBK.

- Dukungan yang dapat diberikan adalah dukungan pengembangan kegiatan inventarisasi data HHBK untuk komoditas HHBK lainnya dan pengembangan jaringan pemasaran.

Merujuk data di lapangan KPHP yanng termasuk dalam kluster 1 disajikan dalam Tabel

Potensi HHBK Kemiri
KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

KPHP CLUSTER 1

No	Nama KPHP
1	KPHP Unit XXIX Mandailing Natal
2	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri
3	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap
4	KPHP Unit VII Limau Sarolangun
5	KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong
6	KPHP Unit VI Lakitan
7	KPHP Unit IV Meranti
10	KPHP Unit III Bukit Punggur
11	KPHP Unit XIV Gedong Wani
12	KPHP Unit IV Muara Dua
14	KPHP Yogyakarta
15	KPHP Unit IX Batulanteh
16	KPHP Unit V Sejorong
18	KPHP Unit I Banjar
19	KPHP Unit VII Tanah Laut
20	KPHP Unit XII Berau Barat
21	KPHP Unit IV Poigar

Potensi HHBK Kopi
Sumber Foto: MFP3

KPHP CLUSTER 1

No	Nama KPHP
22	KPHP Unit V Boalemo
23	KPHP Unit VI Gorontalo
25	KPHP Unit IV Dampelas Tinombo
26	KPHP Unit V, VI dan IX Dolago Tanggunung
28	KPHP Unit XX Balantak
29	KPHP Unit XIX Toili Batu Rube
30	KPHP Unit XVII Sivia Patuju
31	KPHP Unit XI Sintuwu Maroso
32	KPHP Unit XXIV Gularaya
33	KPHP Unit VII Mamasa Barat
34	KPHP Unit V Budong Budong
35	KPHP Unit X Gunung Sinopa
36	KPHP Unit XIII Bacan
37	KPHP Unit XVII Waropen
40	KPHP Unit XII Ladongi
42	KPHP Unit XXIII Maria Donggomasa
44	KPHP Unit XVIII Tambora Utara

KPHP CLUSTER 1

No	Nama KPHP
46	KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk
47	KPHP Unit XXXII Bongan
48	KPHP Unit XVI Gunung Mas
49	KPHP Unit XXXIV Kendilo
50	KPHP Unit I Kerinci
52	KPHP Unit XXIII Lamandau
53	KPHP Unit XX Madapangga Rompu
54	KPHP Unit I Manggarai Barat
56	KPHP Unit XI Pesisir Selatan
57	KPHP Unit I Rambat Menduyung
58	KPHP Unit XVI Rote Ndao
60	KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi
63	KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin
64	KPHP Unit VII Bone Bolango
65	KPHP Unit VI Tanah Bumbu
66	KPHP Unit XXXIII Telakai
67	KPHP Unit II Wae Apu
69	KPHP Unit III Bubus Panca
72	KPHP Unit X Sungai Merakai
76	KPHP Unit XIV Suban Jeriji
78	KPHP Unit III Wae Tina

KPH bersama Masyarakat Mengolah Biji Kopi, KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

Kluster 2 KPHP

KPHP yang memiliki organisasi kuat yang ditandai dengan kemampuan SDM yang cukup handal, adanya ketersediaan data HHBK kurang dari 50 persen dari daftar HHBK di RPHJP dan sudah memiliki saluran pemasaran produk HHBK.

- Dukungan yang dapat diberikan adalah penguatan kemampuan organisasi, dukungan terhadap pengembangan kegiatan inventarisasi data HHBK untuk komoditas HHBK lainnya dan pengembangan jaringan pemasaran.

Merujuk data lapangan KPHP yang termasuk dalam kluster 2 disajikan dalam Tabel

KPHP CLUSTER 2

No	Nama KPHP
1	KPHP Unit V Rawas
2	KPHP Unit V Sungai Sembulan
3	KPHP Unit VI Reg 47 Way Terusan
4	KPHP Unit IV Gorontalo Utara
5	KPHP Unit XI Mekonga Selatan
6	KPHP Unit VI Karama
7	KPHP Unit XXI Seruyan
8	KPHP Unit XXII dan XXVI Kotawaringin Barat
9	KPHP Unit IX Minas Tahura
10	KPHP Unit II Murung Raya
11	KPHP Unit XLIII Nduga
12	KPHP Unit XII Gane
13	KPHP Unit IV Karossa

Pemberian Pakan
Murbei untuk ulat sutera
Sumber Foto: MFP3

Kluster 3 KPHP
adalah kluster KPHP yang memiliki organisasi yang perlu ditingkatkan kemampuan SDM agar lebih handal, tidak adanya ketersediaan data HHBK dan belum adanya saluran pemasaran produk HHBK.

- Dukungan yang dapat diberikan kepada KPHP kluster 3, yaitu membangun kemampuan organisasi KPHP, dukungan terhadap kegiatan inventarisasi data HHBK prioritas dan membangun jaringan pemasaran.

Merujuk pada data di lapangan, KPHP yanng termasuk dalam kluster 3 disajikan dalam Tabel

KPHP CLUSTER 3

No	Nama KPHP
1	KPHP Unit XVIII dan KPHL Unit XIX Kapuas Hulu
2	KPHP Unit Pogugul
3	KPHP Unit V Sorong Selatan
4	KPHP Unit X Kepulauan Selayar
5	KPHP Unit V Tabalong
6	KPHP Unit XXVII Santan
7	KPHP Unit II Jebu Bembang Antan
8	KPHP Unit XXVI Sub Das Belayan
9	KPHP Unit IX Oba
10	KPHP Unit II Lalan Mangsang Mendis

Pengolahan Madu Hutan Higienis, KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

2. PRAKTIK-PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN MASYARAKAT DI KPHP

Kegiatan usaha masyarakat di wilayah kawasan hutan telah berjalan sejak lama, utamanya kegiatan pemanfaatan lahan dibawah tegakan maupun kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Hasil Hutan Bukan Kayu yang teridentifikasi telah dimanfaatkan dan dikelola masyarakat pada 78 wilayah KPHP adalah sebanyak 24 jenis sebagaimana diuraikan pada bab 2. Berdasarkan data terakhir, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan HHBK sangat besar berkisar 87.145 keluarga dan 20 desa[146] . Angka ini sebenarnya belum menunjukkan kondisi sebenarnya karena hampir 40% dari 78 KPHP belum melakukan pendataan dengan baik berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolan hasil hutan bukan kayu. Belum lagi jumlah masyarakat yang terlibat dalam hasil produksi kayu dan jasa lingkungan yang diduga jumlahnya sangat besar. Oleh karenanya ke depan, penting program pendataan keterlibatan masyarakat ini menjadi prioritas masing-masing KPHP. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfataan HHBK tersebut tersebut, ada yang telah bekerja sama dengan KPHP namun adapula yang masih berjalan sendiri-sendiri.

Berbagai kegiatan usaha masyarakat yang telah berjalan dan bekerja sama dengan KPHP diantaranya adalah :

1. Pengembangan Usaha Gula Aren di KPHP Dampelas Tinombo
Desa Oncone Raya di kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan wilayah KPHP Dampelas Tinombo. Wilayah ini memiliki potensi pohon aren yang telah dimanfaatkan secara tradisional selama puluhan tahun oleh masyarakat. KPHP berupaya memikirkan bagaimana meningkatkan kulaitas gula aren yang di kelola masyarakat.

Pada 2016, KPHP melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan produksi masyarakat dalam pengolahan gula Aren dengan membentuk Kelompok Petani

[146] KPHP Unit X Sungai Merakai menyebutkan tidak ada data pasti berapa keluarga yang dilibatkan, tapi ada sekitar 20 desa yang terlibat dalam pengelolan hasil hutan bukan kayu.

Gula Aren Maminasae beranggotakan 25 orang, diketuai oleh Andi Zainuddin. Selain membentuk kelembagaan petani, KPHP memfasilitasi pengadaan mesin produksi gula Aren untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk gula aren yang dikelola Maminasae. Mesin ini membuat produksi gula Aren menjadi lebih beragam. Kelompok Maminasae kini memproduksi gula batok maupun gula semut (*Palm Sugar*). Fasilitasi KPHP tidak hanya terhadap kuantitas dan kualitas produk, namun diupayakan sampai pada pemasaran dengan memfasilitasi pengurusan Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Ijin ini membuat produk-produk Maminasae dapat diterima oleh pasar yang lebih luas.

2. Pengolahan Madu Hutan Lestari di KPHP Kerinci

Salah satu produk hasil hutan di KPHP Kerinci adalah madu hutan. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya pengelola madu hutan dilakukan KPHP kerinci melalui pelatihan pengolahan madu lestari dan pembentukan kelompok pengelola madu Lestari pada 2016.

Salah satu kelompok yang difasilitasi KPHP adalah Kelompok Jaya Abadi di desa Kebun Baru Kec. Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Kelompok yang beranggotakan 5 orang ini dilatih bagaimana melakukan panen madu lestari. Hasilnya terjadi peningkatan produksi dan harga jual madu yang dihasilkan. Kini rata-rata produksi madu yang dihasilkan sekitar 200 kg tiap bulannya dengan harga jual Rp120 ribu perkilonya. Madu hutan ini selanjutnya dikemas dalam kemasan yang menarik oleh KPHP dan di pasarkan dengan nama **"Madu Hutan Sialang"** dengan harga Rp. 75 Ribu tiap kemasan berisi 300 gram.

Masyarakat Memanem Kulit Manis
Sumber Foto: MFP3

3. Pengolahan Minyak Kepayang di KPHP Limau Unit VII-Hulu Sarolangun

Pohon kepayang banyak terdapat di wilayah KPHP Limau dan di desa desa sekitar – diantaranya Desa Pemuat, Memban dan Bathin Pengambang). KPHP menjalin kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan yang terhimpun dalam Kelompok Tani Hutan "Kelompok Pengolah Kepayang (KPK)". Model kemitraan yang dibangun antara KPHP Limau dengan masyarakat sangat sederhana. Masyarakat sebagai produsen minyak kepayang yang diproses dengan asas kelestarian, sementara KPHP Limau sebagai pembina sekaligus mambantu memasarkan produk.

Upaya meningkatkan produksi dan kualitas minyak kepayang dilakukan oleh KPHP dengan berbagai cara antara lain : peningkatan kapasitas Kelompok Pengolah Kepayang, mengenalkan pengetahuan dan teknologi pengelolahan minyak kepayang, pemberian bantuan alat pengepres modern. Tak berhenti di sini. KPHP mulai menginisisasi "rintisan bisnis" dan terus berupaya mendorong, menumbuhkembangkan serta mempromosikan minyak kepayang sebagai minyak masa depan karena dihasilkan dari hutan alam dan melalui proses pengolahan yang ramah lingkungan. KPHP juga membentuk koperasi KPH dengan No.102/BH/VI.I/III/2016 sebagai salah satu jalan untuk mempromosikan produk minyak kepayang ini.

4. Pengembangan Ulat Sutera di KPHP Boalemo

Pengembangan Ulat Sutera di wilayah KPHP Boalemo dimulai akhir 2014 dengan penanaman 7.000 batang tanaman Murbei dilokasi KPHP seluas 7.000 M2. Luasan ini kemudian berkembang menjadi 2 Ha. Upaya pengembangan ulat sutera ini dilakukan KPHP Boalemo bekerja sama dengan 3 Kelompok tani Hutan yang masing-masing berjumlah 25 Orang.

Salah satu kelompok Tani Hutan/ Kelompok Tani Sutera yang sudah panen kokon perdana adalah Kelompok Tani Sutera dusun Moliliulo Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kabupaten Boalemo. Dari pemeliharaan 1,25 kotak telur ulat sutera, kelompok dapat menghasilkan 61 kilogram kokon basah. Kerjasama ini dimulai KPHP dengan menyiapkan lahan tanaman Murbei dan bantuan telur ulat sutera serta bangunan kandang ulat Sutera. Sementara kelompok tani melakukan pemeliharaan terhadap tanaman Murbei dan ulat sutera. KPHP juga melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi kelompok tani dalam memelihara tanaman maupun ulat sutera serta pemintalan benang sutera. Dalam fase selanjutnya, KPHP mengambil peran dalam produksi lanjutan serta pemasarasan produk benang sutera maupun produk-produk jadi lainnya berbahan benang sutera.

5. Pengembangan madu trigona di KPHP Batulanteh

Pengembangan madu trigona di KPHP batulanteh bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar wilayah KPHP. Langkah awal yang dilakukan KPHP adalah membentuk kelompok-kelompok budidaya lebah trigona. Kelompok budidaya ini mendapat bantuan berupa stup dan pelatihan-pelatihan bagi kelompok budidaya lebah trigona. Selain peralatan dan peningkatan kapasitas, KPHP Batulanteh mengambil peran menampung dan memfasilitasi pemasasaran produk madu trigona. KPHP melakukan kerjasama denagn berbagai pihak untuk memasarkan produk madu trigona yang tdikemas dengan label "Sumbawa Black Honey". Makin tingginya minat masyarakat terhadap budidaya dan produk madu ini melahirkan terbentuknya Asosiasi Lebah Madu Trigona Sumbawa.

Kawasan Hutan KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

Berdasarkan karakter-karakter kunci kewirausahaan kehutanan masyarakat di atas, maka penekanan konsep kewirausahaan kehutanan masyarakat bersumber dari komponen masyarakat yang merupakan sentral pemikiran pada kebijakan kehutanan. Dengan demikian kewirausahaan kehutanan masyarakat tidak hanya sekedar tradisi melainkan menjadi paradigma pembangunan kehutanan secara menyeluruh (*holistic*).

Lima contoh pembelajaran keberhasilan KPHP di atas menunjukkan pengembangan usaha rakyat di KPHP dilakukan menyesuaikan kondisi biofisik dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Pengembangan usaha rakyat dalam skema kehutanan masyarakat merupakan proses perubahan yang mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Sebagai sebuah proses yang dinamis, maka konsep usaha rakyat ini juga tidak memiliki sebuah sistem atau definisi yang baku, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat dan sistem sosial ekonomi, serta kesepakatan-kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Dalam implementasinya di lapang beberapa

Potensi Jasa Lingkungan Air Terjun Salodik KPH Balantak
Sumber Foto: MFP3

prinsip yang harus diperhatikan diuraikan di bawah ini.

1. Prinsip keutuhan (holistic)
Prinsip keutuhan mengandung arti penyelenggaraan pengelolaan hutan harus mempertimbangkan dan sesuai dengan keadaan dan potensi seluruh komponen pembentuk hutan (hayati dan non hayati); kawasan lingkungannya (biofisik, ekonomi, politik, dan sosial-budaya masyarakat), serta memperhatikan dan dapat memenuhi kepentingan keseluruhan pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap hutan serta mampu mendukung kehidupan mahluk hidup (selain manusia) dan keberlanjutan keberadaan alam semesta.

2. Prinsip keterpaduan (Integrated)
Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan harus berlandaskan kepada pertimbangan keseluruhan hubungan ketergantungan dan keterkaitan antara komponen-komponen pembentuk ekosistem hutan serta pihak-pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap hutan dalam keseluruhan aspek kehidupannya, mencakup : aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial-budaya.

3. Prinsip keberlanjutan (sustainability)
Prinsip ini mengandung arti bahwa fungsi dan manfaat ekosistem hutan dalam segala bentuknya harus dapat dinikmati oleh umat manusia dan

Madu Hitam Trigona, KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

seluruh kehidupan di muka bumi ini dari generasi sekarang dan generasi yang akan datang secara bekelanjutan dengan potensi dan kualitas yang sekurang-kurangnya sama (tidak menurun). Jadi tidak boleh terjadi pengorbanan (pengurangan) fungsi dan manfaat ekosistem hutan yang harus dipikul suatu generasi tertentu akibat keserakahan generasi sebelumnya. Prinsip ini mengandung konsekuensi terhadap luasan hutan, produktivitas dan kualitas (kesehatan) hutan yang setidaknya tidak berkurang dalam setiap generasinya. Oleh karena luas hutan yang tersedia pada kenyataannya terus berkurang, sementara total kebutuhan terhadap barang dan jasa hutan setiap saat terus meningkat, maka produktivitas dan kualitas hutan harus dapat ditingkatkan.

Prinsip-prinsip di atas bisa diwujudkan dalam pengembangan usaha rakyat pada skema kehutanan masyarakat jika dipraktekan dengan tiga sikap utama, yaitu :

a. Penataan ruang yang bersifat rasional dalam setiap kesatuan bentang alam (landscape scenario)
Kesatuan bentang alam yang dikelola harus merupakan kesatuan ekologis, bukan kesatuan politik atau administrasi pemerintahan. Pendekatan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kesatuan ekosistem menjadi pendekatan yang harus digunakan. Selanjutnya

setiap kesatuan lahan dalam ekosistem DAS tersebut ditetapkan fungsi penggunaannya sesuai dengan watak fisik lahannya, sedangkan pemanfaatan setiap kesatuan lahan ini tidak boleh melebihi daya dukung lahan tersebut. Proses ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan prinsip kebersamaan. Sesuai karakteristik sebagian besar lahan dalam DAS serta tingkat aksesibilitasnya terhadap pusat pertumbuhan ekonomi wilayahnya, sehingga dapat ditentukan tujuan utama (skenario) pengelolaan sumberdaya alam dalam wilayah DAS. Setelah skenario pengelolaan DAS ditetapkan, maka pengelolaan setiap kesatuan ekosistem dalam DAS harus mendukung pencapaian tujuan utamanya.

b. Komitmen yang kuat terhadap tata ruang yang telah disepakati (strong commitment)

Seluruh pihak yang berada dan terkait dengan penggunaan ruang dalam setiap kesatuan ekosistem (DAS) harus memiliki komitmen yang sama dan kuat untuk mempertahankan tata ruang yang sudah disepakati bersama secara konsisten.

c. Kebersamaan dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program pengelolaan (colaborative management

Kebijakan dan program dalam rangka pengelolaan hutan dalam setiap ekosistem DAS hendaknya disusun dan dilaksanakan secara bersama dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak dan kewajiban yang proporsional dan berkeadilan (sesuai undang-undang), keterbukaan, demokratis, dan bertanggunggugat. Untuk ini, maka pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif *(colabarative management*) dalam pengelolaan hutan merupakan sebuah kewajiban.

Mengingat sifat-sifat biofisik, keadaan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat dalam setiap ekosistem DAS bersifat spesifik (berbeda satu sama lain), maka tujuan pengelolaan, rumusan macam-macam bentuk dan intensitas kegiatan pengelolaan harus ditetapkan untuk setiap kesatuan pengelolaannya dan sesuai dengan sifat-sifat biofisik, keadaan ekonomi dan sosial-budaya masyarakatnya (*adaptive management*).

Dengan mencermati berbagai pelaksanaan program kehutanan

masyarakat baik di dalam maupun diluar negeri, terlihat bahwa hampir tiap program mengintroduksikan satu kelembagaan baru. Kelembagaan telah dijadikan alat yang penting untuk menjalankan program tersebut. Setidaknya telah tumbuh pemahaman pada kalangan pemerintah, bahwa kelembagaan merupakan komponen yang penting dalam masyarakat, dan dapat menjadi *agent of change*. Namun demikian, diperoleh kecenderungan bahwa penggunaan strategi pengembangan kelembagaan banyak mengalami ketidaktepatan dan kekeliruan. Berbagai permasalahan dalam pengembangan kelembagaan yang ditemukan adalah:

(1) Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal,

Pengemasan Madu Hutan
KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis kegiatan yang sama. Hal ini dilandasi asumsi bahwa daya tawar sekelompok orang akan meningkat bila secara kuantitas jumlahnya cukup banyak. Kelompok tani misalnya adalah kelompok orang-orang yang selevel, yaitu pada kegiatan budidaya satu komoditas tertentu.

(2) Kelembagaan yang dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol dari pelaksana program, bukan untuk peningkatan *social capital* masyarakat. Pembentukannya adalah atas ide dan kehendak atas, sehingga bentuk, tujuan, dan strukturnya ditetapkan oleh pelaksana program.

(3) Setiap program atau proyek membuat satu kelembagaan baru, dengan nama yang khas. Jarang sekali, suatu program dari dinas tertentu menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada.

(4) Struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam.

(5) Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual. Hal ini dipengaruhi oleh konsep *trickle down effect* yang umum dipakai dalam dunia penyuluhan. Dari seorang kontak tani yang pintar diharapkan ia mau menyebarkan pengetahuan dan keterampilannya tersebut kepada petani-petani lain dalam kelompoknya. Cara ini jauh lebih murah dan cukup efektif, jika teknologi yang telah diajarkan tersebut memang memiliki keunggulan.

(6) Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya.

(7) Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material dibanding nonmaterial, atau merupakan perubahan yang materialistik.

(8) Introduksi kelembagaan baru telah merusak kelembagaan lokal yang ada sebelumnya, termasuk merusakkan hubungan-hubungan horizontal yang telah ada. Salah satunya adalah karena proyek yang bersifat sektoral dan diskontinyu.

Pembangunan model kewirausahaan kehutanan masyarakat perlu dilakukan karena adanya perbedaan pemahaman baik dalam tataran konsep/ perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfatannya antara pengelola kegiatan – baik pihak Kementrian KLHK maupun dinas di daerah serainstasi terkait lainnya, dengan masyarakat sekitar yang terlibat dan atau terpengaruh langsung oleh kegiatan tersebut.

Dalam tataran konsep, perencanaan, kegagalan sering disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana yang dapat mengatasi permasalahan di daerahnya, dimana setiap daerah mempunyai karekteristik biofisik dan sosial yang berbeda serta akar permasalahan yang berbeda pula. Dengan demikian pada setiap daerah tentu masyarakat yang berada di daerah tersebutlah yang lebih mengetahui bagaimana mengatasi permasalahannya.

Produk KPHP Rawas
Sumber Foto: MFP3

Pada setiap pelaksana kegiatan, pengawasan dan pemanfaatan hasilnya belum secara optimal melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Oleh karena itu masyarakat sekitar tidak merasa memiliki, tidak merasa ikut menikmati hasil di kemudian hari,sehingga akhirnya timbul rasa tidak perlu merasa peduli terhadap kegagalan maupun keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Menjawab penyebab kegagalan tersebut maka model kewirausahaan kehutanan masyarakat akan menghilangkan setidaknya meminimalisir semua hambatan tersebut dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Oleh karena itu strategi utama kegiatannya adalah "dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat". Pemerintah baik pusat maupun daerah serta instansi terkait, perguruan tinggi/lembaga penelitian maupun lembaga swadaya masyarakat bertindak sebagai: (1) penyedia sumber pendanaan dan dana pendamping melalui APBN dan APBD, (2) fasilitator dan mediator dalam pelaksana kegiatan, (3) mediator dan fasilitator dalam penyusunan panduan dan kajian ilmiah dan, (4) pendampingan kegiatan di lapangan. Sedangkan masyarakat di sekitar kegiatan bertindak sebagai: (1) pemilik lahan, (2) pelaksana, pengawas, dan pengguna hasil di lapangan, (3) mempunyai sharing pembiayaan dalam bentuk materi dan non materi. ✣

Potensi Jasling, Air Terjun Pancaro Rayo KPH Kerinci
Sumber Foto: MFP3

Petugas KPH Boalemo
Memanen Kokon Sutera
Sumber Foto: MFP3

BAB LIMA
MEMASTIKAN KPHP YANG LESTARI, PRODUKTIF & ADIL

Hutan sebagai sumberdaya publik, maka pembangunan kehutanan adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak (*related stakeholders*) antara lain pemerintah daerah provinsi (*pemprov*), pemerintah daerah kabupaten (termasuk di dalamnya dinas kehutanan), perguruan tinggi, LSM, perusahaan milik negara dan swasta serta masyarakat. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran, kepentingan (*interest*) serta sudut pandang yang berbeda-beda terhadap hutan dan kehutanan (pengurusan dan pengelolaan hutan).

Pembangunan kehutanan melalui kelembagaan KPHP adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak. Melihat kondisi ini, perlu ada perubahan paradigma pembangunan kehutanan, antara lain dari *stated based* kepada *community based.* Pilihan ini akan memberikan peluang bagi masyarakat lokal dalam mengakses sumberdaya hutan untuk kehidupan mereka. Pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat dalam pengelolaan hutan di KPHP perlu terus dikembangkan sejalan dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. Pergeseran paradigma pembangunan kehutanan dewasa ini secara terus menerus dan bertahap berupaya menempatkan masyarakat sebagai pelaku dari tujuan pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat diharapkan memberikan manfaat secara lestari (*sustainable*), produktif, adil (*equitable*), dan efisien bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu praktek-praktek pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan dan merupakan inisiatif langsung masyarakat dipandang dapat bertahan selama bertahun-tahun secara lestari berkelanjutan dan berlangsung secara turun temurun. Konsep keberlanjutan memiliki implikasi penting untuk pengelolaan sumberdaya hutan di KPHP. Sejumlah perubahan dibutuhkan untuk menciptakan ulang strategi dan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di KPHP. Penataan ulang yang dilakukan salah satunya pengembangan usaha kewirausahaan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang berimbang secara ekologis, ekonomis dan sosial.

Dalam rangka mengembangkan kewirausahaan kehutanan masyarakat dengan pengelolaan hasil hutan bukan kayu di KPHP ada beberapa prasyarat yang harus disiapkan sebagai berikut:

Pemanenan Madu Trigona, KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

Masyarakat mengolah biji kopi, KPH Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

1. Kejelasan wilayah kelola masyarakat

Kejelasan wilayah kelola masyarakat merupakan prasyarat utama bagi berkembangnya kewirausahaan kehutanan masyarakat di KPHP. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk memperjelas hal tersebut. Beberapa upaya yang dibahas adalah adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengalokasikan kawasan hutan menjadi wilayah kelola masyarakat yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karenanya wacana rasionalisasi kawasan hutan menjadi relevan untuk dibicarakan dan dikembangkan menjadi kebijakan yang dapat dioperasionalisasikan. Kejelasan wilayah kelola masyarakat ini juga harus didukung oleh perangkat peraturan seperti Peraturan Daerah.

Disamping itu kejelasan wilayah kelola kewirausahaan kehutanan masyarakat perlu dirumuskan di tingkat desa atau wilayah adat, karena sering tidak jelas batas antar desa. Setiap usulan pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat harus dipastikan batas-batasnya, kaitannya dengan komunitas desa-desa di sekitarnya, untuk itu perlu musyarawah di tingkat desa.

2. Kelembagaan masyarakat

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun kelembagaan masyarakat yang kuat ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dengan para pihak lain, khususnya pengambil kebijakan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan pengaturan internal

Potensi HHBK Rotan dan Aren
Sumber Foto: MFP3

kelompok masyarakat pengelola sumberdaya hutan, serta memperjelas strategi untuk memperoleh akses atas proses-proses pengambilan keputusan. Hal tersebut sangat dibutuhkan mengingat inti keberhasilan dari program kewirausahaan kehutanan masyarakat terletak pada proses kelembagaan masyarakat dibentuk dan dikembangkan yaitu proses membangun komitmen dan solidaritas kolektif diantara peserta untuk dapat bekerjasama secara spontan dalam kepentingan bersama baik yang bersifat sosial maupun ekonomi.

3. Pengorganisasian

Upaya untuk mengembangkan praktek-praktek kewirausahaan kehutanan masyarakat pengelolaan hutan di lapangan harus dilakukan melalui pengorganisasian. Berbagai hal yang diatur meliputi mekanisme komunikasi antar lembaga yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, transparansi, dan partisipatif, baik dalam proses penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan maupun pada saat pertanggung jawaban atas pelaksanaan kebijakan, mekanisme kelembagaan kolaboratif yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak, organisasi dan mekanisme prosedur di tingkat internal pengelola dan pembuat kebijakan dan mekanisme mengalokasikan dana kepada inisiatif kewirausahaan kehutanan masyarakat.

Aset manusia dan sosial yang berkembang merupakan prasyarat bagi pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat. Aset manusia

Potensi HHBK Rotan
KPH Dolago
Sumber Foto: MFP3

harus dikembangkan dalam hal kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, pengembangan keterampilan memfasilitasi dengan menggunakan metode-metode partisipatif yang berlandaskan pada prinsip dan efektif. Upaya sederhana yang bisa dilaksanakan dan membawa dampak yang seringkali signifikan antara lain melalui pelatihan dan studi banding. Pengembangan aset sosial antara lain dapat dilakukan dengan membangun jaringan kerja dan forum-forum dialog multipihak.

Setelah melihat beberapa kajian dan kasus pembelajaran di berbagai daerah dan negara terlihat bahwa komponen yang dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat ada dua yaitu faktor masyarakat dan faktor orang luar yang melakukan intervensi. Dengan dua faktor tersebut, dapat dibuat beberapa kemungkinan asumsi yang pada akhirnya akan memunculkan tipologi-tipologi yang secara spesifik akan membedakan langkah yang satu dengan langkah lainnya.

Berikut diuraikan tentang tipologi yang berdasarkan faktor kekuatan masyarakat dan faktor intervensi orang luar dalam Tabel berikut :

TABEL 4. TIPOLOGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN MASYARAKAT

FAKTOR		INTERVENSI ORANG LUAR	
		TINGGI (T)	RENDAH (R)
KEKUATAN MASYARAKAT	KUAT (K)	TK (I)	RK (II)
	LEMAH (L)	TL (III)	RL (IV)

Ciri-ciri tipologi I (TK):

- Kekuatan masyarakat cukup kuat, artinya secara tradisi bahwa praktik-praktik kewirausahaan kehutanan masyarakat sudah dipraktekkan oleh masyarakat sudah sejak lama dan secara faktual sudah dipraktikan pada lahan-lahan milik, orientasi masyarakat terhadap potensi sumberdaya alam memiliki unsur bisnis /pasar, konflik relatif tidak ada, modal sosial (kepercayaan, relasi sosial dan tatanan kehidupan) cukup baik.
- Posisi intervensi dari luar kuat (pemerintah, LSM, swasta), hal ini ditandai dengan kekuatan dari orang luar yang cukup besar dengan indikasi pengaruh intervensi orang luar terhadap masyarakat tinggi, dana yang cukup besar, SDM yang cukup dan pengorganisasian yang baik.

Ciri-ciri tipologi II (RK):

- Kekuatan masyarakat cukup kuat, artinya secara tradisi bahwa praktik-praktik kewirausahaan kehutanan masyarakat sudah dipraktekkan oleh masyarakat, orientasi masyarakat terhadap potensi sumberdaya alam memiliki unsur bisnis pasar, konflik relatif tidak ada, modal sosial (kepercayaan, relasi sosial dan tatanan kehidupan) cukup baik
- Posisi intervensi dari luar lemah (pemerintah, LSM, swasta), hal ini ditandai dengan kekuatan dari orang luar yang lemah karena pengaruh

Biji Kemiri, Potensi HHBK
Batulanteh
Sumber Foto: MFP3

orang luar terhadap masyarakat kecil, indikasi dana yang kecil, SDM yang minim dan pengorganisasian yang kurang baik.

Ciri-ciri tipologi III (TL):

- Kekuatan masyarakat lemah, artinya secara tradisi bahwa praktik-praktik kewirausahaan kehutanan masyarakat belum dipraktikkan oleh masyarakat, orientasi masyarakat terhadap potensi sumberdaya alam hanya subsisten, potensi konflik ada, modal sosial (kepercayaan, relasi sosial dan tatanan kehidupan) rendah
- Posisi intervensi dari luar kuat (pemerintah, LSM, swasta), hal ini ditandai dengan kekuatan dari orang luar yang cukup besar dengan indikasi pengaruh intervensi orang luar terhadap masyarakat tinggi,dana yang besar, SDM yang cukup dan pengorganisasian yang baik.

Ciri-ciri tipologi IV (RL):

- Kekuatan masyarakat lemah, artinya secara tradisi bahwa praktik-praktik kewirausahaan kehutanan masyarakat belum dipraktekkan oleh masyarakat belum, orientasi masyarakat identifikasi awal Tipologi kewirausahaan kehutanan masyarakat
- Posisi intervensi dari luar lemah (pemerintah, LSM, swasta), hal ini ditandai dengan kekuatan dari orang luar yang lemah karena pengaruh orang luar terhadap masyarakat kecil, indikasi dana yang kecil, SDM yang minim dan pengorganisasian yang kurang baik.

Secara khusus kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat berdasarkan berbagai analisis di atas harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap KPHP.

Dalam mengembangkan kewirausahaan kehutanan masyarakat di KPHP, beberapa langkah dapat ditentukan berdasarkan analisis beberapa aspek, yaitu prakondisi, perencanaan, monitoring, finansial, kelembagaan, pelatihan, insentif dan organisasi, seperti paparan berikut:

1. ANALISIS PRAKONDISI

Aspek prakondisi merupakan aspek yang cukup penting dalam mengembangkan kewirausahaan kehutanan masyarakat di KPHP. Aspek prakondisi merupakan tahap awal yang harus dilakukan untuk menyamakan persepsi setiap stakeholder sehingga dalam membangun kewirausahaan kehutanan masyarakat sudah dianggap sebagai kebutuhan bersama antara masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah dan pelaku usaha. Adapun beberapa hal yang termasuk dalam aspek prakondisi adalah kepastian wilayah kelola, kepastian pasar dan infra struktur.

a. Kepastian wilayah kelola

Kepastian wilayah kelola masyarakat merupakan prasyarat utama bagi berkembangnya kewirausahaan kehutanan masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk memperjelas hal tersebut. Beberapa upaya yang dibahas adalah adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengalokasikan kawasan hutan menjadi wilayah kelola masyarakat yang dapat diakses dan dimanfaatkan

Pengolahan Gula Aren,
KPH Dampelas
Sumber Foto: MFP3

oleh masyarakat. Karenanya wacana rasionalisasi kawasan hutan menjadi relevan untuk dibicarakan dan dikembangkan menjadi kebijakan yang implementatif dan dapat dioperasionalisasikan. Kepastian wilayah kelola masyarakat ini perlu diatur melalui proses partisipatif dengan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, sesama masyarakat itu sendiri dan juga harus didukung oleh perangkat peraturan.

Dalam mendukung kepastian wilayah kelola perlu dibangun forum dialog, baik di daerah sendiri antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan antar masyarakat sendiri, khususnya untuk memperjelas dan menetapkan ruang kelola masyasrakat. Forum juga diharapkan dapat memperjelas hak, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat .

b. Kepastian pasar

Dalam mengembangkan kewirausahaan kehutanan masyarakat di KPHP, prakondisi yang harus dipersiapkan yaitu kepastian pasar. Faktor kepastian pasar maksudnya adalah memastikan bahwa adanya pasar sebagai tempat menjual produk-produk yang dihasilkan dari kewirausahaan kehutanan masyarakat. Hal ini menyangkut dua hal penting yaitu pemilihan jenis tanaman yang dikembangkan di kewirausahaan kehutanan masyarakat dan kecocokan bahan baku serta kemitraan dengan industri. Dalam beberapa kasus kegagalan kewirausahaan kehutanan masyarakat salah satunya karena tidak adanya dukungan kepastian pasar sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pemasaran atas produk yang dihasilkan dari kehutanan masyarakat. Sebagai konsekuensinya produk mereka tidak ada nilai ekonominya dan akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap hasil usaha mereka yang pada akhirnya akan mengakibatkan kegagalan.

Dalam mengatasi hal tersebut langkah yang dapat dibangun untuk menuju kepastian pasar yaitu dengan membuka informasi tentang pemasaran dan membuka saluran-saluran baru sehingga dapat menambah peluang produk yang dihasilkan sehingga dapat dipasarkan dengan harga yang wajar. Langkah lainnya yaitu dengan membangun kemitraan dengan pihak swasta (khususnya industri) dengan membuka saluran pemasaran yang baru. Peran membuka informasi dan membangun kemitraan ini dapat dilakukan oleh Pemda setempat dengan melakukan koordinasi antara dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas kehutanan, masyarakat dan perusahaan industri pengolahan kayu setempat.

c. Infrastruktur

Dalam mengembangkan kewirausahaan kehutanan masyarakat, ketersediaan dan kecukupan infrastruktur menjadi syarat dalam kesuksesan implementasi kewirausahaan kehutanan masyarakat. Faktor infrastruktur yang dimaksudkan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan kewirausahaan kehutanan masyarakat, khususnya pembukaan wilayah hutan (ketersediaan jaringan jalan) dan

kendaraan untuk transportasi input produksi dan hasil hutan. Faktor infrastruktur ini masih erat kaitannya dengan faktor kepastian pasar khususnya efisiensi angkutan input dan hasil hutan ke pasar (industri pengolahan hasil hutan lokal). Di dalam pengelolaan hutan infrastruktur ini memerlukan modal yang cukup besar, sehingga perlu skema pembangunannya secara cermat dan bagaimana pendanaannya.

Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam membangun infrastruktur yaitu Pemda melakukan pembangunan secara menyeluruh dan terencana sebagai sistem jaringan jalan di dalam wilayah provinsi dan kabupaten, dengan melibatkan pihak swasta. Artinya dalam pembangunan perlu dikembangkan cara membangun yang mengedepankan *multiflier effect* yaitu efek ganda dalam pembangunan, artinya dampak sektor satu akan berdampak kepada sektor yang lain.

Dengan demikian dalam aspek prasyarat ini maka peranan pemerintah daerah cukup besar terutama dalam mengalokasikan sumberdaya manusia dan anggaran untuk meng-implementasikan hal tersebut. Selain itu juga diperlukan komitmen dari berbagai pihak dalam implementasi kewirausahaan kehutanan masyarakat karena faktor resiko kegagalan ini akan terus menghantui kalau komitmen dalam kewirausahaan kehutanan masyarakat tidak terus dijaga. Resiko kegagalan ini juga semakin besar karena waktu yang cukup lama untuk menunggu satu daur panen tanaman kehutanan.

2. ANALISIS KELEMBAGAAN

Model kelembagaan pengelolaan hutan yang paling baik adalah yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat dan kapabilitas negara yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan negara dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Oleh karena itu, dalam memberikan rekomendasi kelembagaan kewirausahaan kehutanan masyarakat yang optimal di KPHP maka terlebih dahulu perlu diketahui kondisi sosial (yang berkaitan dengan kekuatan

Potensi HHBK
Kulit manis
Sumber Foto: MFP3

modal sosial) dan kapabilitas pemda (yang terkait dengan kemampuan, kemauan, dan aksesibilitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan). Identifikasi terhadap modal sosial perlu secara jelas dan rinci dilakukan. Aspek ini sangat berpengaruh nyata dan perlu pemahaman yang mendalam untuk mengetahuinya.

Modal sosial yang dimaksudkan disini adalah kepercayaan dan norma sosial masyarakat yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan, khususnya agar tercapainya pembangunan berkelanjutan. Pada konsep awal pembangunan berkelanjutan, faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan baru terbatas pada sumberdaya alam, sumberdaya fisik atau buatan, dan sumberdaya manusia. Lalu disadari bahwa ketiga kapital tersebut baru menjelaskan secara parsial, perlu modal sosial dari keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi.

Kapabilitas Pemda yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kemampuan pemda dalam mengatur sumberdaya tersebut. Hal itu bisa dilihat dari kemampuan dalam kebijakan yang mengatur sumberdaya manusia dan anggaran. Faktor kegagalan dari aspek ini cukup beresiko yaitu adanya sikap tidak konsisten dari pemerintah akibat dari kinerja buruk pemerintah karena mutasi pegawai dan minim dan buruknya mekanisme penganggaran

Pengamasan Higienis
Madu Kerinci
Sumber Foto: MFP3

sehingga dimensi keproyekan lebih dominan terlihat.

Pengaturan kelembagaan dalam konteks kewirausahaan kehutanan masyarakat lebih diarahkan pada bagaimana individu berinteraksi dengan individu lainnya dalam kegiatan kewirausahaan kehutanan masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan kewirausahaan kehutanan masyarakat dapat diterima oleh berbagai *stakeholders* dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing. dalam pengaturan kelembagaan kewirausahaan kehutanan masyarakat ada 3 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: koherensi kepentingan dan aktivitas di antara *stakeholders*, kekuatan lembaga lokal, dan manfaat untuk masyarakat lokal di dalam kegiatan kewirausahaan kehutanan masyarakat.

Dalam implementasinya, pengaturan kelembagaan kewirausahaan kehutanan masyarakat akan mudah dilakukan jika ada kesamaan kepentingan di antara *stakeholders* dan adanya kejelasan identitas serta besaran (ukuran) kelompok masing-masing *stakeholders*. semakin besar dan semakin terdiferensiasi kelompok *stakeholder* yang ada di dalam kewirausahaan kehutanan masyarakat, maka semakin sulit pengaturan sosialnya. Dalam pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat, keberadaan kelembagaan lokal perlu dikaji sebagai hal yang sangat membantu berfungsinya kegiatan kewirausahaan kehutanan masyarakat melalui perlindungan terhadap hak, penguatan norma-norma yang berlaku, mengatasi konflik, dan distribusi manfaat. Kelembagan lokal akan efektif sebagai pengelola sumberdaya jika manfaat dan biaya memiliki berbagai ciri sebagai berikut: (a) manfaat timbul dengan cepat, (b) manfaat dapat dinikmati secara lokal, (c) manfaat dapat dilihat secara nyata, dan (d) manfaat dapat diperoleh oleh orang yang sama yang menanggung biaya. Pengaruh kelembagaan sangat tergantung pada kekuatan yang dimilikinya atas berbagai aktor yang terlibat dalam pengembangan kewirausahaan kehutanan masyarakat.

Pengaruh kelembagan lokal ini sering sulit menjangkau ranah yang lebih luas, sehingga perlunya perlu penguatan oleh lembaga eksternal yang memiliki kekuatan pengaruh yang memadai. Dalam aspek kelembagaan kewirausahaan kehutanan masyarakat di KPHP, langkah yang harus dilakukan yaitu :

- Pemda dan KPHP melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok masyarakat atau kelembagaan lokal yang akan terlibat dalam kewirausahaan kehutanan masyarakat terutama dalam hal modal sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan LSM
- Pemda dan KPHP perlu melakukan reorientasi terhadap sumberdaya Pemda yang dapat mendukung program kewirausahaan kehutanan masyarakat

Dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan data dan informasi

Pengolahan Biji Kopi oleh
masyarakat dan KPH
Sumber Foto: MFP3

Pemanenan Madu
Hutan Kerinci
Sumber Foto: MFP3

kehutanan di KPHP, pembenahan manajemen kelembagaan adalah suatu keharusan yang meliputi : manajemen sumber daya manusia, kewenangan dan pembiayaan pengelolaan data, kemampuan koordinasi dan efektifitas komunikasi.

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pembenahan pengelolaan data dan informasi kehutanan, ada tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu:

a. Kuantitas SDM

Secara umum jumlah SDM kehutanan di daerah belum memadai. Rasio jumlah tenaga kehutanan dibandingkan dengan luasan hutan masih sangat kecil. Sebagian besar SDM yang ditugaskan di instansi kehutanan adalah tenaga berpendidikan SLTA ke bawah, walaupun di beberapa daerah jumlah Sarjana Kehutanan juga sudah cukup memadai. Namun demikian, secara umum di berbagai daerah terjadi kekurangan tenaga teknis menengah dengan pendidikan akademi atau Diploma Kehutanan yang dapat menjadi penyambung antara SDM berkualifikasi Sarjana Kehutanan dengan tenaga teknis berpendidikan rendah. Kesenjangan jumlah SDM berpendidikan menengah mengakibatkan gap yang lebar antara konsep pengelolaan hutan dengan implementasi di lapangan.

b. Kualitas SDM

Selain kuantitas SDM yang terbatas, secara umum pengelolaan data dan informasi kehutanan di daerah juga menghadapi kendala rendahnya kualitas SDM. Disamping dari tingkat pendidikan sebagian besar SDM kehutanan masih berpendidikan rendah, sebagian besar SDM kehutanan juga kurang memiliki kemampuan yang spesifik sesuai dengan bidang tugasnya. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan masih sangat diperlukan agar kemampuan SDM dapat ditingkatkan. Permasalahannya, seringkali tenaga yang diberi tugas oleh instansi kehutanan di daerah untuk mengikuti pendidikan dan latihan seringkali hanya orang-orang tertentu yang tugas sehari-harinya sebenarnya menangani bidang lain. Dengan demikian, dapat terjadi pendidikan dan pelatihan yang diadakan tidak memenuhi sasaran karena instansi kehutanan di daerah menugaskan beberapa orang "spesialis" mengikuti diklat terlepas dari bidang tugas mereka sehari-hari. Lazim terjadi, hanya orang-orang tertentu yang oleh pimpinan dianggap mampu mengikuti materi diklat karena sangat terbatasnya kualitas SDM di daerah.

c. Alokasi Penugasan SDM

Pada kasus beberapa instansi di daerah, sebenarnya kuantitas dan kualitas SDM telah cukup memadai. Namun demikian, alokasi penugasan SDM tidak sesuai antara latar belakang pendidikan atau kemampuan SDM dengan Tupoksi yang harus diemban. Selain itu permasalahan alokasi SDM juga menyangkut distribusi SDM yang kurang sesuai dengan beban pekerjaan. Ada kalanya suatu unit kerja atau bidang yang beban pekerjaannya tidak terlampau berat tetapi jumlah

Rotan siap distribusi
KPH Dolago
Sumber Foto: MFP3

tenaganya cukup banyak, sementara di sisi lain ada unit kerja atau bidang yang beban pekerjaannya sangat besar tetapi jumlah SDM yang dimilikinya sangat terbatas. Untuk membenahi masalah pengelolaan data dan informasi kehutanan di daerah dan memperlancar aliran data dari daerah ke pusat dan sebaliknya, perlu dipertimbangkan adanya tenaga fungsional khusus pengelola data di masing-masing instansi kehutanan.

2. Kewenangan dan Pembiayaan Pengelolaan Data

Selain manajemen SDM, permasalahan kelembagaan lainnya yang penting diperhatikan dalam rangka pembenahan pengelolaan data dan informasi kehutanan menyangkut aspek kewenangan dan pembiayaan pengelolaan data, meliputi:›

a. Akseptabilitas terhadap kewenangan

Pada umumnya baik instansi kehutanan pusat di daerah (BPKHA, BKSDA, BP DAS, dsb) serta instansi kehututanan daerah (Dinas Kehutanan Provinsi) menerima dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pada umumnya instansi kehutanan daerah (Dinas Kehutanan Provinsi) merasa bahwa kewenangan pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah seharusnya diperluas.

b. Kewenangan pengelolaan data

Dalam hal kewenangan pengelolaan data dan informasi kehutanan instansi kehutanan daerah (Dinas Kehutanan Provinsi) pada umumnya menginginkan kewenangan pengelolaan data dan informasi diberikan kepada instansi daerah, sementara instansi kehutanan pusat di daerah hanya berfungsi sebagai pemasok data.

c. Tanggungjawab pembiayaan pengelolaan data

Keinginan instansi kehutanan daerah untuk diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan data dan informasi kehutanan ternyata tidak berbanding lurus dengan kesanggupan pembiayaan dari instansi kehutanan daerah. Secara umum, instansi kehutanan di daerah menginginkan pembiayaan pengelolaan data dan

Pemanenan daun Muberi, pakan Ulat Sutera, KPH Boalemo
Sumber Foto: MFP3

informasi kehutanan di daerah diberikan oleh pemerintah pusat.

3. Kemampuan Koordinasi

Aspek kelembagaan ketiga yang tidak kalah pentingnya dengan manajemen SDM serta kewenangan dan pembiayaan adalah aspek kemampuan instansi kehutanan di daerah dalam melakukan koordinasi pengelolaan data dan informasi kehutanan, yang terdiri dari:

a. Ekspektasi koordinasi data

Pada umumnya ekspektasi instansi kehutanan daerah dan pusat terbelah dalam menyikapi instansi mana yang seharusnya mengkoordinir pengelolaan data dan informasi kehutanan. Biasanya instansi kehutanan daerah cenderung menginginkan Dinas Kehutanan Provinsi sebagai koordinator pengelolaan data dan informasi kehutanan, sedangkan instansi kehutanan pusat di daerah pada umumnya menunjuk BPKH sebagai instansi yang dianggap paling tepat sebagai penanggungjawab pengelolaan data dan informasi kehutanan di daerah.

b. Akses publik terhadap data

Setiap daerah tidak sama dalam menyikapi akses publik terhadap data. Namun demikian, pada umumnya format pengelolaan dan pelaporan data dan informasi kehutanan lebih ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada pimpinan atau instansi terkait sehingga akses publik terhadap data dan informasi kehutanan secara umum dapat dikatakan sangat terbatas.

c. Koordinasi horisontal

Dalam hal koordinasi horisontal (lintas instansi dan lintas sektor), pada umumnya sudah dilakukan dengan cukup baik. Permasalahan yang

Penyortiran Telur Ulat Sutera
Sumber Foto: MFP3

Pemanenan Rotan
KPH Dolago Tanggunung
Sumber Foto: MFP3

dihadapi biasanya adalah kurangnya data yang tersedia atau data yang ada di masing-masing instansi sudah cukup lama tidak diperbaharui.

d. Koordinasi vertikal

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, koordinasi vertikal antara instansi pusat dan daerah, terutama dengan instansi di kabupaten seringkali kurang lancar. Hal ini terutama disebabkan karena adanya egoisme kedaerahan, munculnya anggapan tidak ada hubungan hierarkhi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi, serta prioritas pembangunan yang berbeda antar daerah. Akibatnya selain aliran data dan informasi dari kabupaten, provinsi, dan pusat kurang lancar, format pelaporan data serta materi buku statistik yang dipublikasikan termasuk statistik kehutanan antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda sehingga sulit diperbandingkan.

4. Efektifitas Komunikasi

Kelembagaan pengelolaan data dan informasi kehutanan dapat dikatakan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif antara sumber data (instansi kehutanan) dengan penerima/pengguna data dan informasi (publik dan instansi lain). Beberapa hal yang perlu diketahui untuk mengukur efektifitas komunikasi antara lain sebagai berikut:

a. Sumber rujukan publik

Pada umumnya media, baik media cetak maupun elektronik, merupakan sumber rujukan publik yang utama dalam mengetahui berbagai berita yang terkait dengan kehutanan.

Biji Kopi kerinci
Sumber Foto: MFP3

b. Isu kehutanan di kalangan publik dan media
Isu kehutanan yeng menonjol di setiap daerah sangat beragam. Secara garis besar isu kehutanan yang sering menjadi perhatian publik di daerah antara lain banjir dan tanah longsor, pembalakan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan gerakan penanaman pohon.

c. Rujukan utama kebijakan
Pada umumnya kebijakan kehutanan yang dibuat oleh otoritas di daerah mengacu pada laporan (internal) dari instansi terkait. Selain itu, pada kasus-kasus tertentu kebijakan juga dipengaruhi oleh opini media dan jika dianggap perlu pengambil kebijakan menggunakan hasil kajian pakar sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan yang (akan) diambil.

d. Sasaran data dan informasi
Pada umumnya sasaran dari pelaporan data dan informasi kehutanan di daerah adalah pimpinan. Oleh karena itu jenis data dan format pelaporan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing instansi atau sesuai dengan arahan pimpinan.

e. Posisi tawar terhadap media
Pejabat kehutanan di daerah pada umumnya merasa bahwa posisi tawar mereka terhadap media kuat. Artinya, merreka merasa bahwa sesungguhnya media lebih memerlukan informasi dari instansi kehutanan untuk bahan pemberitaan daripada instansi memerlukan mereka sebagai sarana sosialisasi kegiatan. Kesahihan informasi ini tentu masih perlu diuji dengan pandangan dari pihak media karena baru merupakan pandangan dari pihak instansi kehutanan saja.

f. Pihak yang diuntungkan dan dirugikan pemberitaan media
Pihak yang biasanya diuntungkan dari adanya pemberitaan tentang kehutanan di media adalah pejabat terkait karena opini mereka akan dominan dimuat di media dan pada umumnya mendapatkan citra positif di mata publik. Sebaliknya, pihak yang pada umumnya dirugikan oleh pemberitaan media adalah pengusaha hutan yang dituding sebagai pelaku perusakan lingkungan. ✣

Pemanenan Madu
Hutan Kerinci
Sumber Foto: MFP3

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah. 2015. Ekonomi Gaharu [internet]. [diunduh 2017 Mei 30]. Tersedia pada: http://bp2sdm.menlhk.go.id/emagazine/index.php/umum/75-ekonomi-gaharu.html

Sumarna Y. 2012. Budidaya Jenis Pohon Penghasil Gaharu [laporan]. Bogor(ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Andhika et al. 2016. Etnobotani Damar Pada Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas. Berita Biologi. 15(1): 101-106

Mulyono N, Apriyantono A. 2004 Sifat Fisik, Kimia, dan Fungsional Damar. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. 15(3): 245-252

Januminro. 2000. Rotan Indonesia: Potensi, Budi Daya, Pemungutan, Pengolahan, Standar Mutu, dan Prospek Pengusahaan. Yogyakarta(ID): Kanisius

Situmorang et al. 2012. Pemanfaatan dan Pemasaran Rotan oleh Masyarakat Kabupaten Samosir (Studi Kasus di Desa Huta Galung, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir) [skripsi]. Medan(ID): Universitas Sumatera Utara

Lempang M. 2012. Pohon Aren dan Manfaat Produksinya. Info Teknis EBONI. 9(1): 37-54

Ramadani P., I. Khaeruddin, A. Tjoa dan I.F. Burhanuddin. 2008. Pengenalan Jenis-Jenis Pohon Yang Umum di Sulawesi. Palu (ID): UNTAD Press

Sari RK, Bertoni R, Praptami TA. 2013. Kajian Mutu, Nilai Gizi Serta Potensi Pada Antibakteri dan Antioksidan (Manfaat) Madu Hutan Indonesia. Bogor(ID): JMHI.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. 2013. *Budidaya Nilam*. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan.

Adharini DW. 2009. Budidaya dan Penyulingan Tanaman Nilam Aceh (*Pogostemon cablin Benth*) di Deni Nursery and Gardening [Tugas Akhir]. Surakarta(ID): Universitas Sebelas Maret

Sukawi. 2010. Bambu Sebagai Alternatif Bahan Bangunan dan Konstruksi di Daerah Rawan Gempa. Jurnal TERAS. 10(1): 1-10

Batubara. 2002. Pemanfaatan Bambu di Indonesia. Medan(ID): Universitas Sumatera Utara

Sallata MK. 2013. Pinus (*Pinus merkusii Jungh et de Vriese*) dan Keberadaannya di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. *Info Teknis EBONI.* 10(2): 85-98

Soenardi, 1983. Pemasaran Kayu Pinus dan Hasil Ikutannya. *Proceeding Simpo Pinus'83. Jakarta, 27-28 Juli 1983.*

Bastoni & Lukman, A.H. (2004). Prospek pengembangan hutan tanaman jelutung pada lahan rawa Sumatera (pp. 85-97). Yogyakarta: Pusat Litbang Bioteknologi dan PemuliaanTanaman Hutan.

Bastoni. 2014. Budidaya Jelutung Rawa. Balai Penelitian kehutanan Palembang.

Yetty, Hariyadi B, dan Murni Pinta. 2013. Studi Etnobotani Jernang (Daemonorops spp.) pada Masyarakat Desa Lamban Sigatal dan Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi. Biospecies (6)1: 34-44.

Purwanto Y. Polosokan, R., Susiarti, S., Waluyu B.E. 2005. Ektraktivisme jernang (Daemonorops sp.) dan Kemungkinan Pengembangan: Studi Kasus di Jambi, Sumatera, Indonesia. Laporan Teknik 2005 Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi-LIPI. *Valuasi Ekonomi Produksi Hutan Non Kayu.* 409-411.

[DBTT] Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan 2008 Budidaya Kemiri. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Jakarta, Indonesia.

[DHTT] Direktorat Hutan Tanaman Industri 1990 Teknik Pembuatan Hutan Tanaman Kemiri. Departemen Kehutanan, Jakarta, Indonesia.

Elevitch, C.R. dan Manner, H.I. 2006 Traditional tree initiative: species profiles for Pacific Islands agroforestry. http://www.agroforestry.net/tti/ Aleurites-kukui.pdf [5 Juli 2017].

Krisnawati, H., Kallio, M. dan Kanninen, M. 2011 *Aleurites moluccana* (L.) Willd.: ekologi, silvikultur dan produktivitas. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Antoni F. 2015. Sarang Semut untuk Pengobatan Berbagai Penyakit [internet]. [diunduh pada 2017 Juli 5]. Tersedia pada: http://pei-pusat.org/?p=129

Jaiswal P, Kumar P, Singh VK, Singh DK. 2011. Areca cathechu L: A Valuable Herbal Medicine Against Different Health Problem. Res. J. Med. Plant 5(2): 145-152.

Litbang Pertanian.2012. Prospek Pengembangan Tanaman Pinang. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian 34(1): 10-11.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Lahan Perkebunan Indonesia Tahun 2008-2011. Komoditi Pinang. Biro Pusat Statistik. Indonesia.

Mardisiswojo,S dan Radjakmangunsudarso, H Cabe Puyang Warisan Nenek Moyang I & 11. PT. Karya Wreda. Jakarta. 1975.

Meiyanto E, Susidarti RA, Handayani S, Rahmi F.2008. Ekstrak Etabolik Biji Buah Pinang mampu menghambat proliferasi dan mamacu apoptosis sel MFC-7. Majalah Faarmasi Indonesia 19(1): 12-19.

Suryana, A. 2007. Arah dan strategi pengembangan sagu di Indonesia. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Sagu Indonesia. Batam, 25-26 Juli 2007.

Kanro MZ, Rouw A, Widjono A, Syamsuddin, Amisnaipa, Atekan. 2003. Tanaman Sagu dan Pemanfaatannya di Proponsi Papua. J.Lit.Pertanian 22(3): 116-124.

Harris, R. (1990). *Tanaman Minyak Atsiri.* Penebar Swadaya : Jakarta Departemen. Kesehatan RI, Dirjen POM. *Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional* :Jakarta. Departemen Kesehatan 2000.

Denian. A., 1996. Seleksi massa dan uji turunan kayumanis. Laporan Hasil Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. BPTP Sukarami. Solok. Sukarami.

Ferry Y. 2013. Prospek Pengembangan Kayu Manis di Indonesia. SIRINOV, 1(1):11-20.

Purwaningsih. 2004. Sebaran Ekologi Jenis-Jenis Dipterocarpaceae di Indonesia. Biodiversitas Vol.5 No.2: 89-95. UNS. Surakarta

Istomo dan Hidayati, T. 2010. Studi Potensi dan Penyebaran Tengkawang (*Shorea spp.*) di Areal IUPHHK-HA PT. Intracawood Manufacturing Tarahan, Kalimantan Timur. Jurnal Silvikulktur Tropika Vol. 01 No. 01: 11-17. IPB. Bogor

Fernandes, A., dan Maharani, R. 2014. Teknologi Tepat Guna Tengkawang. Balai Penelitian Dipterokarpa. Samarinda. Diakses dari www.diptero.or.id pada tanggal 8 Agustus 2014.

Hakim, L., Leksono, B., dan Setiadi, D. 2010. Eksplorasi Tengkawang (*Shorea spp.*) di Sebaran Alam Kalimantan Untuk Konservasi Sumber Daya Genetik dan Populasi Pemuliaan. Prosiding Seminar Nasional Mapeki XIII "Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kayu Untuk Mendukung Implementasi Program Perubahan Iklim" p.813-822. Bali.

Sobari. 2001. Budidaya Tanaman Kehutanan. Diakses dari http://irwantoshut.com pada tanggal 6 Juli 2017.

Hasibuan AM, Sudjarmoko B & Listyati D. 2012. Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif usaha tani pala (Studi kasus: Kabupaten Bogor dan Sukabumi). *Buletin RISTRI* 3(3), 223-230.

Nurdjannah N. 2007. Teknologi Pengolahan Pala. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

Purseglove JW, Brown EG, Green SL, & Robbins SRJ. 1995. *Spices*. Longmans, New York. 175-228.

DAFTAR PUSTAKA

Rodianawati I, Hastuti P, & Cahyanto MN. Nutmeg's (*Myristica fragrans Houtt*) oleoresin: effect of heating to chemical compositions and antifungal properties. The First International Symposium on Food and Agro-biodiversity (ISFA2014). *Procedia Food Science 3*, 244-254.

Erowid HTM. General Information ABout Nutmeg. Encyclopedia Britanica. Part VII Micropedia. 2001. HTTP:// erowid.org/plants/nutmeg-fag.shtml. Leenhout, P.W., 1959. Revision of the the Burseraceae of the Malaysian area in woder sense. *Canarium* Stickm. Blumea, 9(2):275-647.

Leenhout, P.W., 1959. Revision of the the Burseraceae of the Malaysian area in woder sense. *Canarium* Stickm. Blumea, 9(2):275-647.

Mailoa M. 2015. Kajian Senyawa Bioaktif Buah Kenari Segar. Prosiding Seminar Agroindustri dan Lokakarya Nasional FKPT-TPI.

Thomson, L.A.J and Barry Evans, 2004. *Canarium indicum* var. indicum and C. *harveyi* (canarium nut) *Burseraceae* (torchwood family). Species Profiles for Pacific Island Agroforestry www.traditionaltree.org.

Yen, D.E., 1994. Melanesian Arboriculture: Historical perspective Alt emphasis on genus Canarium in South Pacific Indigenous Nuts. Edited by Steven, M.L., R.M. Bourke, and B.R. Evans. Proceedings of a workshop, 31 October – 4 November, Vanuatu.

Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Chaniago, 1980. Analisis permintaan cengkeh untuk industri rokok kretek. Tesis SPS – IPB.

Kemala, S., 1988. Kebijaksanaan harga tataniaga dalam swasembada cengkeh di Indonesia. Edisi Khusus Littro IV (2) 1988. Bogor.

Nurdjannah N. 2004. Diversifikasi Penggunaan Cengkeh. Perspek 3(2): 61-70.

Mahandari et al. 2011. Kajian Awal Biji Buah Kepayang sebagai Bahan Baku Minyak Nabati Kasar. *SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS GADJAH MADA 2011*. ISBN 978-602-99680-0-2

Misriadi. 2016. PHP Limau Sarolangun Merintis Bisnis HHBK Minyak Kepayang [internet]. [diunduh 2017 Juli 13]. Tersedia pada: fokusjambi.com/post/detail/php-limau-sarolangun-merintis-bisnis-hhbk-minyak-kepayang.html

Elizabeth R. 2012. Keragaan Komoditas Lada di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Bangka). *SOCA (SOCIO-ECONOMIC OF AGRICULTURRE AND AGRIBUSINESS)*. 5(1):1-21

Heartwin PAD, Korikanthimath VS. 2003. Processing and quality of black pepper-a review. *Journal Spices and Aromatic Crops*. 12(1): 1-13.

Rizal M, Yusransyah, Stiani SN. 2016. Uji Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol 70% Kulit Buah Jengkol (*Archidendron Pauciflorum* (Benth.) I.C.Nielsen) Terhadap Mencit Jantan Yang Diinduksi Oleum Ricini.Jurnal Ilmiah Manutung. 2(2):131-136.

Handrianto P. 2016. UJI ANTIBAKTERI EKSTRAK JAHE MERAH Zingiber officinale var. Rubrum TERHADAP Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli. Journal of Research and Technologies. 2(1):1-4.

Hidayati F, Agusmawati P, Firdausy MD. Pengaruh Pemberian Ekstrak Jahe Merah (Zingiber Officinale Var. Rubrum) Terhadap Jumlah Sel Makrofag Ulkus Traumatikus Mukosa Mulut Akibat Bahan Kimiawi. Odonto dental Journal.

Arifin, M. A. 2001. Pengeringan Kripik Umbi Iles-iles Secara Mekanik Untuk Meningkatkan Mutu Keripik Iles-iles [Thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Dwiyanti ER, Widjanarko SB, Purwatiningrum I. 2015. Pengaruh Penambahan Gel Porang (*Amorphophallus Muelleri Blume*) pada Pembuatan Kerupuk Puli. Jurnal Pangan dan Industri. 3(4):1521-1530.

Panjaitan RGP, Masriani, Zulfan. 2016. Pengaruh Pemberian Akar Pasak Bumi (Eurycoma Longifolia Jack.) Terhadap Kerusakan Organ Hati Mencit Bunting. *Jurnal kedokteran hewan*. 10(1):28-31

Ayuti T, Garnida D, Asmara Iy. 2016. Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuciphaga) Di Kabupaten Lampung Timur. Universitas Padjajaran: Fakultas Peternakan.

Elfita L. 2014. Analisis Profil Protein dan Asam Amino Sarang Burung Walet (Collocalia fuchiphaga) Asal Painan. *Jurnal Sains Farmasi dan Klinis*. 1(1):27-37.

Susilawati, Raharjo B. 2010. *Petunjuk Teknis Budidaya Jamur Tiram (Pleourotus Ostreatus Var Florida) Yang Ramah Lingkungan*. Report No. 50.STE. Final. Sumatera Selatan(ID): BPTP Sumatera Selatan.

Novi Yarli. 2011. Ekologi Pohon Pelawan (Tristaniopsis Merguensis Griff.) Sebagai Inang Jamur Pelawan Di Kabupaten Bangka Tengah.

Armando D. 2008. Workshop pengembangan sutera alam di kabupaten cianjur. Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Cianjur.
Nunuh A, Andikarya A. 2006. Budidaya Sutera Alam. Cianjur: Politeknik Negeri Jember dan Politeknik VEDCA Joint Program

KPHP MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

9 786025 128516